



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/393/KPTS/013/2013

TENTANG

POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

WILAYAH SUNGAI BARU BAJULMATI

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Baru Bajulmati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 ((Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 12 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Baru Bajulmati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Baru Bajulmati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan sebagai kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai Baru Bajulmati.
- KETIGA : Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Baru Bajulmati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. tujuan dan dasar pertimbangan pengelolaan sumber daya air;
 - b. skenario kondisi wilayah sungai pada masa yang akan datang;

c. strategi

- c. strategi pengelolaan sumber daya air; dan
- d. kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya air.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Mei 2013


GUBERNUR JAWA TIMUR
Dr. H. SOEKARWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta.
 3. Sdr. Direktur Jenderal Pengairan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta.
 4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.
 6. Sdr. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Bupati/Walikota pada wilayah sungai yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 188/393/KPTS/013/2013

TANGGAL : 30 MEI 2013

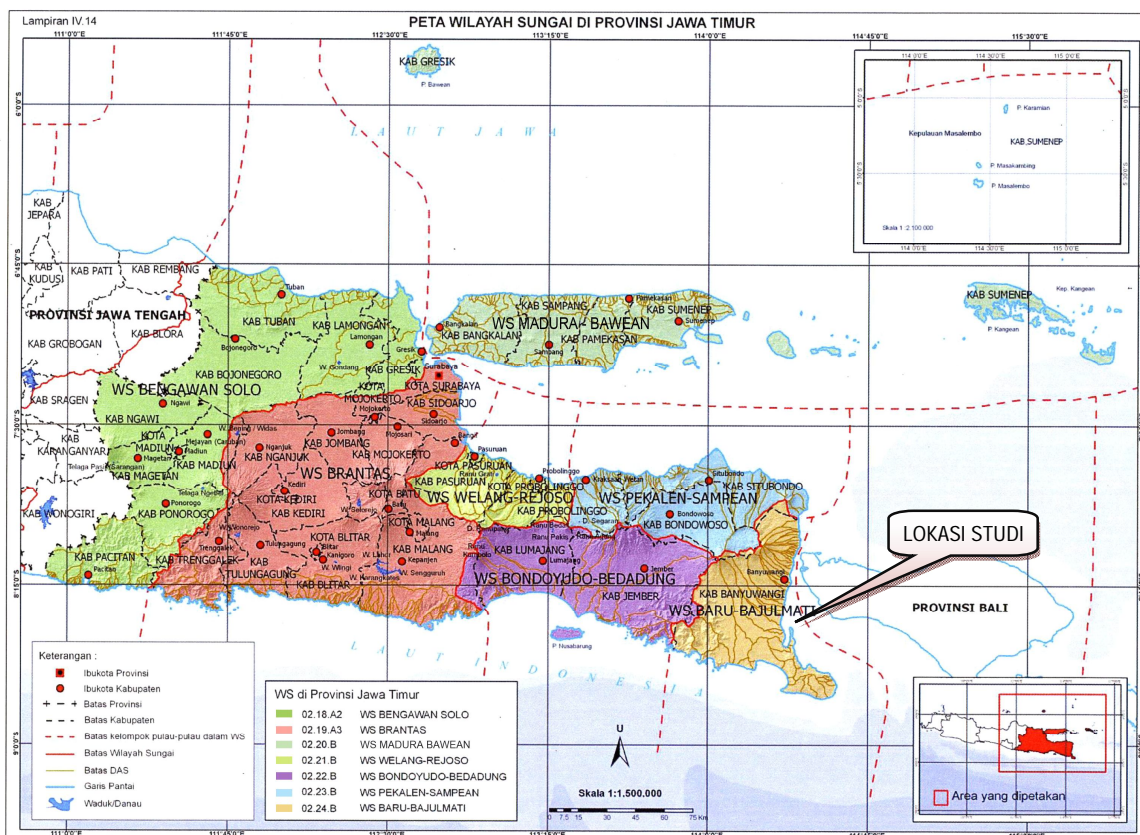
**POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
WILAYAH SUNGAI BARU BAJULMATI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Wilayah Studi

Wilayah studi Penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WS) Baru Bajulmati adalah di WS Baru Bajulmati yang secara administrasi terletak di Kabupaten Banyuwangi dan sebagian di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Peta lokasi wilayah studi dapat dilihat pada **Gambar 1.1.**



Sumber : Keppres No. 12 Tahun 2012

Gambar 1.1.
Peta Lokasi Wilayah Studi (WS Baru Bajulmati)

1.1.2. Permasalahan Umum

Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, secara alami keberadaannya bersifat dinamis mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administrasi. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologis yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah, sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan wilayah.

Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air dan meningkatnya daya rusak air. Hal tersebut **menuntut pengelolaan sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam satu pola pengelolaan sumber daya air** tanpa dipengaruhi oleh batas-batas wilayah administrasi yang dilaluinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan, yaitu :

1. Wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan/atau wilayah sungai strategis nasional menjadi kewenangan Pemerintah.
2. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
3. Wilayah sungai yang secara utuh berada pada satu wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, telah menetapkan pembagian WS di Indonesia.

Untuk Provinsi Jawa Timur terdiri dari 7 (tujuh) WS, dengan rincian, 1 (satu) WS Lintas Provinsi (WS Bengawan Solo), 1 (satu) WS Strategis Nasional (WS Brantas), dan 5 (lima) WS Lintas Kabupaten/Kota (WS Baru - Bajulmati, WS Pekalen - Sampean, WS Baru - Bajulmati, WS Bondoyudo - Bedadung dan WS Madura - Bawean).

Saat ini, Wilayah Sungai mempunyai problem yang begitu kompleks seperti :

1. Alokasi air untuk berbagai sektor yang mengalami kelangkaan lokal (local scarcity) yang cenderung kearah politis akibat bertambahnya penduduk dan kebutuhan air non-irigasi.
2. Tidak memadainya akses pasokan air bersih dari institusi pengelola, sementara prasarana penyedia air bersih perkotaan tidak kunjung mampu melayani perkembangan yang pesat.
3. Tekanan terhadap lingkungan yang timbul akibat perencanaan yang tidak mengikuti prosedur dan kurang memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan factor sosial budaya setempat.

Pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan semua pihak, baik sebagai pengguna, pemanfaat maupun pengelola, maka tidak dapat dihindari perlunya upaya bersama untuk mulai mempergunakan pendekatan ***one river basin, one plan and one integrated management*** Keterpaduan dalam perencanaan, kebersamaan dalam pelaksanaan dan kepedulian dalam pengendalian sudah waktunya diwujudkan sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dimaksudkan untuk memfasilitasi strategi pengelolaan sumber daya air untuk WS di seluruh tanah air untuk memenuhi kebutuhan, baik jangka menengah maupun jangka panjang secara berkelanjutan. Pada pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 4, menyebutkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, maka disusun **rancangan pola pengelolaan sumber daya air**.

Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada setiap WS dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah.

Pola pengelolaan sumber daya air disusun secara terkoordinasi di antara instansi yang terkait, berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian serta asas transparansi dan akuntabilitas. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana pengelolaan sumber daya air.

Penyusunan rancangan pola pengelolaan perlu melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha, baik koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun badan usaha swasta. Masyarakat tidak hanya diberi peran dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, tetapi berperan pula dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan serta pengawasan atas pengelolaan sumber daya air.

Untuk itu, kegiatan Penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (PSDA-WS) Baru Bajulmati, merupakan salah satu kegiatan yang diharapkan dapat memberikan arah dalam mengatasi permasalahan SDA pada WS Baru Bajulmati.

Sebagai kelanjutan dari hal-hal yang telah dijelaskan pada alinea-alinea sebelumnya, pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pengairan Provinsi Jawa Timur, telah mengalokasikan dana pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Air, untuk kegiatan Penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (PSDA-WS) Baru Bajulmati.

1.1.3. Pengertian Istilah

Pengertian istilah yang berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati, adalah :

1. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
3. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
6. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
7. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan / atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
8. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
9. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
10. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
11. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
12. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
13. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.

14. Dinas adalah organisasi pemerintahan pada tingkat provinsi atau kabupaten / kota yang memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab dalam bidang sumber daya air.
15. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
16. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
17. Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air.
18. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati / walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
19. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran, Visi dan Misi

1.2.1. Maksud

Maksud kegiatan pekerjaan ini adalah menyusun rancangan pola pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati untuk kemudian dijadikan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian SDA di WS Baru Bajulmati.

1.2.2. Tujuan

Adapun tujuan dari pekerjaan Penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati adalah merumuskan pola pengelolaan WS Baru Bajulmati termasuk menyusun dokumen SDA WS (air permukaan dan air tanah), memperkirakan kebutuhan air, baik untuk saat ini dan saat mendatang serta mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan suatu pedoman untuk menyusun Rencana Induk Pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati dengan melibatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan instansi terkait. Hasil dari rancangan pola pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati berisikan program komprehensif pengembangan sumber daya air untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

1.2.3. Sasaran

Sasaran dari pekerjaan Penyusunan Rancangan Pola PSDA WS Baru Bajulmati adalah sebagai berikut :

- Memberikan arahan pengembangan pembangunan pada kawasan-kawasan yang berkaitan dengan sumber daya air.

- Memberikan arahan pengembangan kawasan pembangunan antara lain kawasan budidaya, sistem pusat-pusat permukiman dan sistem sarana
- Memberikan arahan kebijakan yang menyangkut tata guna air, tata guna sumber daya alam, tata guna tanah serta kebijakan penataan ruang.
- Memberikan arahan terjaminnya ketersediaan air untuk kepentingan masa kini dan masa yang akan datang.

1.2.4. Visi dan Misi

Visi dari pekerjaan Penyusunan Rancangan Pola PSDA WS Baru Bajulmati adalah mewujudkan suatu pengelolaan SDA berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Misi dari pekerjaan ini adalah :

- Melakukan konservasi SDA
- Mengembangkan potensi - potensi SDA
- Pengendalian daya rusak air
- Mengembangkan sistem informasi sumber daya air
- Meningkatkan partisipasi / peran serta masyarakat dan para stakeholder / pemangku kepentingan.

1.3. Isu – Isu Strategis

1.3.1. Isu Strategis Nasional

Isu Strategis Nasional yang dikemukakan dalam pekerjaan “Penyusunan Rancangan Pola PSDA WS Baru Bajulmati, diantaranya adalah :

1. MDGs Program (Millenium Development Goals)

Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) merupakan paradigma pembangunan yang disepakati secara internasional. Indonesia menjadikan MDGs sebagai arah dalam pelaksanaan pembangunan yang menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan dan dicanangkan untuk dicapai pada tahun 2015.

Secara nasional pencapaian MDGs telah mengalami kemajuan bertahap pada semua tujuan MDGs dan, banyak dari target yang telah ditetapkan tercapai. Walaupun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi misalnya, terkait kemiskinan, kesehatan ibu, nutrisi anak dan lingkungan, akses terhadap air minum, dll. Dengan demikian, masih banyak yang akan dilakukan, termasuk upaya melokalkan MDGs, agar semua daerah mencapai target-target yang telah ditetapkan, terutama daerah yang masih tertinggal.

Upaya tersebut, tidak hanya menjadikan MDGs sebagai acuan perencanaan pembangunan, tetapi juga sebagai salah satu instrumen utama dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian sumberdaya dan belanja publik di daerah.

Adapun 8 (delapan) tujuan pokok dari MDGs adalah :

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan
2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
4. Menurunkan angka kematian anak
5. Meningkatkan kesehatan ibu
6. Memerangi HIV / AIDS, malaria serta penyakit lainnya
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup
8. Membangun kemitraan global untuk pembangunan

Dalam rangka menyongsong MDGs tahun 2015, air sungai di WS Baru Bajulmati dimanfaatkan juga untuk kebutuhan air baku untuk air minum. Peningkatan kebutuhan air baku seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, dan perkembangan daerah perkotaan dan kawasan industri. Hal ini menimbulkan permasalahan antara lain menurunnya kualitas air.

Potensi air yang ada di WS Baru Bajulmati dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan air tersebut, terutama pada musim kemarau dan dapat meningkatkan pelayanan memenuhi kebutuhan air penduduk pada masa yang akan datang, asalkan dikelola dan dimaintenance dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya air yaitu one river, one plan dan one integrated management.

2. Ketahanan Pangan

WS Baru Bajulmati mempunyai peran yang cukup besar dalam menunjang Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Dari target produksi padi dan beras Jawa Timur dalam rangka Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), mulai tahun 2012 yang mencapai 13.978.973 ton GKG, sampai dengan tahun 2014 yang mencapai 14.259.946 ton GKG, dan produksi beras Jawa Timur ditargetkan akan mengalami surplus pada tiap tahunnya mulai tahun 2012 sebesar 5.666.272 ton beras, sampai tahun 2014 surplus sebesar 6.193.835 ton beras. Dengan kondisi tersebut, maka ketersediaan air baku untuk irigasi harus dijaga kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya.

3. Perubahan Iklim Global (Global Climate Change)

IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) menyatakan bahwa pemanasan global dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis, seperti peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi, frekuensi serangan hama dan penyakit serta mempengaruhi berbagai ekosistem.

Perubahan iklim global juga membawa dampak yang kurang baik terhadap beberapa sektor, diantaranya sektor pertanian mengalami perubahan pola tanam,

maupun masa tanam akibat kekeringan yang berkepanjangan serta banjir pada musim penghujan. Hal ini mengakibatkan hasil produksi pertanian mengalami penurunan drastis, sedangkan sektor industri mengalami penurunan produksi karena kekurangan sumber air akibat kekeringan.

Perubahan iklim global merupakan tantangan serius terhadap kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan sehingga memerlukan tanggapan yang proaktif serta usaha bersama oleh para pemangku kepentingan (stake holders).

4. Ketersediaan Energi

Provinsi Jawa Timur memiliki potensi minyak dan gas bumi yang cukup besar. Potensi energi lainnya adalah adalah panas bumi (geothermal). Potensi energi panas bumi tersebut tersebar di beberapa kabupaten, seperti Pacitan, Ponorogo, Madiun, Mojokerto, Malang, Sumenep, Probolinggo, Banyuwangi, dan beberapa daerah lainnya. Potensi energi terbarukan lainnya adalah energi micro hydro, gelombang dan surya.

Secara total cadangan energi terbarukan di Provinsi Jawa Timur bila dikonversikan menjadi tenaga listrik ditaksir mencapai sekitar 796.845 megawatt (MW). Cadangan energi terbarukan di Provinsi Jawa Timur masing-masing terdiri atas energi air dengan potensi sebesar 38.244,69 MW, angin (165.008,43 MW), biogas (390.456,12 MW), biomasa (31.918,31 MW), surya (24.955,05 MW), gelombang (145.058,1 MW), dan panas bumi (diduga mencapai 1.206 MW).

Pada tahun 2025, Provinsi Jawa Timur akan mendorong pengembangan energi terbarukan di wilayahnya dengan menargetkan akan memasok 5% energi dari total kebutuhan energi nasional yang diprioritaskan pada energi panas bumi, bahan bakar nabati (biofuel), aliran air sungai (micro hydro), panas surya, angin dan biomasa/biogas.

Visi energi tahun 2025 diarahkan untuk bisa mencapai target pangsa energi baru terbarukan sebesar 25% atau dikenalkan dengan Visi Energi 25/25.

Di WS Baru Bajulmati, potensi energi panas bumi terdapat di kawasan Blawan – Ijen yang berada di Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dengan cadangan terduga sebesar 270 MW.

1.3.2. Isu Strategis Lokal

1. Degradasi Lingkungan

Kondisi DAS di Wilayah Sungai Baru Bajulmati yang telah banyak mengalami kerusakan dan penurunan fungsi. Dari 60 DAS yang ada di WS Baru Bajulmati, hanya 1 DAS yang memiliki tutupan lahan sebesar 29% mendekati 30% yaitu DAS Bajulmati (luas DAS = 219,90 Km²) (sesuai amanat dari Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004). Sedangkan untuk DAS besar lainnya telah mengalami kerusakan tutupan lahan dan kondisi lingkungan DAS, seperti DAS Tambong (180,39 Km²), DAS Glondong (173,66 Km²), DAS Bomo (129,85 Km²), DAS Blambangan (142,15 Km²), DAS

Setail (304,57 Km²), DAS Baru (614,22 Km²), DAS Karangtambak (190,77 Km²) dan DAS Sukamade (160,61 Km²). Hal ini perlu pengelolaan Sumber Daya Air dan upaya konservasi Sumber Daya Air secara menyeluruh dan terpadu dilaksanakan oleh semua stakeholders SDA.

Kerusakan ekosistem hutan telah memberikan dampak pada konservasi lahan maupun kelangkaan sumber air/mata air. Kecenderungan ini telah tampak dari indikator menurunnya kualitas lingkungan hidup karena tekanan penduduk maupun bencana alam, dan pemanfaatan berlebihan sumber daya alam yang melampaui daya dukung lingkungannya. Kasus pembalakan hutan secara liar, erosi dan longsor, rusaknya habitat biota, menurunnya biodiversitas, banjir dan kekeringan, berubahnya iklim, kebakaran hutan, masalah dampak sosial ekonomi akibat eksploitasi dan sebagainya, telah menjadikan masalah laten yang memerlukan pendekatan holistik dan bertahap guna menyelesaikan atau menangani masalah ini.

2. Program Agropolitan

Pembangunan Perdesaan sebagai produsen hasil pertanian masih kurang optimal dibandingkan pembangunan perkotaan sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, telah mendorong aliran sumber daya dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan secara tidak seimbang, kesenjangan sosial dan kehidupan masyarakat desa dan kota yang semakin melebar. Disisi lain pergeseran fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, kepemilikan lahan pertanian yang relatif menyempit, minimnya infrastruktur perdesaan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat perdesaan, kesemuanya merupakan refleksi perekonomian di perdesaan. Untuk itu diperlukan strategi dalam membangkitkan pembangunan ekonomi yang mampu memberikan kehidupan lebih baik bagi mayoritas penduduk di perdesaan yang hidup di sektor pertanian melalui pengembangan kawasan agropolitan.

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pembangunan ekonomi berbasis pertanian di kawasan perdesaan (agropolitan), yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

Berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur, tahun 2011, di WS Baru Bajulmati pengembangan kawasan agropolitan berada di Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dengan produk unggulan berupa padi, pisang, jagung, jeruk siam, nanas, kelapa, kapuk, randu, jati, sapi potong dan ayam petelur.

Dengan demikian program agropolitan membutuhkan dukungan terhadap sistem penyediaan kebutuhan air untuk supply irigasi.

3. Program Minapolitan

Kawasan pesisir merupakan kawasan yang memiliki sumber daya yang sangat tinggi nilai ekonomisnya. Tingginya nilai sumber daya alam dan nilai strategis kawasan menjadikan kawasan pesisir sangat memungkinkan untuk dikembangkan berbagai kegiatan, selain itu konflik pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir perlu mendapat perhatian yang intensif untuk mengurangi berbagai permasalahan yang timbul berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan penyusunan kebijakan, strategi dan program penataan zonasi laut dan pesisir yang disesuaikan dengan karakteristik, daya dukung (*carrying capacity*) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, meningkatkan pendapatan daerah dan nasional, dan terpeliharanya integritas dan daya dukung lingkungan. Program Minapolitan berbasis perikanan tangkap, merupakan salah satu *Pilot Project* program pengembangan kawasan minapolitan di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Kecamatan Muncar. Dimana kawasan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat tinggi untuk dikembangkan. Program ini selaras dengan upaya pengembangan ekonomi nasional berbasis keunggulan potensi wilayah Banyuwangi.

Pengembangan Minapolitan diharapkan membawa multiplier effect yang cukup luas terutama pada zona pendukung sentra produksi pada kecamatan Purwoharjo dan zona penyangga pada kecamatan Rogojampi, Srono dan Tegaldlimo serta seluruh wilayah di Banyuwangi secara umum.

Oleh karena itu kawasan ini dijadikan sebagai kawasan minapolitan yang berarti bahwa kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Lautan dan Pulau-Pulau Kecil mengamatkan bahwa dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang didalamnya meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian, memerlukan upaya yang sistematis dan terukur agar dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya demi kesejahteraan masyarakat.

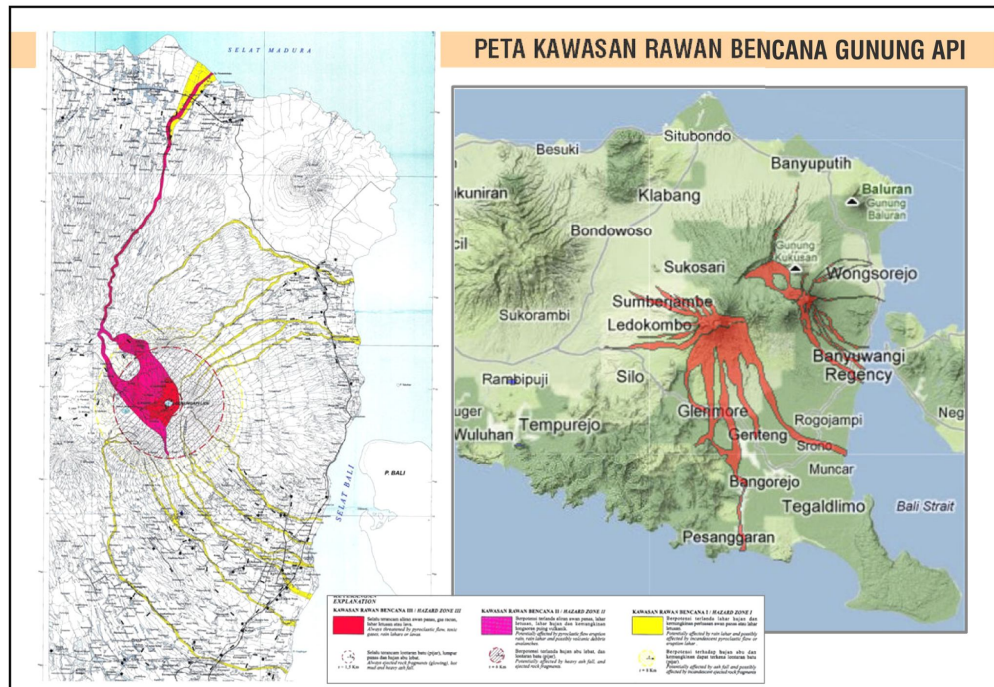
Dengan demikian program minapolitan membutuhkan dukungan terhadap sistem penyediaan kebutuhan air untuk sanitasi dan kebutuhan air domestik.



Gambar 1.2.
Program Minapolitan di Muncar – Kabupaten Banyuwangi

4. Daerah Rawan Bencana Gunung Api

Dalam WS Baru Bajulmati khususnya di Kabupaten Banyuwangi terdapat potensi bencana gempa dan letusan Gunung Ijen dan Gunung Raung yang perlu diwaspadai dan diantisipasi dalam rangka usaha penanggulangan bencana tersebut bilamana terjadi. Adapun peta kawasan rawan bencana gunung api di WS Baru Bajulmati disajikan pada **Gambar 1.3.**



Gambar 1.3.
Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api di WS Baru Bajulmati

BAB II KONDISI WS BARU - BAJULMATI

2.1. Peraturan Perundangan dan Peraturan Pemerintah yang Terkait

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

2.2. Kebijakan yang Berlaku dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

2.2.1. Kebijakan Pemerintah yang Berlaku di Daerah Terkait

Kebijakan pemerintah daerah provinsi / kabupaten terkait dengan pekerjaan Penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Baru Bajulmati yang digunakan sebagai acuan studi adalah :

1. RTRW Provinsi Jawa Timur Th. 2011 – 2031 (Perda No. Th. 2011)
2. RPJPD Provinsi Jawa Timur Th. 2005 – 2025 (Perda No. 1 Th. 2009)
3. RTRW Kabupaten Banyuwangi Th. 2011 – 2031 (Raperda belum disahkan)
4. RPJMD Kabupaten Banyuwangi Th. 2011 – 2015
5. RTRW Kabupaten Bondowoso Th. 2011 – 2031
6. RTRW Kabupaten Situbondo Th. 2008 – 2028

Adapun status proses pengesahan RTRW Kabupaten di WS Baru Bajulmati sampai dengan bulan April 2012 disajikan pada **Tabel 2.1.** berikut.

Tabel 2.1.
Status RTRW Kabupaten di Wilayah WS Baru – Bajulmati (Status : April 2012)

No	Kabupaten	Pengajuan Materi Substansi	Pembahasan Substansi Oleh BKPRD Prov.	Rekom Gubernur Substansi RTRW	Pembahasan BKPRN	Persetujuan Substansi Oleh Kementerian PU	Pembahasan & Persetujuan Antara DPRD Kab – Bupati	Pengajuan Pembahasan Raperda Kepada Gub.	Pembahasan Raperda Oleh BKPRD Prov.	Hasil Evaluasi Raperda Oleh Gub.	Perda	Klarifikasi Perda
1	Banyuwangi	14/06/2010	27/07/2010	28/10/2010	Sudah	04/11/2011	Proses	Belum				
2	Situbondo	27/07/2009	20/08/2009	25/11/2009	04/11/2010	27/12/2010	Proses	Belum				
3	Bondowoso	Sudah	Sudah	Sudah	21/09/2010	06/01/2011	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Nb. 12 Th. 2011	02/2012

Selain itu, penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati disamping memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah administrasi memperhatikan pula, peraturan perundang-undangan dibidang sumber daya air dan peraturan lainnya yang terkait diantaranya :

- 1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) UU No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.
- 3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 4) UU No. 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- 5) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 6) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- 7) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 8) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.
- 9) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 10) UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 11) PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
- 12) PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.
- 13) PP No. 03 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
- 14) PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- 15) PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA
- 16) PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah
- 17) PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- 18) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- 19) PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
- 20) Keppres No. 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah
- 21) Keppres No. 22 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.
- 22) Permen PU No. 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air atau Sumber Air.
- 23) Permen PU No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
- 24) Permen PU No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 25) Permen PU No. 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi PSDA Tingkat Provinsi, Kab/Kota dan Wilayah Sungai
- 26) Permen PU No. 22/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penyusunan Pola PSDA.
- 27) Permen PU No. 06 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan SDA.

2.2.2. Kebijakan Daerah

- 1) Perda Prov. Jatim No. 05 Tahun 2000 tentang Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur.
- 2) Perda Prov. Jatim No. 01 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan – C pada WS di Prov. Jatim
- 3) Perda Prov. Jatim No. 07 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pemakaian Tanah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 4) Perda Prov. Jatim No. 12 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Jawa Timur.
- 5) Perda Prov. Jatim No. 05 Tahun 2011 tentang Pengelolaan SDA.
- 6) Perda Prov. Jatim No. 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.
- 7) Pergub Jatim No. 5 Tahun 2008 tentang Gerakan Menanam Pohon di Jawa Timur untuk Penyelamatan Bumi.

2.3. Inventarisasi Data

2.3.1. Data Umum

2.3.1.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

A. Rencana Struktur Ruang di WS Baru Bajulmati

Ruang dilihat sebagai wadah interaksi sosial, ekonomi, budaya antara manusia lainnya dan ekosistem serta sumberdaya buatan. Sudut pandangan yang demikian merupakan arah dan kebijakan dari pembangunan di bidang penataan ruang sehingga terjadi harmonisasi diantaranya guna optimalisasi penataan dan pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada intinya adalah rencana pemanfaatan ruang yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan wilayah dan sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang ada di wilayah. Sebagai suatu rencana, RTRW tidak hanya menggambarkan tata letak dan keterkaitan hirarki ruang, baik antara kegiatan maupun antar pusat kegiatan, akan tetapi kualitas komponen-komponen yang menjadi penyusunan ruang.

Pada dasarnya urusan tata ruang diarahkan pada revitalisasi penataan ruang dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang daerah yang optimal dan berkelanjutan. Tujuan Pengembangan Wilayah di Kabupaten Banyuwangi :

- ☉ Terwujudnya harmonisasi pengelolaan kawasan lindung dan mitigasi daerah rawan bencana dalam rangka pengembangan wilayah Kabupaten Banyuwangi;
- ☉ Tersedianya infrastruktur sehingga dapat mengurangi ketimpangan wilayah dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi;

- ❶ Berkembangnya sentra ekonomi unggulan Kabupaten Banyuwangi yang berbasiskan pada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata.
- ❷ Berkembangnya pendidikan yang berbasis sumberdaya daerah dalam rangka mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Banyuwangi.

1. Sistem Pusat Kegiatan

Sistem pusat kegiatan terdiri atas rencana sistem perkotaan disertai dengan penetapan fungsi wilayah pengembangannya dan sistem perdesaan. Sistem pusat kegiatan dibentuk secara berhirarki di seluruh wilayah sehingga terjadi pemerataan pelayanan dan mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan.

a. Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan sebagai sistem pusat kegiatan adalah meliputi Wilayah Pengembangan (WP), hirarki atau besaran kota dan fungsi atau peranan kota.

Rencana sistem perkotaan direncanakan dalam Wilayah Pengembangan (WP) dengan kedalaman penataan struktur pusat permukiman perkotaan. Di Kabupaten Banyuwangi, Wilayah Pengembangan (WP) terbagi atas :

→ WP Banyuwangi Utara, meliputi :

1. Kecamatan Wongsorejo
2. Kecamatan Kalipuro
3. Kecamatan Banyuwangi
4. Kecamatan Giri
5. Kecamatan Licin
6. Kecamatan Glagah.

Kota Banyuwangi sebagai pusat pertumbuhan bagi kabupaten Banyuwangi Bagian Utara yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pertumbuhan bagi Kabupaten Banyuwangi.

→ WP Banyuwangi Tengah Timur, meliputi :

1. Kecamatan Kabat
2. Kecamatan Rogojampi
3. Kecamatan Songgon
4. Kecamatan Singojuruh
5. Kecamatan Srono
6. Kecamatan Muncar
7. Kecamatan Cluring.

Kota Rogojampi sebagai pusat pertumbuhan bagi kabupaten Bagian Tengah Timur yang sekaligus berfungsi sebagai pusat

pengembangan bandar udara Blimbingsari dan Fishery Town bagi Kabupaten Banyuwangi

→ WP Banyuwangi Tengah Barat, meliputi :

1. Kecamatan Genteng
2. Kecamatan Kalibaru
3. Kecamatan Glenmore
4. Kecamatan Sempu
5. Kecamatan Tegalsari
6. Kecamatan Gambiran.

Kota Genteng sebagai pusat pertumbuhan bagi Kabupaten Banyuwangi Bagian Tengah Barat yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pertumbuhan terbesar ke - 2 di Kabupaten Banyuwangi.

→ WP Banyuwangi Selatan, meliputi :

1. Kecamatan Tegaldlimo
2. Kecamatan Purwoharjo
3. Kecamatan Bangorejo
4. Kecamatan Pesanggaran
5. Kecamatan Siliragung.

Kota Bangorejo sebagai pusat pertumbuhan bagi Kabupaten Banyuwangi Bagian Selatan yang sekaligus berfungsi sebagai Agropolitan.

Setiap pusat kegiatan telah ditetapkan besarnya, sehingga perlu diberikan penjelasan tingkat pelayanan yang mampu diberikan secara eksplisit. Hirarki atau besaran kota di Kabupaten Banyuwangi, terdiri atas :

→ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi menjadi pusat pertumbuhan dan pelayanan wilayah di Kabupaten Banyuwangi berada di Kota Banyuwangi.

→ Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi pengembangan pusat pelayanan wilayah belakang (*hinterland service*) dan pusat pertumbuhan antar wilayah, meliputi:

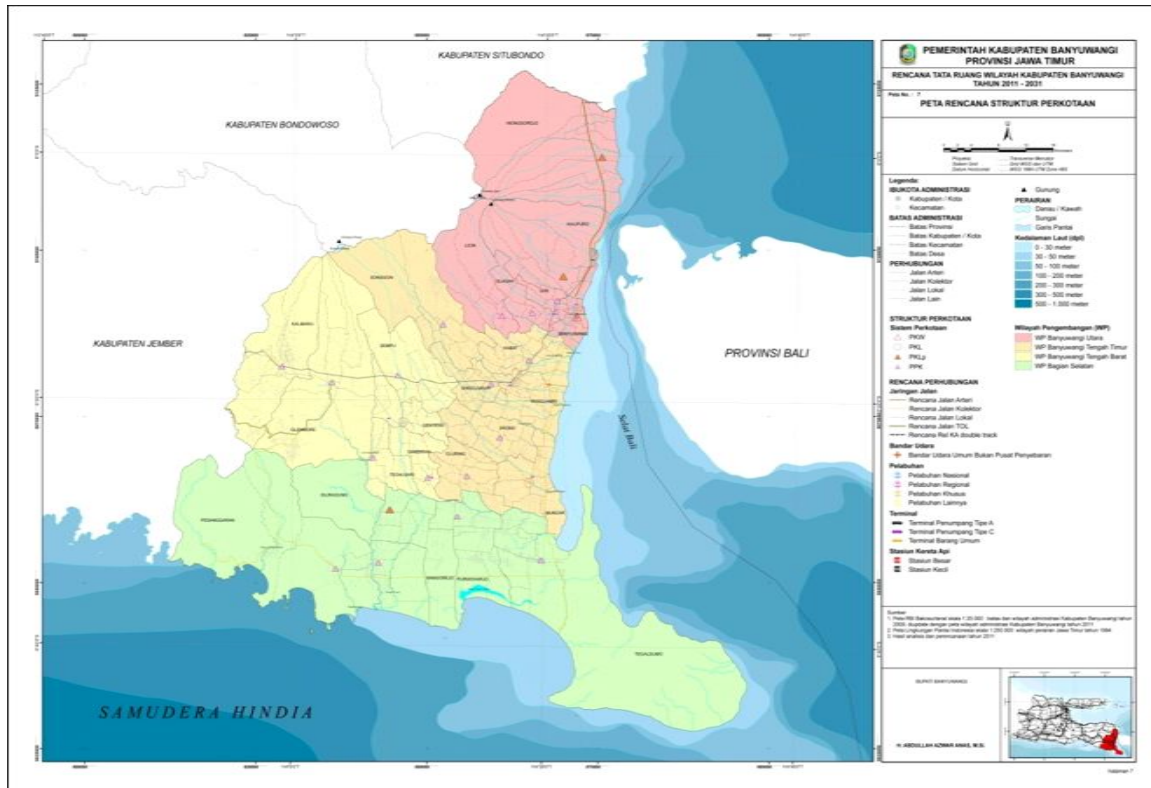
1. Perkotaan Genteng
2. Perkotaan Muncar
3. Perkotaan Rogojampi
4. Perkotaan Gambiran.

→ Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) meliputi:

1. Perkotaan Wongsorejo
2. Perkotaan Kalipuro

3. Perkotaan Bangorejo.

→ Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di setiap wilayah kecamatan yang berfungsi melayani wilayahnya sendiri, meliputi : Perkotaan Glagah, Giri, Licin, Kabat, Srono, Cluring, Singojuruh, Sempu, Songgon, Purwoharjo, Tegaldimo, Tegalsari, Glenmore, Kalibaru, Pesanggaran, dan Perkotaan Siliragung.

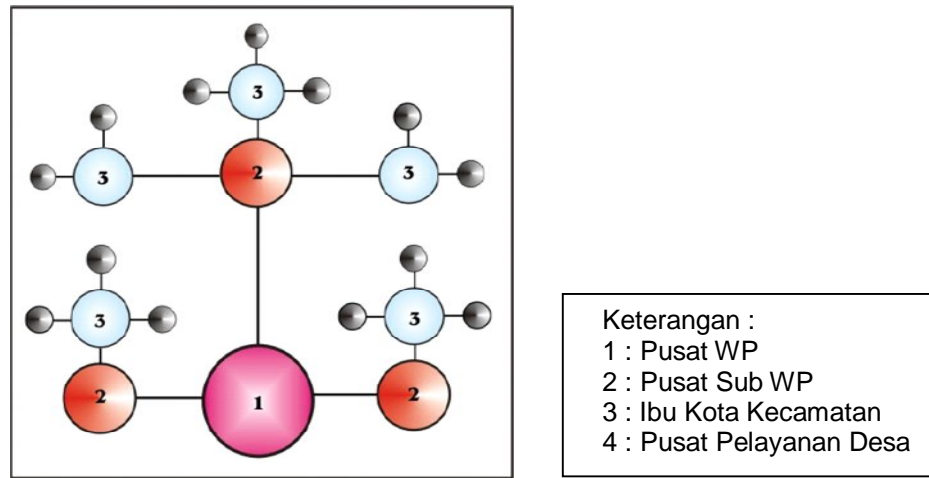


Gambar 2.1.
Rencana Struktur Perkotaan Banyuwangi

b. Sistem Perdesaan

Sistem pedesaan dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarki, yakni :

- a. Pusat pelayanan antar desa (PPL)
- b. Pusat pelayanan setiap desa (PPd)
- c. Pusat pelayanan pada satu atau beberapa dusun atau kelompok permukiman (PPds).

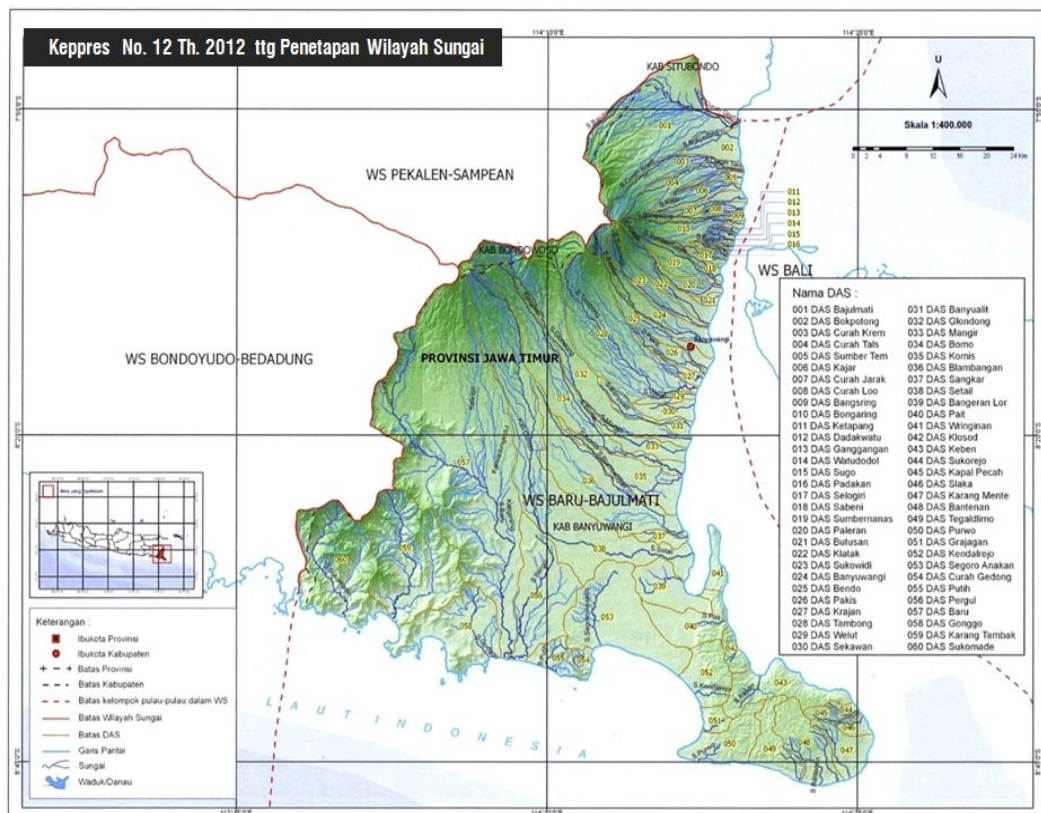


Gambar 2.2.
Sistem Pusat Permukiman Perdesaan

B. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air di WS Baru Bajulmati

1. Sistem Wilayah Sungai

Berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, WS Baru Bajulmatiterdiri dari 60 (enam puluh) DAS. Peta WS Baru Bajulmati disajikan pada Gambar 2.3. berikut.



Gambar 2.3.
Peta Wilayah Sungai Baru Bajulmati

2. Sistem Jaringan Irigasi

Pengembangan sumberdaya air lintas kabupaten/kota untuk mendukung kebutuhan air irigasi / air baku irigasi pertanian dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan kesamaan hak antar wilayah.

Rencana pengembangan jaringan irigasi didukung rencana pengembangandaerah tangkapan air (catchment area) dan sumber air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air oleh adanya waduk dan embung - embung.

Sistem jaringan irigasi berupa kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasional dan pemeliharaan Daerah Irigasi (DI) di WS Baru Bajulmatimeliputi:

- a. DI kewenangan kabupaten/kota untuk Daerah Irigasi utuh dan lintas kabupaten/kota (luas < 1.000 Ha).
- b. DI kewenangan provinsi untuk Daerah Irigasi utuh kabupaten/kota (luas 1000 ~ 3.000 Ha).
- c. DI Kewenangan Pusat untuk Daerah Irigasi utuh kabupaten / kota (luas > 3.000 Ha).

Tabel 2.2.

Luas Sawah Daerah Irigasi di Kabupaten Banyuwangi
(Wewenang Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi & Pemerintah Pusat)

No	Daerah Irigasi (DI)	Luas (Ha)						Jumlah
		< 1000		1000 ~ 3000		> 3000		
		Utuh	Lintas	Utuh	Lintas	Utuh	Lintas	
1	Bajulmati	-	711	-	-	-	-	711
2	Gembleng	-	-	1.336	-	-	-	1.336
3	Tenggoro	-	-	1.074	-	-	-	1.074
4	Blambangan	-	-	1.523	-	-	-	1.523
5	Setail Teknik	-	-	-	-	5.788	-	5.788
6	Porolinggo	-	-	-	-	3.515	-	3.515
7	Baru	-	-	-	-	16.200	-	16.200
8	K. Setail	-	-	-	-	6.422	-	6.422
9	Tersebar (166 DI)	29.581	-	-	-	-	-	29.581
Total Jumlah		29.581	711	3.933	0	31.925	0	66.150

D.I UTUH KABUPATEN = 29.581 Ha, TERDIRI DARI :
 IRIGASI TEKNIIS = 27.109 Ha
 IRIGASI SEMI TEKNIS = 2.081 Ha
 IRIGASI SEDERHANA = 391 Ha

: Wewenang Pemerintah Kabupaten
 : Wewenang Pemerintah Provinsi
 : Wewenang Pemerintah Pusat

Sumber : Dinas PU Pengairan Kab. Banyuwangi, 2012

3. Sistem Jaringan Air Baku

Sistem jaringan air baku di WS Baru Bajulmati sesuai dengan rencana peningkatan / pengembangan waduk / embung, terdiri atas :

→ Peningkatan Embung, meliputi :

- (1) Embung Sumber Trowongan di Kecamatan Kalipuro
- (2) Embung Umbul Pule di Kecamatan Sempu
- (3) Embung Sutrisno di Kecamatan Tegaldlimo
- (4) Embung Dasri di Kecamatan Tegalsari
- (5) Embung Sumberurip di Kecamatan Purwoharjo

- (6) Embung Sumberjambe di Kecamatan Siliragung.
- Pengembangan waduk dan embung, meliputi :
- (1) Waduk Bajulmati di Kecamatan Wongsorejo
 - (2) Embung Singolatri di Kecamatan Kalibaru
 - (3) Embung Kedawang di Kecamatan Sempu
 - (4) Embung Lider di Kecamatan Songgon
 - (5) Embung Sumber Kajar di Kecamatan Songgon
 - (6) Embung Kali Telepak I, II di Kecamatan Songgon
 - (7) Embung Sumber Rejeng di Kecamatan Songgon
 - (8) Embung Karangdoro di Kecamatan Tegalsari
 - (9) Embung Karangmulyo di Kecamatan Tegalsari
 - (10) Embung Setail I, II, III di Kecamatan Gambiran
 - (11) Embung Simbar di Kecamatan Purwoharjo
 - (12) Embung Sidorejo di Kecamatan Purwoharjo
 - (13) Embung Kalibendo di Kecamatan Glagah
 - (14) Embung Kalipuro I, II di Kecamatan Kalipuro
 - (15) Embung Sumber Mengarang di Kecamatan Kalipuro
 - (16) Embung Sumberagung I, II di Kecamatan Srono
 - (17) Embung Wringinpitu I, II, III di Kecamatan Tegaldimo

Selain itu, pengembangan sumber air tanah untuk peningkatan cadangan air baku dilakukan dengan memanfaatkan potensi air tanah yang terdapat pada Cekungan Air Tanah (CAT). Di WS Baru Bajulmati terdapat 3 (tiga) wilayah CAT seperti yang ditunjukkan pada **Tabel 2.3.** dan **Gambar 2.4.**

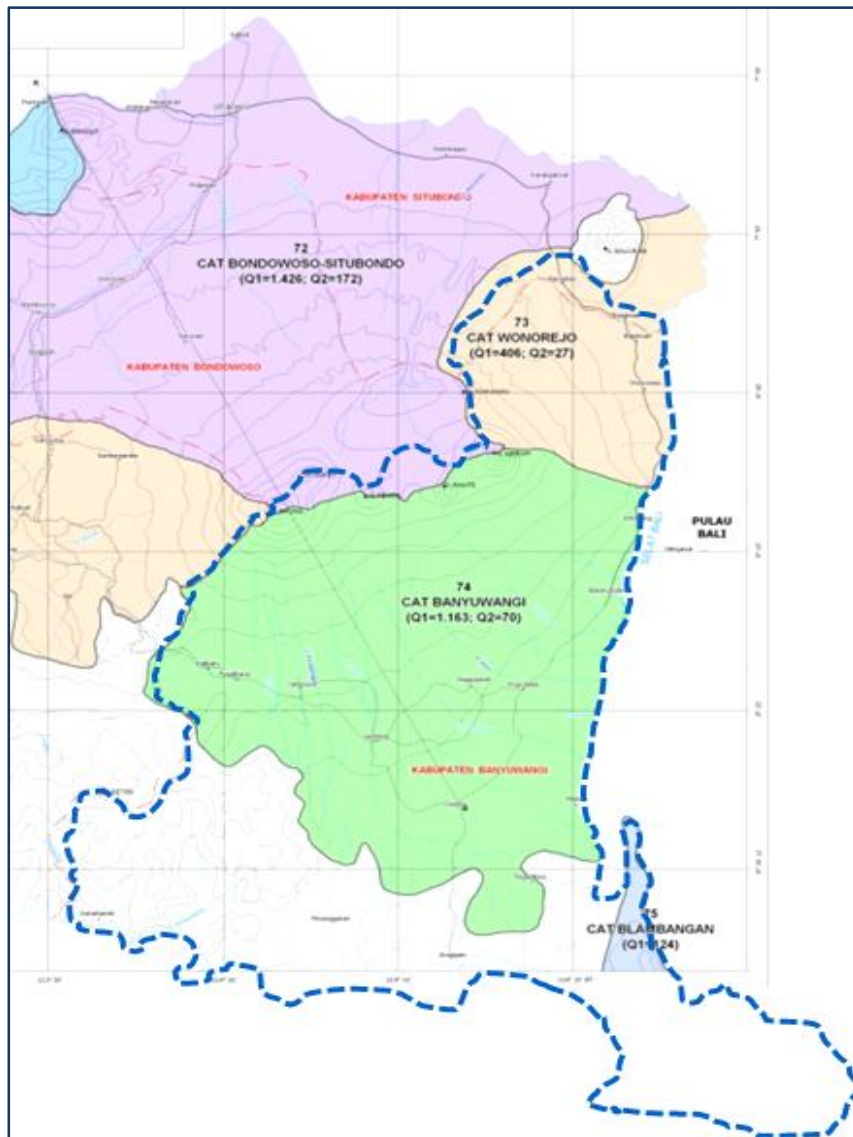
Tabel 2.3.
Data Potensi Cekungan Air Tanah di Kabupaten Banyuwangi

No	Cekungan Air Tanah (CAT)			Kabupaten	Jumlah Air Tanah (juta m ³ /tahun)		Keterangan
	No	Nama CAT	Luas (km ²)		Bebas	Tertekan	
					Q1	Q2	
1	73	CAT Wonorejo	543	Banyuwangi, Situbondo	406	27	CAT Lintas Batas Wilayah Kab / Kota
2	74	CAT Banyuwangi (+)	1.737	Banyuwangi	1.163	70	CAT Dalam Wilayah Kabupaten
3	75	CAT Blambangan (+)	413	Banyuwangi	124	0	CAT Dalam Wilayah Kabupaten

Dari tabel diatas diketahui bahwa potensi cadangan air tanah di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

- Air tanah bebas = 1.693 x 10⁶ m³/tahun.
- Air tanah tertekan = 97 x 10⁶ m³/tahun.
- Total potensi air tanah = 1.790 x 10⁶ m³/tahun.

Berikut adalah peta yang menggambarkan cekungan air tanah di WS Baru Bajulmati yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.



Gambar 2.4.
Peta Cekungan Air Tanah di WS Baru Bajulmati

3. Sistem Jaringan Air Bersih

Rencana pengembangan jaringan air baku untuk air minum regional pada WS Baru Bajulmati ditujukan kepada kelompok pengguna air bersih meliputi :

- Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) untuk kebutuhan air bersih perkotaan
- Himpunan Petani Pemakai Air Minum (HIPPAM) untuk kebutuhan air bersih perdesaan
- Swasta untuk kebutuhan air bersih perusahaan dan industri.

Arahan pengelolaan sumberdaya air disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya

didasarkan pada prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air meliputi :

- a. Pembangunan prasarana sumber daya air.
- b. Semua sumber air diklasifikasikan dari I – IV yang airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan.
- c. Zona pemanfaatan DAS dilakukan dengan membagi tipologi DAS berdasarkan tipologinya.
- d. Penetapan zona pengelolaan sumber daya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai tersebut pada zona kawasan lindung tidak diijinkan pemanfaatan sumber daya air untuk fungsi budidaya, termasuk juga untuk penambangan.
- e. Prasarana sumberdaya air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lintas wilayah administratif kabupaten/kota, dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi.
- f. Prasarana pengairan direncanakan sesuai dengan kebutuhan peningkatan sawah irigasi teknis dan non teknis baik untuk irigasi air permukaan maupun air tanah.

Pengembangan waduk, dam dan embung serta pompanisasi terkait dengan pengelolaan sumber daya air, dengan mempertimbangkan :

- a. Daya dukung sumber daya air.
- b. Kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat.
- c. Kemampuan pembiayaan.
- d. Kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
- e. Posisi Kabupaten Banyuwangi sebagai lumbung pangan Provinsi Jawa Timur / Nasional.

C. Rencana Pola Ruang Wilayah di WS Baru Bajulmati

Rencana pola ruang Provinsi Jawa Timur secara garis besar diwujudkan dalam rencana kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pola ruang kawasan ini ditekankan pada kesesuaian fungsi wilayah, mengingat besarnya pergeseran pemanfaatan kawasan lindung untuk kawasan budidaya. Maka diperlukan penanganan dan pengembalian fungsi lindung, sedangkan padakawasan budidaya dioptimalkan pemanfaatannya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, kegiatan yang dikembangkan diarahkan untuk tidak mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir.

1. Kawasan Hutan Lindung

Hutan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya

alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan. Hutan lindung merupakan kawasan dengan sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kawasan sekitar dan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah erosi dan banjir yang mutlak fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Oleh karena itu kawasan ini tidak dapat dialihkan peruntukannya.

Permasalahan yang terjadi di hutan Jawa Timur adalah tingginya konversi lahan hutan menjadi kawasan budidaya dan sebagian berdampak pada terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.

Untuk mengendalikan konversi dan meminimalkan dampak bencana, direncanakan mempertahankan luasan hutan lindung dari kondisi eksisting seluas kurang lebih 314.720 Ha (6,58 % dari luas Jawa Timur) tetap dengan luasan tersebut hingga tahun 2029. Dengan demikian rencana luas hutan lindung di Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan adalah 23,06% dari rencana luas hutan secara keseluruhan yaitu seluas kurang lebih 1.768.591 Ha (37% dari luas Jawa Timur).

Akan tetapi kawasan hutan lindung di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyaknya penebangan pohon secara liar bahkan sudah merambah ke suaka alam yang merupakan kawasan perlindungan mutlak. Terjadinya erosi merupakan salah satu bentuk kesalahan penanganan menempatkan dan memprediksikan penggunaan kawasan, dalam pengembangan wilayah tersebut harus diketahui daerah rawan bencana sehingga selama musim hujan tidak terjadi pelumpuran atas air permukaan yang mengakibatkan erosi.

Lokasi kawasan hutan lindung di Kabupaten Banyuwangi dengan luas 57.079 Ha, meliputi :

- Kecamatan Wongsorejo
- Kecamatan Kalipuro
- Kecamatan Licin
- Kecamatan Songgon
- Kecamatan Sempu
- Kecamatan Glenmore
- Kecamatan Kalibaru
- Kecamatan Pesanggaran
- Kecamatan Siliragung
- Kecamatan Bangorejo
- Kecamatan Purwoharjo
- Kecamatan Tegaldlimo.

Arahan pengelolaan untuk hutan lindung pada WS Baru Bajulmati meliputi :

- ⓐ Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung.
- ⓐ Mempertahankan luasan kawasan hutan lindung.
- ⓐ Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
- ⓐ Pengembangan kerjasama antarwilayah dalam pengelolaan kawasan lindung.
- ⓐ Percepatan rehabilitasi hutan dan lahan milik masyarakat yang termasuk kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohonlindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil hasil hutan non-kayunya.
- ⓐ Pembukaan jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa memiliki terhadap alam.
- ⓐ Pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam.

2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah berupa kawasan resapan air, meliputi : kawasan hutan lindung, taman nasional, cagar alam, hutan produksi, perkebunan. Di Kabupaten Banyuwangi, kawasan resapan air terdapat di Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Songgon, Sempu, Glenmore, Kalibaru, Pesanggaran dan Kecamatan Tegaldlimo.

3. Kawasan Perlindungan Setempat

a) Sempadan Pantai

Sempadan pantai di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi:

- ❖ wilayah pesisir kepulauan
- ❖ sempadan pantai utara Jawa Timur
- ❖ sempadan pantai timur Jawa Timur
- ❖ sempadan pantai selatan Jawa Timur

Wilayah sempadan pantai di WS Baru Bajulmati berada di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Banyuwangi, meliputi : Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung dan Kecamatan Pesanggaran.

b) Sempadan Sungai

Kriteria penetapan sempadan sungai berdasarkan PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, meliputi :

- ❖ daratan sepanjang tepian sungai bertanggung dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
- ❖ daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter daritepi sungai; dan
- ❖ daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter daritepi sungai.

Arahan pengelolaan kawasan sempadan sungai antara lain :

- ❖ Pembatasan dan melarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas sungai.
- ❖ Pembatasan dan melarang menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitandengan pelestarian atau pengelolaan sungai.
- ❖ Melakukan re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan pada kawasan permukiman perdesaandan perkotaan.
- ❖ Penetapan wilayah sungai sebagai salah satu bagian dari wisata perairan dan transportasi sesuai karakter masing-masing.

c) Kawasan Sekitar Danau atau Waduk

Sebagian besar waduk sudah dimanfaatkan baik untuk sumber air irigasi,sumber air bersih, pariwisata, dll. Luas kawasan penyangga untuk danau atau waduk ditetapkan secara teknis oleh instansi yang berwenang dan ditetapkan lebih lanjut dalamrencana tata ruang masing-masing kabupaten/kota. Penetapan perlindungan waduk ini adalah diukur dari tepi waduk saat pasang tertinggiyang proporsional dengan kondisinya dengan jarak antara 50 sampai 100 meter. Arahan kegiatan pengelolaan kawasan sekitar danau atau waduk antara lain:

- ❖ Perlindungan sekitar danau atau waduk dari kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan kerusakan kualitas sumber air.
- ❖ Pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya.
- ❖ Pengembangan kegiatan pariwisata dan/atau kegiatan budidaya lainnya di sekitar lokasi danau atau waduk diijinkan membangun selamatidak mengurangi kualitas tata air.

- ❖ Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air.

Di WS Baru Bajulmati, kawasan sekitar danau atau waduk yang berada di Kabupaten Banyuwangi, meliputi kawasan sekitar :

- Danau Rawa Bayu di Kecamatan Songgon
- Embung Sumber Trowongan di Kecamatan Kalipuro
- Embung Umbul Pule di Kecamatan Sempu
- Embung Sutrisno di Kecamatan Tegaldlimo
- Embung Dasri di Kecamatan Tegalsari
- Embung Sumberurip di Kecamatan Purwoharjo
- Embung Sumberjambe di Kecamatan Siliragung
- Pengembangan Waduk Bajulmati di Kecamatan Wongsorejo
- Pengembangan Embung Singolatri di Kecamatan Kalibaru
- Pengembangan Embung Kedawang di Kecamatan Sempu
- Pengembangan Embung Lider di Kecamatan Songgon
- Pengembangan Embung Sumber Kajar di Kecamatan Songgon
- Pengembangan Embung Kali Telepak I, II di Kecamatan Songgon
- Pengembangan Embung Sumber Rejeng di Kecamatan Songgon
- Pengembangan Embung Karangdoro di Kecamatan Tegalsari
- Pengembangan Embung Karangmulyo di Kecamatan Tegalsari
- Pengembangan Embung Setail I, II, III di Kecamatan Gambiran
- Pengembangan Embung Simbar di Kecamatan Purwoharjo
- Pengembangan Embung Sidorejo di Kecamatan Purwoharjo
- Pengembangan Embung Kalibendo di Kecamatan Glagah
- Pengembangan Embung Kalipuro I, II di Kecamatan Kalipuro
- Pengembangan Embung Sumber Mengarang di Kecamatan Kalipuro
- Pengembangan Embung Sumberagung I, II di Kecamatan Srono
- Pengembangan Embung Wringinpitu I, II, III di Kecamatan Tegaldlimo.

d) Kawasan Rawa

Di WS Baru Bajulmati, kawasan rawa yang berada di Kabupaten Banyuwangi, meliputi : kawasan Rawa Taruna Jajang di perbatasan Kecamatan Tegaldlimo dengan Kecamatan Purwoharjo dan kawasan Rawa Biru di Kecamatan Siliragung.

e) Kawasan Sekitar Mata Air

Penentuan kawasan perlindungan sekitar mata air ditetapkan dalam RTRW masing-masing kabupaten/kota disesuaikan dengan lokasi, volume dan fungsi utama. Perlindungan di sekitar mata air ini dimaksudkan melindungi secara langsung dari gangguan khususnya aktifitas manusia yang berakibat menurunnya kualitas mata air. Perlindungan setempat ini difokuskan kepada badan air dari mata air, perlingkungannya daerah tangkapan mata air atau recharge area ditekankan dalam perlindungan kawasan resapan air. Untuk perlindungan setempat kawasan sekitar mata air ditetapkan minimal radius 200 meter dari mata air.

Arahan pengelolaan kawasan sekitar mata air antara lain :

- ❖ Penetapan perlindungan pada sekitar mata air ini adalah minimum berjari-jari 200 meter dari sumber mata air tersebut jika di luar kawasan permukiman dan 100 meter jika di dalam kawasan permukiman. Dengan demikian di sekitar kawasan sumber air dapat ditanami dengan jenis tanaman yang dapat mengikat air, sehingga kawasan di sekitar sumber air juga dapat digunakan sebagai daerah resapan.
- ❖ Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan kerusakan kualitas sumber air.
- ❖ Pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi.
- ❖ Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air.
- ❖ Pembatasan dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air.
- ❖ Untuk mata air yang terletak pada kawasan lindung, maka perlindungan sekitarnya tidak dilakukan secara khusus, sebab pada kawasan lindung tersebut sudah sekaligus berfungsi sebagai perlindungan terhadap lingkungan dan air.

4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

a) Cagar Alam

Lokasi cagar alam di WS Baru Bajulmati, antara lain :

- ❖ Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup dengan luas 1.583 Ha berada di Kecamatan Licin dari luas keseluruhan 2.468 Ha

- ❖ Cagar Alam Janggangan Rogojampi seluas 2,5 Ha berada di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.

Arahan kegiatan pengelolaan cagar alam ini antara lain:

- ❖ Pelestarian ekosistem yang masih berkembang.
- ❖ Pengelolaan hutan partisipatif dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan selain mempunyai fungsi ekologis juga secara tidak langsung memiliki nilai ekonomis.

b) Kawasan Suaka Alam Laut

Lokasi kawasan suaka alam laut di WS Baru Bajulmati, antara lain :

- ❖ Perairan sekitar pantai Pulau Tabuan di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- ❖ Perairan sekitar pantai Pulau Merah berada di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

c) Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Lokasi kawasan pantai berhutan bakau di WS Baru Bajulmati, berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi antara lain : Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharjo dan Kecamatan Pesanggaran.

Arahan pengelolaan sempadan hutan bakau antara lain:

- ❖ Pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui penanaman tanaman bakau dan nipah di pantai.
- ❖ Pengembangan kegiatan budidaya terbatas di kawasan pantai berhutan bakau.

d) Kawasan Taman Nasional

Kawasan Taman Nasional di Provinsi Jawa Timur yang berada di WS Baru Bajulmati adalah :

- ❖ Kawasan Taman Nasional Alas Purwo dengan luas 43.420 Ha meliputi : Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi.
- ❖ Kawasan Taman Nasional Meru Betiri dengan luas 20.415 Ha berada di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi.

Arahan kegiatan pengelolaan kawasan Taman Nasional adalah :

- ❖ Pengembalian fungsi lindung pada kawasan yang tereleminasi dengan mengembangkan tanaman produktif yang dapat meresapkan air ke tanah.
- ❖ Pembangunan sarana penelitian terhadap flora dan fauna disamping mengembangkan penangkaran satwa langka.
- ❖ Apabila terdapat alih fungsi lindung, maka harus diadakan pengembalian ke fungsi semula.

- ❖ Pengelolaan hutan partisipatif dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pentingnya hutan selain mempunyai fungsi ekologis juga secara tidak langsung memiliki nilai ekonomis.

e) Kawasan Taman Wisata Alam

Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama pelestarian alam (flora, fauna dan ekosistem serta segala isinya) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Taman wisata alam di Jawa Timur seluas ± 298 Ha.

Lokasi kawasan taman wisata alam di WS Baru Bajulmati berada di Kecamatan Licin berupa Taman Wisata Alam Kawah Ijen seluas 71 Ha dari luas keseluruhan 92 Ha.

Kriteria taman wisata alam menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi :

- ❖ memiliki daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa dan ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologi yang indah, unik, dan langka;
- ❖ memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
- ❖ memiliki luas yang cukup untuk menjamin pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk dimanfaatkan bagi kegiatan wisata alam;
- ❖ kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan kegiatan wisata alam.

5. Kawasan Rawan Bencana Alam

a) Kawasan Rawan Gempa

Di WS Baru Bajulmati, kawasan rawan gempa berada di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi, meliputi : Kecamatan Pesanggaran, Siliragung, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Kalibaru, Glenmore, Genteng, Gambiran, Cluring, Srono, Singojuruh, Muncar, Rogojampi, Kabat dan Kecamatan Banyuwangi.

b) Kawasan Rawan Banjir

Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

Di WS Baru Bajulmati, kawasan rawan banjir terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi, meliputi : Kecamatan Banyuwangi, Kalipuro, Muncar, Purwoharjo dan Kecamatan Kalibaru.

Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir secara umum dapat dibagi menjadi empat kegiatan yaitu upaya pengelolaan

kawasan rawan banjir melalui tata ruang, melalui mitigasi non struktural, melalui mitigasi struktural serta peningkatan peranserta masyarakat.

c) Kawasan Rawan Kerentanan Gerakan Tanah

Di WS Baru Bajulmati, kawasan rawan kerentanan gerakan tanah berada di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi, meliputi : Kecamatan Wongsorejo, Licin, Glagah, Kalipuro, Kabat, Songgon, Siliragung, Pesanggaran, Kalibaru dan Kecamatan Glenmore.

d) Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

Di WS Baru Bajulmati, kawasan rawan letusan gunung api berada di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi, meliputi : Kecamatan Songgon, Licin, Glagah, Kalipuro, Wongsorejo, Glenmore, Sempu dan Kecamatan Kalibaru.

e) Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Tsunami

Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria Kawasan Rawan Gelombang Pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari.

Di WS Baru Bajulmati, kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami berada di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi, meliputi : Kecamatan Pesanggaran, Purwoharjo, Muncar, Rogojampi, Banyuwangi, Siliragung dan Kecamatan Tegaldlimo.

f) Kawasan Rawan Kebakaran Hutan

Kawasan rawan bencana kebakaran hutan di WS Baru Bajulmati meliputi : Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Glagah, Songgon, Sempu, Purwoharjo, Tegaldlimo, Bangorejo, Tegalsari, Kalibaru, Glenmore, Siliragung dan Kecamatan Pesanggaran.

Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran hutan meliputi :

- ❖ Pelaksanaan kampanye dan sosialisasi kebijakan pengendalian kebakaran lahan dan hutan.
- ❖ Peningkatan Masyarakat Peduli Api (MPA).
- ❖ Peningkatan penegakan hukum.
- ❖ Pembentukan pasukan pemadaman kebakaran khususnya untuk penanggulangan kebakaran secara dini.
- ❖ Pembuatan waduk (embung) di daerahnya untuk pemadaman api.
- ❖ Pembuatan sekat bakar, terutama antara lahan, perkebunan, pertanian dengan hutan.

- ❖ Hindarkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran.
- ❖ Hindarkan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang luas.
- ❖ Melakukan pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara ketat.
- ❖ Melakukan penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman yang heterogen.
- ❖ Partisipasi aktif dalam pemadaman awal kebakaran di daerahnya.
- ❖ Pengembangan teknologi pembukaan lahan tanpa membakar (pembuatan kompos, briket arang dll).
- ❖ Pembentukan kesatuan persepsi dalam pengendalian kebakaran lahan dan hutan.
- ❖ penyediaan dana tanggap darurat untuk penanggulangan kebakaran lahan dan hutan disetiap unit kerja terkait.

6. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

a) Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi

Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria penetapan kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi:

- ❖ wilayah di sekitar kawah atau kaldera.
- ❖ wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.

Kawasan rawan letusan gunung api di WS Baru Bajulmati, meliputi :

- ❖ Gunung Ijen – Merapi Ungup-Ungup di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi
- ❖ Gunung Raung di Kabupaten Bondowoso berbatasan dengan Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi.

Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana gunung berapi :

- ❖ Perencanaan lokasi pemanfaatan lahan untuk aktivitas penting jauh atau diluar dari kawasan rawan bencana letusan gunung berapi.
- ❖ Menghindari tempat-tempat yang memiliki kecenderungan untuk dialiri lava dan atau lahar.
- ❖ Penerapan desain bangunan yang tahan terhadap tambahan beban akibat abu gunungapi.
- ❖ Pembangunan fasilitas jalan dari tempat pemukiman ke tempat pengungsian untuk memudahkan evakuasi.
- ❖ Penyediaan alat transportasi bagi penduduk bila ada perintah pengungsian.
- ❖ Identifikasi daerah bahaya letusan gunung berapi.

- ❖ Peningkatan kemampuan pemadam kebakaran.
- ❖ Pembuatan tempat penampungan yang kuat dan tahan api untuk kondisi kedaruratan.
- ❖ Penyuluhan pada masyarakat yang bermukim di sekitar gunungapi untuk mengetahui posisi tempat tinggalnya pada Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi.
- ❖ Penyuluhan pada masyarakat yang bermukim di sekitar gunungapi untuk faham cara menghindar dan tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi letusan gunungapi.
- ❖ Penyuluhan pada masyarakat untuk memahami arti dari peringatan dini yang diberikan oleh aparat/pengamat gunung api.
- ❖ Penyuluhan pada masyarakat untuk bersedia melakukan koordinasi dengan aparat/pengamat gunungapi.

7. Kawasan Budidaya

a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutanyang tidak terkendali.

Kawasan peruntukan hutan produksi di WS Baru Bajulmati seluas 56.890 Ha yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, meliputi : Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Licin, Glagah, Songgon, Sempu, Purwoharjo, Tegaldlimo, Tegalsari, Bangorejo, Siliragung, Pesanggaran, Glenmore dan Kecamatan Kalibaru.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan hutan produksi adalah sebagai berikut :

- ❖ Pengusahaan hutan produksi di Provinsi Jawa Timur dilakukan oleh Perum Perhutani dengan menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).
- ❖ Melakukan reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas tebangan dan tidak dapat dialih fungsikan ke budidaya non kehutanan.
- ❖ Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya.
- ❖ Pengembalian pada fungsi hutan semula dengan reboisasi.
- ❖ Percepatan reboisasi dan pengkayaan tanaman (enrichment planting) pada kawasan hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah.

- ❖ Pengembangan zona penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan hutan lindung.
 - ❖ Pengembalian kondisi hutan bekas tebangan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan kritis.
 - ❖ Penerapan arahan di setiap wilayah kabupaten/kota mewujudkan hutan kota.
- b) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
Hutan rakyat dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan iklim mikro, memenuhi kebutuhan akan hasil hutan dan berada pada lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat. Kawasan peruntukan hutan rakyat di WS Baru Bajulmati seluas ± 23.930 Ha berada diseluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Banyuwangi.
- c) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan
- d) Kawasan Peruntukan Hortikultura
- e) Kawasan Peruntukan Perkebunan
Kawasan peruntukan perkebunan di WS Baru Bajulmati, terdiri :
- ❖ Perkebunan Negara (± 30.976 Ha), meliputi : perkebunan tebu, kopi, perkebunan karet dan coklat.
 - ❖ Perkebunan Swasta (± 18.024 Ha), meliputi : perkebunan kopi, coklat, karet, cengkeh, abaca, kelapa, kapuk randu, tebu, vanili.
 - ❖ Perkebunan Rakyat (± 31.964 Ha), meliputi : perkebunan kelapa buah, kelapa deres, kopi, coklat, cengkeh, vanili, kapas, kapuk randu, nilam, jarak pagar, tembakau.
- f) Kawasan Peruntukan Peternakan
Jenis sentra peternakan di WS Baru Bajulmati adalah :
- ❖ Sentra peternakan ternak besar, meliputi : ternak sapi, sapi potong, kerbau dan ternak kuda terdapat di sebagian wilayah kecamatan Kabupaten Banyuwangi.
 - ❖ Sentra peternakan ternak kecil, meliputi : ternak kambing, domba dan ternak babi terdapat di sebagian wilayah kecamatan Kabupaten Banyuwangi.
 - ❖ Sentra peternakan unggas, meliputi ternak ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik dan ternak entok terdapat di hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.
- g) Kawasan Peruntukan Perikanan
❖ Peruntukan Perikanan Tangkap, meliputi : Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung dan Kecamatan Pesanggaran.

- ❖ Peruntukan Budidaya Perikanan
- ❖ Kawasan Peruntukan Pengolahan Ikan, meliputi : Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Banyuwangi, Kabat, Srono, Tegaldlimo, Purwoharjo, Sempu, Muncar dan Kecamatan Pesanggaran.
- ❖ Pengembangan Fungsi Pelabuhan Perikanan, terdiri atas :
 - (1) Penataan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) meliputi :
 - PPP Muncar terintegrasi dengan program pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Muncar.
 - PPP Grajagan di Kecamatan Purwoharjo
 - (2) Penataan dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi:
 - PPI Pancer di Kecamatan Pesanggaran
 - PPI Bimorejodi Kecamatan Wongsorejo.
 - (3) Penataan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) meliputi :
 - TPI Muncar di Kecamatan Muncar
 - TPI Brak Kalimoro di Kecamatan Muncar
 - TPI Kampung Mandar di Kecamatan Banyuwangi
 - TPI Bimorejo di Kecamatan Wongsorejo
 - TPI Blimbingsari di Kecamatan Rogojampi
 - TPI Grajagan di Kecamatan Purwoharjo
 - TPI Rajegwesi di Kecamatan Pesanggaran.
 - (4) Pengembangan pelabuhan perikanan *fishery park* di Desa Bomo Kecamatan Rogojampi.

8. Kawasan Peruntukan Pertambangan

- Kawasan tambang mineral logam berupa tambang emas, perak, dan tembaga, meliputi : Kecamatan Pesanggaran dan Kecamatan Siliragung.
- Kawasan tambang mineral bukan logam berupa tambang belerang di Kecamatan Licin.
- Kawasan peruntukan pertambangan berupa potensi panas bumi di WS Baru Bajulmatiyang dijadikan isu strategis nasional adalah adanya rencana pemanfaatan potensi panas bumi berupa pembangunan PLTP Blawan – Ijen dengan kapasitas rencana 270 MW di Kecamatan Licin.

Arahan pengelolaan kawasan pertambangan antara lain :

- ❖ Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan.
- ❖ Pengelolaan kawasan bekas penambangan yang telah digunakan harus direhabilitasi dengan melakukan penimbunan tanah subur sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
- ❖ Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan lapisan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan.

9. Kawasan Peruntukan Industri

a) Kawasan Industri Besar

Pengembangan kawasan direncanakan berupa industrial estate di Kecamatan Wongsorejo atau dikenal dengan Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo (BIEW).

b) Kawasan Industri Menengah

- Pengembangan kegiatan usaha sektor perikanan dan/atau usaha sejenisnya terintegrasi dengan kawasan minapolitan di Kecamatan Muncar.
- Pengembangan *fishery park* berada di Kecamatan Rogojampi.
- Pengembangan agroindustri berada disentra produksi pertanian terintegrasi dengan kawasan agropolitan meliputi : Kecamatan Bangorejo, Kalibaru, Kalipuro dan Kecamatan Siliragung.
- Pengembangan kegiatan usaha industri terintegrasi dengan pengembangan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus di Kecamatan Kalipuro.

c) Kawasan Industri Kecil / Rumah Tangga

Pengembangan direncanakan berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

10. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di WS baru Bajulmati menetapkan obyek wisata andalan dalam Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) sebagai kawasan segitiga berlian, yakni :

- WPP I berupa Kawah Ijen
- WPP II berupa Pantai Plengkung
- WPP III berupa Pantai Sukamade

11. Kawasan Peruntukan Permukiman

a) Kawasan Permukiman Perdesaan

Arahan pengelolaan kawasan permukiman perdesaan meliputi:

- Pengelompokan lokasi permukiman perdesaan yang sudah ada.
- Pembatasan alih fungsi sawah irigasi.
- Pengembangan permukiman dengan memperhatikan kebutuhan perumahan berdasar perkembangan penduduk perdesaan untuk masa yang akan datang, kecenderungan perkembangan dan aksesibilitas.

b) Kawasan Permukiman Perkotaan

Arahan pengelolaan kawasan permukiman perkotaan meliputi:

- Pengaturan perkembangan pembangunan permukiman perkotaan baru.
- Pengembangan permukiman perkotaan dengan memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk dan fasilitas atau prasarana yang dibutuhkan.

2.3.1.2. Kabupaten Dalam Angka

WS Baru Bajulmati mempunyai luas *cacthment area* sebesar 5.782 km² yang secara administratif melintasi Kabupaten Banyuwangi dan sebagian Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso dengan jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) = 60 DAS. Jumlah curah hujan rata-rata mencapai 1.760,5 mm/tahun dan dari jumlah tersebut sekitar 80% jatuh pada musim hujan. Potensi air permukaan per tahun rata-rata 3,85.10⁶m³, dan potensi yang dimanfaatkan sebesar 3,12.10⁶ m³/tahun (dimanfaatkan 81,02%). Untuk potensi air tanah per tahun rata-rata 888,88.10⁶m³ dan potensi yang dimanfaatkan sebesar 93,71.10⁶m³/tahun (baru dimanfaatkan 10,54%). Data kabupaten dalam angka di WS Baru – Bajulmati, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Data Kabupaten Dalam Angka di WS Baru – Bajulmati

No.	Kabupaten	Luas Wilayah (Km2)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
1.	Banyuwangi	5.782,50	1.556.078	269
2.	Bondowoso	1.560,10	748.177	479
3.	Situbondo	1.638,50	647.619	395

Sumber : Daerah Dalam Angka, 2011

WS Baru Bajulmati mempunyai peran yang cukup besar dalam menunjang Provinsi Jawa timur sebagai lumbung pangan nasional. Pada tahun 2012 – 2014, Provinsi

Jawa timur ditargetkan memberikan kontribusi lebih dari 5 juta ton beras/tahun atau sebesar \pm 30% dari stok pangan nasional.

Pengembangan WS Baru Bajulmati dilakukan dengan pendekatan yang terencana, terpadu, menyeluruh, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan serta dengan sistem pengelolaan terpadu berlandaskan pengertian bahwa WS merupakan satu kesatuan hidrologis (satu sungai, satu rencana, satu manajemen terpadu atau *one river, one plan, one integrated management*).

Morfologi sungai pada WS Baru Bajulmati mulai sungai di pegunungan, sungai di daerah transisi, sampai sungai di pedataran atau daerah pasang surut, mempunyai perubahan morfologi. Morfologi sungai di daerah pegunungan memiliki tebing sungai yang tinggi dengan kemiringan dasar sungai besar (curam), untuk daerah transisi/tengah mempunyai kemiringan dasar agak lebar dengan tebing sungai agak rendah, sedangkan di daerah pedataran mempunyai kemiringan dasar yang landai serta tebing sungai yang rendah.

2.3.1.3. Produk Domestik Rata – rata Bruto (PDRB)

Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi yang dicapai sebesar 2,08% yang terutama disumbangkan oleh pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang tumbuh sebesar 0,30%.

Berdasarkan pertumbuhan PDRB Kabupaten di WS Baru Bajulmati, dapat diproyeksikan pertumbuhan ekonomi kedepan, dengan memperhitungkan target pertumbuhan ekonomi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur. Berikut disajikan PDRB Kabupaten di WS Baru Bajulmati atas dasar harga berlaku.

Tabel 2.5.
Produk Domestik Rata–rata Bruto (Atas Dasar Harga Berlaku)
Kabupaten di WS Baru Bajulmati

(dalam juta rupiah)

No	LAPANGAN USAHA	BANYUWANGI		BONDOWOSO		SITUBONDO	
		2009	2010	2009	2010	2009	2010
1	PERTANIAN	9.318.614,09	10.286.265,67	862.975	956.379	2.356.187,01	2.610.923,02
2	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	871.926,97	987.524,97	6.042	6.732	171.654,69	188.848,25
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	1.323.832,32	1.498.247,89	141.127	171.525	682.729,51	767.665,40
4	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	65.291,83	72.922,56	9.456	10.412	64.402,82	72.642,32
5	BANGUNAN	138.375,20	153.691,80	48.705	54.382	280.741,13	304.375,11
6	PERDAGANGAN, HOTEL, RESTORAN	5.504.954,69	6.633.865,54	314.588	357.168	2.522.336,86	2.906.698,92
7	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	649.911,95	709.807,64	35.364	38.527	421.145,95	471.863,84
8	KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	1.223.217,30	1.397.351,27	151.425	162.456	236.191,31	253.565,33
9	JASA - JASA	1.360.322,46	1.527.134,17	193.753	217.319	634.137,45	697.369,57
	PDRB DENGAN MIGAS	20.456.46,81	23.266.811,50	1.763.434	1.974.898	7.369.526,74	8.273.951,76
	PDRB TANPA MIGAS	20.456.46,81	23.266.811,50	1.763.434	1.974.898	7.369.526,74	8.273.951,76

Sumber : Daerah Dalam Angka, 2011

Penyumbang terbesar dalam pertumbuhan perekonomian di WS Baru Bajulmati terutama di Kabupaten Banyuwangi didominasi oleh sektor Pertanian.

Mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur, dapat diketahui target pertumbuhan ekonomi tahun 2006 – 2008 yaitu berturut-turut sebesar 5,8%, 6,1% dan 6,3% (atas dasar harga konstan 2000). Sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor bangunan akan tetap memberikan sumbangan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

2.3.1.4. Kondisi Fisik WS Baru Bajulmati

Berdasarkan batas-batas administrasi dan pembagian wilayah DAS, WS Baru Bajulmati berada pada wilayah administrasi Kabupaten Banyuwangi dan sebagian kecil WS Baru Bajulmati masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Situbondo dan Bondowoso. Luas total WS Baru Bajulmati ± 3.692 Km², yang terdiri dari 60 Daerah Aliran Sungai (DAS), dimana wilayah DAS yang paling besar adalah DAS Baru = 614,22 Km². Perincian luas dari masing-masing DAS di WS Baru Bajulmati disajikan pada **Tabel 2.6**.

Tabel 2.6.
Kondisi DAS pada WS Baru Bajulmati

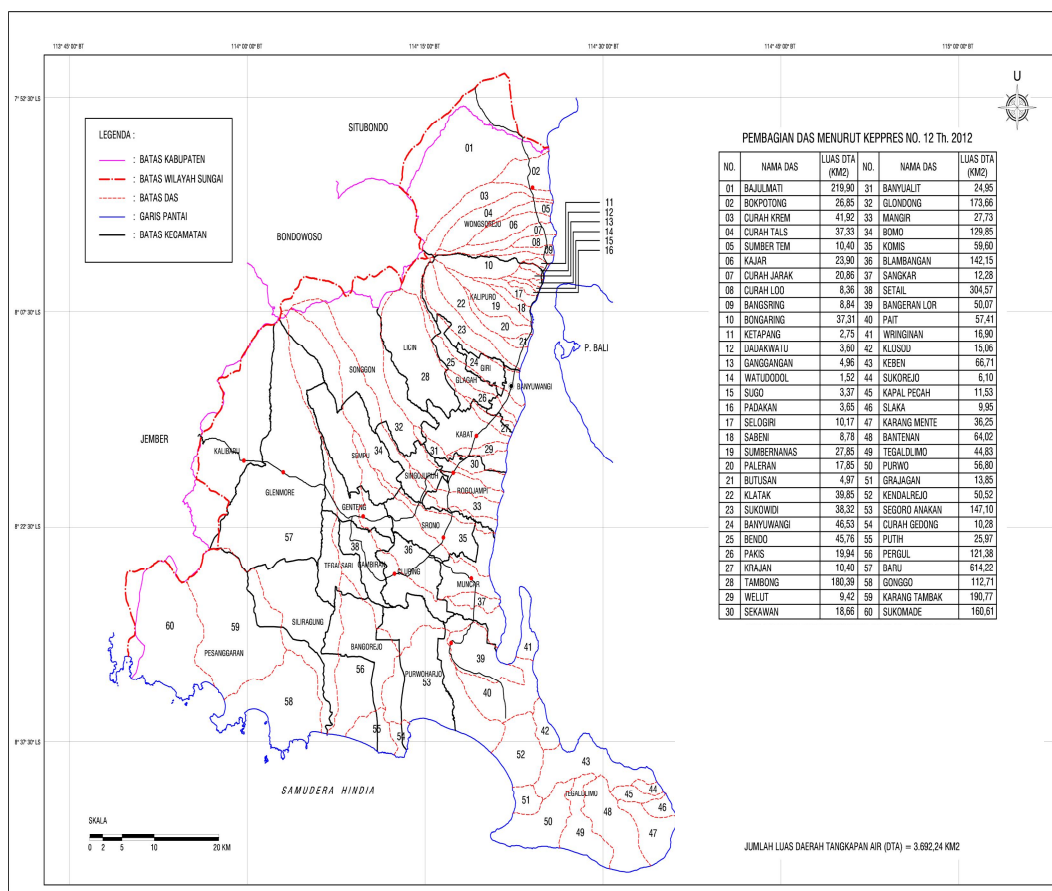
NO	NAMA DAS	LUAS (KM2)	NO	NAMA DAS	LUAS (KM2)
1	BAJULMATI	219,90	31	BANYUALIT	24,95
2	BOKPOTONG	26,85	32	GLONDONG	173,66
3	CURAH KREM	41,92	33	MANGIR	27,73
4	CURAH TALS	37,33	34	BOMO	129,85
5	SUMBER TEM	10,40	35	KOMIS	59,60
6	KAJAR	23,90	36	BLAMBANGAN	142,15
7	CURAH JARAK	20,86	37	SANGKAR	12,28
8	CURAH LOO	8,36	38	SETAIL	304,57
9	BANGSRING	8,84	39	BANGERAN LOR	50,07
10	BONGARING	37,31	40	PAIT	57,41
11	KETAPANG	2,75	41	WRINGINAN	16,90
12	DADAKWATU	3,60	42	KLOSOD	15,06
13	GANGGANGAN	4,96	43	KEBEN	66,71
14	WATUDODOL	1,52	44	SUKOREJO	6,10
15	SUGO	3,37	45	KAPAL PECAH	11,53
16	PADAKAN	3,65	46	SLAKA	9,95
17	SELOGIRI	10,17	47	KARANG MENTE	36,25
18	SABENI	8,78	48	BANTENAN	64,02
19	SUMBERNANAS	27,85	49	TEGALDLIMO	44,83
20	PALERAN	17,85	50	PURWO	56,80
21	BUTUSAN	4,97	51	GRAJAGAN	13,85
22	KLATAK	39,85	52	KENDALREJO	50,52
23	SUKOWIDI	38,32	53	SEGORO ANAKAN	147,10
24	BANYUWANGI	46,53	54	CURAH GEDONG	10,28
25	BENDO	45,76	55	PUTIH	25,97
26	PAKIS	19,94	56	PERGUL	121,38
27	KRAJAN	10,40	57	BARU	614,22
28	TAMBONG	180,39	58	GONGGO	112,71
29	WELUT	9,42	59	KARANG TAMBAK	190,77
30	SEKAWAN	18,66	60	SUKOMADE	160,61

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2012

Total Luas = 3.692,24 km²
Luas Maksimum = 614,22 km² (DAS Baru)
Luas Minimum = 1,52 km² (DAS Watudodol)

Pembagian DAS Baru Bajulmati menjadi 60 (enam puluh) DAS didasarkan atas peraturan Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.

Peta Administrasi dan Pembagian DAS untuk WS Baru Bajulmati ditunjukkan pada **Gambar 2.5.**



Gambar 2.5.
Peta Administrasi dan Pembagian DAS WS Baru Bajulmati

2.3.1.5. Sistem Sungai

Dari 60 Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di WS Baru Bajulmati, terdapat 9 (sembilan) DAS yang dominan diantaranya adalah ;

1. DAS Bajulmati

DAS Bajulmati yang mempunyai luas 219.90 Km² terdiri dari 5 (lima) sungai pada orde 1 sampai dengan orde 3, yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso.

2. DAS Tambong

DAS Tambong yang mempunyai luas 180,39 Km² terdiri dari 3 (tiga) sungai pada orde 1 sampai dengan orde 2, yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi.

3. DAS Glondong

DAS Glondong yang mempunyai luas 173,66 Km² terdiri dari 1 (satu) sungai pada orde 1, yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso.

4. DAS Bomo

DAS Bomo yang mempunyai luas 129,85 Km² terdiri dari 4 (empat) sungai pada orde 1 sampai dengan orde 3, yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso.

5. DAS Blambangan

DAS Blambangan yang mempunyai luas 142,15 Km² terdiri dari 11 (sebelas) sungai pada orde 1 sampai dengan orde 3, yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi.

6. DAS Setail

DAS Setail yang mempunyai luas 304,57 Km² terdiri dari 3 (tiga) sungai pada orde 1 sampai dengan orde 2, yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi.

7. DAS Baru

DAS Baru yang mempunyai luas 614,22 Km² terdiri dari 9 (sembilan) sungai pada orde 1 sampai dengan orde 3, yang secara administratif masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi dan Jember.

2.3.1.6. Tataguna Lahan

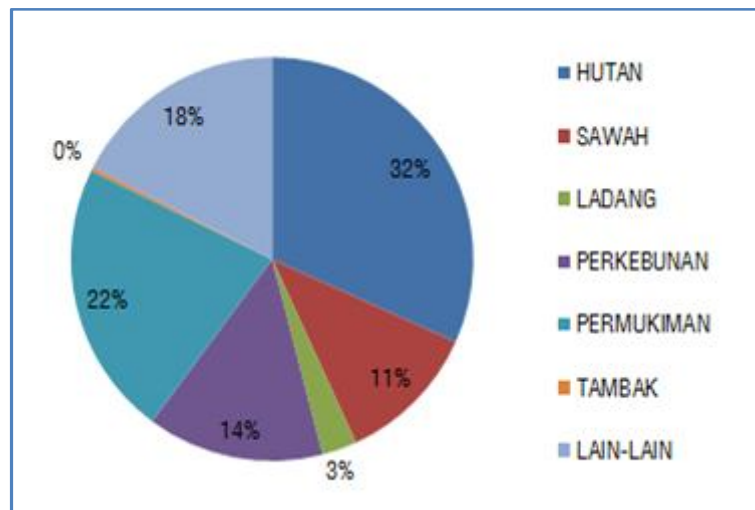
Luas Kabupaten Banyuwangi dibedakan menurut penggunaannya disajikan pada **Tabel 2.7.** dan **Gambar 2.6.**

Sedangkan gambaran kondisi tata guna lahan berdasarkan BPDAS Sampean di WS Baru Bajulmatidisajikan pada **Gambar 2.7.**

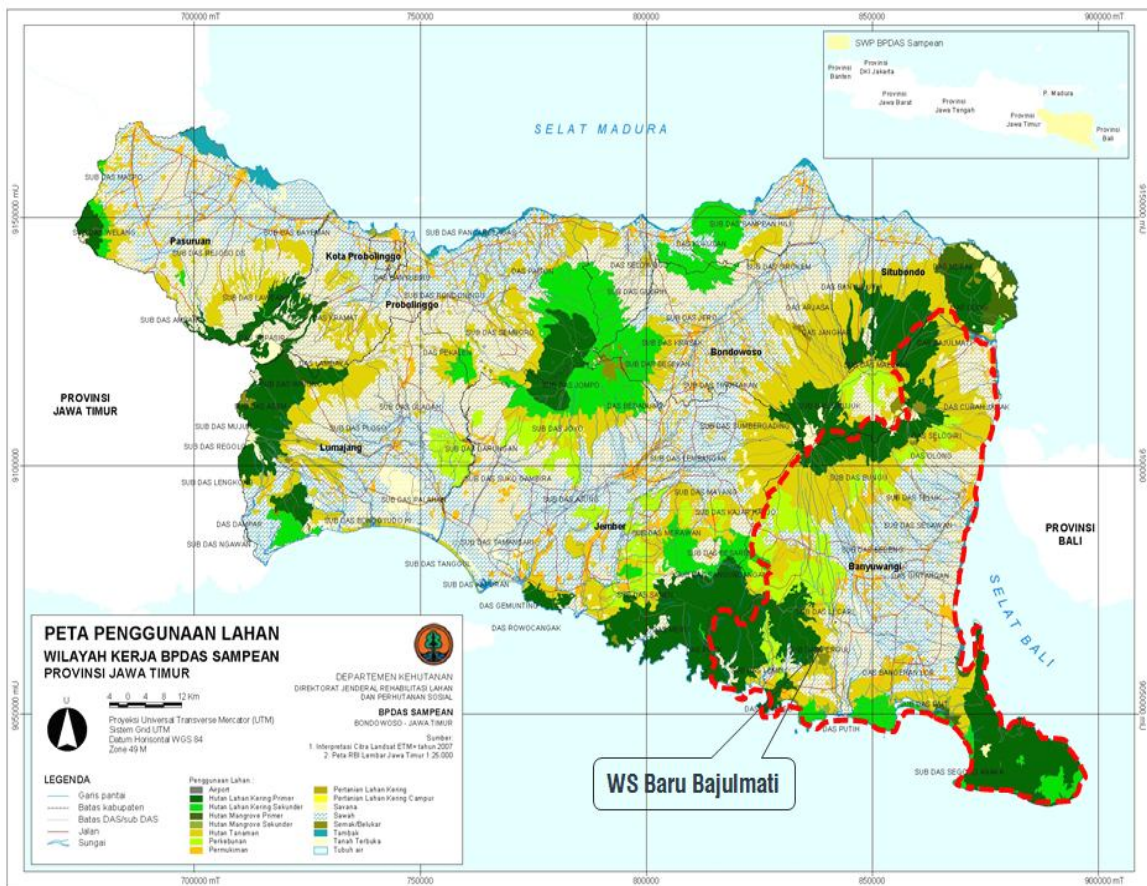
Tabel 2.7.
Luas Kabupaten Banyuwangi Menurut Penggunaannya

No	JENIS PENGGUNAAN LAHAN	LUAS	
		Km2	%
1.	HUTAN	1.834,21	31,72
2.	SAWAH	661,52	11,44
3.	LADANG	161,91	2,8
4.	PERKEBUNAN	821,69	14,21
5.	PERMUKIMAN	1.274,46	22,04
6.	TAMBAK	17,93	0,31
7.	LAIN-LAIN	1.010,78	17,48
	JUMLAH	5.782,50	100

Sumber : Banyuwangi Dalam Angka, 2011



Gambar 2.6.
Grafik Prosentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Banyuwangi



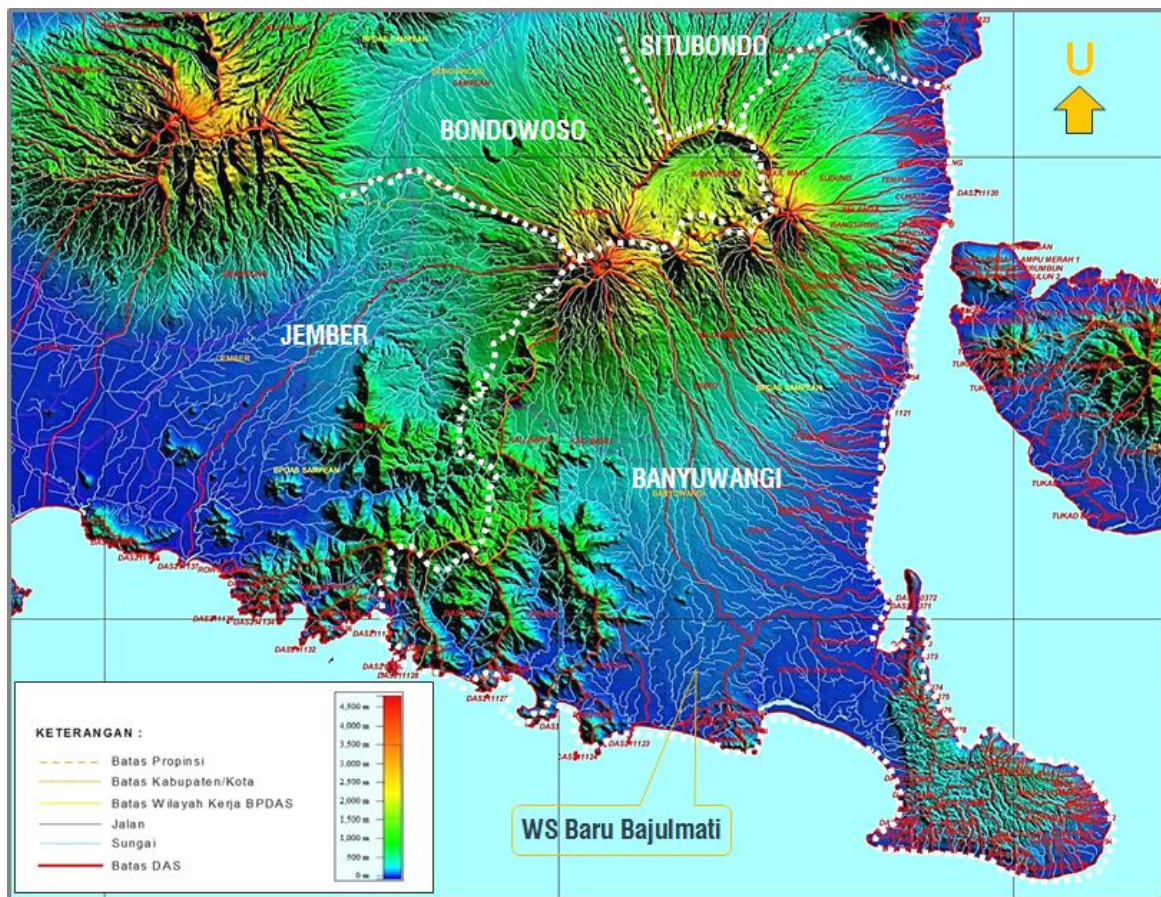
Gambar 2.7.
Peta Tata Guna Lahan WS Baru Bajulmati

2.3.1.7. Digital Elevation Model (DEM)

WS Baru Bajulmati memiliki kondisi topografi agak bergelombang dan memiliki kemiringan topografi yang bervariasi, di daerah bagian Selatan, Barat dan Utara merupakan daerah pegunungan, sehingga daerah ini mempunyai tingkat kemiringan tanah dengan rata-rata mencapai 40%.

Daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng 0 – 3 % merupakan daerah datar / landai berada di wilayah pesisir / pantai. Sedangkan daerah dataran tinggi yang memiliki kemiringan lereng sedang dan curam (> 30%) merupakan daerah upland. Daerah pantai meliputi Kecamatan Wongsorejo, Giri, Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharjo, Pesanggaran.

Seperti yang terlihat pada gambar peta Digital Elevation Model (DEM), bahwasanya WS Baru Bajulmati bagian hulu dibatasi oleh beberapa puncak gunung yakni Gunung Raung dan Gunung Ijen. Periksa **Gambar 2.8.**



Gambar 2.8.
Peta Digital Elevation Model (DEM) WS Baru Bajulmati

2.3.1.8. Laporan Hasil Studi Terdahulu

Laporan hasil studi terdahulu yang dijadikan referensi untuk menyusun Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati, antara lain :

1. SID Waduk Singolatri, Lider, Kedawang, Bappeda Kabupaten Banyuwangi, Th. 2004
2. Perencanaan Penatagunaan Sumber Daya Air Pada Das Bomo Wilayah Sungai Baru – Bajulmati, Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim, Th. 2008
3. Uraian Singkat Tentang Sistem Penyediaan Air Irigasi Antar Wilayah Tata Air (System Supply Interbasin) Pada Wilayah Sungai Baru – Bajulmati, Dinas PU Pengairan Provinsi Jatim, Th. 2008.
4. Studi Analisa Perhitungan Neraca Air Jawa Timur, Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur, Th. 2010.
5. Studi Inventarisasi Potensi Air Tanah Wilayah Kerja BBWS Brantas Provinsi Jawa Timur, Satker BBWS Brantas, Th. 2010.
6. Penyusunan Neraca Air Di Kabupaten Banyuwangi, Bappeda Kabupaten Banyuwangi, Th. 2011.

2.3.2. Data Sumber Daya Air

2.3.2.1. Data Iklim dan Hidroklimatologi

Data curah hujan yang dipakai dalam studi ini berasal dari pengukuran dan pencatatan beberapa stasiun penakar hujan yang tersebar di WS Baru Bajulmati. Dari hasil pencatatan hujan selama 14 tahun terakhir (tahun 1995 sampai dengan 2008) pada 2(dua) wilayah administrasi Kabupaten pada WS Baru Bajulmati dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8.
Data Curah Hujan Rerata Tahunan WS Baru Bajulmati

Tahun	Wilayah Administrasi	
	Kabupaten	
	Bondowoso	Banyuwangi
1995	1.972	2.086
1996	751	1.603
1997	751	1.257
1998	1.648	2.763
1999	1.942	2.071
2000	1.986	2.045
2001	1.743	1.837
2002	1.612	1.464
2003	1.384	1.743
2004	974	1.027
2005	1.463	1.560
2006	1.551	1.627
2007	1.670	1.714
2008	1.886	1.850
JUMLAH	21.333	24.647
RERATA	1.524	1.761
MAKSIMUM	1.986	2.763
MINIMUM	751	1.027

Sumber : Pengairan Dalam Angka

Data klimatologi meliputi data kelembaban udara, kecepatan angin, lama penyinaran sinar matahari, suhu, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya data klimatologi pada WS Baru Bajulmati dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9.
Data Klimatologi Pada WS Baru Bajulmati

Bulan	Data Klimatologi						
	RH	TU	TP	P	K	RM	SM
	(%)	(° C)	(° C)	(mm)	(Km/Jam)	(kal/cm ² /hr)	(%)
Januari	64,45	23,27	-	3,87	0,60	-	66,06
Pebruari	67,00	22,25	-	3,31	0,34	-	50,43
Maret	65,81	22,35	-	2,84	0,30	-	48,14
April	69,97	21,81	-	3,28	0,21	-	53,53
Mei	69,50	21,30	-	4,50	0,20	-	65,50
Juni	68,83	20,44	-	4,42	0,63	-	68,00
Juli	63,30	19,00	-	5,10	0,70	-	74,80
Agustus	56,60	18,10	-	5,20	0,90	-	77,30
September	61,40	21,00	-	6,10	1,50	-	85,20
Oktober	62,50	22,70	-	5,10	1,10	-	76,50
Nopember	62,10	22,80	-	4,32	0,63	-	66,60
Desember	61,87	21,78	-	2,20	-	-	40,50
JUMLAH	773,33	256,80	-	50,24	7,11	-	772,56
RERATA	64,44	21,40	-	4,19	0,59	-	64,38
MAKSIMUM	69,97	23,27	-	6,10	1,50	-	85,20
MINIMUM	56,60	18,10	-	2,20	-	-	40,50

Keterangan

- RH = Kelembaban / RH (%)
- TU = Temperatur udara (° C)
- TP = Temperatur air dalam panci (° C)
- P = Penguapan (mm)
- K = Kecepatan Angin (km / jam)
- RM = Radiasi matahari (kal/cm²/hr)
- SM = Sinar matahari (%)
- = Tidak ada data

Dari tabel diatas, dapat dilihat bawah temperatur tertinggi di bulan Januari 23,27°C dan terendah di bulan Agustus 18,10°C, dengan kelembaban 56,6% sampai 69,97%, dengan maksimum terjadi pada bulan April dan minimum pada bulan Agustus. Rata-rata lama penyinaran matahari adalah 64,38%, dimana maksimum pada bulan September sebesar 85,2%, sedangkan minimum pada bulan Desember sebesar 40,50%. Penguapan tertinggi mencapai 6,1 mm yang terjadi di bulan September dan terendah 2,2 mm yang terjadi di bulan Desember. Kecepatan angin tertinggi 1,5 km/jam pada bulan September.

Kondisi iklim didominasi oleh iklim tropis. Pada keadaan normal musim hujan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari bulan Nopember sampai April, dan musim kemarau terjadi antara bulan Mei sampai Oktober.

2.3.2.2. Kondisi Air Permukaan dan Air Tanah

Untuk dapat mensimulasikan WS Baru Bajulmati sebagai suatu sistem tata air, maka disusun skematisasi sistem tata air yang menggambarkan sistem tata air secara hidrologis, lengkap dengan bangunan air dan sarana pembawanya.

Sistem tata air yang ada dalam WS Baru Bajulmati meliputi potensi air baik yang ada di atas permukaan (waduk, embung, sungai dan mata air) maupun air bawah

permukaan dan bangunan prasarana pengairan (baik berupa bendungan, bendung maupun pintu air). Dengan diketahuinya sistem tata air, maka dapat diketahui ketersediaan air di WS Baru Bajulmati.

Berdasarkan data volume ketersediaan air / potensi sumber daya air yang ada di WS Baru Bajulmati sesuai dengan berikut :

Tabel 2.10.
Neraca Sumber Daya Air Permukaan di WS Baru Bajulmati

NO	KABUPATEN	CATCHMENT AREA	AKTIVA	PASIVA			AKTIVA - PASIVA	PEMANFAATAN	
			POTENSI AIR PERMUKAAN	KEBUTUHAN (10^6 m^3)					JUMLAH
			(10^6 m^3)	DOMESTIK	PERTANIAN	INDUSTRI			(10^6 m^3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Banyuwangi	4.612,18	3.836,29	148,45	2.962,34	7,91	3.118,70	717,59	81,29
2	Bondowoso	15,13	15,54	0,81	1,20	-	2,01	13,53	12,93
	JUMLAH	4.627,31	3.851,83	149,26	2.963,54	7,91	3.120,71	731,12	81,02

Sumber : Pengairan Dalam Angka

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa penggunaan / pemanfaatan potensi air permukaan yaitu $3.120,71 \times 10^6 \text{ m}^3$ atau 81,02% dari potensi yang tersedia yaitu $3.851,31 \times 10^6 \text{ m}^3$ atau dapat dikatakan neraca air permukaan pada WS Baru Bajulmati masih surplus $731,12 \times 10^6 \text{ m}^3$. Neraca potensi sumber daya air tanah WS Baru Bajulmatidisajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.11.
Neraca Sumber Daya Air Tanah di WS Baru Bajulmati

NO	KABUPATEN	CATHMENT AREA	AKTIVA	PASIVA			AKTIVA - PASIVA	PEMANFAATAN	
			POTENSI AIR TANAH	KEBUTUHAN (10^6 m^3)					JUMLAH
			(10^6 m^3)	DOMESTIK	PERTANIAN	INDUSTRI			(10^6 m^3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Banyuwangi	4.612,18	885,30	93,53	0,18	-	93,71	791,59	10,59
2	Bondowoso	15,13	3,59	-	-	-	-	3,59	-
	JUMLAH	4.627,31	888,89	93,53	0,18	-	93,71	795,18	10,54

Sumber : Pengairan Dalam Angka

Dari tabel diatas, untuk neraca air tanah dapat diketahui bahwa penggunaan / pemanfaatan potensi air tanah masih sangat rendah yaitu $93,71 \times 10^6 \text{ m}^3$ atau 10,54% dari potensi yang tersedia yaitu $888,89 \times 10^6 \text{ m}^3$ atau dapat dikatakan neraca air tanah pada WS Baru Bajulmati masih surplus $795,18 \times 10^6 \text{ m}^3$.

Adapun potensi sumber-sumber air di WS Baru Bajulamati disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.12.

Sumber-sumber Air di Kabupaten Banyuwangi

NO	NAMA SUMBER AIR	LOKASI		KAPASITAS Liter/dt (Estimasi)	PEMANFAATAN		KET.
		DESA	KECAMATAN		IRIGASI (Ha)	LAIN-LAIN	
I. CABANG DINAS BANYUWANGI							
1	Jajar	Karangrejo	Banyuwangi	49,00	0,00		
2	Jainudin	Karangrejo	Banyuwangi	49,00	0,00		
3	Klepi	Karangrejo	Banyuwangi	49,00	0,00		
4	Madinah	Lateng	Banyuwangi	15,00	1,00		
5	Klampok	Penganjuran	Banyuwangi	15,00	7,00		
6	Pring I, II	Sobo	Banyuwangi	16,00	8,00		
7	Lompot	Sobo	Banyuwangi	9,00	6,00		
8	Manggis a	Sobo	Banyuwangi	22,50	13,00		
9	Malang	Sobo	Banyuwangi	0,00	0,00		
10	Mojosari	Sobo	Banyuwangi	0,00	0,00		
11	Watubuncul	Boyolangu	Giri	12,50	0,00		
12	Wongso	Grogol	Giri	15,00	1,00		
13	Awal	Grogol	Giri	32,50	7,00		
14	Peting	Grogol	Giri	55,00	7,00		
15	Benelancer	Grogol	Giri	65,00	30,00		
16	Temon	Grogol	Giri	63,00	54,00		
17	Patimah	Jambesari	Giri	100,00	13,00		
18	Tumbu	Jambesari	Giri	113,00	64,00		
19	Setrogading	Bakungan	Glagah	24,00	16,00		
20	Lalangan	Bakungan	Glagah	15,00	20,00		
21	Kalong	Bakungan	Glagah	30,00	20,00		
22	Sawo	Bakungan	Glagah	184,50	123,00		
23	Cangkring	Banjarsari	Glagah	20,00	0,00		
24	Gunungsari	Banjarsari	Glagah	3,00	0,00		
25	Ancarrupi	Kampunganyar	Glagah	125,00	45,00		
26	Clakel	Kampunganyar	Glagah	14,00	16,00		
27	Salak	Kampunganyar	Glagah	60,00	0,00		
28	Bendo	Kampunganyar	Glagah	40,00	0,00		
29	Kampunganyar	Kampunganyar	Glagah	10,00	6,00		
30	Kemiri	Kemiren	Glagah	35,00	0,00		
31	Olehsari	Olehsari	Glagah	13,00	0,00		
32	Jainudin	Olehsari	Glagah	23,00	0,00		
33	Pamon	Tamansuruh	Glagah	225,00	33,00		
34	Cempo	Tamansuruh	Glagah	75,00	19,00		
35	Umbul	Tamansuruh	Glagah	15,00	0,00		
36	Jagir	Tamansuruh	Glagah	5,00	5,00		
37	Umbyulsari	Tamansuruh	Glagah	53,00	30,00		
38	Menggolo	Tamansuruh	Glagah	7,00	9,00		
39	Tutul	Tamansuruh	Glagah	22,00	13,00		
40	Rejo	Tamansuruh	Glagah	15,00	0,00		
41	Kajar	Tamansuruh	Glagah	45,00	0,00		
42	Mengarang	Tamansuruh	Glagah	188,00	106,00		
43	Umbul	Tamansuruh	Glagah	8,00	0,00		
44	Dul Majid	Kalipuro	Kalipuro	30,00	4,00		
45	Pakem	Kalipuro	Kalipuro	10,00	3,00		
46	Putat Lor	Kalipuro	Kalipuro	10,00	2,00		
47	Cacalan III	Kalipuro	Kalipuro	7,50	0,00		
48	Gedor	Kalipuro	Kalipuro	115,00	0,00		
49	Buluh	Kelir	Kalipuro	42,50	18,00		
50	Rejeng	Kelir	Kalipuro	105,00	64,00		
51	Tretes	Kelir	Kalipuro	30,00	12,00		
52	Bendo	Ketapang	Kalipuro	12,00	0,00		
53	Kajar	Ketapang	Kalipuro	50,00	30,00		

NO	NAMA SUMBER AIR	LOKASI		KAPASITAS Liter/dt (Estimasi)	PEMANFAATAN		KET.
		DESA	KECAMATAN		IRIGASI (Ha)	LAIN- LAIN	
54	Panawar	Ketapang	Kalipuro	50,00	30,00		
55	Dilem	Ketapang	Kalipuro	7,00	0,00		
56	Daryun	Ketapang	Kalipuro	9,50	0,00		
57	Bulusan	Klatak	Kalipuro	19,00	0,00		
58	Paliran	Klatak	Kalipuro	10,50	0,00		
59	Solong	Klatak	Kalipuro	10,50	0,00		
60	Cacalan I	Klatak	Kalipuro	10,50	0,00		
61	Cacalan II	Klatak	Kalipuro	10,50	0,00		
62	Pakem	Pesucen	Kalipuro	25,00	0,00		
63	Melalu	Pesucen	Kalipuro	40,00	11,00		
64	Trowongan	Pesucen	Kalipuro	175,00	80,00		
65	Mailang	Pesucen	Kalipuro	60,00	15,00		
66	Laos	Pesucen	Kalipuro	62,50	9,00		
67	Gludak	Pesucen	Kalipuro	50,00	29,00		
68	Dompyong a	Pesucen	Kalipuro	50,00	0,00		
69	Jembangan	Alasbuluh	Wongsorejo	12,00	0,00		
70	Alasbuluh	Wongsorejo	Wongsorejo	60,00	83,00		
71	Kajar	Wongsorejo	Wongsorejo	60,00	83,00		
72	Karto	Wongsorejo	Wongsorejo	4,00	0,00		
73	Ui Cin Kui	Wongsorejo	Wongsorejo	4,00	0,00		
74	Gempol	Wongsorejo	Wongsorejo	4,00	0,00		
74	<i>JUMLAH</i>	<i>20</i>	<i>5</i>	<i>3.081,00</i>	<i>1.145,00</i>		
II. CABANG DINAS WONGSOREJO							
75	H. Usman	Bajulmati	Wongsorejo	28,00	30,00		
76	Badulan 1	Bajulmati	Wongsorejo	22,00	30,00		
77	Kajar III	Bajulmati	Wongsorejo	20,00	20,00		
78	Makari	Sidodadi	Wongsorejo	37,00	50,00		
79	Sodong	Wongsorejo	Wongsorejo	105,00	148,00		
80	Sonosari/Maidin	Watukebo	Wongsorejo	14,00	40,00		
81	Bedah	Watukebo	Wongsorejo	138,00	116,00		
82	Makari	Sidodadi	Wongsorejo	14,00	16,00		
83	Gempol	Sumber Kencono	Wongsorejo	26,00	25,00		
84	Kencono	Sumber Kencono	Wongsorejo	49,00	48,00		
85	Dampit	Sumber Kencono	Wongsorejo	44,00	37,00		
86	Sodong	Wongsorejo	Wongsorejo	110,00	148,00		
87	Widorolorong	Wongsorejo	Wongsorejo	30,00	60,00		
88	Patemon	Alasbuluh	Wongsorejo	16,00	22,00		
89	Kajar	Alasbuluh	Wongsorejo	38,00	48,00		
15	<i>JUMLAH</i>	<i>6</i>	<i>1</i>	<i>691,00</i>	<i>838,00</i>		
III. CABANG DINAS DADAPAN							
90	Marsam	Pakis	Banyuwangi	64,00	30,00		
91	Dari	Pakis	Banyuwangi	50,50	20,00		
92	Jaidin	Bakungan	Glagah	2,50	0,00		
93	Muncar	Bakungan	Glagah	1,50	0,00		
94	Gumuk	Banjar	Glagah	29,00	0,00		
95	Salak	Banjar	Glagah	13,00	0,00		
96	Pancoran	Banjarsari	Glagah	14,50	12,00		
97	Kalianyar	Gumuk	Glagah	61,00	41,00		
98	Jelun	Jelun	Glagah	20,50	0,00		
99	Kedawung	Jelun	Glagah	35,50	16,00		
100	Megoarum	Kluncing	Glagah	38,00	23,00		
101	Dandi	Kluncing	Glagah	43,00	25,00		
102	Sastro	Licin	Glagah	15,00	10,00		

NO	NAMA SUMBER AIR	LOKASI		KAPASITAS Liter/dt (Estimasi)	PEMANFAATAN		KET.
		DESA	KECAMATAN		IRIGASI (Ha)	LAIN- LAIN	
103	Asnapun	Licin	Glagah	15,00	10,00		
104	Pring	Licin	Glagah	30,00	20,00		
105	Waginah	Licin	Glagah	15,00	8,00		
106	Pakem	Licin	Glagah	22,50	179,00		
107	Bodos	Oleh Sari	Glagah	3,00	0,00		
108	Semalang	Oleh Sari	Glagah	6,00	0,00		
109	Gebus	Paspan	Glagah	1,00	0,00		
110	Watu Ulo	Rejosari	Glagah	62,50	45,00		
111	Urip I	Segobang	Glagah	105,00	42,00		
112	Urip II	Segobang	Glagah	101,00	35,00		
113	Lengen	Segobang	Glagah	46,50	21,00		
114	Watu	Tamansari	Glagah	101,50	62,00		
115	Sruni	Tamansari	Glagah	30,00	14,00		
116	Laos	Tamansari	Glagah	33,50	16,00		
117	Petang	Tamansari	Glagah	11,50	7,00		
118	Plampang Enceng	Tamansari	Glagah	254,00	196,00		
119	Dadang	Bunder	Kabat	39,50	0,00		
120	Kajar	Bunder	Kabat	42,00	0,00		
121	Gunung Wongko I	Bunder	Kabat	7,00	7,00		
122	Gunung Wongko II	Bunder	Kabat	4,50	3,00		
123	Seguling a	Bunder	Kabat	21,50	14,00		
124	Atimah	Dadapan	Kabat	20,50	0,00		
125	Bojil	Dadapan	Kabat	22,50	0,00		
126	Pal	Kabat	Kabat	6,00	0,00		
127	Tublek	Kalirejo	Kabat	10,50	2,00		
128	Sur I	Kalirejo	Kabat	95,00	68,00		
129	Sur II	Kalirejo	Kabat	81,00	54,00		
130	Kalong	Kalirejo	Kabat	8,00	0,00		
131	Mailang	Kedayunan	Kabat	42,50	24,00		
132	Bendo	Kedayunan	Kabat	41,00	28,00		
133	Dipo	Kedayunan	Kabat	45,00	25,00		
134	Citrowati	Macan Putih	Kabat	68,00	42,00		
135	Kedawung	Pdk Nongko	Kabat	74,50	56,00		
136	Seguling	Pdk Nongko	Kabat	12,00	3,00		
47	JUMLAH	19	3	1.867,00	1.158,00		
IV. CABANG DINAS ROGOJAMPI							
137	Koco	Pakel	Glagah	7,50			
138	Sruni a	Bunder	Kabat	17,00	14,00		
139	Petang a	Bunder	Kabat	7,00	7,00		
140	Klerek	Bunder	Kabat	4,50	3,00		
141	Blimbingsari I	Bunder	Kabat	75,50	58,00		
142	Blimbingsari II	Bunder	Kabat	16,50	11,00		
143	Blimbingsari III	Bunder	Kabat	10,00	7,00		
144	Umbul	Bunder	Kabat	15,50	0,00		
145	Bendo	Bunder	Kabat	20,00			
146	Dandi a	Gombolirang	Kabat	23,00	25,00		
147	Umbul a	Gombolirang	Kabat	13,50	0,00		
148	Kencuran	Gombolirang	Kabat	9,50	0,00		
149	Palu Kuning	Gombolirang	Kabat	20,50	0,00		
150	Watu Ulo a	Gombolirang	Kabat	33,00	44,00		
151	Dipo a	Gombolirang	Kabat	31,00			
152	Ilek - ilek	Gombolirang	Kabat	17,50			
153	Daim	Macan Putih	Kabat	5,00	20,00		
154	Beki	Malar	Kabat	10,00	6,00		

NO	NAMA SUMBER AIR	LOKASI		KAPASITAS Liter/dt (Estimasi)	PEMANFAATAN		KET.
		DESA	KECAMATAN		IRIGASI (Ha)	LAIN- LAIN	
155	Pakem	Malar	Kabat	9,50	7,00		
156	Randu	Malar	Kabat	5,00	0,00		
157	Lebuh	Malar	Kabat	6,55	3,00		
158	Kuran	Malar	Kabat	3,00	5,00		
159	Bendo	Malar	Kabat	9,00	4,00		
160	Kepundung	Pakistaji	Kabat	15,00	0,00		
161	Blambangan	Pakistaji	Kabat	100,00			
162	Penawar	Sukojati	Kabat	17,50	0,00		
163	Kedondong	Sukojati	Kabat	15,00	0,00		
164	Songgon I	Sukojati	Kabat	75,00	8,00		
165	Songgon II	Sukojati	Kabat	35,00	8,00		
166	Ori	Blimbingsari	Rogojampi	111,00	66,00		
167	Blibis	Blimbingsari	Rogojampi	54,50			
168	Sebani	Bomo	Rogojampi	21,50	20,00		
169	Beji	Bomo	Rogojampi	106,50	30,00		
170	Gumuk	Gitik	Rogojampi	3,50	0,00		
171	Bendo	Gitik	Rogojampi	17,50	0,00		
172	Rempelas	Gitik	Rogojampi	5,00	0,00		
173	Margo	Gitik	Rogojampi	2,50	0,00		
174	Ijah	Gitik	Rogojampi	5,00	0,00		
175	Umbul	Gitik	Rogojampi	5,00	0,00		
176	Gemuling	Gitik	Rogojampi	2,50	0,00		
177	Sukadi	Gitik	Rogojampi	2,50	0,00		
178	Pancoran	Karang Bendo	Rogojampi	130,00	70,00		
179	Kepundung	Karang Bendo	Rogojampi	12,50	0,00		
180	Poh	Karang Bendo	Rogojampi	25,00	0,00		
181	Karang Bendo	Karang Bendo	Rogojampi	225,00			
182	Cekaitan	Karang Bendo	Rogojampi	60,00	36,00		
183	Glutuk	Kedaleman	Rogojampi	52,50	0,00		
184	Glodong	Watu Kebo	Rogojampi	28,50	6,00		
185	Rowo	Cantuk	Singojuruh	195,00	138,00		
186	Sroyo	Balak	Songgon	103,00	23,00		
187	Sroyo Bawah	Balak	Songgon	45,00	0,00		
188	Bulutarung	Balak	Songgon	23,50	0,00		
189	Lungun	Balak	Songgon	222,00	0,00		
190	Sewu	Balak	Songgon	55,00			
191	Antengan Lanang	Balak	Songgon	27,50	0,00		
192	Bendo Kali Wader	Balak	Songgon	25,50	0,00		
193	Mailang	Balak	Songgon	25,00	6,00		
194	Bendo	Balak	Songgon	22,00	0,00		
195	Penawar	Balak	Songgon	17,50	0,00		
196	Benel	Balak	Songgon	13,50	0,00		
197	Buluketigo	Songgon	Songgon	50,00	0,00		
198	Wongso	Songgon	Songgon	13,50	0,00		
199	Tunglah	Songgon	Songgon	34,50	23,00		
200	Seladahan	Songgon	Songgon	170,50	39,00		
64	<i>JUMLAH</i>	<i>16</i>	<i>4</i>	<i>2.540,55</i>	<i>687,00</i>		
V. CABANG DINAS SINGOJURUH							
201	Jeruk	Bunder	Kabat	17,00	14,00		
202	Poni	Bendo	Sempu	20,00	0,00		
203	Fucak	Alas Malang	Singojuruh	15,00	0,00		
204	Tukwin	Cantuk	Singojuruh	15,00	0,00		
205	Cluring	Bedewang	Songgon	200,00	744,00		
206	Luk - luk	Bedewang	Songgon	63,00	0,00		
207	Kijing	Bedewang	Songgon	110,00	149,00		

NO	NAMA SUMBER AIR	LOKASI		KAPASITAS Liter/dt (Estimasi)	PEMANFAATAN		KET.
		DESA	KECAMATAN		IRIGASI (Ha)	LAIN- LAIN	
208	Kajar	Parang Harjo	Songgon	137,50	51,00		
209	Rejeng	Parang Harjo	Songgon	350,00	113,00		
210	Jambe	Songgon	Songgon	24,00	0,00		
211	Katok	Songgon	Songgon	30,00	0,00		
212	Abu - abu	Songgon	Songgon	6,00	0,00		
12	<i>JUMLAH</i>	7	4	987,50	1.071,00		
VI. CABANG DINAS CLURING							
213	Sumber Bunut	Sembulung	Cluring	6,00	2,00		
214	H. Busairi	Sraten	Cluring	5,00	10,00		
215	Tawangalun	Sraten	Cluring	2,00	0,00		
216	Sumber Urip	Kradenan	Purwoharjo	5,00	1,00		
4	<i>JUMLAH</i>	3	2	18,00	13,00		
VII. CABANG DINAS BANGOREJO							
217	Sendang Biru	Karangdoro	Gambiran	10,00	0,00		Ke K Baru
1	<i>JUMLAH</i>	1	1	10,00	0,00		
VIII. CABANG DINAS TEGALDLIMO							
218	Sumber Umbul	Grajagan	Tegaldlimo	10,00	0,00		
219	Sumber Kebo	Kedungasri	Purwoharjo	7,00	0,00		
220	Sumber Kucur	Kedungasri	Tegaldlimo	9,00	0,00		
221	Sumber Gedang	Kendal Rejo	Tegaldlimo	13,00	0,00		
222	Sumber Jambe	Wringinpitu	Tegaldlimo	55,00	0,00		
223	Sbr. Gunung Kunci	Tegaldlimo	Tegaldlimo	10,00	0,00		
224	Sumber Pancur	Tegaldlimo	Tegaldlimo	8,00	0,00		
7	<i>JUMLAH</i>	5	3	112,00	0,00		
IX. CABANG DINAS GENTENG							
225	Welut	Tamanagung	Cluring	15,00	7,00		
226	Tutul	Tamanagung	Cluring	5,00	2,00		
227	Rawu	Tamanagung	Cluring	8,00	4,00		
228	Jeding	Jajag	Gambiran	1,00	0,00		
229	Mulyo	Yosomulyo	Gambiran	8,00	4,00		
230	Penawar	Kembiritan	Genteng	12,00	6,00		
231	Lele	Karangsari	Sempu	15,00	8,00		
232	Samat	Karangsari	Sempu	20,00	5,00		
233	Pring	Karangsari	Sempu	4,00	3,00		
234	Buntung	Karangsari	Sempu	9,00	10,00		
235	Sempu	Sempu	Sempu	9,00	3,00		
236	Dipo	Sumbersari	Srono	7,00	5,00		
237	Kamsinah	Sumbersari	Srono	15,00	10,00		
238	Marwoto	Sumbersari	Srono	5,00	3,00		
239	Penganten	Sumbersari	Srono	8,00	4,00		
240	Jeding	Sumbersari	Srono	1,00	0,00		
241	Bang	Sumbersari	Srono	4,00	2,00		
242	Buntung	Sumbersari	Srono	4,00	2,00		
18	<i>JUMLAH</i>	7	5	150,00	78,00		
X. CABANG DINAS GLEMORE							
243	Kluwih	Kaligondo	Genteng	8,00	5,00		
244	Buntung	Kaligondo	Genteng	20,00	7,00		
245	Plus	Setail	Genteng	25,00	15,00		
246	Wadung	Bumiarjo	Glenmore	5,00	5,00		

NO	NAMA SUMBER AIR	LOKASI		KAPASITAS Liter/dt (Estimasi)	PEMANFAATAN		KET.
		DESA	KECAMATAN		IRIGASI (Ha)	LAIN- LAIN	
247	Penang	Bumiarjo	Glenmore	4,00	5,00	PDAM	
248	Kemiri	Bumiarjo	Glenmore	5,00	4,00		
249	Sugihwaras	Bumiarjo	Glenmore	120,00	100,00		
250	Tunjangan	Bumiarjo	Glenmore	7,00	16,00		
251	Ampel	Bumiarjo	Glenmore	70,00	70,00		
252	Sladah	Bumiarjo	Glenmore	15,00	15,00		
253	Gedang	Bumiarjo	Glenmore	4,00	5,00		
254	Ontobogo	Bumiarjo	Glenmore	145,00	52,00		
255	Salam	Bumiarjo	Glenmore	4,00	6,00		
256	Umbulpule	Bumiarjo	Glenmore	250,00	172,00		
257	Sadami	Tegalharjo	Glenmore	4,00	5,00		
258	Arifin	Tegalharjo	Glenmore	67,00	60,00		
259	Ilyas	Tegalharjo	Glenmore	2,00	2,00		
260	Bakar	Tegalharjo	Glenmore	4,00	5,00		
261	Bakir	Tegalharjo	Glenmore	57,00	50,00		
262	Mansur	Tegalharjo	Glenmore	5,00	4,00		
263	Sepanjang	Tegalharjo	Glenmore	5,00	6,00		
264	Petung	Tegalharjo	Glenmore	30,00	25,00		
265	Bendo	Tegalharjo	Glenmore	3,00	4,00		
266	Pucung	Tegalharjo	Glenmore	3,00	4,00		
267	Jambe	Tegalharjo	Glenmore	5,00	6,00		
268	Kempit	Tegalharjo	Glenmore	180,00	294,00		
269	Amah	Kajarharjo	Kalibaru	10,00	6,00		
270	Joyo	Kajarharjo	Kalibaru	6,00	4,00		
271	Parno	Kajarharjo	Kalibaru	2,00	2,00		
272	Muncar	Kajarharjo	Kalibaru	2,00	2,00		
273	Salak	Kajarharjo	Kalibaru	42,00	16,00		
274	Pesangah	Kalibarukulon	Kalibaru	37,00	3,00		
275	Nurhamat	Kalibarukulon	Kalibaru	21,00	5,00		
276	Muasih	Kalibarukulon	Kalibaru	19,00	5,00		
277	Tangis	Kalibarukulon	Kalibaru	32,00	30,00		
278	Umbul Wucur	Kalibarukulon	Kalibaru	62,00	18,00		
279	Terong I	Kalibarukulon	Kalibaru	4,00	6,00		
280	Terong II	Kalibarukulon	Kalibaru	3,00	2,00		
281	Karsono	Kalibarukulon	Kalibaru	6,00	8,00		
282	Senaya	Kalibarukulon	Kalibaru	3,00	2,00		
283	Petung	Kalibarumanis	Kalibaru	4,00	2,00		
284	Mrico	Kalibarumanis	Kalibaru	7,00	4,00		
285	Katiah	Kalibarumanis	Kalibaru	10,00	5,00		
286	Jepang	Kalibarumanis	Kalibaru	5,00	2,00		
287	Minang	Kalibarumanis	Kalibaru	4,00	4,00		
288	Tempe	Kalibarumanis	Kalibaru	9,00	3,00		
289	Tutup	Kalibarumanis	Kalibaru	5,00	2,00		
290	Tolu	Kalibarumanis	Kalibaru	7,00	3,00		
291	Kamin	Kalibarumanis	Kalibaru	1,00	1,00		
292	Maningrum	Kalibaruwetan	Kalibaru	4,00	3,00		
293	Kadis	Kalibaruwetan	Kalibaru	3,00	2,00		
294	Artawi	Kalibaruwetan	Kalibaru	12,00	10,00		
295	Yahya	Kalibaruwetan	Kalibaru	10,00	5,00		
296	Sidomulyo I	Jambewangi	Sempu	51,00	0,00		
297	Sidomulyo II	Jambewangi	Sempu	62,00	32,00		
298	Manggis	Jambewangi	Sempu	150,00	0,00		
299	Temon	Jambewangi	Sempu	90,00	0,00		
300	Kasan	Jambewangi	Sempu	90,00	9,00		
301	Kembar	Jambewangi	Sempu	50,00	15,00		

NO	NAMA SUMBER AIR	LOKASI		KAPASITAS Liter/dt (Estimasi)	PEMANFAATAN		KET.
		DESA	KECAMATAN		IRIGASI (Ha)	LAIN- LAIN	
302	Umbulsari	Jambewangi	Sempu	41,00	4,00		
60	JUMLAH	8	4	1.911,00	1.157,00		
XI. CABANG DINAS SRONO							
303	Kaulan	Blambangan	Muncar	15,00	3,00		
304	Gempol	Blambangan	Muncar	0,00	0,00		
305	Kopek	Blambangan	Muncar	0,00	0,00		
306	Buntung	Temuguruh	Sempu	5,00	3,00		
307	Kekep	Temuguruh	Sempu	10,00	10,00		
308	Kemesu	Temuguruh	Sempu	12,00	10,00		
309	Bandung	Temuguruh	Sempu	10,00	10,00		
310	Rukayah	Temuguruh	Sempu	6,00	10,00		
311	Dadapan	Temuguruh	Sempu	1,00	1,00		
312	Amat	Temuguruh	Sempu	15,00	10,00		
313	Ulo	Temuguruh	Sempu	4,00	10,00		
314	Kates	Temuguruh	Sempu	10,00	2,00		
315	Sandang	Temuguruh	Sempu	15,00	10,00		
316	Umbul	Temuguruh	Sempu	20,00	5,00		
317	Broto	Bagorejo	Srono	25,00	7,00		
318	Sumbermas	Bagorejo	Srono	7,00	7,00		
319	Bendo	Bagorejo	Srono	20,00	3,00		
320	Kluntung	Bagorejo	Srono	101,00	15,00		
321	Gempol	Bagorejo	Srono	0,00	3,00		
322	Kalimati	Bagorejo	Srono	0,00	5,00		
323	Brahim	Bagorejo	Srono	8,00	4,00		
324	Blumbang	Bagorejo	Srono	8,00	5,00		
325	Gumukjati	Bagorejo	Srono	40,00	15,00		
326	Kepodang	Kebaman	Srono	18,00	35,00		
327	Toyip	Kebaman	Srono	0,00	0,00		
328	Serutu	Kebaman	Srono	0,00	0,00		
329	Penawar	Kebaman	Srono	14,00	8,00		
	Sbr Rahmat	Kebaman	Srono	30,00	12,00		
330	Dinas	Parijatahwetan	Srono	48,00	10,00		
331	Buntung	Sukonatar	Srono	27,00	10,00		
332	Gondosuli	Sukonatar	Srono	62,00	26,00		
333	Sumberwangi	Wonosobo	Srono	110,00	10,00		
31	JUMLAH	7	3	641,00	259,00		
333	TOTAL	99	35	12.009,05	6.406,00		

Sumber : Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi, 2011

2.3.2.3. Erosi dan Sedimentasi

Sudah dipahami bersama bahwa erosi dan sedimentasi merupakan kejadian alami yang tidak mungkin untuk dihindari sama sekali. Hubungan antara keduanya merupakan proses yang berkaitan erat, dimana erosi merupakan sumber awal terangkutnya lapisan tanah dan kemudian diendapkan sebagai sedimen melalui proses sedimentasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya erosi antara lain iklim, topografi, karakteristik tanah, vegetasi penutup tanah, tata guna lahan dan aktifitas manusia. Namun faktor dominan yang mempercepat terjadinya erosi adalah aktifitas manusia yang mengabaikan kaidah-kaidah konservasi.

Di WS Baru Bajulmati, erosi dan sedimentasi merupakan salah satu permasalahan yang dapat mengancam kelestarian fungsi SDA serta keberlangsungan manfaat yang diperoleh dari upaya pengembangan dan pengelolaan SDA yang telah dilaksanakan.

Beberapa isu terkait dengan erosi dan sedimentasi yang terjadi di WS Baru Bajulmati antara lain :

- Kegiatan pembukaan hutan secara ilegal untuk lahan pertanian, permukiman telah memicu terjadinya proses erosi dan sedimentasi. Hal ini berdampak pada berkurangnya kapasitas daya tampung sungai.
- Letusan Gunung Raung dan Gunung Ijen berpotensi mempengaruhi keseimbangan sedimen di WS Baru Bajulmati, menyebabkan terjadinya aggradasi dasar sungai.
- Di banyak lokasi pada ruas tengah sungai – sungai di WS Baru Bajulmati telah terjadi degradasi dasar sungai karena ketidakseimbangan angkutan sedimen yang disebabkan oleh pengaruh *damtrapping* di daerah hulu serta aktifitas penambangan pasir di daerah tengah.

1. Erosi

Perhitungan erosi yang digunakan adalah model USLE (*Universal Soil Loss Equation*) yang dikembangkan oleh Wischmeier dan Smith (1978). Tanah yang terkelupas karena proses erosi akan terbawa oleh aliran air menuju kawasan yang lebih rendah. Besar kecilnya tanah yang terbawa aliran air sangat tergantung pada karakteristik wilayah sungai. Makin rapat penutupan lahan, makin baik sistem konservasi lahan, maka kadar tanah yang terbawa aliran biasanya menjadi makin kecil. Kandungan tanah dalam aliran ini disebut sebagai muatan sedimen. Muatan sedimen dapat dihitung dengan cara mengambil sampel air yang keluar dari suatu wilayah sungai yang disebut sebagai hasil sedimen (*sediment yield*). Perbandingan antara erosi dengan hasil sedimen yang terjadi pada suatu wilayah sungai disebut sebagai *sediment delivery ratio*. Nilai maksimum adalah 1, bila semua tanah yang tererosi terbawa seluruhnya oleh aliran air menuju ke muara.

2. Sedimentasi

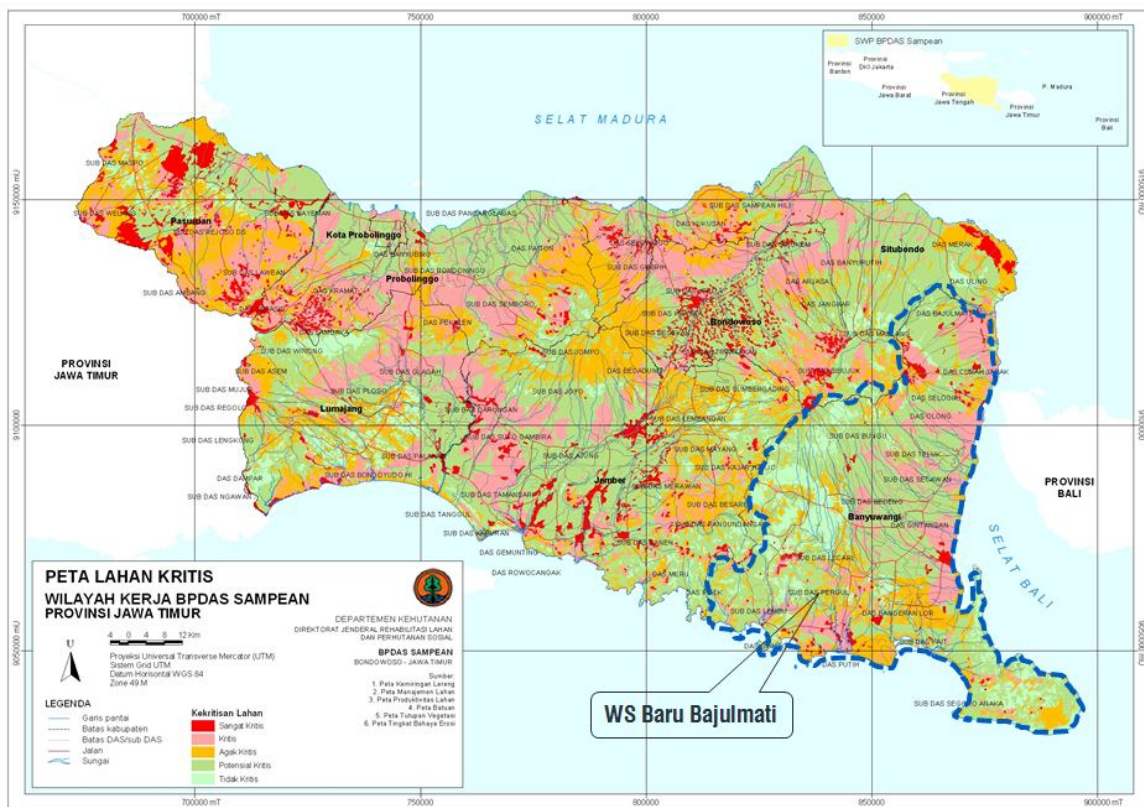
Sedimentasi adalah pengendapan sedimen atau material hasil proses erosi, baik berupa erosi permukaan, erosi parit, atau jenis erosi tanah lainnya. Sedimen umumnya mengendap di bagian bawah kaki bukit, di daerah genangan banjir, di saluran air, sungai, dll.

3. Degradasi Dasar Sungai

Degradasi dasar sungai di WS Baru Bajulmati khususnya di bagian tengah sampai hilir perlu segera diatasi mengingat bahaya yang mengancam keberlanjutan fungsi sarana dan prasarana SDA telah tampak pada saat ini.

Di beberapa lokasi pada ruas sungai yang mengalami degradasi dasar sungai telah terjadi longsor tebing, destabilisasi dan kerusakan bangunan-bangunan seperti pilar jembatan, *intake* pengambilan dan lain-lain, dimana rehabilitasi kerusakan-kerusakan tersebut akan memerlukan biaya yang sangat besar.

Adapun gambaran kondisi lahan kritis di WS Baru Bajulmati disajikan pada **Gambar 2.9.** berikut.



Gambar 2.9.
Peta Lahan Kritis WS Baru Bajulmati

2.3.2.4. Kondisi Muara Sungai

Permasalahan sedimentasi telah terjadi di beberapa muara sungai-sungai besar di WS Baru Bajulmati, antara lain : K. Bajulmati, K. Loo, K. Setail, K. Baru di Kabupaten Banyuwangi. Pada muara sungai tersebut telah terjadi sedimentasi yang mengakibatkan ketidakberaturan bentuk penampang pada muara sungai yang dapat menghambat aliran air banjir. Untuk itu perlu dilakukan normalisasi / perbaikan muara sungai dengan membuat dinding pengarah (*training wall*).

2.3.2.5. Kualitas Air

Dengan berkembangnya kawasan yang dilalui aliran sungai pada WS Baru Bajulmati, mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan air bersih dan air baku. Di samping itu, semakin tingginya konsentrasi penduduk dan industri di daerah

perkotaan menimbulkan masalah antara lain timbulnya daerah kumuh di tepi sungai, menurunnya kualitas air sungai dan bencana banjir akibat terganggunya aliran air, baik karena banyaknya sampah, pendangkalan maupun berkurangnya lebar sungai.

Menurunnya kualitas air juga disebabkan oleh beban pencemar dari limbah industri, domestik dan pertanian. Selain itu, menurunnya kualitas air diakibatkan juga oleh perilaku masyarakat yang menganggap bahwa sungai adalah sebagai tempat pembuangan limbah padat maupun limbah cair.

Sumber pencemar dominan yang mencemari sungai pada WS Baru Bajulmati adalah sebagai berikut :

a. Limbah industri

Di WS Baru Bajulmati terdapat industri – industri yang berpotensi membuang limbahnya yang berpengaruh langsung pada kualitas air sungai. Meskipun telah ditetapkan standar baku mutu buangan limbah industri masih sulit untuk diterapkan karena belum diterapkannya peraturan perijinan pembuangan limbah cair industri dan penegakan hukum yang masih belum efektif.

b. Limbah domestik

Limbah domestik (rumah tangga, hotel, restoran, dan lain-lain) adalah sumber yang paling besar memberikan kontribusi limbah pada WS Baru Bajulmati. Hal ini disebabkan karena masih kuatnya paradigma bahwa sungai adalah sebagai tempat pembuangan dan kurangnya kesadaran masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.

c. Limbah pertanian

Sumber pencemar dari pertanian berasal dari sisa pestisida dan pupuk anorganik dan yang mengalir ke sungai bersama dengan sisa air irigasi. Pencemaran ini umumnya terjadi pada saat musim hujan. Dampak yang terjadi akibat limbah pertanian tersebut adalah terjadinya eutrofikasi perairan akibat tingginya kadar *nutrient* dalam air sehingga menyebabkan pertumbuhan alga semakin tinggi dan terjadi penurunan kualitas air.

1. Permasalahan Dalam Pengendalian Pencemaran

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengendalian pencemaran di WS Baru Bajulmati, antara lain:

a. Sampai saat ini, pengendalian pada sumber pencemar (dengan menggunakan instalasi pengelolaan limbah) hanya dilaksanakan pada limbah industri. Pengendalian limbah domestik belum dilaksanakan, terutama pengendalian sumber pencemar limbah rumah tangga.

Padahal berdasarkan penelitian dan pengamatan, beban pencemaran limbah domestik yang paling dominan masuk sungai.

- b. Penegakan hukum terhadap pencemar masih lemah, karena masih mempertimbangan aspek sosial, ekonomi, termasuk kesempatan kerja dan lain lain.
- c. Banyak industri yang kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)-nya lebih kecil dari limbah yang diproduksi, sehingga buangan limbahnya tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
- d. Pengendalian pencemaran air merupakan masalah yang kompleks, memerlukan dana besar dan waktu panjang serta memerlukan komitmen semua pihak yang berkepentingan, baik Pemerintah Pusat/ Daerah, Pengelola WS maupun dari Pemanfaat Air (industri, domestik, pertanian) serta Masyarakat.
- e. Banyaknya permukiman yang didirikan di daerah sempadan sungai, sehingga banyak sampah dan limbah domestik yang langsung dibuang ke sungai serta akan menyulitkan dalam melakukan pemeliharaan sungai (misalnya pengerukan sedimen).
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan kontrol sosial yang positif (aktif-konstruktif).

2. Pemantauan Kualitas Air di WS Baru Bajulmati

Dalam rangka pengendalian pencemaran, untuk mengatasi masalah penurunan kualitas air di WS Baru Bajulmati, perlu dilakukan pemantauan kualitas air secara berkesinambungan, sehingga dari hasil pemantauan tersebut akan menghasilkan informasi atau gambaran kualitas air sungai WS Baru Bajulmati dan sumber-sumber pencemar secara menyeluruh.

Informasi ini secara rutin dikirimkan kepada instansi terkait untuk mendukung usaha terciptanya kualitas air yang memadai dan penegakan hukum bagi pencemar.

Selain itu data yang dihasilkan diharapkan dapat digunakan untuk :

- Evaluasi pelaksanaan program tahunan Rencana Induk Pengendalian Kualitas Air Sungai.
- Pelaksanaan pemantauan yang dikaitkan dengan penegakan hukum (*law enforcement*) bagi para pencemar.
- Memberikan data yang diperlukan untuk pengendalian pencemaran dalam upaya memperbaiki kualitas air melalui pengenceran.
- Memberikan data untuk penetapan iuran pembiayaan limbah cair.
- Memberikan data untuk pemberian ijin pembuangan limbah cair yang didasarkan pada daya dukung sungai dalam menerima limbah sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Adapun lokasi pemantauan kualitas air di wilayah kerja Balai UPT PSAWS Sampean Baru di Bondowoso adalah sebagai berikut :

Tabel 2.13.
Lokasi Pemantauan Kualitas Air

NO	KODE	LOKASI	SUNGAI	DAS	DATA
1	KBR. 1	Kecamatan Glenmore	K. Baru	Baru	Tercatat
2	KBR. 2	Kecamatan Gambiran	K. Baru	Baru	Tercatat

Sumber : UPT PSAWS Sampean Baru

2.3.3. Data Kebutuhan Air

Air sungai di WS Baru Bajulmati dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan antara lain untuk irigasi, air baku untuk air minum dan industri, pembangkit tenaga listrik, perikanan, penggelontoran dan pariwisata. Kebutuhan air tersebut erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan industri dan perubahan pola tanam serta jenis tanaman (irigasi).

2.3.3.1. Kebutuhan Air Domestik, Non Domestik dan Industri

Kebutuhan air domestik dan non domestik di WS Baru Bajulmati sebagian besar dilayani oleh PDAM dan sumber-sumber lain. Sedangkan kebutuhan air industri dialokasikan dari sungai-sungai yang mengalir di WS Baru Bajulmati. Untuk kebutuhan air domestik dan non domestik yang dipenuhi oleh PDAM tergantung dari jumlah penduduk. Berdasarkan Laporan Penyusunan Neraca Air di Kabupaten Banyuwangi, tahun 2011, kebutuhan air untuk air domestik, non domestik dan Industridisajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.14.
Data Kebutuhan Air Untuk RKI WS Baru Bajulmati

No	Kabupaten	Kebutuhan Air Untuk	
		Domestik & Non Domestik (10 ⁶ m ³ /th)	Industri (10 ⁶ m ³ /th)
1	Banyuwangi	53,07	11,50

Sumber : Laporan Penyusunan Neraca Air di Kabupaten Banyuwangi, 2011

2.3.3.2. Kebutuhan Air Peternakan dan Perikanan

Berdasarkan Laporan Penyusunan Neraca Air di Kabupaten Banyuwangi, tahun 2011, kebutuhan air untuk Peternakan dan Perikanan di WS Baru Bajulmati disajikan pada tabelberikut.

Tabel 2.15. Data Kebutuhan Air untuk Peternakan & Perikanan
WS Baru Bajulmati

No	Kabupaten	Kebutuhan Air Untuk	
		Peternakan (10 ⁶ m ³ /th)	Perikanan (10 ⁶ m ³ /th)
1	Banyuwangi	2,96	270,57

Sumber : Laporan Penyusunan Neraca Air di Kabupaten Banyuwangi, 2011

2.3.3.3. Kebutuhan Air Irigasi

Kebutuhan air irigasi di WS Baru Bajulmati dialokasikan untuk pemenuhan daerah irigasi yang ada. Berdasarkan Laporan Penyusunan Neraca Air di Kabupaten Banyuwangi, Tahun 2011, Kebutuhan air untuk Irigasi di WS Baru Bajulmati disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16. Data Kebutuhan Air untuk Irigasi WS Baru Bajulmati

No	Kabupaten	Kebutuhan Air Untuk Irigasi (10 ⁶ m ³ /th)
1	Banyuwangi	2.732,98

Sumber : Laporan Penyusunan Neraca Air di Kabupaten Banyuwangi, 2011

2.4. Identifikasi Kondisi Lingkungan dan Permasalahan

2.4.1. Aspek Konservasi Sumber Daya Air

Permasalahan yang terjadi pada aspek Konservasi Sumber Daya Air di WS Baru Bajulmati yang dapat mengancam kelestarian fungsi SDA serta keberlangsungan manfaat yang diperoleh dari upaya pengembangan pengelolaan SDA adalah :

- Terjadinya degradasi kondisi DAS yang ada di WS Baru Bajulmati.
- Penebangan hutan secara liar / tidak terkendali serta adanya perambahan hutan.
- Kerusakan kondisi kawasan resapan air akibat semakin banyaknya lahan terbuka.
- Erosi lahan pada DAS dan sedimentasi pada sungai mengancam kelestarian fungsi SDA.
- Di bagian tengah dan hulu sungai di WS Baru Bajulmati terjadi degradasi dasar sungai karena ketidakseimbangan angkutan sedimen seperti yang terjadi pada K. Baru, K. Loo, K. Tambong.
- Di wilayah pesisir bagian hilir dari wilayah DAS terjadi intrusi air laut akibat tidak terkendalinya pengambilan air tanah melalui sumur-sumur bor seperti di daerah Pelabuhan Tanjungwangi dan Ketapang.
- Penurunan kualitas air baik air permukaan maupun air tanah.
- Perlindungan sumber air dan mata air belum optimal sehingga debit mata air yang ada cenderung menurun.
- Terjadi pelanggaran di dalam batas sempadan/bantaran sungai dengan berdirinya bangunan-bangunan permukiman penduduk. Seperti Bangunan liar permanen di tepi saluran / kanal kecamatan Tegaldlimo, Siliragung, Bangorejo, Pesanggaran.
- Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai batas sempadan sungai, mata air dan batas sempadan pantai akibat kurangnya sosialisasi. Seperti yang

terjadi di saluran primer Waduk Bajulmati dipenuhi oleh bangunan-bangunan masyarakat.

- Lemahnya penegakan hukum terhadap praktek-praktek pelanggaran, seperti penebangan hutan liar, perubahan status kepemilikan lahan di daerah sempadan sungai.
- Rendahnya kesadaran masyarakat dlm memelihara lingkungan dan upaya konservasi lahan & air.
- Adanya program pembangunan PLTP Blawan – Ijen yang diperkirakan kontradiksi dengan program peningkatan status CA – TWA Ijen menjadi Taman Nasional (TN) Ijen.

2.4.2. Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

Permasalahan yang terjadi pada aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air antara lain :

- Kurangnya integrasi antara perencanaan tata ruang wilayah dengan sistem tata kelola air.
- Kurangnya ketersediaan air baik secara kuantitas maupun kualitas terutama pada musim kemarau akibat pengelolaan SDA yang kurang optimal.
- Kurangnya air baku/bersih untuk keperluan RKI dan air untuk irigasi dimusim kemarau.
- Kurangnya integrasi untuk sharing pemakaian air dibagian hulu dan hilir.
- Pemanfaatan air untuk perusahaan yang perijinannya belum tertib, seperti pengambilan air kemasan di Umbul Pule dan pengambilan air untuk tanaman tebu di Desa Saneporejo.
- Banyak bangunan prasarana irigasi seperti bendung, bangunan bagi, pintu-pintu air dan alat ukur yang tidak dapat berfungsi dengan baik.
- Banyak terjadi kehilangan air akibat kebocoran di saluran serta akibat sistem operasional kurang efisien.
- Kurangnya pemberdayaan masyarakat pemakai air (HIPPA / HIPAM) dalam pengelolaan air irigasi dan air minum.

2.4.3. Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

Permasalahan pada aspek Pengendalian Daya Rusak Air antara lain :

- Belum adanya integrasi antara perencanaan tata ruang dan tata kelola air
- Adanya sedimentasi dan tumbuhan liar yang terdapat pada palung sungai dapat mengurangi kapasitas daya tampung sungai, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya banjir.
- Kurangnya bangunan prasarana pengendali banjir seperti : waduk, embung, dll.

- Kurangnya sosialisasi pada masyarakat mengenai cara penanganan, pencegahan dan penanggulangan banjir serta pemulihan terhadap kerusakan akibat bencana banjir.
- Belum diketahui dengan jelas tentang batas zonasi daerah rawan banjir.
- Adanya kegiatan penambangan emas di daerah pantai selatan Banyuwangi yang diperkirakan akan membawa dampak negatif bagi lingkungan.
- Adanya kegiatan pembangunan villa – villa di Kecamatan Licin yang dapat mengurangi resapan air dan menambah besaran run off yang dapat mengakibatkan bertambahnya debit banjir.

2.4.4. Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air antara lain :

- Data dan informasi yang dibutuhkan guna menunjang perencanaan dan pengelolaan SDA kurang memadai.
- Informasi mengenai SDA belum dapat diakses secara luas dan transparan.
- Pengelolaan data informasi mengenai SDA masih kurang maksimal dan belum ditunjang oleh kemampuan SDM yang memadai.
- Keberadaan Stasiun Pengamatan Hidro-klimatologi jumlahnya masih belum memadai, terutama untuk AWLR dan ARR.

2.4.5. Aspek Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

Permasalahan utama pada aspek Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pengelolaan SDA antara lain :

- Dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan SDA, peranserta masyarakat masih kurang dilibatkan.
- Keterbatasan sumber daya manusia yang terdapat pada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan tentang tata cara pengelolaan SDA dan tata kelola Air.
- Keberadaan lembaga masyarakat pengguna air guna menunjang kegiatan pengelolaan SDA masih belum memadai.
- Keberadaan Badan Koordinasi / Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) yang baru dibentuk, belum bisa berperan secara optimal.

2.5. Identifikasi Terhadap Potensi yang Bisa Dikembangkan

2.5.1. Aspek Konservasi Sumber Daya Air

Pada aspek Konservasi Sumber Daya Air, potensi yang bisa dikembangkan di WS Baru Bajulmatiantara lain sebagai berikut :

- Upaya konservasi vegetatif berupa kegiatan reboisasi hutan serta pengembangan agroforestry sesuai kriteria standar yang ditentukan, pada

lokasi kawasan hutan produksi guna memperbaiki kondisi daerah resapan air sekaligus dapat memperoleh hasil produksi yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Program konservasi vegetatif tersebut dapat dikembangkan di kawasan lereng bagian timur Gunung Raung dan Gunung Ijen.

- Upaya konservasi dengan pembangunan sipil teknis berupa embung-embung atau Check Dam (sederhana) yang dibangun pada anak-anak sungai di bagian hulu K. Baru, K. Setail, K. Blambangan, K. Bomo, K. Tambong, guna meningkatkan fungsi daerah resapan dan mengurangi debit banjir pada sungai-sungai tersebut.
- Pembangunan embung / check dam selain berfungsi untuk usaha konservasi SDA juga berfungsi untuk pendayagunaan SDA serta untuk pengendalian daya rusak air. Rencana pembangunan embung / check dam telah dicantumkan dalam RTRW Provinsi maupun draft RTRW Kabupaten Banyuwangi. Periksa **Tabel 2.17.**
- Untuk daerah permukiman padat penduduk, dapat diusulkan pembuatan sumur-sumur resapan air hujan berupa sumur gali maupun sumur bor (Sistem Biopori) guna memelihara potensi dan kedudukan permukaan air tanah.

Tabel2.17.

Rencana Pembangunan Waduk / Embung di WS Baru Bajulmati

RENCANA PENGEMBANGAN WADUK / EMBUNG			RENCANA PENINGKATAN EMBUNG		
NO	NAMA WADUK / EMBUNG	KECAMATAN	NO	NAMA EMBUNG	KECAMATAN
1	Waduk Bajulmati	Wongsorejo	1	Embung Sumber Trowongan	Kalipuro
2	Embung Singolatri	Kalibaru	2	Embung Umbul Pule	Sempu
3	Embung Kedawang	Sempu	3	Embung Sutrisno	Tegaldlimo
4	Embung Lider	Songgon	4	Embung Dasri	Tegalsari
5	Embung Sumber Kajar	Songgon	5	Embung Sumberurip	Purwoharjo
6	Embung Kali Telepak I	Songgon	6	Embung Sumberjambe	Siliragung
7	Embung Kali Telepak II	Songgon			
8	Embung Sumber Rejeng	Songgon			
9	Embung Karangdoro	Tegalsari			
10	Embung Karangmulyo	Tegalsari			
11	Embung Setail I	Gambiran			
12	Embung Setail II	Gambiran			
13	Embung Setail III	Gambiran			
14	Embung Simbar	Purwoharjo			
15	Embung Sidorejo	Purwoharjo			
16	Embung Kalibendo	Glagah			
17	Embung Kalipuro I	Kalipuro			
18	Embung Kalipuro II	Kalipuro			
19	Embung Sumber Mengarang	Kalipuro			
20	Embung Sumberagung I	Srono			
21	Embung Sumberagung II	Srono			
22	Embung Wringinpitu I	Tegaldlimo			
23	Embung Wringinpitu II	Tegaldlimo			
24	Embung Wringinpitu III	Tegaldlimo			

RENCANA PENGEMBANGAN WADUK / EMBUNG		
NO	NAMA EMBUNG	KECAMATAN
1	Waduk Bajulmati	Wongsorejo
2	Embung Singolatri	Kalibaru
3	Embung Kedawang	Sempu
4	Embung Bomo	Rogojampi / Srono
5	Embung Sumber Mengarang	Kalipuro

SUMBER : DRAFT RTRW KABUPATEN BANYUWANGI 2011 - 2031
 DRAFT RTRW KABUPATEN – RTRW PROVINSI
 SUMBER : RTRW PROVINSI JAWA TIMUR 2011 - 2031

2.5.2. Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pada Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air, potensi yang mungkin dapat dikembangkan di WS Baru Bajulmati antara lain :

- Mendukung program Kabupaten Banyuwangi sebagai lumbung padi nasional dengan upaya meningkatkan Intensitas tanaman padi dari rata-rata 125 – 150 % menjadi 200%. Adapun rencana peningkatan IP padi di Kabupaten Banyuwangi disajikan pada **Tabel 2.18**.
- Mengembangkan potensi air tanah yang terdapat pada wilayah CAT Wonorejo dan CAT Banyuwangi yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti di Kecamatan Wongsorejo, Rogojampi, Srono dan Kecamatan Tegaldlimo.
- Pembangunan Waduk Bajulmati, Embung Singolatri, Lider, Kedawang, Dam Bomo, dll sesuai yang telah dicantumkan dalam RTRW Kabupaten Banyuwangidan RTRW Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan ketersediaan air di musim kemarau.
- Meningkatkan kinerja bangunan–bangunan fasilitas SDA yang ada dengan cara meningkatkan kinerja operasional dan pemeliharaan serta merehabilitasi / meng-upgrade fungsi bangunan agar dapat berfungsi secara maksimal.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber – sumber mata air yang ada guna memenuhi kebutuhan air baku / air minum rumah tangga dan industri (RKI) di wilayah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengembangkan sistem eksploitasi pemberian air dengan cara subsidi silang antar wilayah yang ada di wilayah DI Baru, Setail, Blambangan (Sistem Interbasin).
- Rencana pengembangan Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo (BIEW) yang perlu didukung supply air baku dari Waduk Bajulmati dan sumber mata air terdekat.
- Mendukung program agropolitan di Kecamatan Bangorejo dan Minapolitan di Kecamatan Muncar dengan menyiapkan suplai air yang dibutuhkan.
- Adanya program dari BBWS Brantas untuk pengembangan jaringan tata air tambak Tegalpare di sekitar muara K. Setail seluas ±1.000 Ha.
- Waduk Bajulmati juga diprogramkan menjadi obyek wisata (ekowisata) di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo.
- Adanya program investasi penanaman tebu untuk keperluan pabrik gula di Kecamatan Glenmore. Jenis tebu yang akan ditanam adalah jenis tebu khusus yang ditanam dilahan kering dan kebutuhan airnya cukup mengandalkan air hujan, sehingga tidak membutuhkan suplai air irigasi. Rencana lokasi kebun untuk penanaman tebu memanfaatkan lahan perkebunan yang tidak produktif milik PTPN XII seluas ± 5.000 Ha, yang lokasinya tersebar di Kecamatan Glenmore dan Wongsorejo di Kabupaten Banyuwangi dan sebagian berada di wilayah Kabupaten Jember.

Adapun program pengembangan sumber daya air di WS Baru Bajulmati secara garis besar disajikan dalam **Gambar 2.10**.

Tabel 2.18
Rencana Peningkatan Intensitas Tanaman Padi

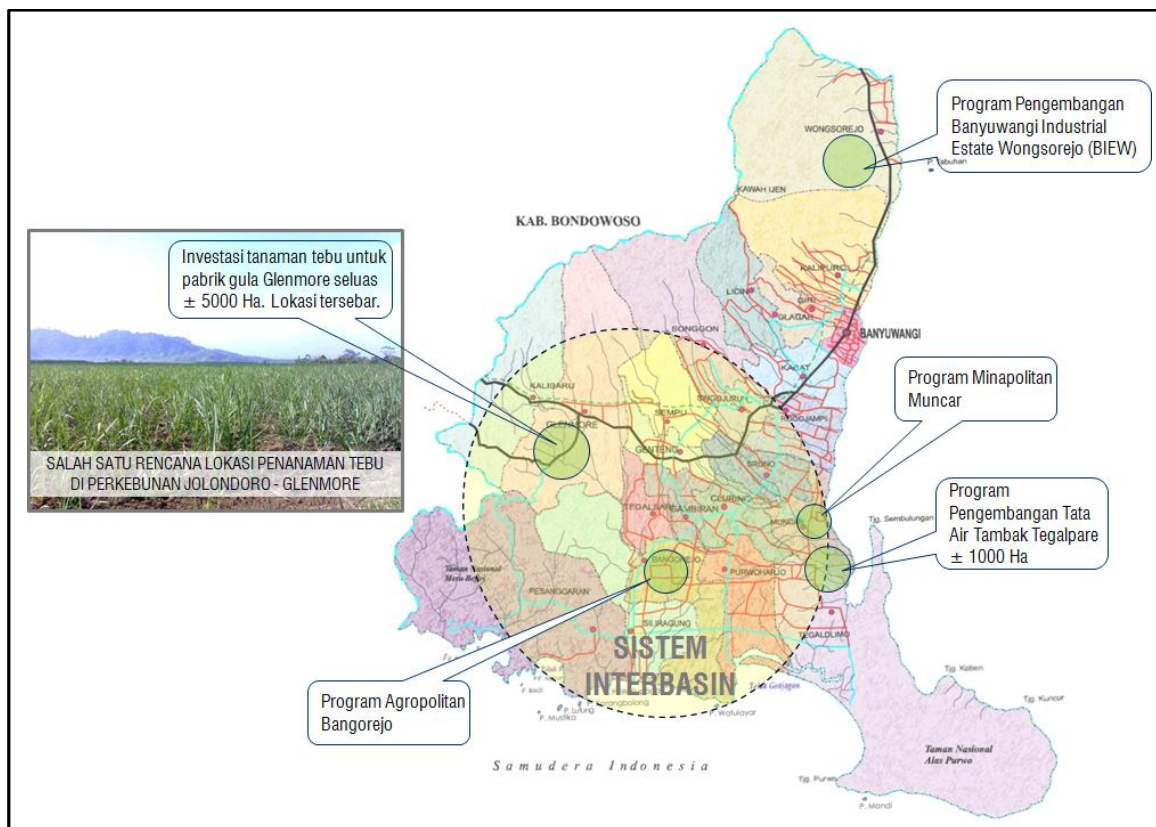
NO.	DAERAH IRIGASI (DI)	LUAS (HA)	IP PADI SAAT INI	IP PADI YANG DIHARAPKAN
1	AGUL - AGUL	150	100	200
2	AMAT	82	100	200
3	AMPELGADING	98	100	200
4	ASTIYAR	354	100	200
5	AWU - AWU	396	100	300
6	BADEAN Ka/Ki	160	100	200
7	BADENG	52	100	200
8	BAGONG Ka/Ki	108	100	200
9	BARU	159	100	200
10	BARUMANIS Ka	54	100	200
11	BARUMANIS Ki	380	100	300
12	BEJONG	228	100	200
13	BLORA	79	100	200
14	BODOS	123	100	200
15	CANGKRING	95	100	200
16	CEMPOGO B	58	100	200
17	CERME	221	100	200
18	CERUNG Ka	63	100	200
19	CERUNG Ki	314	100	200
20	CONCRONG	656	100	200
21	CUNGKRING	60	100	200
22	DADAP	77	100	200
23	DIMAN	68	100	200
24	EDRIS Ka/Ki	87	100	200
25	GANGGANGAN	92	100	200
26	GARIT	475	100	200
27	GENITRI	184	100	200
28	GINTUNGAN Ka/Ki	52	100	200
29	GLENGSERAN	131	100	200
30	GONTORAN	76	100	200
31	GUMUK	85	100	300
32	GUMUK Ka/Ki	182	100	300
33	JABON	69	100	200
34	JAKPAR	89	100	200
35	JALEN 1	192	100	200
36	JALEN 2	161	100	200
37	JAMBEWANGI 1	57	100	200
38	JAMBEWANGI 2	146	100	200
39	JANGKUNG	186	100	200
40	JANTOK	60	100	200
41	JLARUM	135	100	200
42	KEJAR Ka	218	100	200
43	KEJAR Ki	160	100	200
44	KALIWENI	260	100	200
45	KARANGTAMBAK	300	100	200
46	KARIM	77	100	200
47	KAWAT 1	236	100	200
48	KAWAT 2	100	100	200

NO.	DAERAH IRIGASI (DI)	LUAS (HA)	IP PADI SAAT INI	IP PADI YANG DIHARAPKAN
49	KAYANGAN	57	100	200
50	KEDAWANG	148	100	200
51	KEDUNGTUNO	210	100	200
52	KELIR	191	100	200
53	KEMPIT 2	72	100	200
54	KERTOSARI	390	100	200
55	KETEGAN	144	100	200
56	KLAMPOK	265	100	200
57	KLAMPOK	54	100	200
58	KLAMPOK A	93	100	200
59	KLUNCING	68	100	200
60	KOROLINTANG 1	54	100	300
61	KOROLINTANG 2	52	100	300
62	LALANGAN GENITRI	94	100	200
63	LAOS ANCAR	69	100	200
64	LARANGAN	231	100	200
65	LATENG	148	100	200
66	LEBUH	54	100	200
67	LOS	71	100	200
68	MANGGIS	374	100	200
69	MANGGIS	153	100	200
70	MAREM	699	100	200
71	MARWO	64	100	200
72	MLUWO	54	100	200
73	MUSTOFA	62	100	200
74	ONTOBOGO 1	72	100	200
75	ONTOBOGO 2	86	100	200
76	ORI	108	100	200
77	PACEAN	72	100	200
78	PAKEL	65	100	200
79	PAKEL Ka/Ki	543	100	200
80	PAKEM	273	100	200
81	PALIRAN AMAT	109	100	200
82	PANDAN	53	100	200
83	PANGGANGHARJO	309	100	200
84	PARASTEMBOK	167	100	200
85	PAYUNG	140	100	200
86	POLOAN	231	100	200
87	PLONTO	111	100	200
88	PONCOWATI Ka/Ki	513	100	200
89	PUGAG	67	100	200
90	PUTAT GEDANG	59	100	200
91	PUTROJOYO	113	100	200
92	RACEK	304	100	200
93	RANDU AGUNG	55	100	200
94	REJENG	101	100	200
95	REJENG	71	100	200
96	SANIMAN	111	100	200
97	SUMBER DIPO	55	100	200
98	SUMBER GITIK	56	150	200
99	SUMBER KAJAR	157	100	200
100	SUMBER KEMPIT	294	200	200
101	SUMBER MENGARANG	105	150	200
102	SUMBER ORI Ka/Ki	66	150	200
103	SUMBER PANCORAN	70	200	200

NO.	DAERAH IRIGASI (DI)	LUAS (HA)	IP PADI SAAT INI	IP PADI YANG DIHARAPKAN
104	SUMBER PLP. ENCENG	196	150	200
105	SUMBER REJENG	152	150	200
106	SUMBER SAWO	109	200	200
107	SUMBER SODONG	148	150	200
108	SUMBER SUGIHWARAS	100	200	200
109	SUMBER TUMBU	51	150	200
110	SUMBER UMBUL PULE	172	200	200
111	SUMBER WDR. PORONG Ki	57	200	200
112	SEKIDANG	91	150	200
113	SELOREJO 1	111	200	200
114	SEMPOL KEMAPAK	437	200	200
115	SEMPU	300	200	200
116	SEPANJANG 1	129	200	200
117	SEPANJANG 2	63	200	200
118	SIMBAR 2	155	150	200
119	SIMBAR 3	100	150	200
120	SINGOLATRI	139	100	200
121	SRAGI	282	200	200
122	SRONO	115	100	200
123	SROYO	74	100	200
124	STENGKOL	153	100	200
125	SUDIMORO Ka/Ki	232	100	200
126	SUKO	112	100	200
127	SUKO	83	100	200
128	SUKOMUKTI	87	100	200
129	SUKUN II	69	100	200
130	SUMBER BLIMBING 1	58	100	200
131	SUMBER DUKUH	65	100	200
132	SUMBER MAS	72	200	200
133	SUMBERMULYA	92	100	200
134	SUREN	57	150	200
135	SUROPATI	201	100	200
136	TAKIR	191	200	200
137	TAKIR	121	200	200
138	TALANG GANTUNG	139	150	200
139	TALUN BAYUR	185	150	200
140	TALUNJERUK	110	200	200
141	TAMAN KEPUNDUNG	64	200	200
142	TAMAN GLUGO	56	200	200
143	TAMANSARI	171	200	200
144	TANGKUP	116	100	200
145	TELEPAK	543	150	200
146	TELEPAK	231	150	200
147	TELEPON	137	150	200
148	TEMBELANG Ka/Ki	332	150	200
149	TOJO Ka	126	200	200
150	TROWONGAN	79	200	200
151	TUGU Ka/Ki	286	150	200
152	TUGUNG 1	93	150	200
153	TUGUNG 2	98	150	200
154	TUGUNG 3	131	150	200
155	TURUS Ki	144	200	200
156	TURUS Ka	424	200	200
157	TUTUL	146	100	200
158	UMAR	96	200	200

NO.	DAERAH IRIGASI (DI)	LUAS (HA)	IP PADI SAAT INI	IP PADI YANG DIHARAPKAN
159	UNTUNG	70	150	200
160	UNTUNG Ki	74	150	200
161	WARU	213	200	200
162	WONGSO	170	100	200
163	H. USMAN	50	150	200
164	KRUPIK	50	150	200
165	PUTUK	50	200	200
166	SUTI	50	150	200
	RATA - RATA		125	204

Sumber : Dinas PU Pengairan Kab. Banyuwangi, 2012



Gambar 2.10.
Program Pengembangan Sumber Daya Air di WS Baru Bajulmati

2.5.3. Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

Pada aspek Pengendalian Daya Rusak Air, potensi yang mungkin dapat dikembangkan di WS Baru Bajulmati antara lain :

- Normalisasi penampang sungai pada ruas yang sering mengalami luapan air banjir dengan cara menggali sedimen, membersihkan tumbuhan pengganggu & timbunan sampah, membuat plengsengan pada talud sungai, membuat parapet atau meninggikan tanggul guna mencegah luapan air banjir.
- Pembuatan embung-embung maupun Check Dam yang dapat dibangun pada anak-anak sungai di bagian hulu K. Baru, K. Setail, K. Blambangan, K. Bomo,

K. Tambong, di Kabupaten Banyuwangi, guna meningkatkan fungsi daerah resapan dan mengurangi debit banjir pada sungai-sungai tersebut.

- Penambangan material sedimen / pasir yang mengendap di palung sungai, yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan, dengan cara penambangan sesuai kriteria yang ditentukan, guna memelihara ekosistem morfologi sungai dan kelestarian lingkungan.
- Perbaiki alur sungai pada bagian muara / mulut sungai (River Mouth), guna melancarkan aliran debit banjir dimusim hujan, terutama pada muara sungai K. Bajulmati, K. Loo, K. Tambong, K. Bomo, K. Setail, K. Baru.
- Menerapkan program “Zero Delta Q Policy” guna menghindari meningkatnya debit banjir dari tahun ke tahun, dengan cara memperketat proses perijinan dan pengawasan terhadap rencana pembangunan di daerah konservasi yang dapat mengurangi resapan air dan menambah besaran run off yang dapat mengakibatkan bertambahnya debit banjir.

2.5.4. Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air

Pada Aspek Sistem Informasi sumber daya air, potensi yang bisa dikembangkan di WS Baru Bajulmati adalah sebagai berikut :

- ❖ Mengembangkan sistem informasi SDA secara luas dan transparan
- ❖ Menambah jumlah stasiun pengamatan hidro-meteorologi di WS Baru Bajulmati sesuai standar kebutuhan.
- ❖ Mengembangkan sumber daya manusia terutama bagi para personil yang bertugas menangani sistem informasi SDA, agar memiliki kemampuan menjalankan tugas dengan baik, guna menunjang keberhasilan dalam pengelolaan sistem informasi sumber daya air.

2.5.5. Aspek Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

Pada Aspek Peran Masyarakat dan Dunia Usaha, potensi yang bisa dikembangkan antara lain :

- Melakukan sosialisasi pada masyarakat luas mengenai pentingnya keterlibatan peran serta masyarakat dan para pelaku dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air.
- Meningkatkan kesadaran bagi para pemangku kepentingan (Stake Holder) untuk melakukan upaya bersama guna menunjang keberhasilan di dalam pengelolaan sumber daya air.
- Meningkatkan peran asosiasi kelembagaan masyarakat di bidang SDA seperti : HIPPA, LSM, HKTI, dll.
- Meningkatkan peran TKPSDA yang baru terbentuk, namun masih belum bisa melaksanakan TUPOKSI nya secara optimal.

- Perlu adanya pembinaan konservasi secara sistematis dan periodik, melalui program pemberian penghargaan khusus kepada Desa/Kelurahan dan Kab/Kota yang berprestasi di bidang konservasi dan pelestarian SDA. Contoh : ada usulan untuk memberikan penghargaan kepada pribadi / lembaga yang dianggap telah berjasa untuk menjaga kelestarian lingkungan, seperti membuat demplot penghijauan yang ada di daerah perkebunan Kalibendo.

BAB III
ANALISA DATA
WILAYAH SUNGAI BARU - BAJULMATI

3.1. Asumsi, Kriteria dan Standar

Dasar yang digunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air, antara lain mencakup analisis kondisi yang ada, asumsi, standar dan kriteria. Asumsi, standar dan kriteria tersebut perlu ditetapkan secara jelas, sehingga analisis dan perhitungan yang dilakukan mempunyai dasar yang jelas. Kejelasan tersebut diperlukan dalam penyusunan skenario, strategi dan kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air. Asumsi, kriteria dan standar pengelolaan sumber daya air dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Kriteria dan Standar

No	Kriteria	Standar
1	Kebutuhan Air Irigasi	Standar Kriteria Perencanaan Irigasi KP-01
2	Proyeksi Pemakaian Air Domestik dan Perkotaan	Jumlah Penduduk (jiwa)
		> 1.000.000
		500.000 – 1.000.000
		100.000 – 500.000
		Kriteria Kebutuhan Air (l/org/hr)
		2013 2018 2023 2033
		120 135 150 180
		100 117 135 165
		90 104 120 140
3	Standar Pemakai Air Industri Berdasarkan Jenis Industri	Kategori Tekstil (378 lt/org/hr), Gula (4.163 lt/org/hr), Semen (233 lt/org/hr), Petrokimia (15.922 lt/org/hr), Industri Rumah Tangga/Kecil (<20 org) 23 lt/org/hr, Industri Menengah (20-100 org) 161 lt/org/hr, Industri Besar (>100 org) 161 lt/org/hr, Sosial/Bisnis (Sektor Pelayanan) 22 lt/org/hr.
4	Perhitungan Erosi	Menggunakan Model USLE (Universal Soil Loss Equation) $A = R.K.Ls.C.P$ dimana : $R = 1,119.Rm^{1,211}.D^{-0,474}.M^{0,526}$ $K = (2,713X^{1,14}.10^{-4}(12-a)+3,25(b-2)+2,5(c-2))$ $Ls = (1/73)^{0,45}.(0,43+0,3s+0,043s^2)$ A = Jumlah tanah yang tererosi (ton/ha/tahun) R = Faktor hujan dan aliran permukaan K = Faktor erodibilitas tanah Ls = Faktor panjang dan kemiringan lereng C = Faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan tanaman P = Faktor tindakan manusia dalam konservasi tanah
5	Analisis Transportasi Sedimen di Sungai	Menggunakan Rumus Frijlink $T_v = D_{50} \times \sqrt{g \times \mu \times R \times S_e } \times 5 \times e^{\frac{-0,27KD_{50}}{\mu R S_e }}$ T _v = Kapasitas transportasi sedimen per meter lebar dasar (m ² /det) μ = Factor kekasaran dasar saluran (rippel factor) D ₅₀ = Diameter butiran dengan 50% butiran lebih kecil dari (μ) R = Radius hidrolis (m)
		Se = Gradien energy (-) C = Koefisien Chezy (m ^{1/2} /det) n = Kinematic Viskosity (m ² /det), biasanya 1,002 x 10 ⁻⁶

No	Kriteria	Standar						
		h = Permukaan air (m) u = Kecepatan (m ² /det) g = Percepatan gravitasi (m/det ²) = 9,81 x = Length of reach segment (m)						
6	Analisis Debit	Analisa Kala Ulang Banjir menggunakan metode statistik dan regresi Analisa Debit Banjir menggunakan Standar Tata Cara Perhitungan Debit Banjir Revisi SNI 03-2415-1991						
7	Kriteria Kelas Mutu Air Sesuai PP. 82 tahun 2001	Standar						
		No	Parameter	Satuan	Kelas			
					I	II	III	IV
		I	FISIKA					
		1	Temperatur	°C	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 5
		2	Residu Terlarut	mg/L	1000	1000	1000	2000
		3	Residu Tersuspensi	mg/L	50	50	400	400
		II	KIMIA ANORGANIK					
		1	pH		6 – 9	6 – 9	6 – 9	5 – 9
		2	BOD	mg/L	2	3	6	12
		3	COD	mg/L	10	25	50	100
		4	DO	mg/L	6	4	3	0
		5	Total Phospat sbg P	mg/L	0,2	0,2	1	5
		6	NO ₃ sebagai N	mg/L	10	10	20	20
		7	NH ₃ -N	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)
		8	Arsen	mg/L	0,05	1	1	1
		9	Kobalt	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2
		10	Barium	mg/L	1	(-)	(-)	(-)
		11	Boron	mg/L	1	1	1	1
		12	Selenium	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05
		13	Kadmium	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01
		14	Khrom (VI)	mg/L	0,05	0,05	0,05	1
		15	Tembaga	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2
		16	Besi	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)
		17	Timbal	mg/L	0,03	0,03	0,03	1
		18	Mangan	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)
		19	Air Raksa	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005
		20	Seng	mg/L	0,05	0,05	0,05	2
		21	Khlorida	mg/L	600	(-)	(-)	(-)
		22	Sianida	mg/L	0,02	0,02	0,02	(-)
23	Fluorida	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)		
24	Nitrit sebagai N	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)		
25	Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)		
26	Khlorin bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)		
27	Belerang sbg H ₂ S	mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)		
III	MIKROBIOLOGI							
1	Fecal Coliform	Jml/100 ml	100	1000	2000	2000		
2	Total Coliform	Jml/100 ml	1000	5000	10000	10000		
IV	RADIOAKTIVITAS							
1	Gross A	Bq/L	0,1	0,1	0,1	0,1		
2	Gross B	Bq/L	1	1	1	1		

No	Kriteria	Standar					
		V	KIMIA ORGANIK				
1	Minyak & Lemak	ug/L	1000	1000	1000	(-)	
2	Detergen sbg MBAS	ug/L	200	200	200	(-)	
3	Senyawa Fenol sbg fenol	ug/L	1	1	1	(-)	
4	BHC	ug/L	210	210	210	(-)	
5	Aldrin / Dieldrin	ug/L	17	(-)	(-)	(-)	
6	Chlordane	ug/L	3	(-)	(-)	(-)	
7	DDT	ug/L	2	2	2	2	
8	Heptachlor & Heptachlor Epoxide	ug/L	18	(-)	(-)	(-)	
9	Lindane	ug/L	56	(-)	(-)	(-)	
10	Methoxychlor	ug/L	35	(-)	(-)	(-)	
11	Endrin	ug/L	1	4	(-)	(-)	
12	Toxapon	ug/L	5	(-)	(-)	(-)	

Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2012

3.2. Skenario Kondisi Ekonomi, Politik, Perubahan Iklim

Skenario kondisi sungai merupakan asumsi tentang kondisi pada masa yang akan datang yang mungkin terjadi, misalnya kondisi perekonomian, perubahan iklim atau perubahan politik.

Sebelum krisis moneter pada tahun 1997/1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar di angka 7% dan sebagai akibat dari krisis ekonomi dan finansial yang melanda Asia membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat hingga 13% pada tahun 1998. Pertumbuhan ekonomi secara lambat pulih kembali pada kurun waktu 2004-2007 tetapi dampak dari krisis finansial di Amerika Serikat tahun 2007-2008 ditengarai akan berimbas ke negara lain termasuk Indonesia sehingga target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 direvisi dari 6,3% menjadi 6,2%.

Prospek perekonomian Indonesia tahun 2009 dan seterusnya dalam menghadapi krisis finansial di Amerika Serikat tahun 2007-2008 menurut analisis dari ahli ekonomi dapat ditarik kesimpulan fenomena sebagai berikut :

1. Krisis ekonomi yang dialami Indonesia (dan Negara Asia lainnya) pada tahun 1997/1998 adalah akibat dari lemahnya struktur finansial ekonomi mikro (perusahaan perbankan dan neraca pemerintahan).
2. Indonesia yang lemah dalam mikro ekonomi tidak akan terlepas dari guncangan finansial yang diakibatkan oleh peningkatan suku bunga, memburuknya kondisi neraca perusahaan, keruntuhan pasar saham, meningkatnya ketidak pastian dan masalah kelembagaan yang ada di pasar finansial.
3. Kondisi Perekonomian Indonesia pada tahun 2009 dan tahun-tahun berikutnya diyakini akan mengalami pertumbuhan yang terbatas (sedang), tetapi masih mempunyai harapan karena adanya faktor-faktor yang nampaknya tidak terpengaruh oleh krisis finansial global, antara lain :
 - Pertumbuhan sektor non riil (misalnya property) tetap tinggi, sehingga mendorong investasi di industri Semen.

- ▮ Meningkatnya permintaan Automotif terutama diluar jawa
- ▮ Mulai ada perbaikan dalam sektor institusi (infrastruktur), (misal membaiknya niat Pemerintah memberantas korupsi, peningkatan efisiensi pengurusan dokumen, dll) yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.

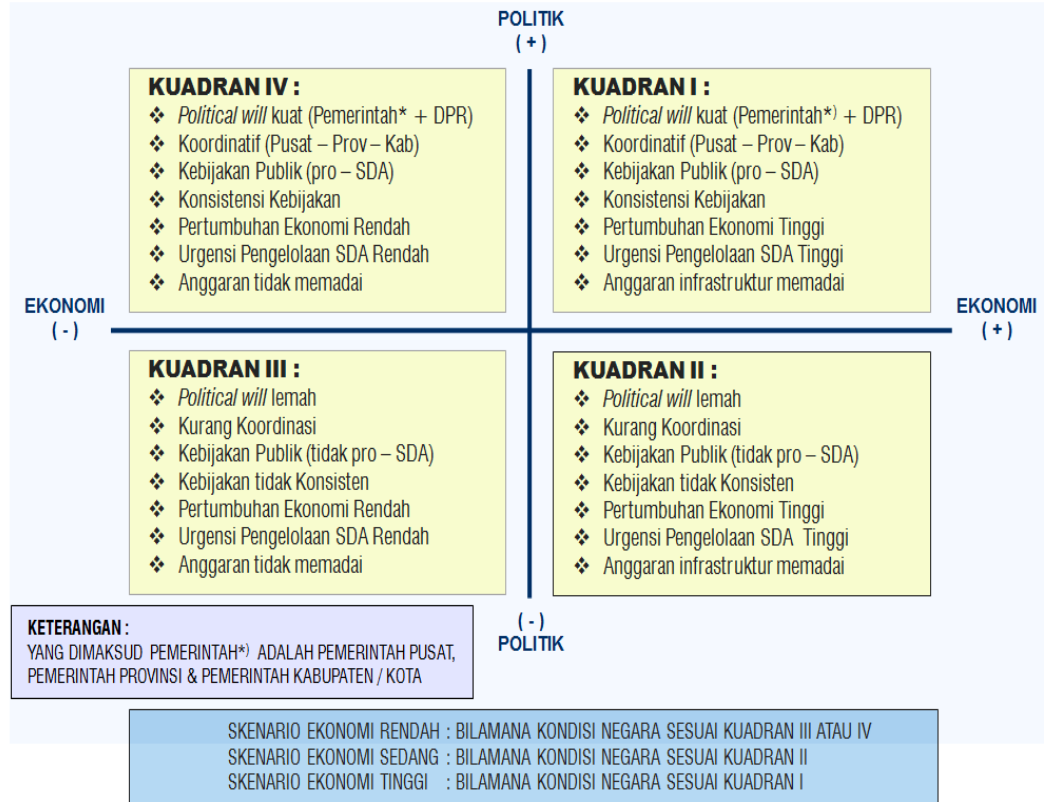
Dalam analisis pertumbuhan ekonomi dikategorikan kedalam pertumbuhan ekonomi rendah, sedang dan tinggi dengan kriteria sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi rendah apabila pertumbuhan ekonomi $< 4,5\%$
- Pertumbuhan ekonomi sedang apabila pertumbuhan ekonomi $4,5\% - 6,5\%$
- Pertumbuhan ekonomi tinggi apabila pertumbuhan ekonomi $> 6,5\%$

Selain kondisi pertumbuhan ekonomi, kondisi lain yang sangat berpengaruh dalam pengelolaan sumber daya air di masa yang akan datang adalah kondisi perubahan politik. Untuk menentukan kondisi wilayah sungai di masa yang akan datang, yang mungkin terjadi, pada analisis Rancangan Pola Pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati digunakan superposisi dua kondisi yang mungkin terjadi, yaitu :

- a. Kondisi pertumbuhan ekonomi.
- b. Kondisi perubahan politik.

Dalam menentukan skenario dilakukan skenario planning dengan kemungkinan kedua kondisi tersebut. Skenario planning pengelolaan sumber daya air WS Baru Bajulmati mengutamakan pada pengelolaan sumber daya air WS Baru Bajulmati 2033 secara holistik, terpadu, adil dan berkelanjutan. Daya penggerak kritis pengelolaan sumber daya air WS Baru Bajulmati adalah kondisi politik yang unpredictable dan pertumbuhan ekonomi. Analisa skenario planning ditampilkan pada **Gambar 3.1.** berikut :



Gambar 3.1.
Penentuan Skenario Rancangan Pola PSDA WS Baru Bajulmati

Skenario planning pengelolaan sumber daya air WS Baru Bajulmati dibagi menjadi 4 (empat) kuadran, diantaranya :

1. Kuadran I : Asumsi Kondisi Politik Baik, Ekonomi Baik

- Pada tahun 2033, Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera, dengan pemerintahan yang kuat dan stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
- Kebijakan publik pemerintahan yang didukung oleh DPR berorientasi pada kesejahteraan rakyat, antara lain dengan upaya memenuhi kebutuhan air untuk berbagai keperluan melalui pengelolaan SDA berbagai wilayah sungai secara holistik, terpadu, adil dan berkelanjutan.
- Pembangunan infrastruktur SDA di WS Baru Bajulmati mendapat perhatian pemerintah dengan dukungan dari DPR, sehingga tersedia alokasi yang memadai.

2. Kuadran II : Asumsi Kondisi Politik Buruk, Ekonomi Baik

- Pada tahun 2033, Indonesia menjadi negara yang jalan ditempat, tertinggal dari negara-negara di kawasan ASEAN, karena ketidakstabilan pemerintahan akibat pertarungan politik antara Pemerintah dan DPR, serta kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, meskipun pertumbuhannya ekonominya relatif tinggi.

- Karena pertarungan politik tersebut, kebijakan publik dalam pengelolaan SDA menjadi tidak berkualitas dan tidak konsisten.
- Pembangunan infrastruktur SDA di WS Baru Bajulmati kurang mendapat perhatian dari Pemerintah dan kurang mendapat dukungan dari DPR, meskipun alokasi dana masih relatif memadai.
- Karena kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, pembangunan infrastruktur SDA yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena ketidaksepakatan antara Pemerintah dan DPR dan terkendala pembebasan lahan. Akibatnya, pada tahun 2033, masalah banjir, kekeringan dan masalah-masalah lain di WS Baru Bajulmati masih terjadi.

3. Kuadran III : Asumsi Kondisi Politik Buruk, Ekonomi Buruk

- Pada tahun 2033, Indonesia menjadi negara yang gagal karena ketidakstabilan pemerintahan akibat pertarungan politik terus-menerus antara Pemerintah dengan DPR, serta kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, dibarengi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi yang rendah.
- Karena ketidakstabilan pemerintahan dan kondisi perekonomian yang buruk, kebijakan publik dalam pengelolaan SDA menjadi tidak berkualitas dan tidak konsisten, serta terbatasnya kegiatan yang dapat dilaksanakan.
- Pembangunan infrastruktur SDA di WS Baru Bajulmati tidak mendapat perhatian dan tidak mendapat dukungan dari DPR, sehingga alokasi dana sangat minimal.
- Pada Tahun 2033, banjir dan kekeringan masih melanda setiap tahun di WS Baru Bajulmati, serta masalah-masalah lain dalam pengelolaan SDA masih tetap terjadi, diperparah dampak Global Climate Change.

4. Kuadran IV : Asumsi Kondisi Politik Baik, Ekonomi Buruk

- Pada tahun 2033, Indonesia menjadi negara simbolik, yakni negara dengan pemerintahan yang stabil, tetapi rakyat kurang sejahtera, karena pertumbuhan ekonomi rendah.
- Kebijakan publik dalam pengelolaan SDA relatif baik, namun pelaksanaannya terkendala oleh alokasi dana yang tidak memadai.
- Pembangunan infrastruktur SDA di WS Baru Bajulmati dilaksanakan dengan alokasi dana yang sangat terbatas, sehingga banjir, kekeringan dan masalah-masalah lain dalam pengelolaan SDA belum dapat diatasi, meskipun Pemerintah telah berupaya maksimal.

Untuk selanjutnya di dalam menyusun kebijakan operasional Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati, dibuat 3 (tiga) skenario, sebagai berikut :

- a. SKENARIO EKONOMI RENDAH, bilamana kondisi negara seperti tercantum pada Kuadran III atau Kuadran IV, yaitu skenario yang dihasilkan dari superposisi pertumbuhan ekonomi rendah.
- b. SKENARIO EKONOMI SEDANG, bilamana kondisi negara seperti tercantum pada Kuadran II, yaitu skenario yang dihasilkan dari superposisi pertumbuhan ekonomi tinggi (baik).
- c. SKENARIO EKONOMI TINGGI, bilamana kondisi negara seperti tercantum pada Kuadran I, yaitu skenario yang dihasilkan dari superposisi pertumbuhan ekonomi tinggi dan dukungan politik tinggi.

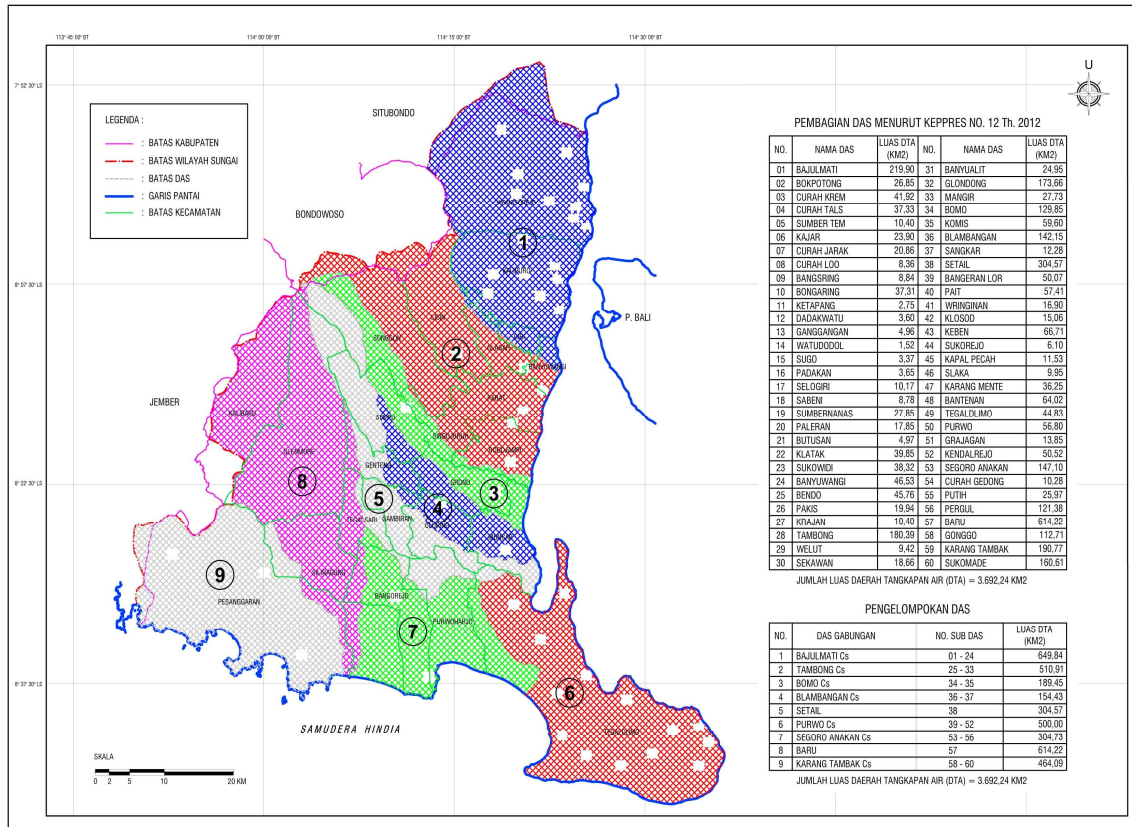
3.3. Pengelompokan DAS Untuk Koordinasi Pengelolaan SDA

Sebagaimana diketahui, menurut Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang penetapan wilayah sungai, bahwasanya jumlah DAS yang terdapat di WS Baru Bajulmati adalah sebanyak 60 DAS (dengan notasi DAS No.1 s/d DAS No. 60), seperti yang telah diuraikan pada BAB II.

Sedangkan BPDAS Sampean telah mengelompokkan DAS di WS Baru Bajulmati menjadi 6 (enam) Satuan Wilayah Pengelolaan DAS (SWP DAS), yakni :

- 1) SWP DAS Bajulmati ds, terdiri dari DAS No. 1 s/d DAS No. 24
- 2) SWP DAS Tambong ds, terdiri dari DAS No. 25 s/d DAS No. 33
- 3) SWP DAS Bomo ds, terdiri dari DAS No. 34 s/d DAS No. 35
- 4) SWP DAS Bago Wagut / Blambangan terdiri dari DAS No. 36
- 5) SWP DAS Setail ds, terdiri dari DAS No. 37 s/d DAS No. 39
- 6) SWP DAS Kalibaru ds, terdiri dari DAS No. 40 s/d DAS No. 60

Pengelompokan DAS yang diusulkan dalam rangka memudahkan koordinasi pengelolaan SDA, terutama dalam aspek konservasi SDA adalah dengan mengelompokkan 60 DAS yang ada menjadi 9 (sembilan) kelompok yang mana, kelompok 1 s/d kelompok 5 sesuai dengan pembagian SWP DAS oleh BP DAS, kelompok 6 s/d kelompok 9 merupakan pemecahan / pemekaran dari SWP DAS Kalibaru menjadi SWP DAS Purwo, Segoro Anakan, Baru dan SWP DAS Karang Tambak. Pengelompokan DAS di WS Baru Bajulmati disajikan pada **Gambar 3.2.** berikut.



Gambar 3.2.
Pengelompokan DAS di WS Baru Bajulmati

3.4. Analisa Aspek Konservasi Sumber Daya Air

Faktor utama yang menyebabkan permasalahan pada aspek konservasi sumber daya air adalah terjadinya penambahan jumlah penduduk dan perkembangan aktifitasnya yang mendorong terjadinya pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan aspek konservasi. Oleh karena itu, usaha konservasi SDA yang perlu dilakukan adalah dalam rangka mengimbangi dampak negatif dari penambahan jumlah penduduk dan perkembangan aktifitasnya, seperti yang dijelaskan berikut.

3.4.1. Konservasi Tanah dan Sumber Daya Air

Metode konservasi tanah pada WS Baru Bajulmati dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan utama, yaitu :

a) **Konservasi Secara Vegetatif**, dapat dilakukan dengan :

- i). Pertanaman tanaman atau tumbuhan penutup tanah secara terus-menerus (*permanent plant cover*);
- ii) Pertanaman dalam Strip (*Strip Cropping*) ;
- iii) Pertanaman Berganda (*Multiple Cropping*) ;
- iv) Penggunaan Mulsa (*Residues Management*); dan
- v) Penghutanan Kembali (Reboisasi).

- b) Konservasi Secara Mekanis**, dapat dilakukan dengan cara, yakni :
- i) Pengolahan Tanah;
 - ii) Pengolahan Tanah Menurut Kontur;
 - iii) Guludan (*Contour Bands*);
 - iv) Teras;
 - v) Saluran Pembuang Air (*Waterways*);
 - vi) Sumur Resapan; dan
 - vii) Bangunan Stabilisasi (*Check Dam*).
- c) Konservasi Secara Kimiawi**, usaha untuk memperbaiki kemantapan struktur tanah melalui pemberian preparat-preparat kimia yang secara umum disebut pemantap tanah (*soil conditioner*).

Upaya penanganan lahan kritis yang berada di dalam dan luar kawasan hutan pada WS Baru Bajulmati dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat kekritisannya lahan dan besarnya kelerengan lahan, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Upaya Penanganan Lahan Kritis pada WS Baru Bajulmati

Kode	Status Kawasan	Tingkat Kekritisannya	Kelerengan	Upaya Penanganan
V1	Kawasan Hutan	SK,K	>35%	Reboisasi, pengkayaan
V2	Luar Kawasan	SK,K	>35%	Penghijauan, Agroforestry
V3	Kawasan Hutan	AK	15-35%	Penanaman dg strip
V4	Luar Kawasan	AK	15-35%	Penanaman penutup tanah
T1	Luar Kawasan	AK,PK	> 5%	Teras Kridit, Teras Guludan, Datar
T2	Luar Kawasan	SK,K	15-35%	Teras Bangku
T3	Kawasan hutan dan luar kawasan hutan	SK,K,AK	15-35%	Dam Penahan
T4	Kawasan hutan dan luar kawasan hutan	SK,K	15-35%	Dam Pengendali
T5	Kawasan hutan dan luar kawasan hutan	SK,K	>30%	Pengendali jurang
T6	Luar Kawasan	K,AK	5-35%	Sumur resapan

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2012

Catatan : V = Vegetasi K = Kritis
 AK = Agak kritis T = Teknis
 PK = Potensi Kritis SK = Sangat kritis

3.4.2. Konservasi Lingkungan Sungai

- a) Strategi Konservasi Lingkungan Sungai pada WS Baru Bajulmati mengarah pada :
- Meningkatkan fungsi dan kemanfaatan sungai serta mengendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.
 - Meningkatkan kepedulian masyarakat di sekitar sungai dalam menjaga kelestarian sungai.
 - Menetapkan peruntukan pada daerah sempadan sungai yang menyangkut batas sempadan dan peruntukan lahannya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993, yang diperbarui dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, khususnya pasal 8 sampai dengan pasal 17.
- b) Metode Konservasi Lingkungan Sungai mengarah pada :
- Mengidentifikasi bangunan pengaman sungai (tanggul dan parapet) yang telah dilaksanakan.
 - Menentukan batas garis sempadan sungai sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Sosialisasi lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai.
 - Mengidentifikasi profil sungai untuk mengetahui morfologi sungai (degradasi, aggradasi dan meandering sungai).

3.4.3. Konservasi Air

Konservasi Air pada WS Baru Bajulmati, meliputi kegiatan Konsep Konservasi Air, Usaha-Usaha Konservasi Air Secara Holistik dan Rencana yang ada terkait dengan Konservasi WS Baru Bajulmati. Secara detail, penjelasan masing-masing kegiatan konservasi air pada WS Baru Bajulmati, diuraikan sebagai berikut ;

a) Konsep Konservasi Air.

Konservasi air yang baik yaitu menyimpan air di kala berlebihan dengan menggunakannya seefisien mungkin untuk keperluan tertentu yang produktif. Konservasi air pada WS Baru Bajulmati dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- (1) meningkatkan pemanfaatan air permukaan dan air tanah,
- (2) meningkatkan efisiensi air irigasi, dan
- (3) menjaga kualitas air sesuai dengan peruntukannya,
- (4) meningkatkan kapasitas tampung.

Pengelolaan air permukaan di WS Baru Bajulmati dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain ;

- (1) pengendalian aliran permukaan,
- (2) pemanenan air hujan,
- (3) meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah dan
- (4) meningkatkan kapasitas tampung.

Kelestarian air tanah perlu dijaga keseimbangan antara pengisian dan pengambilannya. Adapun beberapa metode pengelolaan air tanah pada WS Baru Bajulmati adalah sebagai berikut ;

- (1) Pengisian air tanah secara buatan dan
- (2) Pengendalian pengambilan air tanah.

b) Usaha-Usaha Konservasi Air Secara Holistik

Pada dasarnya semua pihak berpotensi untuk merusak air yang dimiliki bumi ini sekaligus juga berpotensi memperbaikinya. Adalah sangat tidak bijak jika menganggap bahwa konservasi air hanya menjadi tanggung jawab salah satu instansi atau pemerintah saja. Konservasi air dapat dilakukan oleh pengelola air maupun pemakai air di daerah aliran sungai, di bendungan dan embung-embung, di sistem distribusi, maupun di sistem pembuangan.

c) Rencana yang ada terkait dengan Konservasi WS Baru Bajulmati

Penyebab utama terjadinya bencana adalah kerusakan lingkungan, terutama di bagian hulu WS Baru Bajulmati sebagai daerah tangkapan air. Kondisi di atas menumbuhkan kesadaran dari semua pihak untuk melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang rusak guna memperbaiki dan mengembalikan fungsi dan produktifitas sumber daya alam tersebut. Kegiatan tersebut diarahkan sebagai gerakan berskala nasional yang terencana dan terpadu, melibatkan berbagai pihak terkait, baik pemerintah, swasta dan masyarakat luas. Gerakan tersebut adalah merupakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang mana dilaksanakan berdasar Keputusan Bersama Menko Bidang Kesra Nomor : 09/KEP/MENKO/KESRA/ III/2003, Menko Bidang Perekonomian Nomor : KEP.16/M.EKONOMI/03/2003 dan Menko Bidang Polkam Nomor : KEP.08/MENKO/POLKAM/III/2003 Tanggal 31 Maret 2003 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional.

Upaya tindak lanjut kegiatan konservasi pada WS Baru Bajulmati dapat mengacu pada kegiatan konservasi di Wilayah Sungai Brantas. Sebagai bahan masukan dan referensi, bahwasanya kegiatan konservasi pada WS Brantas, yaitu pada tanggal 28 April 2005 dilaksanakan Pencanangan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) yang kemudian diikuti dengan adanya Kesepakatan Bersama antara Menteri Kehutanan dengan Menteri Pekerjaan

Umum dan Menteri Pertanian Nomor : PKS.10/ Menhut.V/2007, Nomor : 06/PKS/M/2007 dan Nomor : 100/TU.210/M/5/2007 tentang Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kritis untuk Konservasi Sumber Daya Lahan dan Air pada Wilayah Sungai, yang telah melakukan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) dan akan dilakukan secara bertahap.

3.5. Analisa Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air

Potensi sumber daya air di WS Baru Bajulmati, baik air permukaan maupun air tanah selama ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, pemenuhan kebutuhan air industri, rumah tangga dan perkotaan serta pemberian air untuk tambak.

Untuk mengembangkan pertanian di WS Baru Bajulmati dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- ④ Mengidentifikasi potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas pertanian (padi, jagung, kedelai, tebu) dan peternakan (sapi, kambing dan unggas).
- ④ Meningkatkan kemampuan infrastruktur fisik dengan merehabilitasi jaringan irigasi lama dan membangun jaringan irigasi baru untuk pengembangan lahan sawah di WS Baru Bajulmati yang masih mungkin untuk dikembangkan.
- ④ Lahan sawah irigasi yang ada sekarang di WS Baru Bajulmati saat ini seluas 66.150 Ha (Dinas PU Pengairan Kab. Banyuwangi, 2012), yang terdiri dari kewenangan pusat (> 3.000 Ha) seluas 31.925 Ha, kewenangan provinsi (1.000 s.d 3.000 Ha) seluas 4.644 Ha, dan kewenangan kabupaten / kota (< 1.000 Ha) seluas 29.581 Ha, perlu dipertahankan keberadaannya karena sawah tersebut telah menghabiskan investasi yang besar dalam pencetakan dan pembangunan jaringan irigasinya, dengan mengupayakan memperketat proses alih fungsi lahan berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

3.5.1. Analisa Kebutuhan Air

1. Kebutuhan Air Pertanian

Berdasarkan kondisi saat ini luas daerah irigasi yang berada di WS Baru Bajulmati berdasarkan data tahun 2012 seluas 66.150 Ha. Di dalam perhitungan kebutuhan air untuk pertanian, kebutuhan air yang paling besar adalah untuk kepentingan suplai air irigasi persawahan yang berupa tanaman pangan. Selain itu juga dibutuhkan suplai air untuk keperluan tanaman perkebunan, perikanan dan peternakan.

Dari hasil perhitungan kebutuhan air di WS Baru Bajulmati, maka kebutuhan air pertanian pada tahun 2013 sebesar 3.034.523.000 m³. Sedangkan prediksi kebutuhan air pertanian pada tahun 2033 sebesar 3.337.976.000 m³.

Kondisi ini perlu mendapat perhatian agar program pemerintah di bidang ketahanan pangan dapat terwujud dan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan penyumbangan stock pangan nasional dapat dipertahankan.

Dengan adanya PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka diharapkan kondisi alih fungsi lahan pertanian yang produktif dapat dihindari. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat resume dari Peraturan Pemerintah tersebut, yaitu sebagai berikut ;

- PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - Mekanisme penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang berada pada lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan, usulan penetapan kawasan disampaikan oleh Kepala Dinas provinsi kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah provinsi untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait, selanjutnya diusulkan oleh Kepala Dinas provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi (*Pasal 8, 9, 13, 14*)
 - Mekanisme Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah / Pemerintah Daerah dalam rangka : a). pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau b). terjadi bencana. Penyediaan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan (*Pasal 35, 38*).

2. Kebutuhan Air Domestik

Kebutuhan air domestik terdiri dari kebutuhan air minum dan kebutuhan lainnya yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Besar kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan ketentuan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.3.
Kriteria Kebutuhan Air Penduduk

Jumlah Penduduk (Jiwa)	Keb. Air Domestik (Lt/org/hr)	Keb. Lainnya (%)
>1.000.000	174	60
500.000 – 1.000.000	142	40
100.000 – 500.000	126	30
20.000 – 100.000	78	20
3.000 – 20.000	54	5

Sumber : Ditjen Cipta Karya

Dari hasil perhitungan kebutuhan air di WS Baru Bajulmati, maka kebutuhan air domestik pada tahun 2013 sebesar 210.753.000 m³. Sedangkan prediksi kebutuhan air domestik pada tahun 2033 sebesar 252.903.000 m³.

3. Kebutuhan Air Industri

Untuk perhitungan kebutuhan air industri di WS Baru Bajulmati, industri-industri yang ada dikelompokkan berdasarkan jenis industrinya, dimana untuk WS Baru Bajulmati terdiri dari 3 (tiga) kelompok industri besar, terdiri dari ;

- 1) Industri kertas,
- 2) Industri gula, dan
- 3) Industri lainnya.

Kebutuhan air untuk industri akan diproyeksikan berdasarkan trend penggunaan air masing-masing industri selama 5 tahun terakhir, dengan rerata penggunaan adalah sebagai berikut :

- Gula : $1,25 \text{ m}^3/\text{dt}$
- Kertas : $1,57 \text{ m}^3/\text{dt}$
- Lain-lain : $1,67 \text{ m}^3/\text{dt}$

Dari hasil perhitungan kebutuhan air di WS Baru Bajulmati, maka kebutuhan air industri pada tahun 2013 sebesar $31.088.000 \text{ m}^3$. Sedangkan prediksi kebutuhan air industri pada tahun 2033 sebesar $37.305.000 \text{ m}^3$.

Perincian hasil perhitungan kebutuhan air di WS Baru Bajulmati disajikan pada **Tabel 3.4** dan **Tabel 3.5**.

Perhitungan Kebutuhan Air WS Baru Bajulmati, 2013

No.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas DAS (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air			Jumlah Kebutuhan Air (10 ⁶ m ³ / Th)
				Domestik (10 ⁶ m ³ / Th)	Pertanian (10 ⁶ m ³ / Th)	Industri (10 ⁶ m ³ / Th)	
1	DAS Bajulmati	219,90	500.113,60	16,429	98,062	3,883	118,374
2	DAS Bokpotong	26,85	61.114,62	2,008	11,983	0,475	14,465
3	DAS Qurah Krem	41,92	95.416,20	3,134	18,709	0,741	22,584
4	DAS Qurah Tals	37,33	84.968,67	2,791	16,661	0,660	20,112
5	DAS Sumber Tem	10,40	23.671,96	0,778	4,642	0,184	5,603
6	DAS Kajar	23,90	54.399,98	1,787	10,667	0,422	12,876
7	DAS Qurah Jarak	20,86	47.480,49	1,560	9,310	0,369	11,238
8	DAS Qurah Loo	8,36	19.028,61	0,625	3,731	0,148	4,504
9	DAS Bangsring	8,84	20.121,16	0,661	3,945	0,156	4,763
10	DAS Bongaring	37,31	84.923,15	2,790	16,652	0,659	20,101
11	DAS Ketapang	2,75	6.259,41	0,206	1,227	0,049	1,482
12	DAS Dadakwatu	3,60	8.194,14	0,269	1,607	0,064	1,939
13	DAS Ganggangan	4,96	11.289,70	0,371	2,214	0,088	2,672
14	DAS Watudodol	1,52	3.459,75	0,114	0,678	0,027	0,819
15	DAS Sugo	3,37	7.670,62	0,252	1,504	0,060	1,816
16	DAS Padakan	3,65	8.307,95	0,273	1,629	0,065	1,966
17	DAS Selogiri	10,17	23.148,44	0,760	4,539	0,180	5,479
18	DAS Sabeni	8,78	19.984,60	0,656	3,919	0,155	4,730
19	DAS Sumbemanas	27,85	63.390,77	2,082	12,430	0,492	15,004
20	DAS Paleran	17,85	40.629,27	1,335	7,967	0,315	9,617
21	DAS Butusan	4,97	11.312,46	0,372	2,218	0,088	2,678
22	DAS Klatak	39,85	90.704,57	2,980	17,785	0,704	21,469
23	DAS Sukowidi	38,32	87.222,06	2,865	17,102	0,677	20,645
24	DAS Banyuwangi	46,53	105.909,25	3,479	20,767	0,822	25,068
25	DAS Bendo	45,76	66.090,61	2,171	69,100	0,127	71,398
26	DAS Pakis	19,94	28.799,10	0,946	30,110	0,055	31,112
27	DAS Krajan	10,40	15.020,59	0,493	15,705	0,029	16,227
28	DAS Tambong	180,39	260.535,08	8,559	272,399	0,499	281,457
29	DAS Welut	9,42	13.605,19	0,447	14,225	0,026	14,698
30	DAS Sekawan	18,66	26.950,41	0,885	28,178	0,052	29,115
31	DAS Banyualit	24,95	36.034,98	1,184	37,676	0,069	38,929
32	DAS Glondong	173,66	250.815,02	8,239	262,236	0,481	270,956
33	DAS Mangir	27,73	40.050,10	1,316	41,874	0,077	43,266
34	DAS Bomo	129,85	357.913,83	11,757	251,965	0,165	263,887
35	DAS Komis	59,60	177.062,24	5,816	124,649	0,082	130,547
36	DAS Blambangan	142,15	812.377,70	26,687	346,430	3,976	377,093
37	DAS Sangkar	12,28	70.179,38	2,305	29,927	0,344	32,576
38	DAS Setail	304,57	872.937,60	28,676	453,173	0,402	482,251
39	DAS Bangeran Lor	50,07	23.986,04	0,788	7,043	0,190	8,021
40	DAS Pait	57,41	27.502,27	0,903	8,076	0,217	9,197
41	DAS Wringinan	16,90	8.095,95	0,266	2,377	0,064	2,707
42	DAS Klosod	15,06	7.214,50	0,237	2,118	0,057	2,412
43	DAS Keben	66,71	31.957,44	1,050	9,384	0,252	10,686
44	DAS Sukorejo	6,10	2.922,21	0,096	0,858	0,023	0,977
45	DAS Kapalpecah	11,53	5.523,45	0,181	1,622	0,044	1,847
46	DAS Slaka	9,95	4.766,55	0,157	1,400	0,038	1,594
47	DAS Karang Mente	36,25	17.365,57	0,570	5,099	0,137	5,807
48	DAS Bantenan	64,02	30.668,80	1,007	9,006	0,242	10,255
49	DAS Tegaldimo	44,83	21.475,82	0,705	6,306	0,170	7,181
50	DAS Punwo	56,80	27.210,05	0,894	7,990	0,215	9,099
51	DAS Grajagan	13,85	6.634,85	0,218	1,948	0,052	2,219
52	DAS Kendalrejo	50,52	24.201,62	0,795	7,107	0,191	8,093
53	DAS Segoro Anakan	147,10	245.508,06	8,065	132,121	0,307	140,493
54	DAS Qurah Gedong	10,28	17.157,19	0,564	9,233	0,021	9,818
55	DAS Putih	25,97	43.343,61	1,424	23,325	0,054	24,804
56	DAS Pergul	121,38	202.581,70	6,655	109,020	0,253	115,928
57	DAS Baru	614,22	933.114,16	30,653	331,628	9,023	371,304
58	DAS Gonggo	112,71	55.171,83	1,812	22,155	0,406	24,373
59	DAS Karang Tambak	190,77	93.496,85	3,071	37,545	0,688	41,304
60	DAS Sukomade	160,61	78.618,99	2,583	31,571	0,579	34,732
Jumlah		3.692,24	6.415.611	210,753	3.034,523	31,088	3.276,364

Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2012

Tabel 3.5.
Perhitungan Kebutuhan Air WS Baru Bajulmati, 2033

No.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas DAS (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air			Jumlah Kebutuhan Air (10 ⁶ m ³ / Th)
				Domestik (10 ⁶ m ³ / Th)	Pertanian (10 ⁶ m ³ / Th)	Industri (10 ⁶ m ³ / Th)	
1	DAS Bajulmati	219,90	600.136,32	19,714	107,868	4,660	132,242
2	DAS Bokpotong	26,85	73.337,55	2,409	13,182	0,569	16,160
3	DAS Curah Krem	41,92	114.499,44	3,761	20,580	0,889	25,230
4	DAS Curah Tals	37,33	101.962,41	3,349	18,327	0,792	22,468
5	DAS Sumber Tem	10,40	28.406,35	0,933	5,106	0,221	6,259
6	DAS Kajar	23,90	65.279,98	2,144	11,733	0,507	14,385
7	DAS Curah Jarak	20,86	56.976,58	1,872	10,241	0,442	12,555
8	DAS Curah Loo	8,36	22.834,34	0,750	4,104	0,177	5,032
9	DAS Bangsring	8,84	24.145,40	0,793	4,340	0,187	5,321
10	DAS Bongaring	37,31	101.907,78	3,348	18,317	0,791	22,456
11	DAS Ketapang	2,75	7.511,29	0,247	1,350	0,058	1,655
12	DAS Dadakwatu	3,60	9.832,97	0,323	1,767	0,076	2,167
13	DAS Ganggangan	4,96	13.547,64	0,445	2,435	0,105	2,985
14	DAS Watudodol	1,52	4.151,70	0,136	0,746	0,032	0,915
15	DAS Sugo	3,37	9.204,75	0,302	1,654	0,071	2,028
16	DAS Padakan	3,65	9.969,54	0,327	1,792	0,077	2,197
17	DAS Selogiri	10,17	27.778,13	0,913	4,993	0,216	6,121
18	DAS Sabeni	8,78	23.981,51	0,788	4,310	0,186	5,284
19	DAS Sumbemanas	27,85	76.068,93	2,499	13,673	0,591	16,762
20	DAS Paleran	17,85	48.755,13	1,602	8,763	0,379	10,743
21	DAS Butusan	4,97	13.574,96	0,446	2,440	0,105	2,991
22	DAS Klatak	39,85	108.845,49	3,576	19,564	0,845	23,984
23	DAS Sukowidi	38,32	104.666,47	3,438	18,813	0,813	23,064
24	DAS Banyuwangi	46,53	127.091,10	4,175	22,843	0,987	28,005
25	DAS Bendo	45,76	79.308,73	2,605	76,010	0,152	78,767
26	DAS Pakis	19,94	34.558,92	1,135	33,122	0,066	34,323
27	DAS Krajan	10,40	18.024,71	0,592	17,275	0,035	17,902
28	DAS Tambong	180,39	312.642,10	10,270	299,639	0,599	310,508
29	DAS Welut	9,42	16.326,23	0,536	15,647	0,031	16,215
30	DAS Sekawan	18,66	32.340,49	1,062	30,995	0,062	32,120
31	DAS Banyualit	24,95	43.241,98	1,420	41,443	0,083	42,947
32	DAS Glondong	173,66	300.978,03	9,887	288,460	0,577	298,924
33	DAS Mangir	27,73	48.060,12	1,579	46,061	0,092	47,732
34	DAS Bomo	129,85	429.496,60	14,109	277,161	0,198	291,468
35	DAS Komis	59,60	212.474,69	6,980	137,113	0,098	144,191
36	DAS Blambangan	142,15	974.853,24	32,024	381,073	4,772	417,869
37	DAS Sangkar	12,28	84.215,25	2,766	32,920	0,412	36,099
38	DAS Setail	304,57	1.047.525,11	34,411	498,490	0,482	533,383
39	DAS Bangeran Lor	50,07	28.783,25	0,946	7,748	0,227	8,921
40	DAS Pait	57,41	33.002,73	1,084	8,883	0,261	10,228
41	DAS Wringinan	16,90	9.715,14	0,319	2,615	0,077	3,011
42	DAS Klosod	15,06	8.657,40	0,284	2,330	0,068	2,683
43	DAS Keben	66,71	38.348,93	1,260	10,322	0,303	11,885
44	DAS Sukorejo	6,10	3.506,65	0,115	0,944	0,028	1,087
45	DAS Kapalpecah	11,53	6.628,14	0,218	1,784	0,052	2,054
46	DAS Slaka	9,95	5.719,86	0,188	1,540	0,045	1,773
47	DAS Karang Mente	36,25	20.838,68	0,685	5,609	0,165	6,458
48	DAS Bantenan	64,02	36.802,55	1,209	9,906	0,291	11,406
49	DAS Tegaldimo	44,83	25.770,99	0,847	6,937	0,204	7,987
50	DAS Purwo	56,80	32.652,06	1,073	8,789	0,258	10,120
51	DAS Grajagan	13,85	7.961,81	0,262	2,143	0,063	2,468
52	DAS Kendalrejo	50,52	29.041,94	0,954	7,817	0,229	9,001
53	DAS Segoro Anakan	147,10	294.609,67	9,678	145,333	0,368	155,379
54	DAS Curah Gedong	10,28	20.588,63	0,676	10,157	0,026	10,859
55	DAS Putih	25,97	52.012,33	1,709	25,658	0,065	27,432
56	DAS Pergul	121,38	243.098,04	7,986	119,922	0,304	128,212
57	DAS Baru	614,22	1.119.736,99	36,783	364,791	10,827	412,401
58	DAS Gonggo	112,71	66.206,19	2,175	24,371	0,487	27,033
59	DAS Karang Tambak	190,77	112.196,22	3,686	41,299	0,826	45,811
60	DAS Sukomade	160,61	94.342,79	3,099	34,728	0,694	38,521
Jumlah		3.692,24	7.698.733	252,903	3.337,976	37,305	3.628,184

Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2012

3.5.2. Analisa Ketersediaan Air

Potensi ketersediaan air yang dihitung adalah potensi air permukaan, air tanah dan sumber mata air.

Dari hasil perhitungan ketersediaan air total di WS Baru Bajulmati, maka ketersediaan air total pada tahun 2013 sebesar 4.608.170.000 m³.

Sedangkan untuk prediksi ketersediaan air total pada tahun 2033 diprediksi dengan 2 (dua) alternatif, yakni :

- ▣ Alternatif 1, bilamana usaha konservasi berhasil, maka prediksi ketersediaan air total pada tahun 2033 sebesar 5.068.987.000 m³
- ▣ Alternatif 2, bilamana usaha konservasi tidak berhasil, maka prediksi ketersediaan air total pada tahun 2033 sebesar 4.147.353.000 m³

Perincian hasil perhitungan ketersediaan air di WS Baru Bajulmati disajikan pada **Tabel 3.6, Tabel 3.7** dan **Tabel 3.8.**

Tabel 3.6.
Perhitungan Ketersediaan Air WS Baru Bajulmati, 2013

No	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas DAS (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Air			Jumlah Ketersediaan Air (10 ⁶ m ³ / Th)
				Permukaan (10 ⁶ m ³ / Th)	Tanah (10 ⁶ m ³ / Th)	Sumber (10 ⁶ m ³ / Th)	
1	DAS Bajulmati	219,90	500.114	122,012	101,898	10,674	234,584
2	DAS Bokpotong	26,85	61.115	14,910	12,452	1,304	28,667
3	DAS Qurah Krem	41,92	95.416	23,279	19,441	2,037	44,756
4	DAS Qurah Tals	37,33	84.969	20,730	17,312	1,814	39,856
5	DAS Sumber Tem	10,40	23.672	5,775	4,823	0,505	11,104
6	DAS Kajar	23,90	54.400	13,272	11,084	1,161	25,517
7	DAS Qurah Jarak	20,86	47.480	11,639	9,674	1,013	22,327
8	DAS Qurah Loo	8,36	19.029	4,642	3,877	0,406	8,926
9	DAS Bangsring	8,84	20.121	4,909	4,100	0,429	9,438
10	DAS Bongaring	37,31	84.923	20,719	17,303	1,813	39,834
11	DAS Ketapang	2,75	6.259	1,527	1,275	0,134	2,936
12	DAS Dadakwatu	3,60	8.194	1,999	1,670	0,175	3,844
13	DAS Ganggangan	4,96	11.290	2,754	2,300	0,241	5,296
14	DAS Watudodol	1,52	3.460	0,844	0,705	0,074	1,623
15	DAS Sugo	3,37	7.671	1,871	1,563	0,164	3,598
16	DAS Padakan	3,65	8.308	2,027	1,693	0,177	3,897
17	DAS Selogiri	10,17	23.148	5,647	4,716	0,494	10,858
18	DAS Sabeni	8,78	19.985	4,876	4,072	0,427	9,374
19	DAS Sumbemanas	27,85	63.391	15,465	12,916	1,353	29,734
20	DAS Paleran	17,85	40.629	9,912	8,278	0,867	19,058
21	DAS Butusan	4,97	11.312	2,760	2,305	0,241	5,306
22	DAS Klatak	39,85	90.705	22,129	18,481	1,936	42,546
23	DAS Sukowidi	38,32	87.222	21,279	17,771	1,862	40,912
24	DAS Banyuwangi	46,53	105.909	25,839	21,579	2,260	49,678
25	DAS Bendo	45,76	66.091	11,606	17,489	7,595	36,690
26	DAS Pakis	19,94	28.799	23,138	7,621	3,310	34,069
27	DAS Krajan	10,40	15.021	10,724	3,975	1,726	16,425
28	DAS Tambong	180,39	260.535	205,653	68,945	29,941	304,539
29	DAS Welut	9,42	13.605	9,983	3,600	1,564	15,147
30	DAS Sekawan	18,66	26.950	21,854	7,132	3,097	32,083
31	DAS Banyualit	24,95	36.035	31,685	9,536	4,141	45,362
32	DAS Glondong	173,66	250.815	162,511	66,372	28,824	257,708
33	DAS Mangir	27,73	40.050	39,270	10,598	4,603	54,471
34	DAS Bomo	129,85	357.914	245,820	62,646	21,980	330,446
35	DAS Komis	59,60	177.062	65,715	30,991	10,873	107,579
36	DAS Blambangan	142,15	812.378	260,873	83,316	31,603	375,792
37	DAS Sangkar	12,28	70.179	14,030	7,198	2,730	23,958
38	DAS Setail	304,57	872.938	430,100	129,216	24,711	584,027
39	DAS Bangeran Lor	50,07	23.986	23,829	1,834	0,027	25,690
40	DAS Pait	57,41	27.502	27,323	2,102	0,030	29,456
41	DAS Wringinan	16,90	8.096	8,043	0,619	0,009	8,671
42	DAS Klosod	15,06	7.214	7,167	0,551	0,008	7,727
43	DAS Keben	66,71	31.957	31,749	2,443	0,035	34,227
44	DAS Sukorejo	6,10	2.922	2,903	0,223	0,003	3,130
45	DAS Kapalpecah	11,53	5.523	5,487	0,422	0,006	5,916
46	DAS Slaka	9,95	4.767	4,735	0,364	0,005	5,105
47	DAS Karang Mente	36,25	17.366	17,252	1,327	0,019	18,599
48	DAS Bantenan	64,02	30.669	30,469	2,344	0,034	32,847
49	DAS Tegaldimo	44,83	21.476	21,336	1,642	0,024	23,001
50	DAS Purwo	56,80	27.210	27,032	2,080	0,030	29,143
51	DAS Grajagan	13,85	6.635	6,592	0,507	0,007	7,106
52	DAS Kendalrejo	50,52	24.202	24,044	1,850	0,027	25,920
53	DAS Segoro Anakan	147,10	245.508	139,496	19,165	0,020	158,681
54	DAS Qurah Gedong	10,28	17.157	11,535	1,339	0,001	12,876
55	DAS Putih	25,97	43.344	33,385	3,384	0,004	36,772
56	DAS Pergul	121,38	202.582	165,281	15,814	0,017	181,112
57	DAS Baru	614,22	933.114	547,000	142,131	62,858	751,989
58	DAS Gonggo	112,71	55.172	71,997	0,000	0,000	71,997
59	DAS Karang Tambak	190,77	93.497	123,648	0,000	0,000	123,648
60	DAS Sukomade	160,61	78.619	102,595	0,000	0,000	102,595
Jumlah		3.692,24	6.415.611	3.326,679	1.010,066	271,424	4.608,170

Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2012

Tabel 3.7.
Perhitungan Ketersediaan Air WS Baru Bajulmati, 2033 – Alternatif 1

No.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas DAS (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Air			Jumlah Ketersediaan Air (10 ⁶ m ³ / Th)
				Permukaan (10 ⁶ m ³ / Th)	Tanah (10 ⁶ m ³ / Th)	Sumber (10 ⁶ m ³ / Th)	
1	DAS Bajulmati	219,90	600.136	134,213	112,088	11,742	258,042
2	DAS Bokpotong	26,85	73.338	16,401	13,697	1,435	31,533
3	DAS Qurah Krem	41,92	114.499	25,606	21,385	2,240	49,232
4	DAS Qurah Tals	37,33	101.962	22,803	19,044	1,995	43,841
5	DAS Sumber Tem	10,40	28.406	6,353	5,305	0,556	12,214
6	DAS Kajar	23,90	65.280	14,599	12,192	1,277	28,069
7	DAS Qurah Jarak	20,86	56.977	12,803	10,642	1,115	24,559
8	DAS Qurah Loo	8,36	22.834	5,107	4,265	0,447	9,818
9	DAS Bangsring	8,84	24.145	5,400	4,510	0,472	10,382
10	DAS Bongaring	37,31	101.908	22,790	19,033	1,994	43,818
11	DAS Ketapang	2,75	7.511	1,680	1,403	0,147	3,230
12	DAS Dadakwatu	3,60	9.833	2,199	1,837	0,192	4,228
13	DAS Ganggangan	4,96	13.548	3,030	2,530	0,265	5,825
14	DAS Watudodol	1,52	4.152	0,928	0,775	0,081	1,785
15	DAS Sugo	3,37	9.205	2,059	1,719	0,180	3,958
16	DAS Padakan	3,65	9.970	2,230	1,862	0,195	4,287
17	DAS Selogiri	10,17	27.778	6,212	5,188	0,543	11,944
18	DAS Sabeni	8,78	23.982	5,363	4,479	0,469	10,311
19	DAS Sumbemanas	27,85	76.069	17,012	14,207	1,488	32,708
20	DAS Paleran	17,85	48.755	10,903	9,106	0,954	20,963
21	DAS Butusan	4,97	13.575	3,036	2,535	0,266	5,837
22	DAS Klatak	39,85	108.845	24,342	20,329	2,130	46,801
23	DAS Sukowidi	38,32	104.666	23,407	19,549	2,048	45,004
24	DAS Banyuwangi	46,53	127.091	28,422	23,737	2,487	54,646
25	DAS Bendo	45,76	79.309	12,766	19,238	8,355	40,359
26	DAS Pakis	19,94	34.559	25,452	8,383	3,641	37,476
27	DAS Krajan	10,40	18.025	11,797	4,372	1,899	18,068
28	DAS Tambong	180,39	312.642	226,219	75,839	32,935	334,993
29	DAS Welut	9,42	16.326	10,981	3,960	1,720	16,662
30	DAS Sekawan	18,66	32.340	24,040	7,845	3,407	35,292
31	DAS Banyualit	24,95	43.242	34,853	10,489	4,555	49,898
32	DAS Gondong	173,66	300.978	178,762	73,010	31,707	283,478
33	DAS Mangir	27,73	48.060	43,197	11,658	5,063	59,918
34	DAS Bomo	129,85	429.497	270,402	68,911	24,178	363,491
35	DAS Komis	59,60	212.475	72,286	34,091	11,961	118,337
36	DAS Blambangan	142,15	974.853	286,961	91,648	34,763	413,372
37	DAS Sangkar	12,28	84.215	15,433	7,917	3,003	26,353
38	DAS Setail	304,57	1.047.525	473,110	142,137	27,182	642,430
39	DAS Bangeran Lor	50,07	28.783	26,212	2,017	0,029	28,259
40	DAS Pait	57,41	33.003	30,055	2,313	0,034	32,401
41	DAS Wringinan	16,90	9.715	8,847	0,681	0,010	9,538
42	DAS Klosod	15,06	8.657	7,884	0,607	0,009	8,500
43	DAS Keben	66,71	38.349	34,924	2,687	0,039	37,650
44	DAS Sukorejo	6,10	3.507	3,193	0,246	0,004	3,443
45	DAS Kapalpecah	11,53	6.628	6,036	0,464	0,007	6,507
46	DAS Slaka	9,95	5.720	5,209	0,401	0,006	5,616
47	DAS Karang Mente	36,25	20.839	18,977	1,460	0,021	20,459
48	DAS Bantenan	64,02	36.803	33,515	2,579	0,037	36,132
49	DAS Tegaldlimo	44,83	25.771	23,469	1,806	0,026	25,301
50	DAS Purwo	56,80	32.652	29,736	2,288	0,033	32,057
51	DAS Grajagan	13,85	7.962	7,251	0,558	0,008	7,817
52	DAS Kendalrejo	50,52	29.042	26,448	2,035	0,030	28,512
53	DAS Segoro Anakan	147,10	294.610	153,445	21,081	0,022	174,549
54	DAS Qurah Gedong	10,28	20.589	12,688	1,473	0,002	14,163
55	DAS Putih	25,97	52.012	36,724	3,722	0,004	40,450
56	DAS Pergul	121,38	243.098	181,809	17,395	0,018	199,223
57	DAS Baru	614,22	1.119.737	601,700	156,344	69,144	827,188
58	DAS Gonggo	112,71	66.206	79,197	0,000	0,000	79,197
59	DAS Karang Tambak	190,77	112.196	136,013	0,000	0,000	136,013
60	DAS Sukomade	160,61	94.343	112,854	0,000	0,000	112,854
Jumlah		3.692,24	7.698.733	3.659,347	1.111,073	298,567	5.068,987

Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2012

Tabel 3.8.
Perhitungan Ketersediaan Air WS Baru Bajulmati, 2033 – Alternatif 2

No.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas DAS (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Air			Jumlah Ketersediaan Air (10 ⁶ m ³ / Th)
				Permukaan (10 ⁶ m ³ / Th)	Tanah (10 ⁶ m ³ / Th)	Sumber (10 ⁶ m ³ / Th)	
1	DAS Bajulmati	219,90	600.136	109,811	91,708	9,607	211,126
2	DAS Bokpotong	26,85	73.338	13,419	11,207	1,174	25,800
3	DAS Qurah Krem	41,92	114.499	20,951	17,497	1,833	40,280
4	DAS Qurah Tals	37,33	101.962	18,657	15,581	1,632	35,870
5	DAS Sumber Tem	10,40	28.406	5,198	4,341	0,455	9,993
6	DAS Kajar	23,90	65.280	11,945	9,976	1,045	22,965
7	DAS Qurah Jarak	20,86	56.977	10,475	8,707	0,912	20,094
8	DAS Qurah Loo	8,36	22.834	4,178	3,489	0,366	8,033
9	DAS Bangsiring	8,84	24.145	4,418	3,690	0,387	8,494
10	DAS Bongaring	37,31	101.908	18,647	15,573	1,631	35,851
11	DAS Ketapang	2,75	7.511	1,374	1,148	0,120	2,642
12	DAS Dadakwatu	3,60	9.833	1,799	1,503	0,157	3,459
13	DAS Ganggangan	4,96	13.548	2,479	2,070	0,217	4,766
14	DAS Watudodol	1,52	4.152	0,760	0,634	0,066	1,461
15	DAS Sugo	3,37	9.205	1,684	1,407	0,147	3,238
16	DAS Padakan	3,65	9.970	1,824	1,523	0,160	3,507
17	DAS Selogiri	10,17	27.778	5,083	4,245	0,445	9,772
18	DAS Sabeni	8,78	23.982	4,388	3,665	0,384	8,437
19	DAS Sumbemanas	27,85	76.069	13,919	11,624	1,218	26,761
20	DAS Paleran	17,85	48.755	8,921	7,450	0,780	17,152
21	DAS Butusan	4,97	13.575	2,484	2,074	0,217	4,776
22	DAS Klatak	39,85	108.845	19,916	16,633	1,742	38,291
23	DAS Sukowidi	38,32	104.666	19,151	15,994	1,675	36,821
24	DAS Banyuwangi	46,53	127.091	23,255	19,421	2,034	44,710
25	DAS Bendo	45,76	79.309	10,445	15,740	6,836	33,021
26	DAS Pakis	19,94	34.559	20,825	6,859	2,979	30,662
27	DAS Krajan	10,40	18.025	9,652	3,577	1,554	14,783
28	DAS Tambong	180,39	312.642	185,088	62,050	26,947	274,085
29	DAS Welut	9,42	16.326	8,985	3,240	1,407	13,632
30	DAS Sekawan	18,66	32.340	19,669	6,419	2,787	28,875
31	DAS Banyualit	24,95	43.242	28,516	8,582	3,727	40,825
32	DAS Glondong	173,66	300.978	146,260	59,735	25,942	231,937
33	DAS Mangir	27,73	48.060	35,343	9,539	4,142	49,024
34	DAS Bomo	129,85	429.497	221,238	56,381	19,782	297,401
35	DAS Komis	59,60	212.475	59,143	27,892	9,786	96,821
36	DAS Blambangan	142,15	974.853	234,786	74,985	28,442	338,213
37	DAS Sangkar	12,28	84.215	12,627	6,478	2,457	21,562
38	DAS Setail	304,57	1.047.525	387,090	116,294	22,240	525,624
39	DAS Bangeran Lor	50,07	28.783	21,446	1,650	0,024	23,121
40	DAS Pait	57,41	33.003	24,590	1,892	0,027	26,510
41	DAS Wringinan	16,90	9.715	7,239	0,557	0,008	7,804
42	DAS Klosod	15,06	8.657	6,451	0,496	0,007	6,954
43	DAS Keben	66,71	38.349	28,574	2,199	0,032	30,804
44	DAS Sukorejo	6,10	3.507	2,613	0,201	0,003	2,817
45	DAS Kapalpecah	11,53	6.628	4,939	0,380	0,006	5,324
46	DAS Slaka	9,95	5.720	4,262	0,328	0,005	4,595
47	DAS Karang Mente	36,25	20.839	15,527	1,195	0,017	16,739
48	DAS Bantenan	64,02	36.803	27,422	2,110	0,031	29,562
49	DAS Tegaldimo	44,83	25.771	19,202	1,477	0,021	20,701
50	DAS Purwo	56,80	32.652	24,329	1,872	0,027	26,228
51	DAS Grajagan	13,85	7.962	5,932	0,456	0,007	6,395
52	DAS Kendalrejo	50,52	29.042	21,639	1,665	0,024	23,328
53	DAS Segoro Anakan	147,10	294.610	125,546	17,248	0,018	142,813
54	DAS Qurah Gedong	10,28	20.589	10,381	1,205	0,001	11,588
55	DAS Putih	25,97	52.012	30,047	3,045	0,003	33,095
56	DAS Pergul	121,38	243.098	148,753	14,233	0,015	163,001
57	DAS Baru	614,22	1.119.737	492,300	127,918	56,572	676,790
58	DAS Gonggo	112,71	66.206	64,798	0,000	0,000	64,798
59	DAS Karang Tambak	190,77	112.196	111,283	0,000	0,000	111,283
60	DAS Sukomade	160,61	94.343	92,335	0,000	0,000	92,335
Jumlah		3.692,24	7.698.733	2.994,011	909,060	244,282	4.147,353

Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2012

3.5.3. Neraca Air

Dalam kegiatan penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati, diperlukan analisa neraca untuk mengetahui kondisi neraca air pada WS Baru Bajulmati, dimana masih dalam kondisi surplus atau kondisi minus untuk masing – masing DAS pada WS Baru Bajulmati.

Analisa neraca air juga memperhatikan kondisi sistem tata air yang ada dalam WS Baru Bajulmati, meliputi potensi air, baik yang ada di atas permukaan (waduk, embung, sungai dan mata air) maupun air bawah permukaan dan bangunan prasarana pengairan (baik berupa bendungan, bendung maupun pintu air). Dengan diketahuinya sistem tata air maka dapat diketahui ketersediaan air di WS Baru Bajulmati.

Dari hasil perhitungan kebutuhan dan ketersediaan air total di WS Baru Bajulmati, maka neraca air total pada tahun 2013 mengalami surplus sebesar 1.331.806.000 m³. Sedangkan untuk prediksi neraca air total pada tahun 2033 diprediksi dengan 2 (dua) alternatif, yakni :

- ▣ Alternatif 1, bilamana usaha konservasi berhasil, maka prediksi neraca air total pada tahun 2033 masih mengalami surplus sebesar 1.440.802.000 m³
- ▣ Alternatif 2, bilamana usaha konservasi tidak berhasil, maka prediksi neraca air total pada tahun 2033 masih mengalami surplus sebesar 519.168.000 m³

Meskipun untuk neraca air total di WS Baru Bajulmati masih mengalami surplus, namun beberapa DAS tertentu mengalami defisit air, diantaranya : DAS Bendo, Tambong, Glondong yang masuk dalam SWP DAS Tambong ds, kemudian DAS Komis masuk SWP DAS Bomo, DAS Blambangan, Sangkar masuk SWP DAS Bago Wagut / Blambangan dan DAS Segoro Anakan yang masuk dalam SWP DAS Segoro Anakan.

Dengan demikian usaha pengelolaan SDA pada aspek konservasi dan pendayagunaan SDA yang harus lebih mendapat perhatian adalah pada SWP DAS Tambong, Bomo, Bago Wagut / Blambangan dan SWP DAS Blambangan.

Perincian hasil perhitungan neraca air di WS Baru Bajulmati disajikan pada **Tabel 3.9, Tabel 3.10 dan Tabel 3.11.**

Sedangkan gambaran neraca air di WS Baru Bajulmati disajikan dalam bentuk gambar grafik (periksa **Gambar 3.3, Gambar 3.4 dan Gambar 3.5**).

Tabel 3.9.
Neraca Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati, 2013

No.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Ketersediaan Air			Jumlah Potensi Air (10 ⁶ m ³ / Th)	Kebutuhan Air			Jumlah Kebutuhan Air (10 ⁶ m ³ / Th)	Balance (10 ⁶ m ³ / Th)
		Permukaan	Tanah	Sumber		Domestik	Pertanian	Industri		
		(10 ⁶ m ³ / Th)	(10 ⁶ m ³ / Th)	(10 ⁶ m ³ / Th)		(10 ⁶ m ³ / Th)	(10 ⁶ m ³ / Th)	(10 ⁶ m ³ / Th)		
1	DAS Bajulmati	122,012	101,898	10,674	234,584	16,429	98,062	3,883	118,374	116,210
2	DAS Bokpotong	14,910	12,452	1,304	28,667	2,008	11,983	0,475	14,465	14,201
3	DAS Qurah Krem	23,279	19,441	2,037	44,756	3,134	18,709	0,741	22,584	22,172
4	DAS Qurah Tals	20,730	17,312	1,814	39,856	2,791	16,661	0,660	20,112	19,744
5	DAS Sumber Tem	5,775	4,823	0,505	11,104	0,778	4,642	0,184	5,603	5,501
6	DAS Kajar	13,272	11,084	1,161	25,517	1,787	10,667	0,422	12,876	12,641
7	DAS Qurah Jarak	11,639	9,674	1,013	22,327	1,560	9,310	0,369	11,238	11,088
8	DAS Qurah Loo	4,642	3,877	0,406	8,926	0,625	3,731	0,148	4,504	4,422
9	DAS Bangsring	4,909	4,100	0,429	9,438	0,661	3,945	0,156	4,763	4,676
10	DAS Bongaring	20,719	17,303	1,813	39,834	2,790	16,652	0,659	20,101	19,733
11	DAS Ketapang	1,527	1,275	0,134	2,936	0,206	1,227	0,049	1,482	1,454
12	DAS Dadakwatu	1,999	1,670	0,175	3,844	0,269	1,607	0,064	1,939	1,904
13	DAS Ganggangan	2,754	2,300	0,241	5,296	0,371	2,214	0,088	2,672	2,623
14	DAS Watudodol	0,844	0,705	0,074	1,623	0,114	0,678	0,027	0,819	0,804
15	DAS Sugo	1,871	1,563	0,164	3,598	0,252	1,504	0,060	1,816	1,782
16	DAS Padakan	2,027	1,693	0,177	3,897	0,273	1,629	0,065	1,966	1,931
17	DAS Selogiri	5,647	4,716	0,494	10,858	0,760	4,539	0,180	5,479	5,379
18	DAS Sabeni	4,876	4,072	0,427	9,374	0,656	3,919	0,155	4,730	4,644
19	DAS Sumbemanas	15,465	12,916	1,353	29,734	2,082	12,430	0,492	15,004	14,730
20	DAS Paleran	9,912	8,278	0,867	19,058	1,335	7,967	0,315	9,617	9,441
21	DAS Butusan	2,760	2,305	0,241	5,306	0,372	2,218	0,088	2,678	2,629
22	DAS Klatak	22,129	18,481	1,936	42,546	2,980	17,785	0,704	21,469	21,077
23	DAS Sukowidi	21,279	17,771	1,862	40,912	2,865	17,102	0,677	20,645	20,268
24	DAS Banyuwangi	25,839	21,579	2,260	49,678	3,479	20,767	0,822	25,068	24,610
25	DAS Bendo	11,606	17,489	7,595	36,690	2,171	69,100	0,127	71,398	-34,707
26	DAS Pakis	23,138	7,621	3,310	34,069	0,946	30,110	0,055	31,112	2,957
27	DAS Krajan	10,724	3,975	1,726	16,425	0,493	15,705	0,029	16,227	0,198
28	DAS Tambong	205,653	68,945	29,941	304,539	8,559	272,399	0,499	281,457	23,083
29	DAS Welut	9,983	3,600	1,564	15,147	0,447	14,225	0,026	14,698	0,449
30	DAS Sekawan	21,854	7,132	3,097	32,083	0,885	28,178	0,052	29,115	2,969
31	DAS Banyualit	31,685	9,536	4,141	45,362	1,184	37,676	0,069	38,929	6,433
32	DAS Glondong	162,511	66,372	28,824	257,708	8,239	262,236	0,481	270,956	-13,249
33	DAS Mangir	39,270	10,598	4,603	54,471	1,316	41,874	0,077	43,266	11,204
34	DAS Bomo	245,820	62,646	21,980	330,446	11,757	251,965	0,165	263,887	66,559
35	DAS Komis	65,715	30,991	10,873	107,579	5,816	124,649	0,082	130,547	-22,967
36	DAS Blambangan	260,873	83,316	31,603	375,792	26,687	346,430	3,976	377,093	-1,301
37	DAS Sangkar	14,030	7,198	2,730	23,958	2,305	29,927	0,344	32,576	-8,619
38	DAS Setail	430,100	129,216	24,711	584,027	28,676	453,173	0,402	482,251	101,776
39	DAS Bangeran Lor	23,829	1,834	0,027	25,690	0,788	7,043	0,190	8,021	17,669
40	DAS Pait	27,323	2,102	0,030	29,456	0,903	8,076	0,217	9,197	20,259
41	DAS Wringinan	8,043	0,619	0,009	8,671	0,266	2,377	0,064	2,707	5,964
42	DAS Klosod	7,167	0,551	0,008	7,727	0,237	2,118	0,057	2,412	5,314
43	DAS Keben	31,749	2,443	0,035	34,227	1,050	9,384	0,252	10,686	23,541
44	DAS Sukorejo	2,903	0,223	0,003	3,130	0,096	0,858	0,023	0,977	2,153
45	DAS Kapalpecah	5,487	0,422	0,006	5,916	0,181	1,622	0,044	1,847	4,069
46	DAS Slaka	4,735	0,364	0,005	5,105	0,157	1,400	0,038	1,594	3,511
47	DAS Karang Mente	17,252	1,327	0,019	18,599	0,570	5,099	0,137	5,807	12,792
48	DAS Bantenan	30,469	2,344	0,034	32,847	1,007	9,006	0,242	10,255	22,592
49	DAS Tegaldlimo	21,336	1,642	0,024	23,001	0,705	6,306	0,170	7,181	15,820
50	DAS Purwo	27,032	2,080	0,030	29,143	0,894	7,990	0,215	9,099	20,044
51	DAS Grajagan	6,592	0,507	0,007	7,106	0,218	1,948	0,052	2,219	4,887
52	DAS Kendalrejo	24,044	1,850	0,027	25,920	0,795	7,107	0,191	8,093	17,828
53	DAS Segoro Anakan	139,496	19,165	0,020	158,681	8,065	132,121	0,307	140,493	18,188
54	DAS Qurah Gedong	11,535	1,339	0,001	12,876	0,564	9,233	0,021	9,818	3,057
55	DAS Putih	33,385	3,384	0,004	36,772	1,424	23,325	0,054	24,804	11,969
56	DAS Pergul	165,281	15,814	0,017	181,112	6,655	109,020	0,253	115,928	65,184
57	DAS Baru	547,000	142,131	62,858	751,989	30,653	331,628	9,023	371,304	380,686
58	DAS Gonggo	71,997	0,000	0,000	71,997	1,812	22,155	0,406	24,373	47,624
59	DAS Karang Tambak	123,648	0,000	0,000	123,648	3,071	37,545	0,688	41,304	82,343
60	DAS Sukomade	102,595	0,000	0,000	102,595	2,583	31,571	0,579	34,732	67,863
	Jumlah	3.326,679	1.010,066	271,424	4.608,170	210,753	3.034,523	31,088	3.276,364	1.331,806

Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2012

Tabel 3.10.
Neraca Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati, 2033 – Alternatif 1

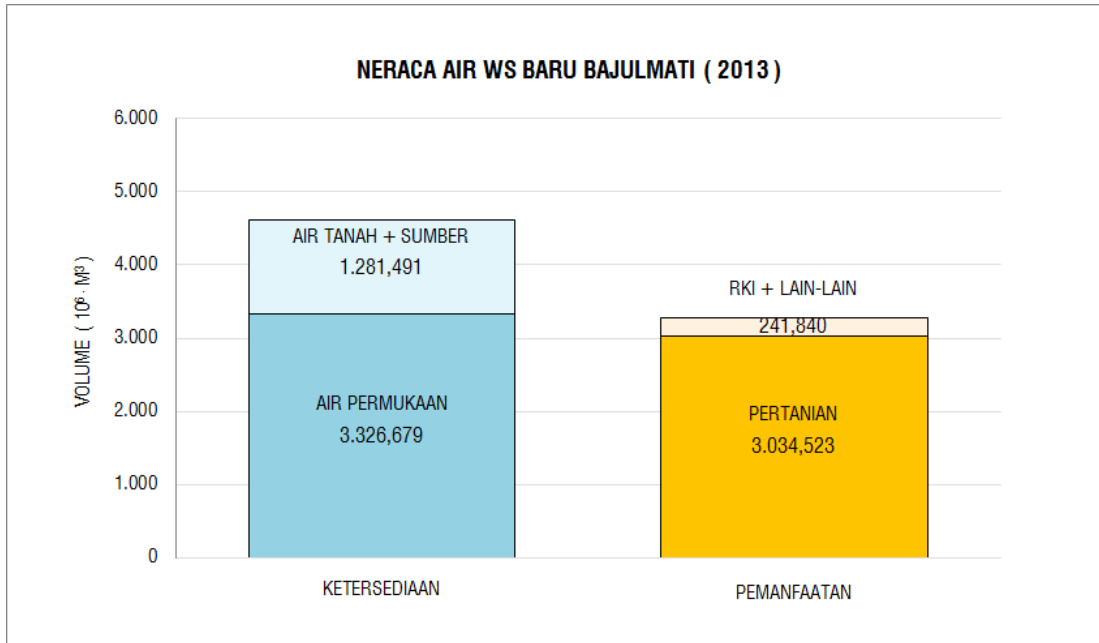
No.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Ketersediaan Air			Jumlah Potensi Air (10 ⁶ m ³ / Th)	Kebutuhan Air			Jumlah Kebutuhan Air (10 ⁶ m ³ / Th)	Balance (10 ⁶ m ³ / Th)
		Permukaan	Tanah	Sumber		Domestik	Pertanian	Industri		
		(10 ⁶ m ³ / Th)	(10 ⁶ m ³ / Th)	(10 ⁶ m ³ / Th)		(10 ⁶ m ³ / Th)	(10 ⁶ m ³ / Th)	(10 ⁶ m ³ / Th)		
1	DAS Bajulmati	134,213	112,088	11,742	258,042	19,714	107,868	4,660	132,242	125,800
2	DAS Bokpotong	16,401	13,697	1,435	31,533	2,409	13,182	0,569	16,160	15,373
3	DAS Qurah Krem	25,606	21,385	2,240	49,232	3,761	20,580	0,889	25,230	24,001
4	DAS Qurah Tals	22,803	19,044	1,995	43,841	3,349	18,327	0,792	22,468	21,373
5	DAS Sumber Tem	6,353	5,305	0,556	12,214	0,933	5,106	0,221	6,259	5,955
6	DAS Kajar	14,599	12,192	1,277	28,069	2,144	11,733	0,507	14,385	13,684
7	DAS Qurah Jarak	12,803	10,642	1,115	24,559	1,872	10,241	0,442	12,555	12,004
8	DAS Qurah Loo	5,107	4,265	0,447	9,818	0,750	4,104	0,177	5,032	4,787
9	DAS Bangsring	5,400	4,510	0,472	10,382	0,793	4,340	0,187	5,321	5,061
10	DAS Bongaring	22,790	19,033	1,994	43,818	3,348	18,317	0,791	22,456	21,362
11	DAS Ketapang	1,680	1,403	0,147	3,230	0,247	1,350	0,058	1,655	1,575
12	DAS Dadakwatu	2,199	1,837	0,192	4,228	0,323	1,767	0,076	2,167	2,061
13	DAS Ganggangan	3,030	2,530	0,265	5,825	0,445	2,435	0,105	2,985	2,840
14	DAS Watudodol	0,928	0,775	0,081	1,785	0,136	0,746	0,032	0,915	0,870
15	DAS Sugo	2,059	1,719	0,180	3,958	0,302	1,654	0,071	2,028	1,929
16	DAS Padakan	2,230	1,862	0,195	4,287	0,327	1,792	0,077	2,197	2,090
17	DAS Selogiri	6,212	5,188	0,543	11,944	0,913	4,993	0,216	6,121	5,823
18	DAS Sabeni	5,363	4,479	0,469	10,311	0,788	4,310	0,186	5,284	5,027
19	DAS Sumbermanas	17,012	14,207	1,488	32,708	2,499	13,673	0,591	16,762	15,946
20	DAS Paleran	10,903	9,106	0,954	20,963	1,602	8,763	0,379	10,743	10,220
21	DAS Butusan	3,036	2,535	0,266	5,837	0,446	2,440	0,105	2,991	2,846
22	DAS Klatak	24,342	20,329	2,130	46,801	3,576	19,564	0,845	23,984	22,816
23	DAS Sukowidi	23,407	19,549	2,048	45,004	3,438	18,813	0,813	23,064	21,940
24	DAS Banyuwangi	28,422	23,737	2,487	54,646	4,175	22,843	0,987	28,005	26,641
25	DAS Bendo	12,766	19,238	8,355	40,359	2,605	76,010	0,152	78,767	-38,408
26	DAS Pakis	25,452	8,383	3,641	37,476	1,135	33,122	0,066	34,323	3,153
27	DAS Krajan	11,797	4,372	1,899	18,068	0,592	17,275	0,035	17,902	0,166
28	DAS Tambong	226,219	75,839	32,935	334,993	10,270	299,639	0,599	310,508	24,485
29	DAS Welut	10,981	3,960	1,720	16,662	0,536	15,647	0,031	16,215	0,447
30	DAS Sekawan	24,040	7,845	3,407	35,292	1,062	30,995	0,062	32,120	3,172
31	DAS Banyuwalit	34,853	10,489	4,555	49,898	1,420	41,443	0,083	42,947	6,951
32	DAS Glondong	178,762	73,010	31,707	283,478	9,887	288,460	0,577	298,924	-15,445
33	DAS Mangir	43,197	11,658	5,063	59,918	1,579	46,061	0,092	47,732	12,186
34	DAS Bomo	270,402	68,911	24,178	363,491	14,109	277,161	0,198	291,468	72,023
35	DAS Komis	72,286	34,091	11,961	118,337	6,980	137,113	0,098	144,191	-25,854
36	DAS Blambangan	286,961	91,648	34,763	413,372	32,024	381,073	4,772	417,869	-4,497
37	DAS Sangkar	15,433	7,917	3,003	26,353	2,766	32,920	0,412	36,099	-9,745
38	DAS Setail	473,110	142,137	27,182	642,430	34,411	498,490	0,482	533,383	109,046
39	DAS Bangeran Lor	26,212	2,017	0,029	28,259	0,946	7,748	0,227	8,921	19,338
40	DAS Pait	30,055	2,313	0,034	32,401	1,084	8,883	0,261	10,228	22,173
41	DAS Wringinan	8,847	0,681	0,010	9,538	0,319	2,615	0,077	3,011	6,527
42	DAS Klosod	7,884	0,607	0,009	8,500	0,284	2,330	0,068	2,683	5,816
43	DAS Keben	34,924	2,687	0,039	37,650	1,260	10,322	0,303	11,885	25,765
44	DAS Sukorejo	3,193	0,246	0,004	3,443	0,115	0,944	0,028	1,087	2,356
45	DAS Kapalpecah	6,036	0,464	0,007	6,507	0,218	1,784	0,052	2,054	4,453
46	DAS Slaka	5,209	0,401	0,006	5,616	0,188	1,540	0,045	1,773	3,843
47	DAS Karang Mente	18,977	1,460	0,021	20,459	0,685	5,609	0,165	6,458	14,000
48	DAS Bantenan	33,515	2,579	0,037	36,132	1,209	9,906	0,291	11,406	24,726
49	DAS Tegaldlimo	23,469	1,806	0,026	25,301	0,847	6,937	0,204	7,987	17,314
50	DAS Purwo	29,736	2,288	0,033	32,057	1,073	8,789	0,258	10,120	21,937
51	DAS Grajagan	7,251	0,558	0,008	7,817	0,262	2,143	0,063	2,468	5,349
52	DAS Kendalrejo	26,448	2,035	0,030	28,512	0,954	7,817	0,229	9,001	19,512
53	DAS Segoro Anakan	153,445	21,081	0,022	174,549	9,678	145,333	0,368	155,379	19,170
54	DAS Qurah Gedong	12,688	1,473	0,002	14,163	0,676	10,157	0,026	10,859	3,305
55	DAS Putih	36,724	3,722	0,004	40,450	1,709	25,658	0,065	27,432	13,018
56	DAS Pergul	181,809	17,395	0,018	199,223	7,986	119,922	0,304	128,212	71,011
57	DAS Baru	601,700	156,344	69,144	827,188	36,783	364,791	10,827	412,401	414,787
58	DAS Gonggo	79,197	0,000	0,000	79,197	2,175	24,371	0,487	27,033	52,164
59	DAS Karang Tambak	136,013	0,000	0,000	136,013	3,686	41,299	0,826	45,811	90,202
60	DAS Sukomade	112,854	0,000	0,000	112,854	3,099	34,728	0,694	38,521	74,333
	Jumlah	3.659,347	1.111,073	298,567	5.068,987	252,903	3.337,976	37,305	3.628,184	1.440,802

Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2012

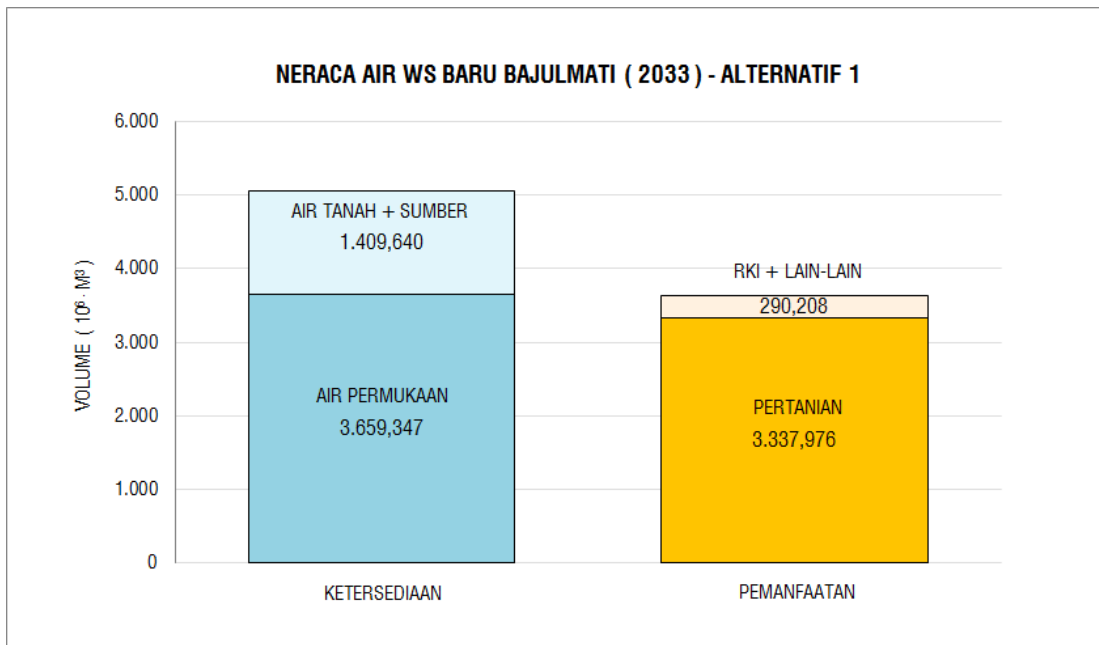
Tabel 3.11.
Neraca Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati, 2033 – Alternatif 2

No.	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Ketersediaan Air			Jumlah			Kebutuhan Air			Balance
		Permukaan	Tanah	Sumber	Potensi Air	Domestik	Pertanian	Industri	Jumlah Kebutuhan Air		
		(10 ⁶ m ³ / Th)	(10 ⁶ m ³ / Th)	(10 ⁶ m ³ / Th)	(10 ⁶ m ³ / Th)	(10 ⁶ m ³ / Th)	(10 ⁶ m ³ / Th)	(10 ⁶ m ³ / Th)	(10 ⁶ m ³ / Th)		
1	DAS Bajulmati	109,811	91,708	9,607	211,126	19,714	107,868	4,660	132,242	78,883	
2	DAS Bokpotong	13,419	11,207	1,174	25,800	2,409	13,182	0,569	16,160	9,640	
3	DAS Qurah Krem	20,951	17,497	1,833	40,280	3,761	20,580	0,889	25,230	15,050	
4	DAS Qurah Tals	18,657	15,581	1,632	35,870	3,349	18,327	0,792	22,468	13,402	
5	DAS Sumber Tem	5,198	4,341	0,455	9,993	0,933	5,106	0,221	6,259	3,734	
6	DAS Kajar	11,945	9,976	1,045	22,965	2,144	11,733	0,507	14,385	8,581	
7	DAS Qurah Jarak	10,475	8,707	0,912	20,094	1,872	10,241	0,442	12,555	7,539	
8	DAS Qurah Loo	4,178	3,489	0,366	8,033	0,750	4,104	0,177	5,032	3,001	
9	DAS Bangsring	4,418	3,690	0,387	8,494	0,793	4,340	0,187	5,321	3,174	
10	DAS Bongaring	18,647	15,573	1,631	35,851	3,348	18,317	0,791	22,456	13,395	
11	DAS Ketapang	1,374	1,148	0,120	2,642	0,247	1,350	0,058	1,655	0,987	
12	DAS Dadakwatu	1,799	1,503	0,157	3,459	0,323	1,767	0,076	2,167	1,292	
13	DAS Ganggangan	2,479	2,070	0,217	4,766	0,445	2,435	0,105	2,985	1,781	
14	DAS Watudodol	0,760	0,634	0,066	1,461	0,136	0,746	0,032	0,915	0,546	
15	DAS Sugo	1,684	1,407	0,147	3,238	0,302	1,654	0,071	2,028	1,210	
16	DAS Padakan	1,824	1,523	0,160	3,507	0,327	1,792	0,077	2,197	1,310	
17	DAS Selogiri	5,083	4,245	0,445	9,772	0,913	4,993	0,216	6,121	3,651	
18	DAS Sabeni	4,388	3,665	0,384	8,437	0,788	4,310	0,186	5,284	3,152	
19	DAS Sumbemanas	13,919	11,624	1,218	26,761	2,499	13,673	0,591	16,762	9,999	
20	DAS Paleran	8,921	7,450	0,780	17,152	1,602	8,763	0,379	10,743	6,408	
21	DAS Butusan	2,484	2,074	0,217	4,776	0,446	2,440	0,105	2,991	1,784	
22	DAS Klatak	19,916	16,633	1,742	38,291	3,576	19,564	0,845	23,984	14,307	
23	DAS Sukowidi	19,151	15,994	1,675	36,821	3,438	18,813	0,813	23,064	13,758	
24	DAS Banyuwangi	23,255	19,421	2,034	44,710	4,175	22,843	0,987	28,005	16,705	
25	DAS Bendo	10,445	15,740	6,836	33,021	2,605	76,010	0,152	78,767	-45,746	
26	DAS Pakis	20,825	6,859	2,979	30,662	1,135	33,122	0,066	34,323	-3,661	
27	DAS Krajan	9,652	3,577	1,554	14,783	0,592	17,275	0,035	17,902	-3,119	
28	DAS Tambong	185,088	62,050	26,947	274,085	10,270	299,639	0,599	310,508	-36,423	
29	DAS Welut	8,985	3,240	1,407	13,632	0,536	15,647	0,031	16,215	-2,583	
30	DAS Sekawan	19,669	6,419	2,787	28,875	1,062	30,995	0,062	32,120	-3,245	
31	DAS Banyualit	28,516	8,582	3,727	40,825	1,420	41,443	0,083	42,947	-2,121	
32	DAS Gondong	146,260	59,735	25,942	231,937	9,887	288,460	0,577	298,924	-66,987	
33	DAS Mangir	35,343	9,539	4,142	49,024	1,579	46,061	0,092	47,732	1,291	
34	DAS Bomo	221,238	56,381	19,782	297,401	14,109	277,161	0,198	291,468	5,934	
35	DAS Komis	59,143	27,892	9,786	96,821	6,980	137,113	0,098	144,191	-47,370	
36	DAS Blambangan	234,786	74,985	28,442	338,213	32,024	381,073	4,772	417,869	-79,656	
37	DAS Sangkar	12,627	6,478	2,457	21,562	2,766	32,920	0,412	36,099	-14,537	
38	DAS Setail	387,090	116,294	22,240	525,624	34,411	498,490	0,482	533,383	-7,759	
39	DAS Bangeran Lor	21,446	1,650	0,024	23,121	0,946	7,748	0,227	8,921	14,200	
40	DAS Pait	24,590	1,892	0,027	26,510	1,084	8,883	0,261	10,228	16,282	
41	DAS Wringinan	7,239	0,557	0,008	7,804	0,319	2,615	0,077	3,011	4,793	
42	DAS Klosod	6,451	0,496	0,007	6,954	0,284	2,330	0,068	2,683	4,271	
43	DAS Keben	28,574	2,199	0,032	30,804	1,260	10,322	0,303	11,885	18,919	
44	DAS Sukorejo	2,613	0,201	0,003	2,817	0,115	0,944	0,028	1,087	1,730	
45	DAS Kapalpecah	4,939	0,380	0,006	5,324	0,218	1,784	0,052	2,054	3,270	
46	DAS Slaka	4,262	0,328	0,005	4,595	0,188	1,540	0,045	1,773	2,822	
47	DAS Karang Mente	15,527	1,195	0,017	16,739	0,685	5,609	0,165	6,458	10,281	
48	DAS Bantenan	27,422	2,110	0,031	29,562	1,209	9,906	0,291	11,406	18,156	
49	DAS Tegaldimo	19,202	1,477	0,021	20,701	0,847	6,937	0,204	7,987	12,714	
50	DAS Purwo	24,329	1,872	0,027	26,228	1,073	8,789	0,258	10,120	16,109	
51	DAS Grajagan	5,932	0,456	0,007	6,395	0,262	2,143	0,063	2,468	3,928	
52	DAS Kendalrejo	21,639	1,665	0,024	23,328	0,954	7,817	0,229	9,001	14,328	
53	DAS Segoro Anakan	125,546	17,248	0,018	142,813	9,678	145,333	0,368	155,379	-12,566	
54	DAS Qurah Gedong	10,381	1,205	0,001	11,588	0,676	10,157	0,026	10,859	0,729	
55	DAS Putih	30,047	3,045	0,003	33,095	1,709	25,658	0,065	27,432	5,664	
56	DAS Pergul	148,753	14,233	0,015	163,001	7,986	119,922	0,304	128,212	34,789	
57	DAS Baru	492,300	127,918	56,572	676,790	36,783	364,791	10,827	412,401	264,389	
58	DAS Gonggo	64,798	0,000	0,000	64,798	2,175	24,371	0,487	27,033	37,765	
59	DAS Karang Tambak	111,283	0,000	0,000	111,283	3,686	41,299	0,826	45,811	65,472	
60	DAS Sukomade	92,335	0,000	0,000	92,335	3,099	34,728	0,694	38,521	53,814	
	Jumlah	2.994,011	909,060	244,282	4.147,353	252,903	3.337,976	37,305	3.628,184	519,168	

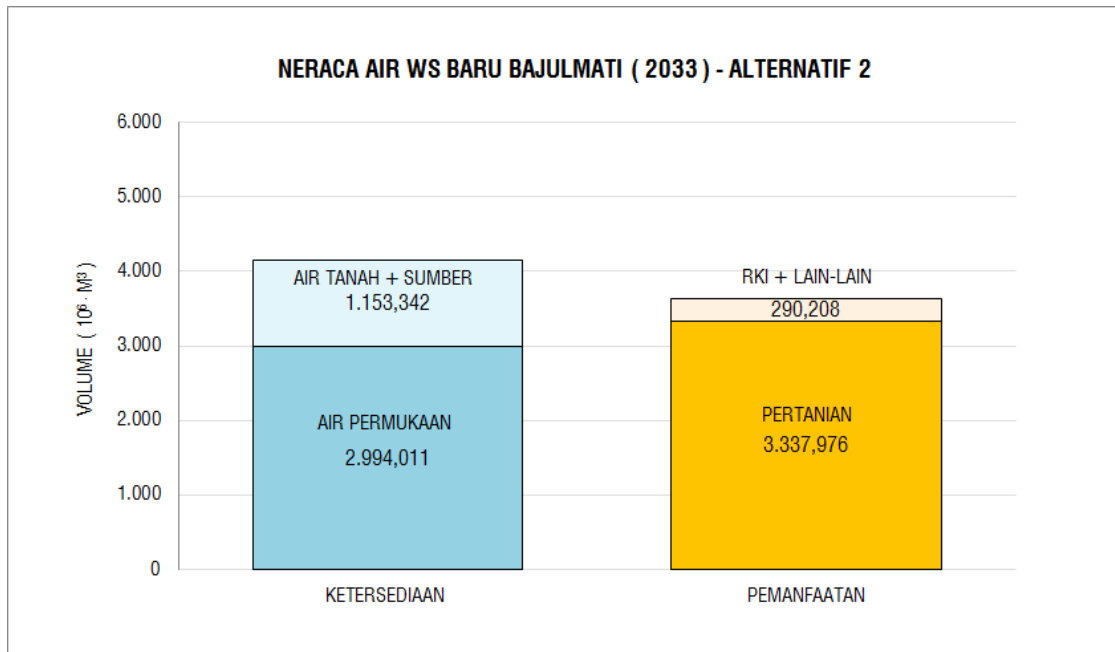
Sumber : Hasil Analisa Konsultan, 2012



Gambar 3.3.
Grafik Neraca Air WS Baru Bajulmati
Kondisi Sekarang (Tahun 2013)



Gambar 3.4.
Grafik Neraca Air WS Baru Bajulmati
Kondisi 20 Th. Mendatang (2033) – Alternatif 1



Gambar 3.5.

Grafik Neraca Air WS Baru Bajulmati
Kondisi 20 Th. Mendatang (2033) – Alternatif 2

3.6. Analisa Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

3.6.1. Erosi dan Sedimentasi

1) Erosi

Di WS Baru Bajulmati, erosi dan sedimentasi merupakan salah satu permasalahan yang mengancam kelestarian fungsi SDA serta keberlangsungan manfaat yang diperoleh dari upaya pengembangan dan pengelolaan SDA yang telah dilaksanakan. Perhitungan erosi yang digunakan adalah model USLE (*Universal Soil Loss Equation*).

Analisis tingkat kekritisan lahan dapat diasumsikan sebagai tahap final dari keseluruhan proses analisis kekritisan lahan yang dilakukan untuk mengkaji karakteristik dan kerusakan lahan pada suatu DAS menggunakan parameter-parameter biogeofisik dan sosial-ekonomi. Pemodelan kekritisan lahan ini diperoleh dengan *Arithmetic Weighted Overlay*, yaitu metode tumpang susun dengan pembobotan pada setiap parameter pendukungnya, tergantung dari kontribusi yang disumbangkan tiap parameter tersebut, atau dengan kata lain sejauh mana masing-masing parameter memberikan *influence*/pengaruh terhadap tingkat kekritisan lahan yang dihasilkan.

Tabel 3.12.

Luasan Tingkat Kekritisan Lahan di WS Baru Bajulmati (Ha)

KABUPATEN	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Total
Banyuwangi	47.884,88	184.156,34	55.178,61	64.109,05	8.276,87	578.250,00

Sumber : Analisa Tumpang susun dengan Pembobotan

Memperhatikan tabel diatas, Luasan Tingkat Kekritisan Lahan di WS Baru Bajulmati seluas 578.250,00 Ha dengan tingkat potensial kritis seluas 184.156,34 Ha dan tingkat sangat kritis seluas 8.276,87 Ha.

Tabel 3.13.
Tabel Analisa Kekritisan Lahan Berdasarkan Luasan DAS Kritis

No.	DAS	Luas (Ha)					Lahan Kritis (7+ 8)	% Lahan Kritis dan Luas DAS	
		Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis			Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DAS BAJULMATI	809,69	11.742,95	787,10	3.140,70	853,97	17.334,40	3.994,67	23,04%
2	DAS BOMO	1.629,54	13.248,21	148,34	5.034,16	167,82	20.228,07	5.201,98	25,72%
3	DAS KALIBARU	34.430,43	44.801,70	21.383,38	9.511,94	2.074,22	###	11.586,15	10,33%
4	DAS SETAIL	6.773,25	24.178,95	8.090,50	6.722,09	381,60	46.146,39	7.103,69	15,39%
5	DAS TAMBONG	1.152,53	14.550,06	2.029,50	8.051,92	129,21	25.913,22	8.181,13	31,57%

Sumber : Hasil Analisa, 2012

Tabel 3.14.
Analisa Kekritisan Lahan Berdasarkan Luasan Kecamatan

No.	Kecamatan	Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	Jumlah	Lahan Kritis (6+ 7)	% Lahan Kritis dan Luas Kecamatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	WONGSOREJO	1.529,41	22.414,05	3.722,24	16.204,58	2.609,73	46.480,00	18.814,31	40%
2	BANGOREJO	638,43	4.012,41	5.930,24	2.526,55	635,37	13.743,00	3.161,92	23%
3	BANYUWANG	0,00	1.394,03	512,96	1.106,01	0,00	3.013,00	1.106,01	37%
4	CLURING	315,66	7.950,61	688,25	789,49	0,00	9.744,00	789,49	8%
5	GAMBIRAN	337,00	3.697,00	1.711,00	932,00	0,00	6.677,00	932,00	14%
6	TEGALSARI	330,00	3.612,00	1.670,00	911,00	0,00	6.523,00	911,00	14%
7	GENTENG	1.624,36	3.719,65	762,99	2.127,01	0,00	8.234,00	2.127,01	26%
8	GIRI	0,00	1.665,53	0,00	465,47	0,00	2.131,00	465,47	22%
9	LICIN	785,00	11.119,00	1.691,00	3.075,00	255,00	16.925,00	3.330,00	20%
10	GLAGAH	369,00	5.049,00	757,00	1.384,00	116,00	7.675,00	1.500,00	20%
11	GLENMORE	21.081,29	15.761,68	4.692,65	403,10	259,28	42.198,00	662,37	2%
12	KABAT	31,20	5.614,77	792,46	4.291,62	17,95	10.748,00	4.309,57	40%
13	KALIBARU	13.574,27	19.354,20	7.038,52	632,11	76,90	40.676,00	709,01	2%
14	KALIPURO	465,10	11.875,03	4.818,77	12.539,54	1.304,57	31.003,00	13.844,11	45%
15	MUNCAR	0,00	4.374,48	1.469,04	6.982,91	1.780,56	14.607,00	8.763,48	60%
16	PESANGGRAHAN	7.574,00	40.180,00	14.925,00	14.726,00	2.845,00	80.250,00	17.571,00	22%
17	SILIRAGUNG	898,00	4.763,00	1.769,00	1.746,00	339,00	9.515,00	2.085,00	22%
18	PURWOKAJATI	1.936,21	7.700,23	9.040,06	1.249,38	104,12	20.030,00	1.353,50	7%
19	ROGJAMPI	32,19	7.268,86	497,10	2.434,84	0,00	10.233,00	2.434,84	24%
20	SEMPU	804,36	13.047,93	533,42	2.790,66	306,63	17.483,00	3.097,29	18%
21	SINGOJURUH	0,13	5.646,64	0,00	342,23	0,00	5.989,00	342,23	6%
22	SONGGON	4.150,74	19.927,04	1.577,12	4.241,18	287,91	30.184,00	4.529,10	15%
23	SRONO	0,00	6.283,85	0,03	3.631,64	161,49	10.077,00	3.793,12	38%
24	TEGALDUMI	26.814,00	66.643,12	27.907,52	11.071,70	1.675,30	134.111,64	12.747,00	10%

Sumber : Hasil Analisa, 2012

2) Sedimentasi

Sedimentasi adalah pengendapan sedimen atau material hasil proses erosi, baik berupa erosi permukaan, erosi parit, atau jenis erosi tanah lainnya. Sedimentasi dapat mempercepat pendangkalan pada bangunan-bangunan air ataupun sungai.

Rencana pengelolaan sedimen dengan membuat bangunan pengendali sedimen (Chek Dam/Sabo Dam) ditujukan untuk mengatasi masalah sedimen di WS Baru Bajulmati, baik yang berasal dari erosi dan longsoran tebing maupun hasil letusan Gunung Raung dan Gunung Ijen.

- ▮ Perencanaan Pengendalian Sedimen Vulkanik G. Raung dan G. Ijen
Dalam pengendalian sedimen vulkanik G. Raung dan G. Ijen pada WS Baru Bajulmati harus dirumuskan rencana untuk mencegah bencana akibat sedimen yaitu :
 - Perencanaan pengendalian sedimen vulkanik untuk menghadapi letusan vulkanik antara lain aliran *pyroclastic*, hujan abu vulkanik dan aliran lahar primer.
 - Perencanaan pengendalian sedimen vulkanik akibat aliran lahar sekunder (aliran *debris*, aliran lumpur)

Untuk mencegah dan mengurangi bahaya bencana yang diakibatkan oleh sedimen dilakukan kombinasi pendekatan yaitu secara struktural : mencegah bahaya sedimen melalui bangunan pengendali sedimen dan secara non struktural : mengurangi bahaya sedimen vulkanik terutama bagi manusia.

- ▮ Perencanaan Pengendalian Sedimen Akibat Erosi dan Longsoran Tebing dengan mempertimbangkan kondisi erosi dan sedimentasi yang terjadi di Upper DAS-DAS di WS Baru Bajulmati, mengusulkan pembangunan *sabo dam* di *Upper DAS-DAS* yang kritis, dan di sungai – sungai yang kritis, dengan infrastruktur *sabo dam* dan *consolidation dam*.

- ▮ Bangunan Pengendali Sedimen yang Ada

Beberapa bangunan Pengendali Sedimen perlu dibangun di sungai-sungai yang berada di lereng G. Raung maupun G. Ijen. Di sekitar G. Raung dan G. Ijen dibangun kantung pasir, untuk menampung sedimen dari letusan gunung tersebut.

- ▮ Fasilitas yang Diusulkan

Direncanakan kantung pasir baru dibangun untuk menanggulangi permasalahan yang diakibatkan penggerusan dasar sungai. Selain itu juga diperlukan pelepasan sedimen dari slit-type atau large-conduit-type Sabo dam ke bagian hilir sungai, selama periode banjir kecil ke sedang . Sedangkan untuk mengatasi permasalahan sedimen hasil letusan G. Raung dan G. Ijen, diusulkan pembangunan beberapa *sabo dam*, *sand pocket* dan *consolidation dam* pada beberapa sungai berdasarkan tingkat bahaya akibat letusan.

3.6.2. Analisa Pengendalian Banjir

1. Pengendalian Banjir pada Masa yang Akan Datang

Di WS Baru Bajulmati, pengendalian banjir masih dilaksanakan pada beberapa sungai utama dan telah dilakukan dengan baik, namun pada anak-anak sungai pengendaliannya belum maksimal. **UU No.7/2004** tentang Sumber Daya Air

menyebutkan penanganan bencana bisa dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

2. Pengembangan Sistem Peringatan Dini Berbasis Masyarakat

Sistem peringatan dini (early warning system) sebagai salah satu upaya non struktural pengendalian bencana merupakan satu elemen utama dalam mengurangi resiko bencana dan harus berpusat secara kuat pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir mulai hilir sampai hulu. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin tingginya frekuensi kejadian banjir pada sungai di WS Baru Bajulmati dimana wilayah-wilayah tersebut tidak tercakup dalam sistem telemeteri Flood Forecasting and Warning System (FFWS). Dengan penerapan system ini adalah agar dapat memberikan informasi lebih dini bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri atau barang-barang berharganya. Untuk menciptakan sistem peringatan dini datangnya banjir yang efektif di WS Baru Bajulmati, perlu dilakukan beberapa hal antara lain :

- Membuat peta resiko banjir.
- Melakukan survei kerentanan masyarakat.
- Meningkatkan keinginan melakukan penelitian dan pelatihan.
- Mengembangkan, menguji dan menyempurnakan skenario evakuasi.
- Mengembangkan sistem-sistem berbasis masyarakat.
- Mengembangkan standar dan pedoman.
- Membantu lembaga nasional yang terkait dengan cuaca dan penanggulangan bencana.

3.6.3. Analisa Kualitas Air

Tolok ukur untuk mengetahui mutu air mengacu pada Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air dari PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi penanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi penanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi penanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kriteria mutu air dari setiap kelas air sesuai PP 82 Tahun 2001 telah disebutkan pada **Tabel 3.1** diatas.

1. Kualitas Sumber Air

Hasil pemantauan kualitas air sungai tahun 2011 pada WS Baru Bajulmati di lokasi pos pengamatan KBR 1 dan KBR 2 dengan parameter pH, DO, BOD, dan COD disajikan pada berikut.

Tabel 3.15.
Evaluasi Pemantauan Kualitas Air di WS Baru Bajulmati, Tahun 2011

NO	LOKASI POS PENGAMATAN				PARAMETER (mg/L)															
	KODE STASIUN	KECAMATAN	SUNGAI	KELAS	JANUARI				PEBRUARI				MARET				APRIL			
					pH	DO	BOD	COD	pH	DO	BOD	COD	pH	DO	BOD	COD	pH	DO	BOD	COD
1	KBR 1	GLENMORE	BARU	1	7,66	7,00	2,50	5,80	7,30	7,10	3,30	8,00	7,80	7,10	2,80	6,40	7,80	7,40	4,40	8,70
	KBR 2	GLENMORE	BARU	1	7,54	7,40	3,20	8,20	6,80	6,20	2,60	5,80	7,90	7,50	2,70	5,80	7,60	7,50	2,50	5,60

NO	LOKASI POS PENGAMATAN				PARAMETER (mg/L)															
	KODE STASIUN	KECAMATAN	SUNGAI	KELAS	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS			
					pH	DO	BOD	COD	pH	DO	BOD	COD	pH	DO	BOD	COD	pH	DO	BOD	COD
1	KBR 1	GLENMORE	BARU	1	7,30	6,80	3,50	9,00	7,60	6,80	3,80	9,00	7,60	7,20	5,30	9,90	7,80	6,40	5,30	11,80
	KBR 2	GLENMORE	BARU	1	7,80	7,10	2,80	6,40	7,80	7,10	2,60	6,60	7,80	7,10	4,00	7,80	7,80	7,20	4,00	8,50

NO	LOKASI POS PENGAMATAN				PARAMETER (mg/L)															
	KODE STASIUN	KECAMATAN	SUNGAI	KELAS	SEPTEMBER				OKTOBER				NOPEMBER				DESEMBER			
					pH	DO	BOD	COD	pH	DO	BOD	COD	pH	DO	BOD	COD	pH	DO	BOD	COD
1	KBR 1	GLENMORE	BARU	1	7,50	6,80	4,60	11,70	8,42	6,80	7,80	22,40	7,84	7,10	12,50	30,70	7,30	6,90	13,60	60,00
	KBR 2	GLENMORE	BARU	1	7,90	7,40	3,70	8,60	7,97	6,90	3,50	9,30	7,65	7,50	4,50	11,00	6,80	6,20	9,00	21,30

Sumber : Pengairan Dalam Angka, 2011

Tabel 3.16.

Evaluasi Pemantauan Kualitas Air Kali Baru Pada Lokasi KBR. 2, Tahun 2011

NO	PARAMETER	SATUAN	BLAN												MIN	MAX	RATE
			JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	RSIKA																
1	Temperatur	°C	26,00	27,00	27,00	25,00	28,00	26,00	29,00	29,00	27,00	28,00	29,00	26,00	25,00	29,00	27,25
2	TSS	mg/L	25,20	23,20	37,00	9,00	82,00	35,00	30,00	18,00	16,00	20,00	18,00	40,00	9,00	82,00	29,45
3	Kekeruhan	NTU	16,80	14,10	12,60	7,00	67,80	34,10	11,10	7,80	6,70	16,90	23,50	33,60	6,70	67,80	21,00
II	KIMIA ANORGANIK																
1	Ph	mg/L	7,54	6,80	7,90	7,60	7,80	7,80	7,80	7,70	7,90	7,97	7,65	6,80	6,80	7,97	7,61
2	BOD	mg/L	3,20	2,60	2,70	2,50	2,80	2,60	4,00	4,00	3,70	3,50	4,60	9,00	2,50	9,00	3,77
3	COD	mg/L	8,20	5,80	5,80	5,60	6,40	6,60	7,80	8,50	8,60	9,28	11,00	21,30	5,60	21,30	8,74
4	DO	mg/L	7,40	6,20	7,50	7,50	7,10	7,10	7,10	7,20	7,40	6,90	7,50	6,20	6,20	7,50	7,09
5	PO ₄ -P	mg/L	0,250	0,220	0,190	0,170	0,210	0,160	0,210	0,210	0,230	0,240	0,220	0,200	0,160	0,250	0,209
6	NO ₃ -N	mg/L	0,800	1,000	0,800	0,900	0,940	1,340	1,259	0,942	0,850	0,950	0,720	0,822	0,720	1,340	0,944
7	NH ₃ -N	mg/L	0,004	0,000	0,001	0,006	0,003	0,006	0,003	0,000	0,001	0,009	0,007	0,000	0,000	0,009	0,003
8	NO ₂ -N	mg/L	0,004	0,003	0,003	0,005	0,004	0,010	0,004	0,005	0,005	0,006	0,008	0,005	0,003	0,010	0,005
III	MIKROBIOLOGI																
1	Fecal Coliform	Jml/100ml	750,00	850,00	200,00	1900,00	2000,00	1900,00	800,00	3000,00	700,00	1800,00	1500,00	2000,00	200,00	3000,00	1450,00
IV	KIMIA ORGANIK																
1	Minyak & Lemak	µg/L	< 1050	< 1050	< 1050	< 1050	< 1050	< 1050	< 1050	< 1050	< 1050	< 1050	< 1050	< 1050	0,00	0,00	0,00
2	MBAS	µg/L	40,40	< 9	32,30	21,40	37,30	33,40	230,93	10,60	23,20	< 9	1,80	16,40	1,80	230,93	37,31
3	Phenol	µg/L	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 2	< 2	< 2	< 2	0,00	0,00	0,00

2. Kualitas Air Limbah

- Industri : Evaluasi dengan menggunakan 3 parameter (BOD, COD dan TSS), masih adanya industri yang dipantau belum memenuhi baku mutu air limbah.
- Kualitas air limbah hasil pemantauan dibandingkan dengan baku mutu limbah cair sesuai Keputusan Gubernur No. 45 tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Industri atau Kegiatan Usaha Lainnya di Jawa Timur.
- Domestik (saluran sanitasi umum) : Evaluasi dengan menggunakan 2 parameter (BOD dan TSS), dari semua lokasi yang dipantau telah memenuhi baku mutu.
- Kualitas air limbah hasil pemantauan dibandingkan dengan baku mutu limbah cair sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
- Hotel : Evaluasi dengan menggunakan 2 parameter (BOD dan COD), masih adanya hotel yang dipantau belum memenuhi baku mutu.
- Kualitas air limbah hasil pemantauan dibandingkan dengan baku mutu limbah cair Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 60 Tahun 1999 tentang Baku Mutu limbah Cair Bagi Usaha Kegiatan Hotel di Provinsi Jawa Timur
- Rumah Sakit : Evaluasi dengan menggunakan 2 parameter (BOD dan COD), masih adanya rumah sakit yang dipantau belum memenuhi baku mutu.
- Kualitas air limbah hasil pemantauan dibandingkan dengan baku mutu limbah cair Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 61 Tahun 1999 tentang Baku Mutu limbah Cair Bagi Usaha Kegiatan Rumah Sakit di Provinsi Jawa Timur.

3. Status Mutu Air

Dalam penghitungan Status Mutu Air WS Baru Bajulmati parameter yang digunakan mencakup 11 parameter yaitu :

- Fisika : TSS dan TDS
- Kimia : DO, BOD, COD, NO₂_N, NO₃_N, PO₄_P, Detergen, Raksa, Timbal, Sianida dan Phenol.

4. Permasalahan Kualitas Air

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang bermukim di WS Baru Bajulmati dan semakin beragamnya kegiatan yang dilakukan, mengakibatkan semakin bertambahnya permasalahan yang timbul dan berdampak pada penurunan kualitas air sungai, yakni :

- Seringnya terjadi ikan mabuk akibat semakin tingginya beban pencemar yang masuk, baik dari kegiatan industri, domestik dan pertanian.
- Terjadinya peningkatan *turbidity* (kekeruhan) pada musim hujan karena meningkatnya kandungan sedimen di dalam air sungai.

5. Prediksi Kualitas Air Sungai pada WS Baru Bajulmati

Dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di WS Baru Bajulmati, akan mempengaruhi beban pencemaran yang masuk ke sungai. Dengan asumsi tidak ada pertumbuhan industri, pertumbuhan penduduk rata-rata 0,85%/tahun dan tanpa memperhitungkan limbah pertanian, dapat diprediksikan bahwa sumber pencemaran yang masuk ke sungai-sungai di WS Baru Bajulmati pada tahun 2023 dan 2033 akan semakin meningkat.

6. Skenario Penanganan Kualitas Air

Tingkat pencemaran di WS Baru Bajulmati cukup tinggi, untuk itu perlu pengendalian agar tingkat pencemaran yang terjadi dapat ditekan. Proyeksi beban pencemar BOD pada tahun 2023 akan menghasilkan penurunan total beban pencemaran menjadi 5 juta sampai 125 juta g/hari (pengendalian 20%), sedangkan untuk pengendalian 50% akan menghasilkan penurunan total beban pencemaran menjadi 5 juta sampai 78 juta g/hari. Adapun proyeksi beban pencemar BOD pada tahun 2033 dengan pengendalian 20% akan menghasilkan penurunan total beban pencemaran menjadi 5 juta sampai 134 juta g/hari, sedangkan untuk pengendalian 50% akan menghasilkan penurunan total beban pencemaran menjadi 5 juta sampai 83 juta g/hari.

7. Pola Penanganan Kualitas Air

Berdasarkan permasalahan kualitas air, maka diusulkan pola penanganan kualitas air sebagai berikut :

▣ **Jangka Pendek**

- Pemantauan rutin baik di sungai maupun sumber pencemar.
- Konservasi DAS – DAS di WS Baru Bajulmati.
- Pengalokasian debit untuk pemeliharaan sungai.
- Penyuluhan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan lingkungan
- Pengembangan SDM melalui pelatihan staf.
- Peningkatan koordinasi antar dinas/instansi terkait.
- Pengendalian limbah padat dan cair domestik.
- Tindak lanjut terhadap aspek legalitas dan pelaksanaannya untuk luran Pembuangan Limbah Cair (IPLC).

▣ **Jangka Menengah**

- Pemantauan rutin baik di sungai maupun sumber pencemar.
- Konservasi DAS – DAS di WS Baru Bajulmati.
- Pengalokasian debit untuk pemeliharaan sungai.
- Peningkatan partisipasi masyarakat (aktif dan konstruktif).
- Pengendalian limbah padat dan cair domestik.
- Penerapan luran Pembuangan Limbah Cair (IPLC) untuk kegiatan industri, hotel restoran dan rumah sakit.

▣ **Jangka Panjang**

- Pemantauan rutin baik di sungai maupun sumber pencemar.
- Konservasi DAS- DAS di WS Baru Bajulmati.
- Pengalokasian debit untuk pemeliharaan sungai.
- Peningkatan sistem informasi lingkungan hidup.
- Pengendalian limbah padat dan cair domestik.
- Penerapan luran pembuangan limbah cair (IPLC) untuk kegiatan industri, hotel restoran dan rumah sakit.

3.7. Analisa Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air

3.7.1. Pengelolaan Informasi Sumber Daya Air

Pengelolaan sistem informasi sumber daya air (SDA) di WS Baru Bajulmati meliputi kegiatan perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi SDA. Pengelolaan sistem informasi SDA di WS Baru Bajulmati diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengelola Wilayah Sungai sesuai dengan kewenangannya, dimana dalam menyediakan informasi SDA tersebut berkewajiban menjaga keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas data dan informasi. Data yang dipakai sebagai informasi SDA dianggap benar setelah disahkan oleh pejabat

yang berwenang yaitu pejabat yang ditetapkan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota untuk menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi SDA.

Badan hukum, organisasi, lembaga, dan perseorangan yang melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi berkaitan dengan SDA menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang SDA.

3.7.2. Pembentukan Inter Agency Management Information System

Pada saat ini di WS Baru Bajulmati terdapat lebih dari 10 instansi yang terkait dengan pengelolaan SDA. Masing-masing instansi tersebut memiliki dan mengelola informasi terkait dengan aktifitasnya dalam pengelolaan SDA.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan penggunaan informasi SDA antara lain:

- a. Kegiatan yang dilakukan masing-masing instansi tidak jelas bagi instansi yang lain sehingga tidak ada kejelasan informasi apa saja yang ada pada masing-masing instansi.
- b. Informasi tidak tersedia dalam format yang mudah dibaca dan tidak mudah diakses.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk sistem pengolahan informasi SDA yang menghubungkan semua instansi (*Inter Agency Management Information System*) yang memiliki dan mengolah data terkait dengan kegiatan pengelolaan SDA yang dilakukannya.

3.7.3. Fasilitas Pembentukan Inter Agency Management Information System.

Masing-masing instansi harus memiliki perangkat komputer dan dana operasi dan pemeliharaan yang memadai untuk mendukung *Inter Agency Information System*. Perangkat komputer yang dimaksud meliputi *Personal Computer (PC) Server*, terminal dan *peripheral*-nya (*PC, printer, scanner, HUB, router* dan lain-lain) serta informasi aplikasi untuk jaringan.

3.8. Analisa Aspek Peran Serta Masyarakat dan Sistem Koordinasi

3.8.1. Analisa Aspek Peran Serta Masyarakat

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan SDA. Peran serta masyarakat dalam pendayagunaan sumber daya air harus lebih ditingkatkan lagi, antara lain melalui dewan SDA Nasional dan dewan SDA Propinsi/ Kabupaten. Peran masyarakat dalam pengendalian daya rusak dapat diwujudkan melalui pendekatan persuasif dan penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang mengambil galian golongan C, *early warning system* berbasis masyarakat untuk mengurangi kerugian akibat banjir serta pembuatan IPAL komunal berbasis

masyarakat untuk mengurangi limbah domestik yang masuk ke badan sungai. Pada tahun-tahun mendatang diharapkan akan terbentuknya TK-PSDA WS Baru Bajulmati sehingga peran serta masyarakat akan lebih nyata pada pengelolaan Sumber Daya Air di WS Baru Bajulmati.

3.8.2. Analisa Aspek Sistem Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Lingkup koordinasi mencakup seluruh aspek dan tahapan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk menumbuhkan komitmen rasa memiliki dan rasa tanggung jawab bagi yang berkepentingan dengan tingkatan wadah koordinasi sebagai berikut :

a. Dewan SDA Propinsi

Berfungsi menetapkan kebijakan, strategi, program, pelaksanaan dan pembiayaan pengelolaan wilayah sungai pada tingkat propinsi. Keanggotaan dewan meliputi : gubernur (sebagai ketua), Dinas PU Pengairan dan BAPEDALDA Propinsi (sebagai sekretaris), dengan anggota bupati/walikota terkait. Pengelola SDA (*operator*), wakil pemanfaat (sesuai sektor masing-masing), pemuka masyarakat, pakar/pemerhati (dari Perguruan Tinggi) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

b. Tim Koordinasi Pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati

Berfungsi memberi masukan kepada menteri, gubernur dan bupati tentang kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan operasional pengelolaan SDA. Keanggotaannya meliputi wakil gubernur, Dinas PU Pengairan dan BAPEDALDA Provinsi, dengan anggota bupati / walikota terkait. TK-PSDA WS Baru Bajulmati, nantinya pada saat dibentuk, akan mempunyai tugas :

- Menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan yang diperoleh dari unit teknis pengelola wilayah sungai dan instansi terkait, yang diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan Pemerintah Propinsi mengenai koordinasi tata pengaturan.
- Memberikan pertimbangan dan atau saran pemecahan masalah kepada gubernur,
- Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan keputusan masalah-masalah koordinatif.
- Membuat laporan secara berkala atau setiap saat diperlukan, disampaikan kepada gubernur dan Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air atas pelaksanaan tugas-tugasnya.

3.8.3. Analisa Aspek Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Air

Pesatnya pembangunan serta tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan perindustrian serta infrastruktur lainnya. Sejalan dengan makin meningkatnya pembangunan di berbagai

bidang, maka kebutuhan untuk memanfaatkan sumber daya air juga meningkat, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Pertumbuhan penduduk dan peningkatan tuntutan masyarakat memicu peningkatan pembangunan ekonomi. Air bukan lagi menjadi barang yang tersedia secara melimpah dan bebas digunakan, melainkan telah menjadi komoditi ekonomi yang bersifat sosial dan keberadaannya makin langka, sehingga diperlukan sistem pengelolaan sumber daya air yang memadai.

Dalam sistem pengelolaan sumber daya air yang memadai, di samping menyangkut masalah-masalah fisik dan pembiayaan, juga masalah kelembagaan akan semakin berperan. Kelembagaan pengelola sumber daya air sangat diperlukan guna melaksanakan pengelolaan sumber daya air secara benar, efisien dan efektif. Mengingat sumber daya air merupakan suatu aset yang mengalir, artinya pengelolaan di daerah hulu akan mempengaruhi daerah hilirnya, maka pengelolaannya dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan wilayah sungai. Sistem pengelolaan ini dilakukan dengan mengikutsertakan dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait termasuk peran serta masyarakat. Pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan sumber daya air di WS Baru Bajulmati antara lain :

1. Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 23 tahun 2000 tentang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur bertugas membantu Gubernur melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Air permukaan lintas kabupaten/kota;
- b) Penyediaan dukungan dan/atau bantuan untuk kerja sama antar kabupaten/kota dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan/dam;
- c) Penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan SDA permukaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas kabupaten/kota beserta bangunan-bangunan pelengkap;
- d) Perijinan pemanfaatan sumber daya air permukaan pada daerah aliran sungai lintas kabupaten/kota;
- e) Perijinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi sumber-sumber air atau saluran irigasi lintas kabupaten/kota;
- f) Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi utama lintas kabupaten/kota beserta bangunan-bangunan pelengkap;
- g) Penyusunan rencana penyediaan air irigasi

Di bawah koordinasi Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur terdapat 9 (sembilan) UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (UPT PSDA WS), dimana 1 di antaranya berada di WS Baru Bajulmati, yaitu UPT PSDA WS Sampean Baru di Bondowoso.

UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air
- b) Pelaksanaan operasional konservasi / pelestarian air & sumber air Pemeliharaan sumber-sumber air dan bangunan pengairan
- c) Pengendalian banjir penanggulangan kekeringan dan pencemaran air
- d) Pelaksanaan ketatausahaan
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 614/KPTS/M/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penggunaan Air dan atau Sumber Air di Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, maka untuk pemberian ijin di wilayah kerja Perum Jasa Tirta I, dilimpahkan dari Menteri kepada Gubernur cq Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur.

2. Institusi Lainnya yang Terkait dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Institusi lainnya yang terkait dalam rangka mendukung pengelolaan SDA yang dilaksanakan oleh sebagai berikut :

Tabel 3.17.

Institusi Lainnya yang terkait dengan Pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati

No	Institusi	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang sumber daya air
2	Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (Pemeliharaan Hutan)	Bertanggung jawab untuk konservasi tanah dan rehabilitasi lahan dalam daerah hutan alami dan daerah hutan produksi
3	Dinas Kehutanan	Bertanggung jawab dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi dari pengelolaan daerah tangkapan
4	Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP DAS)	Bertanggung jawab untuk konservasi tanah dan rehabilitasi lahan daerah hutan alami dan daerah hutan produksi di daerah aliran sungai
5	Perum Perhutani	Bertanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan industri dan perdagangan hasil hutan
6	BBWS Brantas	Bertanggung jawab dalam pengembangan irigasi
		Tugas utama adalah berkonsentrasi pada pengembangan irigasi pedesaan dan rehabilitasi fasilitas irigasi
7	Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur	Bertanggung jawab dalam pengaturan, pengendalian dan perkiraan pengembangan perikanan
		Bertanggung jawab pada pemeliharaan saluran utama (Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk pemeliharaan saluran sekunder)

No	Institusi	Tugas dan Tanggung Jawab
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur (DISPERINDAG)	Memberikan panduan teknis pada industri kecil dalam semua bidang produksi, pemasaran dan pengendalian lingkungan
9	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Memberikan arahan teknis untuk pemerintahan propinsi
		Memberikan persetujuan dalam eksploitasi air tanah
		Mengawasi kegiatan PT. PLN dan berkoordinasi dengan Dirjen SDA dalam mengendalikan perijinan penggunaan air
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur (Dinas ESDM)	Menetapkan alokasi dan pencabutan jadwal setelah disetujui oleh Departemen ESDM
11	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi (BAPEDALPROP)	Membantu gubernur dalam mengelola dampak lingkungan termasuk mencegah dan mengendalikan polusi dan kerusakan lingkungan
		Membantu gubernur dalam rehabilitasi kualitas lingkungan
12	Kementrian Lingkungan Hidup	Bertanggungjawab dalam membuat peraturan dalam pengendalian lingkungan
		Saran teknis dan dukungan untuk pemerintah wilayah terkait
		Pengelolaan program lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah wilayah
13	Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi (BAPPEPROV)	Bertanggung jawab untuk perencanaan detail tata guna lahan pada tingkat propinsi
14	Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN)	Bertanggung jawab untuk pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi listrik
		Bertanggung jawab untuk merencanakan, konstruksi dan operasi dari fasilitas suplai tenaga listrik
15	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	Bertanggung jawab untuk menyediakan air untuk perkotaan dan industri
16	Panitia Tata Pengaturan Air (PTPA)	Forum musyawarah untuk membantu gubernur dalam rangka melaksanakan koordinasi tata pengaturan air
17	Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATKORLAK PB)	Bertanggung jawab dalam mengkoordinasi dan mengendalikan bencana di Jawa Timur
		Tugasnya adalah untuk mengadakan koordinasi, arahan, petunjuk dan panduan perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi

3. Peran Pihak Yang Berkepentingan (*Stakeholders*)

Para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pengelolaan SDA dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu *owner / regulator, operator, developer* dan *user*. Wewenang dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder* adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai *regulator* dan *owner*
 - a. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, meliputi:
 - Menetapkan kebijakan nasional sumber daya air;
 - Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas propinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

- Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas propinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- Menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas propinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional;
- Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas propinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;
- Mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas propinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional;
- Mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas propinsi dan cekungan air tanah lintas negara;
- Membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, untuk WS yang menjadi kewenangan pemerintah;
- Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah dalam pengelolaan sumber daya air;
- Menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber daya air;
- Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air ;
- Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan SDA kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah dalam melaksanakan fungsi regulasi dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Balai Besar Wilayah Sungai.

- b. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Propinsi dalam melaksanakan pengelolaan SDA pada Wilayah Sungai kewenangan Pemerintah yang kewenangnya dilimpahkan kepada Pemerintah Propinsi (Dinas PU Pengairan Propinsi) sebagai tugas pembantuan adalah sebagai berikut:
 - Mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;

- Mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha air tanah pada cekungan air tanah;
 - Membentuk Dewan Sumber Daya Air atau dengan nama lain di tingkat propinsi;
 - Memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sumber daya air;
 - Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
 - Memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air;
 - Melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha s/d 3.000 ha.
- c. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota adalah melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha.
- 2) Wewenang dan tanggung jawab *Operator* meliputi :
- Melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
 - Melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
 - Melaksanakan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusaha sumber daya air pada wilayah sungai;
 - Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - Melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi;
 - Melaksanakan penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air;
 - Melaksanakan fasilitas kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
 - Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;

Wewenang dan tanggung jawab Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur adalah :

- Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air;
 - Pelaksanaan operasional konservasi/pelestarian air dan sumber-sumber air;
 - Pemeliharaan sumber-sumber air dan bangunan pengairan;
 - Pengendalian banjir dan penanggulangan kekeringan;
 - Pengendalian pencemaran air;
 - Pelaksanaan ketatausahaan;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 3) Wewenang dan tanggung jawab *Developer* meliputi:
- Menetapkan kebijakan tahunan, lima tahunan pengelolaan SDA serta urutan prioritas pembangunan prasarana pengairan;
 - Melaksanakan pembangunan dengan berbagai sumber dana;
 - Melaksanakan rehabilitasi dan konservasi SDA.
- 4) Wewenang dan tanggung jawab Masyarakat (*User*)
- Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui Dewan SDA;
 - Menggunakan air secara efisien;
 - Ikut menjaga kelestarian SDA dan lingkungan;
 - Berkontribusi dalam pembiayaan pengelolaan SDA;
 - Melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA;
 - Tidak melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan atau mengakibatkan pencemaran air;
 - Berperan aktif dalam pengendalian daya rusak air.

3.9. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Strategi pengelolaan sumber daya air merupakan rangkaian upaya atau kegiatan pengelolaan sumber daya air untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air sesuai dengan skenario kondisi wilayah sungai.

Strategi pengelolaan sumber daya air akan dikelompokkan berdasarkan aspek konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, peningkatan peran serta masyarakat dan keterbukaan data dan sumber daya air.

3.9.1. Strategi Konservasi Sumber Daya Air

Strategi konservasi SDA meliputi beberapa kegiatan di WS Baru Bajulmati dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air

- Rehabilitasi dan perlindungan hutan
- Reboisasi kawasan hutan yang rusak
- Penghijauan di lahan kritis milik masyarakat dan negara
- Penetapan dan pengelolaan kawasan sempadan sungai, danau, waduk, situ, embung, rawa sebagai sabuk hijau terutama yang saat ini digunakan sebagai pemukiman oleh masyarakat
- Pemanfaatan lahan sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan jenis tanah
- Pelestarian dan perlindungan sumber air secara menyeluruh sehingga kerusakan ekosistem sumber daya air dapat dicegah
- Penertiban penambangan galian Golongan C.

b) Pengawetan / Penghematan Air

- Peningkatan pemanfaatan air permukaan dengan cara :
 - Pengendalian aliran permukaan untuk memperpanjang waktu air tertahan di atas permukaan tanah dan meningkatkan jumlah air yang masuk ke dalam tanah melalui : pengolahan tanah untuk setiap aktivitas budidaya pertanian, penanaman tanaman menurut garis kontur (*contour cultivation*), penanaman dalam strip (sistem penanaman berselang seling antara tanaman semusim, pembuatan teras yang dapat menyimpan air, misalnya teras bangku konservasi, pembangunan waduk dan embung.
 - Penyadapan air (*water harvesting*).
 - Peningkatan kapasitas infiltrasi tanah dengan cara memperbaiki struktur tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian tanaman penutup tanah (mulsa) atau bahan organik.
 - Pengolahan tanah minimum (*minimum tillage*).
- Pengelolaan air tanah, dilakukan antara lain dengan : perbaikan drainase permukaan, drainase dalam, atau kombinasi keduanya yang akan meningkatkan efisiensi penggunaan air oleh tanaman. Strategi pengelolaan air tanah pada saat ini belum ditinjau lebih detail, dikarenakan kurangnya data air tanah yang tersedia. Perlu ditinjau lebih detail untuk merumuskan pengelolaan air tanah.
- Peningkatan efisiensi penggunaan air irigasi antara lain dengan : tanam benih langsung (tabela), pengurangan tinggi penggenangan atau pemberian air (sistem SRI), mengurangi kebocoran saluran irigasi dan galengan, pergiliran pemberian air, dan pemberian air secara terputus. Dua aktivitas terakhir ini harus disertai dengan peraturan dan pengawasan yang ketat.

c) Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

- Membangun sistem pemantauan kualitas air pada sumber air dan kualitas limbah cair secara berkelanjutan di sepanjang WS Baru Bajulmati
- Penerbitan Perda Baku Mutu Air dan limbah cair di Kabupaten dalam WS Baru Bajulmati
- Pembangunan IPAL di Kabupaten di WS Baru Bajulmati
- Penerbitan peraturan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dari hulu hingga hilir
- Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran air
- Pembuatan perda yang mengatur pembuangan sampah oleh masyarakat

3.9.2. Strategi Pendayagunaan Sumber Daya Air

- a) Penetapan Zona Pemanfaatan Sumber Air
 - Penetapan zona pemanfaatan sumber air ke dalam peta tata ruang wilayah Kabupaten di WS Baru Bajulmati.
 - Penetapan zona pemanfaatan sumber air yang direkomendasikan oleh TKPSDA WS Baru Bajulmati.
- b) Peruntukan, Penyediaan, Penggunaan dan Pengusahaan SDA
 - Penetapan peruntukan air untuk berbagai kepentingan
 - Penyediaan air sesuai prioritas yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat
 - Penetapan ijin penggunaan air berkaitan dengan hak guna air
 - Pengusahaan SDA tanpa mengabaikan fungsi sosial SDA.
- c) Pengembangan Sumber Daya Air
 - Pengembangan SDA dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan dilengkapi dengan studi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)
 - Pengembangan terhadap modifikasi cuaca untuk menambah volume sumber air.

3.9.3. Strategi Pengendalian Daya Rusak Air

Strategi Pengendalian Daya Rusak Air di WS Baru Bajulmati diarahkan untuk dapat mengupayakan sistem pencegahan bencana akibat daya rusak air dan meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan daya rusak air. Dari strategi pokok tersebut, beberapa kegiatan dalam pengendalian daya rusak air di WS Baru Bajulmati antara lain :

- a) Pencegahan Bencana Alam
 - Penetapan zona rawan banjir, kekeringan, erosi, sedimentasi, tanah longsor, amblesan tanah, perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air, kepunahan flora dan fauna serta wabah penyakit yang diakibatkan oleh daya rusak air (misal banjir)
 - Pengendalian pemanfaatan kawasan rawan bencana dengan melibatkan masyarakat

- Peringatan dini dilakukan di lokasi rawan bencana.
- b) Penanggulangan Bencana Alam
 - Pelaksanaan tindakan penanggulangan kerusakan dan atau bencana akibat daya rusak air
 - Penetapan prosedur operasi standar penanggulangan bencana alam
 - Penyampaian berita tentang kejadian bencana alam.
- c) Pemulihan Daya Rusak Air

Pemulihan daya rusak air merupakan penanganan pasca bencana, baik berupa bencana banjir, bencana kekeringan maupun bencana tanah longsor, dsb.

 - Merehabilitasi kerusakan, baik secara struktural maupun non struktural
 - Menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemulihan akibat bencana
 - Revitalisasi wadah-wadah air pada daerah aliran sungai.

Pemulihan bencana pasca banjir atau disebut juga rehabilitasi pasca banjir, adalah proses perbaikan keadaan terencana berdasarkan hasil evaluasi kelayakan agar keadaan kembali sama dengan atau lebih baik dari keadaan semula. Kegiatan yang dibutuhkan antara lain :

 - Pengumpulan data awal. Inventarisasi terdiri dari jenis kerusakan dan karakter banjir
 - Penilaian kerusakan
 - Revitalisasi :
 - Evaluasi kelayakan terdiri dari kriteria legalitas dan kriteria tingkat resiko banjir
 - Rekonstruksi mengembalikan seperti semula dengan pengembalian total seperti kondisi sebelum banjir atau tidak dilakukan perubahan atau desain ulang
 - Konstruksi lebih baik dari semula yaitu peningkatan di lokasi semula, bangunan jenis baru dan pindah ke lokasi baru (relokasi).

3.9.4. Strategi Sistem Informasi Sumber Daya Air

Strategi sistem informasi data di WS Baru Bajulmati dapat diuraikan berupa :

- Menyediakan data dan informasi sumber daya air yang akurat, tepat waktu, berkelanjutan dan mudah
- Memudahkan pengaksesan data dan informasi oleh masyarakat, swasta dan dunia usaha.

3.9.5. Strategi Peran Masyarakat dan Dunia Usaha

Strategi peran serta masyarakat di WS Baru Bajulmati dapat diuraikan berupa :

- Meningkatkan peran masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya air.
- Meningkatkan kinerja lembaga pemerintah dalam pengelolaan SDA.

- Meningkatkan koordinasi di tingkat lintas kabupaten / kota dalam pengelolaan sumber daya air.
- Pemberdayaan TKPSDA WS Baru Bajulmati.

BAB IV

KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WS BARU BAJULMATI

4.1. Penjelasan Umum

Kebijaksanaan operasional untuk masing-masing aspek dan sub aspek pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan 3 (tiga) skenario, yakni :

- Skenario Ekonomi Rendah
- Skenario Ekonomi Sedang
- Skenario Ekonomi Tinggi

Yang ditampilkan dalam bentuk matrik pada **Tabel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4** dan **Tabel 4.5**.

Dalam matrik tersebut dicantumkan tentang analisis permasalahan, sasaran target yang ingin dicapai, strategi pengelolaan SDA untuk skenario ekonomi rendah, ekonomi sedang & skenario ekonomi tinggi dan rencana kegiatan operasional untuk masing-masing skenario serta lembaga/instansi yang terkait.

Rincian mengenai strategi pengelolaan dari masing-masing aspek dan sub aspek pengelolaan SDA di WS Baru Bajulmati yang dicantumkan dalam matriks adalah sebagai berikut :

ASPEK – I : KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Sub Aspek :

1. Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air
2. Pengawetan / Penghematan Air
3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

ASPEK – II : PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Sub Aspek :

1. Penatagunaan Sumber Daya Air
2. Penyediaan Sumber Daya Air
3. Penggunaan Sumber Daya Air
4. Pengembangan Sumber Daya Air
5. Pengusahaan Sumber Daya Air

ASPEK – III : PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR.

Sub Aspek :

1. Pencegahan
2. Penanggulangan
3. Pemulihan

ASPEK – IV : SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR.

Sub Aspek :

1. Ketersediaan Informasi Sumber Daya Air
2. Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)

ASPEK – V : PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA.

Sub Aspek : Pemberdayaan Masyarakat

4.2. Analisis Permasalahan

Analisis permasalahan yang berkaitan dengan upaya pengelolaan sumber daya air disusun dengan pengelompokan sesuai masing-masing aspek dan sub aspek pengelolaan SDA.

Dapat dimaklumi bahwasanya permasalahan yang menyangkut salah satu aspek pengelolaan SDA juga dapat mempengaruhi pada aspek yang lainnya. Misalnya, permasalahan pada Aspek Konservasi SDA juga dapat menjadi permasalahan pada Aspek Pendayagunaan SDA dan Aspek Pengendalian Daya Rusak Air dan demikian juga sebaliknya.

Hal ini jelas menggambarkan bahwa dari masing-masing aspek pengelolaan SDA satu dan lainnya selalu berkaitan erat dan dapat dipahami bahwa aspek utama yang paling dominan dan dapat mempengaruhi seluruh aspek pengelolaan SDA adalah aspek konservasi SDA. Apabila pengelolaan aspek konservasi SDA cukup baik, maka aspek lainnya bisa diupayakan untuk menjadi baik. Namun bilamana pengelolaan aspek konservasi SDA kurang baik, maka pengelolaan aspek lainnya sulit menjadi baik.

Untuk mengetahui prioritas penanganan dalam pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), seperti yang dicantumkan dalam Laporan Penunjang. Dari hasil analisa tersebut dinyatakan bahwa urutan prioritas penanganan dalam pengelolaan SDA sesuai dengan nilai scoringnya adalah sebagai berikut :

- Ranking – 1, aspek konservasi SDA
- Ranking – 2, aspek pendayagunaan SDA dan aspek pengendalian daya rusak
- Ranking – 3, aspek sistem informasi SDA dan aspek peran serta masyarakat & dunia usaha

4.3. Keterlibatan Instansi Terkait

Guna mengoptimalkan pengelolaan SDA sesuai dengan pola kebijakan operasional, maka perlu diperjelas pembagian tugas bagi lembaga / instansi yang bertanggungjawab untuk menanganinya. Lembaga/instansi yang dilibatkan adalah instansi yang sudah ada (misalnya : dinas PU Pengairan Prov/Kab, dinas Kehutanan Prov/Kab, Bappeda Prov/Kab, BP DAS, BBWS Brantas, Dinas ESDM Prov/Kab, dll), maupun lembaga yang baru akan dibentuk, seperti : TKPSDA WS Baru Bajulmati.

4.4. Tahapan Pembangunan Prasarana SDA

Jenis kegiatan yang diprogramkan dalam kebijakan operasional pengelolaan SDA adalah terdiri dari kegiatan fisik yang berupa pembangunan prasarana SDA, serta kegiatan yang bersifat non fisik seperti pembentukan kelembagaan SDA, pembinaan manajemen, kursus / pelatihan ketrampilan guna meningkatkan kemampuan para petugas serta masyarakat yang ikut terlibat langsung dalam penanganan pengelolaan sumber daya air. Untuk kegiatan non fisik, pada umumnya dapat dilaksanakan secara rutin, terkecuali jenis kegiatan yang sifatnya khusus dan membutuhkan biaya besar. Sedangkan untuk kegiatan pembangunan fisik prasarana SDA yang lebih membutuhkan biaya besar, maka rencana pembangunannya perlu diatur secara bertahap disesuaikan dengan skala prioritas serta tingkat kebutuhannya.

Rencana Tahapan Pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati sesuai yang dicantumkan dalam matrik kebijakan operasional untuk masing-masing skenario adalah sebagai berikut :

1) Jangka Pendek (2013 – 2018)

Berupa rencana pengelolaan SDA yang diperkirakan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun, yakni mulai dari tahun 2013 – 2018, baik yang berlaku pada kondisi skenario ekonomi rendah, ekonomi sedang maupun skenario ekonomi tinggi.

2) Jangka Menengah (2013 – 2023)

Berupa rencana pengelolaan SDA yang diperkirakan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu selama 10 (sepuluh) tahun, yakni mulai dari tahun 2013 – 2023, baik yang berlaku pada kondisi skenario ekonomi rendah, ekonomi sedang maupun skenario ekonomi tinggi.

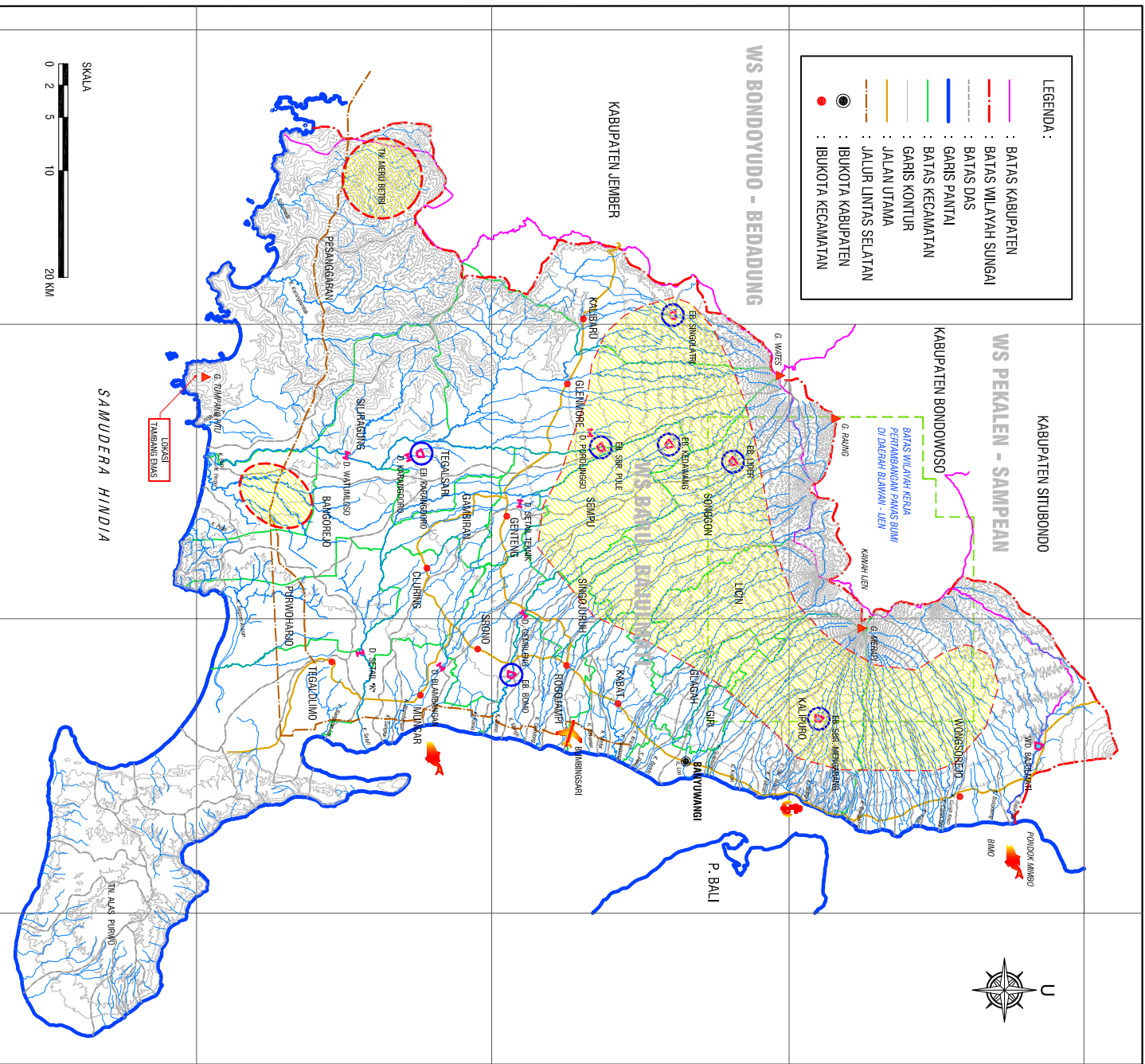
3) Jangka Panjang (2013 – 2033)

Berupa rencana pengelolaan SDA yang diperkirakan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu selama 20 (dua puluh) tahun, yakni mulai dari tahun 2013 – 2033, baik yang berlaku pada kondisi skenario ekonomi rendah, ekonomi sedang maupun skenario ekonomi tinggi.

4.5. Peta Tematik Pola Kebijakan Pengelolaan SDA

Guna memberikan gambaran yang jelas tentang rencana pola kebijakan pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati, terutama yang menyangkut aspek konservasi SDA, aspek pendayagunaan SDA dan aspek pengendalian daya rusak air, maka dibuat peta tematik yang isinya mencerminkan ringkasan dari pola kebijakan pengelolaan SDA seperti yang telah diuraikan dalam matrik. Periksa **Gambar 4.1**, **Gambar 4.2** dan **Gambar 4.3**.

Selain itu juga dibuat peta tematik yang menunjukkan kondisi neraca air secara umum di WS Baru Bajulmati untuk kondisi sekarang (th. 2013), dan kondisi 20 tahun mendatang (th. 2033), seperti yang disajikan pada **Gambar 4.4**.



GAMBAR 4.1.
PETA TEMATIK RANCANGAN POLA PSDA WMS BARU BAJULMATI
ASPEK : KONSERVASI SDA

KABUPATEN BANYUWANGI

- UPAYA KONSERVASI VEGETATIF BERUPA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN SERTA PENGEMBANGAN AGROFORESTRY PADA LOKASI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DI BAGIAN LERENG SEBELAH TIMUR & SELATAN G. RAJUNG DAN SEBELAH TIMUR PEGUNJANGAN IJEN GUNA MEMPERBAIKI KONDISI DAERAH RESAPAN AIR, MELISTRIKAKAN POTENSI SUMBER-SUMBER AIR, MENGRANGGI LAJU EROSI LAHAN SERTA MEMPEROLEH HASIL, PRODUKSI TANAMAN.
 - UPAYA KONSERVASI DENGAN PEMBANGUNAN SIPIL TEKNIS BERUPA EMBUNG / CHECK DAM SEDERHANA PADA ANAK-ANAK SUNGAI DI BAGIAN HULU K. BARU, K. SETAL, K. BLAMBANGAN, K. BOMO, K. TAMBONG DAN K. BAJULMATI GUNA MENINGKATKAN FUNGSI DAERAH RESAPAN AIR DAN MENGURANGI DEBIT BANJIR PADA SUNGAI-SUNGAI TERSEBUT. RENCANA LOKASI PEMBANGUNAN EMBUNG TERSEBUT SESUAI YANG TERcantum DALAM RTRW KAB. BANYUWANGI DAN RTRW PROV. JAWA TIMUR.
 - PEMBUATAN SUMUR-SUMUR RESAPAN AIR HULAN BERUPA SUMUR GALI / SUMUR BOR DENGAN SISTEM BIOPORI PADA DAERAH PERMUKIMAN PADAT PENDUDUK GUNA MEMELIHARA / MEMPERTAHANKAN POTENSI DAN PERMUKIMAN AIR TANAH.
 - MENGENDALIKAN PENGAMBILAN AIR TANAH MELALUI SUMUR POMPA DI DAERAH KAWASAN PANTAI GUNA MENGHINDARI INTRUSI AIR LAUT.
- CATATAN :
 UPAYA KONSERVASI SELARAS DENGAN PROGRAM BPDAS SAMPEAN, YAKNI :
 • UPAYA KONSERVASI VEGETATIF / REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN BERUPA WAMAFARMA, HUTAN NYAMPUNG, MANGROVE, KEBUN BIBIT DESA, HUTAN RAKYAT & REBOISASI KAWASAN HUTAN LINDUNG.
 • UPAYA KONSERVASI DENGAN PEMBANGUNAN SIPIL TEKNIS BERUPA PEMBANGUNAN DAM PENAHAN, DAM PENGENDAL, EMBUNG & SUMUR RESAPAN.
 KEGIATAN KONSERVASI JUGA DILAKUKAN OLEH BALAI TN. ALAS PURWO YANG JUGA MENGELOLA CA - TWA KAWAH IJEN SERTA BALAI TN. MERU BETIRI.

KABUPATEN BONDOWOSO

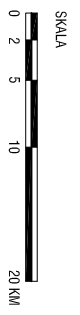
- UPAYA KONSERVASI VEGETATIF BERUPA REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI KAWASAN LERENG GN. RAJUNG DAN GN. IJEN. KEC. SEMPOL GUNA MEMPERBAIKI KONDISI DAERAH RESAPAN AIR SERTA MENEKAN LAJU EROSI LAHAN.

KABUPATEN SITUBONDO

WILAYAH KAB. SITUBONDO MASUK DI WILAYAH DAS BAJULMATI BAGIAN HILIR YANG MERUPAKAN AREAL BUDIDAYA. SEHINGGA DALAM PETA TEMATIK PENGELOLAAN SDA HANYA DIMASUKKAN DALAM ASPEK PENYAGITAN SDA DAN DAYA RUSAK AIR.

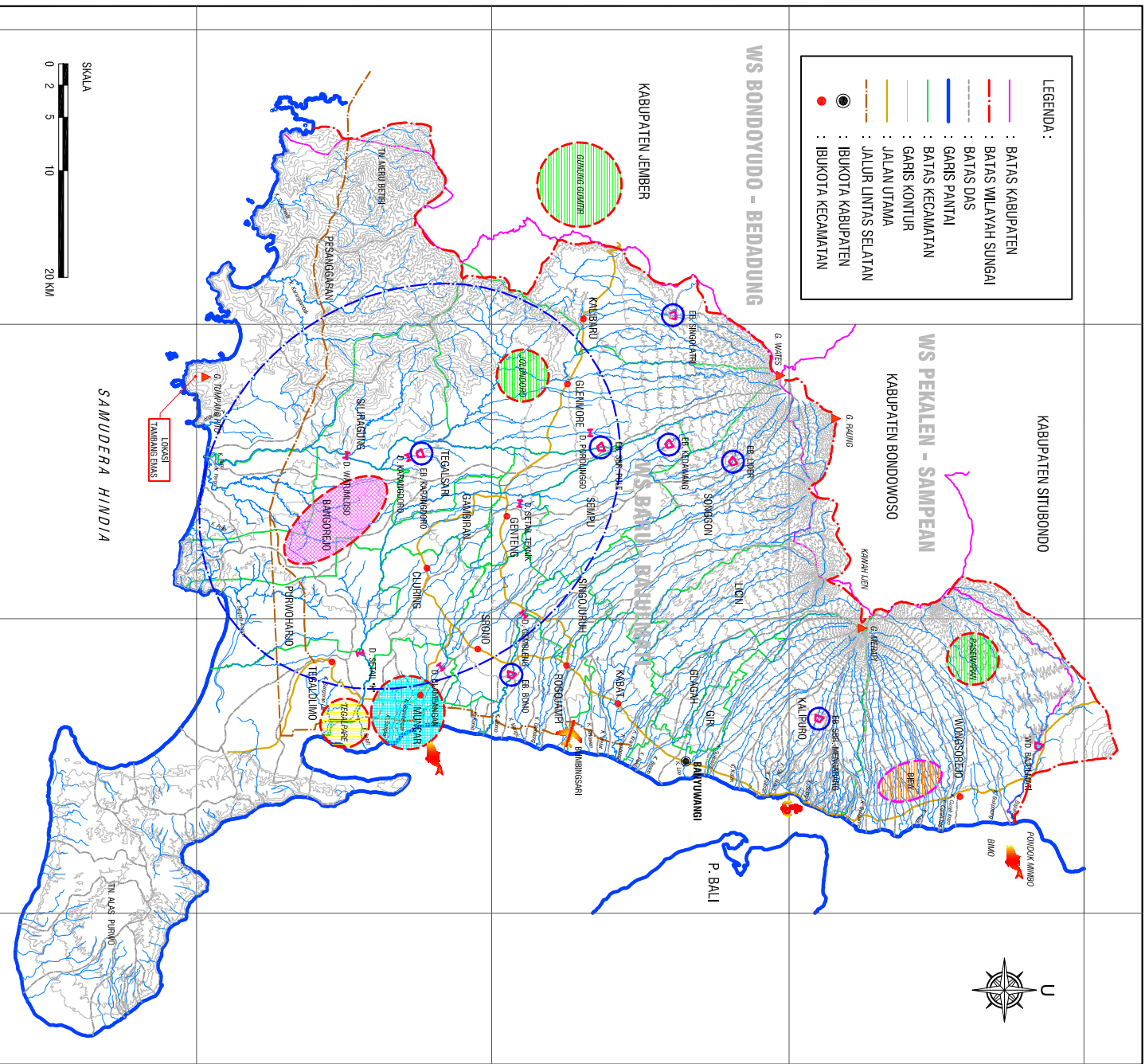
KETERANGAN :

- : USAHA KONSERVASI DTA / RENCANA RHL
- : RENCANA PEMBANGUNAN EMBUNG / CHECK DAM
- : WADUK / EMBUNG SUDAH / SEDANG DIBANGUN
- : BENDUNG YANG SUDAH ADA



SAMUDERA HINDIA





GAMBAR 4.2.
PETA TEMATIK RANCANGAN POLA PSDA WIS BARU BAJULMATI
ASPEK : PENDAYAGUNAAN SDA

KABUPATEN BANYUWANGI

- MENINGKATKAN KINERJA BANGUNAN FASILITAS SDA YANG ADA DENGAN MENINGKATKAN KINERJA O&P SERTA MERHAABILITASI / MENGE-UPGRADE FUNGSI BANGUNAN AGAR DAPAT BERFUNGSI SECARA OPTIMAL. TERUTAMA UNTUK Mendukung Program Kab. Banyuwangi sebagai Lumbung Padi Nasional.
- Mengembangkan pemanfaatan sumber air yang cukup berpotensi untuk mensuplai kebutuhan air irigasi & air minum di daerah sekitarnya.
- Mengembangkan pemanfaatan air waduk Bajulmati untuk kebutuhan air irigasi, industri bieu, pelayanan taujungwangi dan obyek ekowisata.
- Pemantauan Embung Singolatri, Lder, Kedawang, Dam Bomo, dll sesuai yang tercantum dalam RTW Kab. Banyuwangi & RTW Prov. Jawa Timur guna meningkatkan ketersediaan air di musim kemarau.
- (Bangunan tersebut juga berfungsi untuk tujuan konservasi sda & pengendalian daya rusak air).
- Mengembangkan sistem interbasin wilayah di baru, setal, blambangan.
- Mengembangkan potensi air tanah pada wilayah cat wonorejo & cat Banyuwangi yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti di wilayah kecamatan Wonorejo, Kabat, Rogojampi, Spono, Tegaldlimo.
- Usaha meningkatkan volume penyediaan air guna menyuplai air yang dibutuhkan dalam rangka menunjang program agropoltan di kec. Bangorejo dan minapolitan di kec. Muncar.
- Mengembangkan jaringan tata air irigasi tambak tegalpare yang lokasinya berada di sekitar widara k. setal.

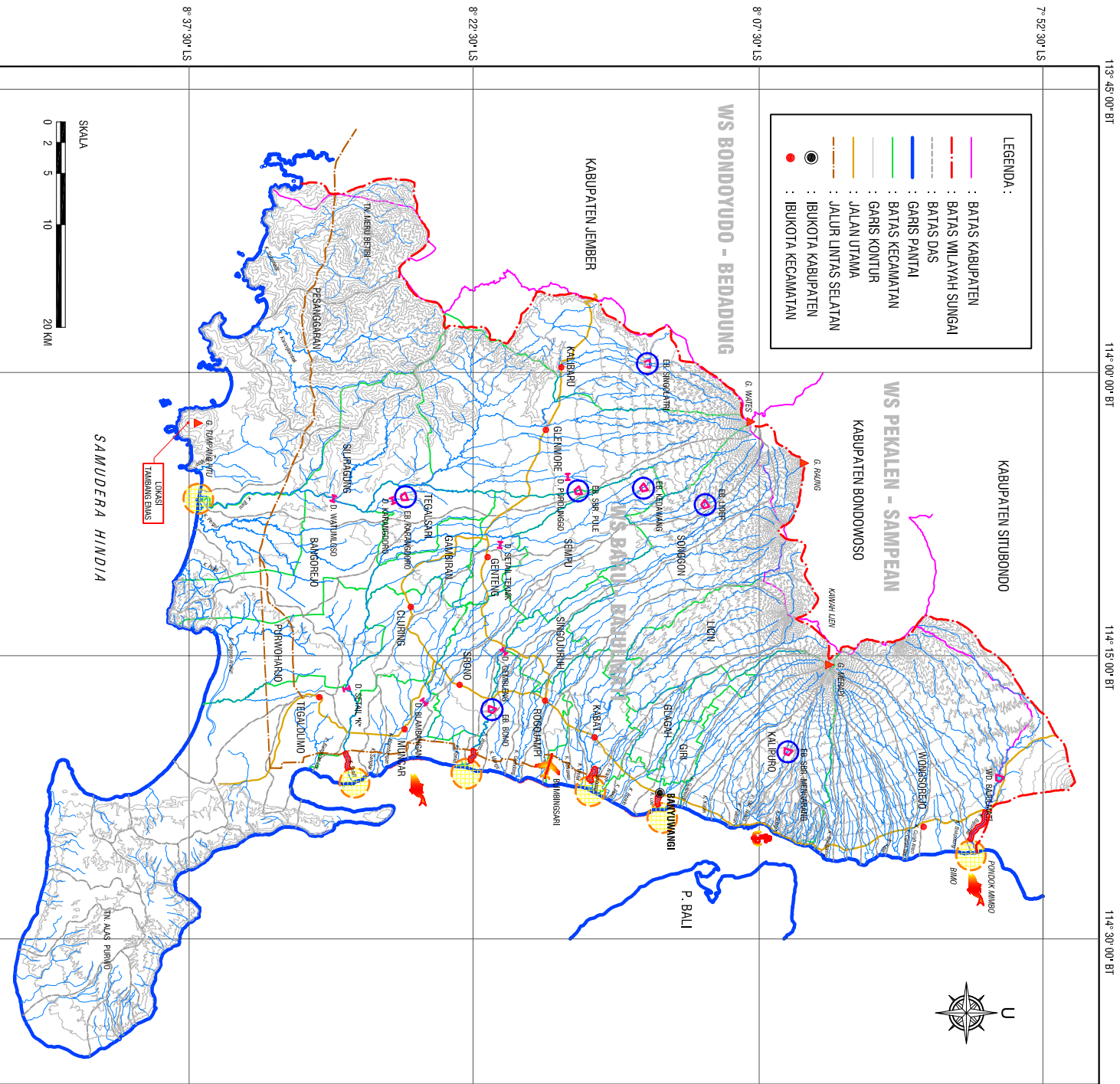
CATATAN :
 KEBUTUHAN AIR BAGI TANAMAN TEBU UNTUK PABRIK GULA DI GLENMORE CUKUP DARI AIR HUJAN SAJA. MENGGANGAT JENIS TANAMAN TEBU YANG DITANAM ADALAH JENIS TEBU KHUSUS LAHAN KERING, SEHINGGA TIDAK MEMERLUKAN SUPLAI AIR IRIGASI. LAHAN TANAMAN TEBU DIRENCANAKAN BERADA PADA LAHAN KEBUN PTP XII YANG KURANG PRODUKTIF DI WILAYAH KAB. BANYUWANGI & JEMBER DAN TIDAK MEMEMPAHI AREAL LAHAN PERSAWAHAN IRIGASI.

KABUPATEN SITUBONDO

- Mengembangkan pemanfaatan air waduk Bajulmati untuk kebutuhan air irigasi dan obyek ekowisata Wonorejo kec. Banyuputih yang lokasinya berdekatan dengan obyek wisata Taman Nasional Baluran.

KETERANGAN :

- RENCANA PEMBANGUNAN EMBUNG / CHECK DAM
- WADUK / EMBUNG SUDAH / SEDANG DIBANGUN
- BENDUNG YANG SUDAH ADA
- WILAYAH PENGEMBANGAN AGROPOLTAN
- WILAYAH PENGEMBANGAN MINAPOLTAN
- WILAYAH PENGEMBANGAN TATA AIR TAMBAK
- RENCANA KEBUN TEBU PABRIK GULA GLENMORE
- RENCANA PENGEMBANGAN BIEW
- WILAYAH TATA AIR SISTEM INTERBASIN



119° 45' 00" BT 114° 00' 00" BT 114° 15' 00" BT 114° 30' 00" BT

7° 52' 30" LS

KABUPATEN SITUBONDO

WIS PEKALEN - SAMPEAN
KABUPATEN BONDOWOSO

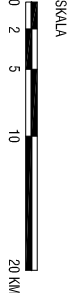
WIS BONDODYUDO - BEDADUNG

LEGENDA :

- : BATAS KABUPATEN
- : BATAS WILAYAH SUNGAI
- : BATAS DAS
- : GARIS PANTAI
- : BATAS KECAMATAN
- : GARIS KONTUR
- : JALUR UTAMA
- : JALUR LINTAS SELATAN
- : IBUKOTA KABUPATEN
- : IBUKOTA KECAMATAN

KABUPATEN JEMBER

SAMUDERA HINDIA



GAMBAR 4.3.

PETA TEMATIK RANCANGAN POLA PSDA WIS BARU BAJULMATI ASPEK : PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

KABUPATEN BANYUWANGI

- NORMALISASI PENAMPANG SUNGAI PADA RUSAK YANG SERING MENGALAMI LUAPAN AIR BANJIR DENGAN CARA MENGGALI SEDIMEN, MEMBERSIHKAN TUMBUHAN PENGANGGU DAN TIMBUNAN SAMPAH, MEMBUAT PLENSSENGAN TALUD, PARAPET ATAU MENINGGIKAN TANGGUL GUWA MENEGAH TERJADI NYA BANJIR.
- PEMBUATAN EMBUNG / CHECK DAM SEDERHANA PADA ANAK SUNGAI BAGIAN HULU K. BARU, K. SETAL, K. BLAMBANGAN, K. TAMBONG DAN K. BAJULMATI GUWA MENGGURANGI DEBIT BANJIR PADA SUNGAI TERSEBUT.
- PENAMBANGAN MATERIAL SEDIMEN / PASIR (BAHAN GALIAN GOLONGAN - C) YANG BISA DIMANFAATKAN UNTUK BAHAN BANGUNAN DENGAN CARA PEMAMBANGAN SESUAI KRITERIA YANG DITENTUKAN GUWA MELIHARA EKOSISTEM MORFOLOGI SUNGAI DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN.
- PERBAIKAN ALUR SUNGAI DI BAGIAN MUARA / GUWA MELANCARKAN ALIRAN DEBIT BANJIR & MENEGAH INTRUSI AIR LAUT, TERUTAMA PADA MUARA SUNGAI K. BAJULMATI, K. LOO, K. TAMBONG, K. BOWO, K. SETAL.
- MEMBUAT BANGUNAN PENGAMAN PANTAI DAN MENANAM MANGROVE DI WILAYAH MUNGGAR, BLIMBINGSARI DAN KOTA BANYUWANGI GUWA MELINDUNGI DARI SERANGAN GELOMBANG BADAI TROPIS (FAY & IGGY) DARI SAMUDERA HINDIA.
- MEMPERKATAT PROSES PERILINAN DAN PENGAWSAN TERHADAP RENCANA PEMBANGUNAN DI DAERAH KONSERVASI YANG DAPAT MENGAKIBATKAN BERKURANGNYA LUAS DAERAH RESAPAN AIR DAN MENAMBAH BESARNYA RUN OFF YANG MENGAKIBATKAN BERTAMBAHNYA DEBIT BANJIR, SEPERTI PEMBANGUNAN VILLA-VILLA DI LERENG PUNCAK GN. IJEN KECAMATAN LIJNI.

KABUPATEN SITUBONDO

- PERBAIKAN MUARA KALI BAJULMATI YANG JUGA BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN PONDOK MIMBO (DI SEBELAH UTARA MUARA KALI BAJULMATI), DIMANA PELABUHAN TERSEBUT MERUPAKAN PELABUHAN PENUNJANG DARI KAWASAN MINAPOLITAN MUNGGAR.

KETERANGAN :

- : RENCANA PEMBANGUNAN EMBUNG / CHECK DAM
- : WADUK / EMBUNG SUDAH / SEDANG DIBANGUN
- : BENDUNG YANG SUDAH ADA
- : NORMALISASI PENAMPANG SUNGAI
- : PERBAIKAN ALUR MUARA SUNGAI
- : RENCANA BANGUNAN PENGAMAN PANTAI

**TABEL 4.1. KEBIJAKAN OPERASIONAL POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BARU BAJULMATI
DENGAN SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH, PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI**

ASPEK I : KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

- SUB ASPE : 1. Perlindungan dan pelestarian sumber air
2. Pengawetan air
3. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

1. PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA AIR

NO.	ANALISIS PERMASALAHAN	SASARAN / TARGET YANG INGIN DICAPAI	STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
			JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)		
1.1	Kerusakan DAS akibat menurunnya kondisi hutan lindung hutan konservasi.	Mempertahankan luas kawasan hutan lindung 30% sesuai dengan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang.	<ul style="list-style-type: none"> Upaya konservasi vegetatif berupa rehabilitasi hutan dan lahan serta pengembangan agroforestry pada lokasi kawasan hutan di bagian lereng sebelah timur & selatan G. Raung dan sebelah timur Pegunungan Ijen. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya konservasi vegetatif berupa rehabilitasi hutan dan lahan serta pengembangan agroforestry pada lokasi kawasan hutan di bagian lereng sebelah timur & selatan G. Raung dan sebelah timur Pegunungan Ijen. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya konservasi vegetatif berupa rehabilitasi hutan dan lahan serta pengembangan agroforestry pada lokasi kawasan hutan di bagian lereng sebelah timur & selatan G. Raung dan sebelah timur Pegunungan Ijen. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya konservasi vegetatif berupa rehabilitasi hutan dan lahan serta pengembangan agroforestry pada lokasi kawasan hutan di bagian lereng sebelah timur & selatan G. Raung dan sebelah timur Pegunungan Ijen. Pelaksanaan RHL secara rutin pada daerah konservasi CA - TWA Kawah Ijen, TN. Alas Purwo serta TN. Meru Betiri. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya konservasi vegetatif berupa rehabilitasi hutan dan lahan serta pengembangan agroforestry pada lokasi kawasan hutan di bagian lereng sebelah timur & selatan G. Raung dan sebelah timur Pegunungan Ijen. Pelaksanaan RHL secara rutin pada daerah konservasi CA - TWA Kawah Ijen, TN. Alas Purwo serta TN. Meru Betiri. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya konservasi vegetatif berupa rehabilitasi hutan dan lahan serta pengembangan agroforestry pada lokasi kawasan hutan di bagian lereng sebelah timur & selatan G. Raung dan sebelah timur Pegunungan Ijen. Pelaksanaan RHL secara rutin pada daerah konservasi CA - TWA Kawah Ijen, TN. Alas Purwo serta TN. Meru Betiri. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya konservasi vegetatif berupa rehabilitasi hutan dan lahan serta pengembangan agroforestry pada lokasi kawasan hutan di bagian lereng sebelah timur & selatan G. Raung dan sebelah timur Pegunungan Ijen. Pelaksanaan RHL secara rutin pada daerah konservasi CA - TWA Kawah Ijen, TN. Alas Purwo serta TN. Meru Betiri. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya konservasi vegetatif berupa rehabilitasi hutan dan lahan serta pengembangan agroforestry pada lokasi kawasan hutan di bagian lereng sebelah timur & selatan G. Raung dan sebelah timur Pegunungan Ijen. Pelaksanaan RHL secara rutin pada daerah konservasi CA - TWA Kawah Ijen, TN. Alas Purwo serta TN. Meru Betiri. 	<ul style="list-style-type: none"> Upaya konservasi vegetatif berupa rehabilitasi hutan dan lahan serta pengembangan agroforestry pada lokasi kawasan hutan di bagian lereng sebelah timur & selatan G. Raung dan sebelah timur Pegunungan Ijen. Pelaksanaan RHL secara rutin pada daerah konservasi CA - TWA Kawah Ijen, TN. Alas Purwo serta TN. Meru Betiri. 	<p>Konservasi / rehabilitasi hutan dan lahan berbasis masyarakat.</p> <p>UU No 5 Thn 2007 tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya.</p> <p>UU No 7 Thn 2004 tentang Sumber Daya Air</p> <p>UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	<p>Pemprov. Jatim Pemkab. BWI, Stbondo, Bdwoso.</p> <p>Dinas Kehutanan, PU Pengairan Prov. Jatim.</p> <p>BP DAS Sampean Perhutani Unit II Prov. Jatim cq KPH Banyuwangi.</p>
1.2	Kerusakan DAS akibat menurunnya fungsi kawasan resapan air, semakin banyak lahan terbuka dan debit sumber air semakin menurun.	Mempertahankan dan menambah luasan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air.	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan daerah resapan air guna memperbaiki kondisi daerah resapan air serta melestarikan potensi sumber-sumber air dan mengurangi laju erosi lahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan daerah resapan air guna memperbaiki kondisi daerah resapan air serta melestarikan potensi sumber-sumber air dan mengurangi laju erosi lahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan daerah resapan air guna memperbaiki kondisi daerah resapan air serta melestarikan potensi sumber-sumber air dan mengurangi laju erosi lahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan daerah resapan air guna memperbaiki kondisi daerah resapan air serta melestarikan potensi sumber-sumber air dan mengurangi laju erosi lahan. Upaya konservasi dengan pembangunan sipil teknis berupa embung / check dam sederhana pada anak-anak sungai di bagian hulu K. Baru, K. Setail, K. Blambangan, K. Bomo, K. Tambong dan K. Bajulmati. Rencana lokasi pembangunan embung tersebut sesuai yang tercantum dalam RTRW Prov. Jatim / RTRW Kab. Banyuwangi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan daerah resapan air guna memperbaiki kondisi daerah resapan air serta melestarikan potensi sumber-sumber air dan mengurangi laju erosi lahan. Upaya konservasi dengan pembangunan sipil teknis berupa embung / check dam sederhana pada anak-anak sungai di bagian hulu K. Baru, K. Setail, K. Blambangan, K. Bomo, K. Tambong dan K. Bajulmati. Rencana lokasi pembangunan embung tersebut sesuai yang tercantum dalam RTRW Prov. Jatim / RTRW Kab. Banyuwangi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan daerah resapan air guna memperbaiki kondisi daerah resapan air serta melestarikan potensi sumber-sumber air dan mengurangi laju erosi lahan. Upaya konservasi dengan pembangunan sipil teknis berupa embung / check dam sederhana pada anak-anak sungai di bagian hulu K. Baru, K. Setail, K. Blambangan, K. Bomo, K. Tambong dan K. Bajulmati. Rencana lokasi pembangunan embung tersebut sesuai yang tercantum dalam RTRW Prov. Jatim / RTRW Kab. Banyuwangi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan daerah resapan air guna memperbaiki kondisi daerah resapan air serta melestarikan potensi sumber-sumber air dan mengurangi laju erosi lahan. Upaya konservasi dengan pembangunan sipil teknis berupa embung / check dam sederhana pada anak-anak sungai di bagian hulu K. Baru, K. Setail, K. Blambangan, K. Bomo, K. Tambong dan K. Bajulmati. Rencana lokasi pembangunan embung tersebut sesuai yang tercantum dalam RTRW Prov. Jatim / RTRW Kab. Banyuwangi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan daerah resapan air guna memperbaiki kondisi daerah resapan air serta melestarikan potensi sumber-sumber air dan mengurangi laju erosi lahan. Upaya konservasi dengan pembangunan sipil teknis berupa embung / check dam sederhana pada anak-anak sungai di bagian hulu K. Baru, K. Setail, K. Blambangan, K. Bomo, K. Tambong dan K. Bajulmati. Rencana lokasi pembangunan embung tersebut sesuai yang tercantum dalam RTRW Prov. Jatim / RTRW Kab. Banyuwangi. 	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah tangkapan air dan daerah resapan air guna memperbaiki kondisi daerah resapan air serta melestarikan potensi sumber-sumber air dan mengurangi laju erosi lahan. Upaya konservasi dengan pembangunan sipil teknis berupa embung / check dam sederhana pada anak-anak sungai di bagian hulu K. Baru, K. Setail, K. Blambangan, K. Bomo, K. Tambong dan K. Bajulmati. Rencana lokasi pembangunan embung tersebut sesuai yang tercantum dalam RTRW Prov. Jatim / RTRW Kab. Banyuwangi. 	<p>Sesuai kebijakan pembangunan Pemprov. Dinas PU Pengairan Jatim, BP DAS Sampean, Balai TN Alas Purwo / Kawah Ijen.</p> <p>Kesepakatan Pemkab. Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Pemprov Jatim dan Kementerian PU</p>	<p>Pemprov. Jatim & Pemkab. Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Dinas Kehutanan, Dinas PU Pengairan Prov. Jatim, BP DAS Sampean, Perhutani Unit II Prov. Jatim, KPH Banyuwangi.</p>

NO.	ANALISIS PERMASALAHAN	SASARAN / TARGET YANG INGIN DICAPAI	STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
			JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)		
						<input type="checkbox"/> Pembuatan sumur-sumur resapan air hujan berupa sumur gali / sumur bor dengan sistem biopori pada daerah permukiman padat penduduk.	<input type="checkbox"/> Pembuatan sumur-sumur resapan air hujan berupa sumur gali / sumur bor dengan sistem biopori pada daerah permukiman padat penduduk.	<input type="checkbox"/> Pembuatan sumur-sumur resapan air hujan berupa sumur gali / sumur bor dengan sistem biopori pada daerah permukiman padat penduduk.	<input type="checkbox"/> Pembuatan sumur-sumur resapan air hujan berupa sumur gali / sumur bor dengan sistem biopori pada daerah permukiman padat penduduk.	<input type="checkbox"/> Pembuatan sumur-sumur resapan air hujan berupa sumur gali / sumur bor dengan sistem biopori pada daerah permukiman padat penduduk.	<input type="checkbox"/> Pembuatan sumur-sumur resapan air hujan berupa sumur gali / sumur bor dengan sistem biopori pada daerah permukiman padat penduduk.	Konservasi / rehabilitasi hutan dan lahan berbasis masyarakat.	
1.3	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam rangka upaya perlindungan dan kelestarian SDA di WS Baru Bajulmati.	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam rangka upaya perlindungan dan kelestarian SDA.	<input type="checkbox"/> Sosialisasi pada masyarakat tentang perlunya perlindungan dan kelestarian SDA yang menjadi tanggungjawab bersama bagi semua unsur masyarakat & stakeholder. <input type="checkbox"/> Memberikan penghargaan / apresiasi khusus kepada masyarakat yang telah terbukti berjasa dalam upaya ikut melindungi dan melestarikan SDA, baik secara pribadi maupun kelompok masyarakat.	<input type="checkbox"/> Sosialisasi pada masyarakat tentang perlunya perlindungan dan kelestarian SDA yang menjadi tanggungjawab bersama bagi semua unsur masyarakat & stakeholder. <input type="checkbox"/> Memberikan penghargaan / apresiasi khusus kepada masyarakat yang telah terbukti berjasa dalam upaya ikut melindungi dan melestarikan SDA, baik secara pribadi maupun kelompok masyarakat.	<input type="checkbox"/> Sosialisasi pada masyarakat tentang perlunya perlindungan dan kelestarian SDA yang menjadi tanggungjawab bersama bagi semua unsur masyarakat & stakeholder. <input type="checkbox"/> Memberikan penghargaan / apresiasi khusus kepada masyarakat yang telah terbukti berjasa dalam upaya ikut melindungi dan melestarikan SDA, baik secara pribadi maupun kelompok masyarakat.	<input type="checkbox"/> Sosialisasi pada masyarakat tentang perlunya perlindungan dan kelestarian SDA yang menjadi tanggungjawab bersama bagi semua unsur masyarakat & stakeholder. <input type="checkbox"/> Memberikan penghargaan / apresiasi khusus kepada masyarakat yang telah terbukti berjasa dalam upaya ikut melindungi dan melestarikan SDA, baik secara pribadi maupun kelompok masyarakat.	<input type="checkbox"/> Sosialisasi pada masyarakat tentang perlunya perlindungan dan kelestarian SDA yang menjadi tanggungjawab bersama bagi semua unsur masyarakat & stakeholder. <input type="checkbox"/> Memberikan penghargaan / apresiasi khusus kepada masyarakat yang telah terbukti berjasa dalam upaya ikut melindungi dan melestarikan SDA, baik secara pribadi maupun kelompok masyarakat.	<input type="checkbox"/> Sosialisasi pada masyarakat tentang perlunya perlindungan dan kelestarian SDA yang menjadi tanggungjawab bersama bagi semua unsur masyarakat & stakeholder. <input type="checkbox"/> Memberikan penghargaan / apresiasi khusus kepada masyarakat yang telah terbukti berjasa dalam upaya ikut melindungi dan melestarikan SDA, baik secara pribadi maupun kelompok masyarakat.	<input type="checkbox"/> Sosialisasi pada masyarakat tentang perlunya perlindungan dan kelestarian SDA yang menjadi tanggungjawab bersama bagi semua unsur masyarakat & stakeholder. <input type="checkbox"/> Memberikan penghargaan / apresiasi khusus kepada masyarakat yang telah terbukti berjasa dalam upaya ikut melindungi dan melestarikan SDA, baik secara pribadi maupun kelompok masyarakat.	<input type="checkbox"/> Sosialisasi pada masyarakat tentang perlunya perlindungan dan kelestarian SDA yang menjadi tanggungjawab bersama bagi semua unsur masyarakat & stakeholder. <input type="checkbox"/> Memberikan penghargaan / apresiasi khusus kepada masyarakat yang telah terbukti berjasa dalam upaya ikut melindungi dan melestarikan SDA, baik secara pribadi maupun kelompok masyarakat.	<input type="checkbox"/> Sosialisasi pada masyarakat tentang perlunya perlindungan dan kelestarian SDA yang menjadi tanggungjawab bersama bagi semua unsur masyarakat & stakeholder. <input type="checkbox"/> Memberikan penghargaan / apresiasi khusus kepada masyarakat yang telah terbukti berjasa dalam upaya ikut melindungi dan melestarikan SDA, baik secara pribadi maupun kelompok masyarakat.	Pembuatan JUKLAK dan JUKNIS sosialisasi.	Pemprov. Jatim & Pemkab. Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Dinas Kehutanan, Dinas PU Pengairan Prov. Jatim, BP DAS Sampean.

2. PENGAWETAN / PENGHEMATAN AIR

NO.	ANALISIS PERMASALAHAN	SASARAN / TARGET YANG INGIN DICAPAI	STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
			JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)		
2.2	Kekurangan air pada musim kemarau (baik untuk air minum maupun air irigasi).	Meningkatkan efisiensi pemakaian air.	<input type="checkbox"/> Kampanye gerakan hemat air. <input type="checkbox"/> Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI).	<input type="checkbox"/> Kampanye gerakan hemat air. <input type="checkbox"/> Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI).	<input type="checkbox"/> Kampanye gerakan hemat air. <input type="checkbox"/> Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI).	<input type="checkbox"/> Kampanye gerakan hemat air. <input type="checkbox"/> Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI).	<input type="checkbox"/> Kampanye gerakan hemat air. <input type="checkbox"/> Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI).	<input type="checkbox"/> Kampanye gerakan hemat air. <input type="checkbox"/> Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI).	<input type="checkbox"/> Kampanye gerakan hemat air. <input type="checkbox"/> Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI).	<input type="checkbox"/> Kampanye gerakan hemat air. <input type="checkbox"/> Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI).	<input type="checkbox"/> Kampanye gerakan hemat air. <input type="checkbox"/> Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI).	PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Kebijakan Pola tanam.	Pemprov. Jatim dan Pemkab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Dinas / instansi terkait di lingkungan Pemprov Jatim.
2.3	Terjadi pengambilan / pemanfaatan air tanah yang meningkat, namun tidak disertai dengan sistem kontrol pengendalian dalam proses perijinannya.	Pemanfaatan air tanah secara optimal yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mencegah intrusi air laut. Untuk itu perlu dikendalikan proses perijinannya.	<input type="checkbox"/> Ijin pemanfaatan air tanah perlu dibatasi hanya pada kawasan yang memiliki potensi air tanah cukup besar, sesuai data hidrogeologi pada Cekungan Air Tanah (CAT) di WS Baru Bajulmati.	<input type="checkbox"/> Ijin pemanfaatan air tanah perlu dibatasi hanya pada kawasan yang memiliki potensi air tanah cukup besar, sesuai data hidrogeologi pada Cekungan Air Tanah (CAT) di WS Baru Bajulmati.	<input type="checkbox"/> Ijin pemanfaatan air tanah perlu dibatasi hanya pada kawasan yang memiliki potensi air tanah cukup besar, sesuai data hidrogeologi pada Cekungan Air Tanah (CAT) di WS Baru Bajulmati.	<input type="checkbox"/> Ijin pemanfaatan air tanah perlu dibatasi hanya pada kawasan yang memiliki potensi air tanah cukup besar, sesuai data hidrogeologi pada Cekungan Air Tanah (CAT) di WS Baru Bajulmati.	<input type="checkbox"/> Ijin pemanfaatan air tanah perlu dibatasi hanya pada kawasan yang memiliki potensi air tanah cukup besar, sesuai data hidrogeologi pada Cekungan Air Tanah (CAT) di WS Baru Bajulmati.	<input type="checkbox"/> Ijin pemanfaatan air tanah perlu dibatasi hanya pada kawasan yang memiliki potensi air tanah cukup besar, sesuai data hidrogeologi pada Cekungan Air Tanah (CAT) di WS Baru Bajulmati.	<input type="checkbox"/> Ijin pemanfaatan air tanah perlu dibatasi hanya pada kawasan yang memiliki potensi air tanah cukup besar, sesuai data hidrogeologi pada Cekungan Air Tanah (CAT) di WS Baru Bajulmati.	<input type="checkbox"/> Ijin pemanfaatan air tanah perlu dibatasi hanya pada kawasan yang memiliki potensi air tanah cukup besar, sesuai data hidrogeologi pada Cekungan Air Tanah (CAT) di WS Baru Bajulmati.	<input type="checkbox"/> Ijin pemanfaatan air tanah perlu dibatasi hanya pada kawasan yang memiliki potensi air tanah cukup besar, sesuai data hidrogeologi pada Cekungan Air Tanah (CAT) di WS Baru Bajulmati.	PP No. 43 tahun 2008 tentang Air Tanah.	Pemprov. Jatim dan Pemkab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Dinas / instansi terkait di lingkungan Pemprov Jatim.

3. PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

NO.	ANALISIS PERMASALAHAN	SASARAN / TARGET YANG INGIN DICAPAI	STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
			JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)		
3.1	Penurunan kualitas air.	Mencegah terjadinya pencemaran air dengan mengontrol buangan limbah dan jenis polutan berbahaya lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Membangun sistem pemantauan kualitas air pada sumber air di WS Baru Bajulmati yang dilengkapi peralatan sesuatu kebutuhan. ❑ Penerbitan peraturan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dari hulu hingga hilir. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Membangun sistem pemantauan kualitas air pada sumber air di WS Baru Bajulmati yang dilengkapi peralatan sesuatu kebutuhan. ❑ Penerbitan peraturan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dari hulu hingga hilir. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Membangun sistem pemantauan kualitas air pada sumber air di WS Baru Bajulmati yang dilengkapi peralatan sesuatu kebutuhan. ❑ Penerbitan peraturan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dari hulu hingga hilir. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Membangun sistem pemantauan kualitas air pada sumber air di WS Baru Bajulmati yang dilengkapi peralatan sesuatu kebutuhan. ❑ Penerbitan peraturan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dari hulu hingga hilir. ❑ Pembangunan IPAL dan TPA di WS Baru Bajulmati. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Membangun sistem pemantauan kualitas air pada sumber air di WS Baru Bajulmati yang dilengkapi peralatan sesuatu kebutuhan. ❑ Penerbitan peraturan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dari hulu hingga hilir. ❑ Pembangunan IPAL dan TPA di WS Baru Bajulmati. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Membangun sistem pemantauan kualitas air pada sumber air di WS Baru Bajulmati yang dilengkapi peralatan sesuatu kebutuhan. ❑ Penerbitan peraturan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dari hulu hingga hilir. ❑ Pembangunan IPAL dan TPA di WS Baru Bajulmati. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Membangun sistem pemantauan kualitas air pada sumber air di WS Baru Bajulmati yang dilengkapi peralatan sesuatu kebutuhan. ❑ Penerbitan peraturan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dari hulu hingga hilir. ❑ Pembangunan IPAL dan TPA di WS Baru Bajulmati. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Membangun sistem pemantauan kualitas air pada sumber air di WS Baru Bajulmati yang dilengkapi peralatan sesuatu kebutuhan. ❑ Penerbitan peraturan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dari hulu hingga hilir. ❑ Pembangunan IPAL dan TPA di WS Baru Bajulmati. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Membangun sistem pemantauan kualitas air pada sumber air di WS Baru Bajulmati yang dilengkapi peralatan sesuatu kebutuhan. ❑ Penerbitan peraturan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dari hulu hingga hilir. ❑ Pembangunan IPAL dan TPA di WS Baru Bajulmati. 	PPLH. Perda Baku Mutu Air & Limbah Cair. Pelaksanaan Penegakan Hukum.	Pemprov. Jatim dan Pemkab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Dinas / instansi terkait di lingkungan Pemprov Jatim.
3.2	Pencemaran air.	Kualitas air yang memenuhi standar baku mutu sesuai kriteria yang disyaratkan.	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran air. ❑ Pembuatan perda yang mengatur pembuangan sampah oleh masyarakat. ❑ Penerbitan Perda Baku Mutu Air dan limbah cair di Kabupaten di WS Baru Bajulmati. ❑ Mengendalikan pengambilan air tanah 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran air. ❑ Pembuatan perda yang mengatur pembuangan sampah oleh masyarakat. ❑ Penerbitan Perda Baku Mutu Air dan limbah cair di Kabupaten di WS Baru Bajulmati. ❑ Mengendalikan pengambilan air tanah 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran air. ❑ Pembuatan perda yang mengatur pembuangan sampah oleh masyarakat. ❑ Penerbitan Perda Baku Mutu Air dan limbah cair di Kabupaten di WS Baru Bajulmati. ❑ Mengendalikan pengambilan air tanah 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran air. ❑ Pembuatan perda yang mengatur pembuangan sampah oleh masyarakat. ❑ Penerbitan Perda Baku Mutu Air dan limbah cair di Kabupaten di WS Baru Bajulmati. ❑ Mengendalikan pengambilan air tanah ❑ Pembangunan IPAL di Kabupaten di WS Baru Bajulmati. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran air. ❑ Pembuatan perda yang mengatur pembuangan sampah oleh masyarakat. ❑ Penerbitan Perda Baku Mutu Air dan limbah cair di Kabupaten di WS Baru Bajulmati. ❑ Mengendalikan pengambilan air tanah ❑ Pembangunan IPAL di Kabupaten di WS Baru Bajulmati. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran air. ❑ Pembuatan perda yang mengatur pembuangan sampah oleh masyarakat. ❑ Penerbitan Perda Baku Mutu Air dan limbah cair di Kabupaten di WS Baru Bajulmati. ❑ Mengendalikan pengambilan air tanah ❑ Pembangunan IPAL di Kabupaten di WS Baru Bajulmati. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran air. ❑ Pembuatan perda yang mengatur pembuangan sampah oleh masyarakat. ❑ Penerbitan Perda Baku Mutu Air dan limbah cair di Kabupaten di WS Baru Bajulmati. ❑ Mengendalikan pengambilan air tanah ❑ Pembangunan IPAL di Kabupaten di WS Baru Bajulmati. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang bahaya pencemaran air. ❑ Pembuatan perda yang mengatur pembuangan sampah oleh masyarakat. ❑ Penerbitan Perda Baku Mutu Air dan limbah cair di Kabupaten di WS Baru Bajulmati. ❑ Mengendalikan pengambilan air tanah ❑ Pembangunan IPAL di Kabupaten di WS Baru Bajulmati. 	Pembuatan JUKLAK dan JUKNIS sosialisasi. Pembuatan JUKLAK dan JUKNIS sosialisasi. Perda Baku Mutu Air & Limbah Cair. Sosialisasi dan Penegakan hukum Sosialisasi dan Penegakan hukum masyarakat industri.	Pemprov. Jatim dan Pemkab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Dinas / instansi terkait di lingkungan Pemprov Jatim.	

**TABEL 4.2. KEBIJAKAN OPERASIONAL POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BARU BAJULMATI
DENGAN SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH, PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI**

ASPEK II : PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

- SUB ASPE : 1. Penatagunaan sumber daya air
2. Penyediaan sumber daya air
3. Penggunaan sumber daya air
4. Pengembangan sumber daya air
5. Pengusahaan sumber daya air

1. PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

NO.	ANALISIS PERMASALAHAN	SASARAN / TARGET YANG INGIN DICAPAI	STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
			JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)		
1.1	Kurangnya integrasi untuk sharing pemakaian air di bagian hulu dan hilir.	Penetapan alokasi penggunaan air dibagian hulu dan hilir sesuai dengan pola pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati.	<input type="checkbox"/> Menyusun pedoman alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menetapkan pola pembagian alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menerapkan sistem interbasin wilayah DI Baru, Setail, Blambangan.	<input type="checkbox"/> Menyusun pedoman alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menetapkan pola pembagian alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menerapkan sistem interbasin wilayah DI Baru, Setail, Blambangan.	<input type="checkbox"/> Menyusun pedoman alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menetapkan pola pembagian alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menerapkan sistem interbasin wilayah DI Baru, Setail, Blambangan.	<input type="checkbox"/> Menyusun pedoman alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menetapkan pola pembagian alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menerapkan sistem interbasin wilayah DI Baru, Setail, Blambangan serta mengembangkan sistem dengan menambah bangunan fasilitas jaringan irigasi.	<input type="checkbox"/> Menyusun pedoman alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menetapkan pola pembagian alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menerapkan sistem interbasin wilayah DI Baru, Setail, Blambangan serta mengembangkan sistem dengan menambah bangunan fasilitas jaringan irigasi.	<input type="checkbox"/> Menyusun pedoman alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menetapkan pola pembagian alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menerapkan sistem interbasin wilayah DI Baru, Setail, Blambangan serta mengembangkan sistem dengan menambah bangunan fasilitas jaringan irigasi.	<input type="checkbox"/> Menyusun pedoman alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menetapkan pola pembagian alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menerapkan sistem interbasin wilayah DI Baru, Setail, Blambangan serta mengembangkan sistem dengan menambah bangunan fasilitas jaringan irigasi.	<input type="checkbox"/> Menyusun pedoman alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menetapkan pola pembagian alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menerapkan sistem interbasin wilayah DI Baru, Setail, Blambangan serta mengembangkan sistem dengan menambah bangunan fasilitas jaringan irigasi.	<input type="checkbox"/> Menyusun pedoman alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menetapkan pola pembagian alokasi penggunaan air. <input type="checkbox"/> Menerapkan sistem interbasin wilayah DI Baru, Setail, Blambangan serta mengembangkan sistem dengan menambah bangunan fasilitas jaringan irigasi.	Kesepakatan Balai PSDA WS Baru Bajulmati , Dinas Terkait Kabupaten. Kesepakatan Pemprov Jatim, Pemkab Banyuwangi dan Kementerian PU.	Pemprov. Jatim dan Pemkab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Dinas / instansi terkait di lingkungan Pemprov Jatim.
1.2	Adanya praktek penggunaan air yang berlebihan / kurang efisien di WS Baru Bajulmati.	Menerapkan kebijakan efisiensi penggunaan air.	<input type="checkbox"/> Menerapkan perda yang mengatur tata cara penggunaan air secara efisien dan menerapkan sanksi bagi penggunaan air yang berlebihan.	<input type="checkbox"/> Menerapkan perda yang mengatur tata cara penggunaan air secara efisien dan menerapkan sanksi bagi penggunaan air yang berlebihan.	<input type="checkbox"/> Menerapkan perda yang mengatur tata cara penggunaan air secara efisien dan menerapkan sanksi bagi penggunaan air yang berlebihan.	<input type="checkbox"/> Menerapkan perda yang mengatur tata cara penggunaan air secara efisien dan menerapkan sanksi bagi penggunaan air yang berlebihan.	<input type="checkbox"/> Menerapkan perda yang mengatur tata cara penggunaan air secara efisien dan menerapkan sanksi bagi penggunaan air yang berlebihan.	<input type="checkbox"/> Menerapkan perda yang mengatur tata cara penggunaan air secara efisien dan menerapkan sanksi bagi penggunaan air yang berlebihan.	<input type="checkbox"/> Menerapkan perda yang mengatur tata cara penggunaan air secara efisien dan menerapkan sanksi bagi penggunaan air yang berlebihan.	<input type="checkbox"/> Menerapkan perda yang mengatur tata cara penggunaan air secara efisien dan menerapkan sanksi bagi penggunaan air yang berlebihan.	<input type="checkbox"/> Menerapkan perda yang mengatur tata cara penggunaan air secara efisien dan menerapkan sanksi bagi penggunaan air yang berlebihan.	Sanksi hukum bagi pelanggan PERDA.	

2. PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR

NO.	ANALISIS PERMASALAHAN	SASARAN / TARGET YANG INGIN DICAPAI	STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
			JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)		
2.1	Kurangnya ketersediaan air untuk air baku dan air irigasi di musim kemarau.	Penyediaan air baku dan air irigasi yang memenuhi kebutuhan dengan cara mempertahankan debit air sungai & mata air di musim kemarau.	<input type="checkbox"/> Penyusunan neraca air guna mengetahui ketersediaan dan kebutuhan air di WS Baru Bajulmati. <input type="checkbox"/> Memanfaatkan potensi air tanah untuk menambah penyediaan sumber daya air. <input type="checkbox"/> Meningkatkan luas dan fungsi resapan air di daerah hulu (up-land)	<input type="checkbox"/> Penyusunan neraca air guna mengetahui ketersediaan dan kebutuhan air di WS Baru Bajulmati. <input type="checkbox"/> Memanfaatkan potensi air tanah untuk menambah penyediaan sumber daya air. <input type="checkbox"/> Meningkatkan luas dan fungsi resapan air di daerah hulu (up-land)	<input type="checkbox"/> Penyusunan neraca air guna mengetahui ketersediaan dan kebutuhan air di WS Baru Bajulmati. <input type="checkbox"/> Memanfaatkan potensi air tanah untuk menambah penyediaan sumber daya air. <input type="checkbox"/> Meningkatkan luas dan fungsi resapan air di daerah hulu (up-land)	<input type="checkbox"/> Penyusunan neraca air guna mengetahui ketersediaan dan kebutuhan air di WS Baru Bajulmati. <input type="checkbox"/> Memanfaatkan potensi air tanah untuk menambah penyediaan sumber daya air. <input type="checkbox"/> Meningkatkan luas dan fungsi resapan air di daerah hulu (up-land)	<input type="checkbox"/> Penyusunan neraca air guna mengetahui ketersediaan dan kebutuhan air di WS Baru Bajulmati. <input type="checkbox"/> Memanfaatkan potensi air tanah untuk menambah penyediaan sumber daya air. <input type="checkbox"/> Meningkatkan luas dan fungsi resapan air di daerah hulu (up-land)	<input type="checkbox"/> Penyusunan neraca air guna mengetahui ketersediaan dan kebutuhan air di WS Baru Bajulmati. <input type="checkbox"/> Memanfaatkan potensi air tanah untuk menambah penyediaan sumber daya air. <input type="checkbox"/> Meningkatkan luas dan fungsi resapan air di daerah hulu (up-land)	<input type="checkbox"/> Penyusunan neraca air guna mengetahui ketersediaan dan kebutuhan air di WS Baru Bajulmati. <input type="checkbox"/> Memanfaatkan potensi air tanah untuk menambah penyediaan sumber daya air. <input type="checkbox"/> Meningkatkan luas dan fungsi resapan air di daerah hulu (up-land)	<input type="checkbox"/> Penyusunan neraca air guna mengetahui ketersediaan dan kebutuhan air di WS Baru Bajulmati. <input type="checkbox"/> Memanfaatkan potensi air tanah untuk menambah penyediaan sumber daya air. <input type="checkbox"/> Meningkatkan luas dan fungsi resapan air di daerah hulu (up-land)	<input type="checkbox"/> Penyusunan neraca air guna mengetahui ketersediaan dan kebutuhan air di WS Baru Bajulmati. <input type="checkbox"/> Memanfaatkan potensi air tanah untuk menambah penyediaan sumber daya air. <input type="checkbox"/> Meningkatkan luas dan fungsi resapan air di daerah hulu (up-land)	Kesepakatan Pemprov Jatim, Pemkab Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Kementerian PU	Pemprov. Jatim, Pemkab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Instansi terkait di lingkungan Pemprov Jatim.

2. PENYEDIAAN SUMBER DAYA AIR

NO.	ANALISIS PERMASALAHAN	SASARAN / TARGET YANG INGIN DICAPAI	STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
			JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)		
						<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan volume penyediaan air untuk suplai air yang dibutuhkan dalam rangka menunjang program agropolitan di Kec. Bangorejo dan Minapolitan di Kec. Muncar. Pembangunan Embung Singolatri, Lider, Kedawang, Dam Bomo, dll sesuai yang tercantum dalam RTRW Kab. Banyuwangi & RTRW Prov. Jawa Timur. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan volume penyediaan air untuk suplai air yang dibutuhkan dalam rangka menunjang program agropolitan di Kec. Bangorejo dan Minapolitan di Kec. Muncar. Pembangunan Embung Singolatri, Lider, Kedawang, Dam Bomo, dll sesuai yang tercantum dalam RTRW Kab. Banyuwangi & RTRW Prov. Jawa Timur. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan volume penyediaan air untuk suplai air yang dibutuhkan dalam rangka menunjang program agropolitan di Kec. Bangorejo dan Minapolitan di Kec. Muncar. Pembangunan Embung Singolatri, Lider, Kedawang, Dam Bomo, dll sesuai yang tercantum dalam RTRW Kab. Banyuwangi & RTRW Prov. Jawa Timur. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan volume penyediaan air untuk suplai air yang dibutuhkan dalam rangka menunjang program agropolitan di Kec. Bangorejo dan Minapolitan di Kec. Muncar. Pembangunan Embung Singolatri, Lider, Kedawang, Dam Bomo, dll sesuai yang tercantum dalam RTRW Kab. Banyuwangi & RTRW Prov. Jawa Timur. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan volume penyediaan air untuk suplai air yang dibutuhkan dalam rangka menunjang program agropolitan di Kec. Bangorejo dan Minapolitan di Kec. Muncar. Pembangunan Embung Singolatri, Lider, Kedawang, Dam Bomo, dll sesuai yang tercantum dalam RTRW Kab. Banyuwangi & RTRW Prov. Jawa Timur. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan volume penyediaan air untuk suplai air yang dibutuhkan dalam rangka menunjang program agropolitan di Kec. Bangorejo dan Minapolitan di Kec. Muncar. Pembangunan Embung Singolatri, Lider, Kedawang, Dam Bomo, dll sesuai yang tercantum dalam RTRW Kab. Banyuwangi & RTRW Prov. Jawa Timur. 	<p>Kesepakatan Pemprov Jatim, Pemkab Banyuwangi dan Kementerian PU.</p> <p>Kesepakatan Pemprov Jatim, Pemkab Banyuwangi dan Kementerian PU.</p>	

3. PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR

NO.	ANALISIS PERMASALAHAN	SASARAN / TARGET YANG INGIN DICAPAI	STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
			JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)		
3.1	Perluunya keterpaduan penyusunan rencana pengelolaan SDA.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air.	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati. Memberikan masukan untuk review RTRW provinsi, RTRW Kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati. Memberikan masukan untuk review RTRW provinsi, RTRW Kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati. Memberikan masukan untuk review RTRW provinsi, RTRW Kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati. Memberikan masukan untuk review RTRW provinsi, RTRW Kabupaten. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati oleh seluruh Stakeholder. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati. Memberikan masukan untuk review RTRW provinsi, RTRW Kabupaten. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati oleh seluruh Stakeholder. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati. Memberikan masukan untuk review RTRW provinsi, RTRW Kabupaten. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air WS Baru Bajulmati oleh seluruh Stakeholder. 	<p>PP no. 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA.</p> <p>Kesepakatan Pemprov Jatim, Pemkab Banyuwangi, Situbondo Bondowoso, DPRD Prov / DPRD Kab Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso.</p>	<p>Pemprov. Jatim, Pemkab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Instansi terkait di lingkungan Pemprov Jatim.</p>
3.2	Penggunaan air irigasi yang kurang efisien.	Meningkatkan efesiensi penggunaan air irigasi dengan lebih meningkatkan kinerja O&P dan merehabilitasi bangunan prasarana irigasi yang rusak / tidak berfungsi.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kinerja bangunan fasilitas SDA yang ada dengan meningkatkan kinerja O&P. Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI). 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kinerja bangunan fasilitas SDA yang ada dengan meningkatkan kinerja O&P. Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI). 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kinerja bangunan fasilitas SDA yang ada dengan meningkatkan kinerja O&P. Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI). 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kinerja bangunan fasilitas SDA yang ada dengan meningkatkan kinerja O&P serta merehabilitasi / meng-upgrade fungsi bangunan agar dapat berfungsi secara optimal. Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI). 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kinerja bangunan fasilitas SDA yang ada dengan meningkatkan kinerja O&P serta merehabilitasi / meng-upgrade fungsi bangunan agar dapat berfungsi secara optimal. Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI). 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kinerja bangunan fasilitas SDA yang ada dengan meningkatkan kinerja O&P serta merehabilitasi / meng-upgrade fungsi bangunan agar dapat berfungsi secara optimal. Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI). 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kinerja bangunan fasilitas SDA yang ada dengan meningkatkan kinerja O&P serta merehabilitasi / meng-upgrade fungsi bangunan agar dapat berfungsi secara optimal, serta menambah bangunan fasilitas jaringan irigasi. Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI). 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kinerja bangunan fasilitas SDA yang ada dengan meningkatkan kinerja O&P serta merehabilitasi / meng-upgrade fungsi bangunan agar dapat berfungsi secara optimal, serta menambah bangunan fasilitas jaringan irigasi. Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI). 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kinerja bangunan fasilitas SDA yang ada dengan meningkatkan kinerja O&P serta merehabilitasi / meng-upgrade fungsi bangunan agar dapat berfungsi secara optimal, serta menambah bangunan fasilitas jaringan irigasi. Penerapan sistem tanam padi dengan pola System of Rice Intensification (SRI). 	<p>Kesepakatan Pemprov Jatim, Pemkab Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Kementerian PU.</p> <p>UU No. 12 Th. 1992 ttg Sistem Budidaya Tanaman, Kebijakan Pola tanam.</p>	<p>Pemprov. Jatim, Pemkab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Instansi terkait di lingkungan Pemprov Jatim.</p>

4. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR

NO.	ANALISIS PERMASALAHAN	SASARAN / TARGET YANG INGIN DICAPAI	STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
			JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)		
4.1	Pemanfaatan sumber daya air yang kurang optimal	Mengembangkan pemanfaatan sumber daya air yang tersedia secara optimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan jaringan tata air irigasi tambak Tegalpare di sekitar muara K. Setail. Mengembangkan pemanfaatan air Waduk Bajulmati untuk kebutuhan air irigasi, industri BIEW, Pelabuhan Tanjungwangi dan obyek ekowisata. . Mengembangkan potensi air tanah pada wilayah CAT Wonorejo & CAT Banyuwangi yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti di wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kabat, Rogojampi, Srono, Tegaldlimo. Mengembangkan pemanfaatan sumber air yang cukup berpotensi untuk mensuplai kebutuhan air irigasi & air minum di daerah sekitarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan jaringan tata air irigasi tambak Tegalpare di sekitar muara K. Setail. Mengembangkan pemanfaatan air Waduk Bajulmati untuk kebutuhan air irigasi, industri BIEW, Pelabuhan Tanjungwangi dan obyek ekowisata. . Mengembangkan potensi air tanah pada wilayah CAT Wonorejo & CAT Banyuwangi yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti di wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kabat, Rogojampi, Srono, Tegaldlimo. Mengembangkan pemanfaatan sumber air yang cukup berpotensi untuk mensuplai kebutuhan air irigasi & air minum di daerah sekitarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan jaringan tata air irigasi tambak Tegalpare di sekitar muara K. Setail. Mengembangkan pemanfaatan air Waduk Bajulmati untuk kebutuhan air irigasi, industri BIEW, Pelabuhan Tanjungwangi dan obyek ekowisata. . Mengembangkan potensi air tanah pada wilayah CAT Wonorejo & CAT Banyuwangi yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti di wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kabat, Rogojampi, Srono, Tegaldlimo. Mengembangkan pemanfaatan sumber air yang cukup berpotensi untuk mensuplai kebutuhan air irigasi & air minum di daerah sekitarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan jaringan tata air irigasi tambak Tegalpare di sekitar muara K. Setail. Mengembangkan pemanfaatan air Waduk Bajulmati untuk kebutuhan air irigasi, industri BIEW, Pelabuhan Tanjungwangi dan obyek ekowisata. . Mengembangkan potensi air tanah pada wilayah CAT Wonorejo & CAT Banyuwangi yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti di wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kabat, Rogojampi, Srono, Tegaldlimo. Mengembangkan pemanfaatan sumber air yang cukup berpotensi untuk mensuplai kebutuhan air irigasi & air minum di daerah sekitarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan jaringan tata air irigasi tambak Tegalpare di sekitar muara K. Setail. Mengembangkan pemanfaatan air Waduk Bajulmati untuk kebutuhan air irigasi, industri BIEW, Pelabuhan Tanjungwangi dan obyek ekowisata. . Mengembangkan potensi air tanah pada wilayah CAT Wonorejo & CAT Banyuwangi yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti di wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kabat, Rogojampi, Srono, Tegaldlimo. Mengembangkan pemanfaatan sumber air yang cukup berpotensi untuk mensuplai kebutuhan air irigasi & air minum di daerah sekitarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan jaringan tata air irigasi tambak Tegalpare di sekitar muara K. Setail. Mengembangkan pemanfaatan air Waduk Bajulmati untuk kebutuhan air irigasi, industri BIEW, Pelabuhan Tanjungwangi dan obyek ekowisata. . Mengembangkan potensi air tanah pada wilayah CAT Wonorejo & CAT Banyuwangi yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti di wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kabat, Rogojampi, Srono, Tegaldlimo. Mengembangkan pemanfaatan sumber air yang cukup berpotensi untuk mensuplai kebutuhan air irigasi & air minum di daerah sekitarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan jaringan tata air irigasi tambak Tegalpare di sekitar muara K. Setail. Mengembangkan pemanfaatan air Waduk Bajulmati untuk kebutuhan air irigasi, industri BIEW, Pelabuhan Tanjungwangi dan obyek ekowisata. . Mengembangkan potensi air tanah pada wilayah CAT Wonorejo & CAT Banyuwangi yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti di wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kabat, Rogojampi, Srono, Tegaldlimo. Mengembangkan pemanfaatan sumber air yang cukup berpotensi untuk mensuplai kebutuhan air irigasi & air minum di daerah sekitarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan jaringan tata air irigasi tambak Tegalpare di sekitar muara K. Setail. Mengembangkan pemanfaatan air Waduk Bajulmati untuk kebutuhan air irigasi, industri BIEW, Pelabuhan Tanjungwangi dan obyek ekowisata. . Mengembangkan potensi air tanah pada wilayah CAT Wonorejo & CAT Banyuwangi yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti di wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kabat, Rogojampi, Srono, Tegaldlimo. Mengembangkan pemanfaatan sumber air yang cukup berpotensi untuk mensuplai kebutuhan air irigasi & air minum di daerah sekitarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan jaringan tata air irigasi tambak Tegalpare di sekitar muara K. Setail. Mengembangkan pemanfaatan air Waduk Bajulmati untuk kebutuhan air irigasi, industri BIEW, Pelabuhan Tanjungwangi dan obyek ekowisata. . Mengembangkan potensi air tanah pada wilayah CAT Wonorejo & CAT Banyuwangi yang belum dimanfaatkan secara optimal, seperti di wilayah Kecamatan Wongsorejo, Kabat, Rogojampi, Srono, Tegaldlimo. Mengembangkan pemanfaatan sumber air yang cukup berpotensi untuk mensuplai kebutuhan air irigasi & air minum di daerah sekitarnya. 	Kesepakatan Dinas Perikanan & Kelautan, Dinas PU Pengairan Prov. Jatim serta BBWS Brantas.	Pemprov. Jatim, Pemkab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Instansi terkait di lingkungan Pemprov Jatim.
4.2	Perlu pengembangan pola tanam dan pemilihan jenis tanaman guna meningkatkan nilai ekonomis.	Meningkatkan produktifitas usaha tani guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan pertanian palawija dan tanaman bernilai ekonomi tinggi yang tidak membutuhkan air yang banyak pada daerah tadah hujan dan pada daerah irigasi yang kekurangan air atau pada daerah irigasi pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan pertanian palawija dan tanaman bernilai ekonomi tinggi yang tidak membutuhkan air yang banyak pada daerah tadah hujan dan pada daerah irigasi yang kekurangan air atau pada daerah irigasi pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan pertanian palawija dan tanaman bernilai ekonomi tinggi yang tidak membutuhkan air yang banyak pada daerah tadah hujan dan pada daerah irigasi yang kekurangan air atau pada daerah irigasi pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan pertanian palawija dan tanaman bernilai ekonomi tinggi yang tidak membutuhkan air yang banyak pada daerah tadah hujan dan pada daerah irigasi yang kekurangan air atau pada daerah irigasi pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan pertanian palawija dan tanaman bernilai ekonomi tinggi yang tidak membutuhkan air yang banyak pada daerah tadah hujan dan pada daerah irigasi yang kekurangan air atau pada daerah irigasi pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan pertanian palawija dan tanaman bernilai ekonomi tinggi yang tidak membutuhkan air yang banyak pada daerah tadah hujan dan pada daerah irigasi yang kekurangan air atau pada daerah irigasi pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan pertanian palawija dan tanaman bernilai ekonomi tinggi yang tidak membutuhkan air yang banyak pada daerah tadah hujan dan pada daerah irigasi yang kekurangan air atau pada daerah irigasi pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan pertanian palawija dan tanaman bernilai ekonomi tinggi yang tidak membutuhkan air yang banyak pada daerah tadah hujan dan pada daerah irigasi yang kekurangan air atau pada daerah irigasi pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan pertanian palawija dan tanaman bernilai ekonomi tinggi yang tidak membutuhkan air yang banyak pada daerah tadah hujan dan pada daerah irigasi yang kekurangan air atau pada daerah irigasi pedesaan. 	Sosialisasi efisiensi pengelolaan pertanian	Pemprov. Jatim, Pemkab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Instansi terkait di lingkungan Pemprov Jatim.

**TABEL 4.3. KEBIJAKAN OPERASIONAL POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BARU BAJULMATI
DENGAN SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH, PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI**

ASPEK III : PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

- SUB ASPE : 1. Pencegahan
2. Penanggulangan
3. Pemulihan

1. PENCEGAHAN

NO.	ANALISIS PERMASALAHAN	SASARAN / TARGET YANG INGIN DICAPAI	STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
			JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)		
1.1	Perlu integrasi antara perencanaan tata ruang dan tata kelola air	Kawasan rawan bencana perlu ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten dan penerbitan Perda.	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Meningkatkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi/Kab. ☐ Pengaturan pemanfaatan kawasan rawan bencana dalam RTRW. ☐ Koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan DAS. ☐ Penetapan kawasan rawan bencana banjir tertutup untuk pemukiman. ☐ Penegakan hukum pemanfaatan sempadan sungai secara optimal. ☐ Penyusunan Peta Resiko Bencana Banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Meningkatkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi/Kab. ☐ Pengaturan pemanfaatan kawasan rawan bencana dalam RTRW. ☐ Koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan DAS. ☐ Penetapan kawasan rawan bencana banjir tertutup untuk pemukiman. ☐ Penegakan hukum pemanfaatan sempadan sungai secara optimal. ☐ Penyusunan Peta Resiko Bencana Banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Meningkatkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi/Kab. ☐ Pengaturan pemanfaatan kawasan rawan bencana dalam RTRW. ☐ Koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan DAS. ☐ Penetapan kawasan rawan bencana banjir tertutup untuk pemukiman. ☐ Penegakan hukum pemanfaatan sempadan sungai secara optimal. ☐ Penyusunan Peta Resiko Bencana Banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Meningkatkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi/Kab. ☐ Pengaturan pemanfaatan kawasan rawan bencana dalam RTRW. ☐ Koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan DAS. ☐ Penetapan kawasan rawan bencana banjir tertutup untuk pemukiman. ☐ Penegakan hukum pemanfaatan sempadan sungai secara optimal. ☐ Penyusunan Peta Resiko Bencana Banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Meningkatkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi/Kab. ☐ Pengaturan pemanfaatan kawasan rawan bencana dalam RTRW. ☐ Koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan DAS. ☐ Penetapan kawasan rawan bencana banjir tertutup untuk pemukiman. ☐ Penegakan hukum pemanfaatan sempadan sungai secara optimal. ☐ Penyusunan Peta Resiko Bencana Banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Meningkatkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi/Kab. ☐ Pengaturan pemanfaatan kawasan rawan bencana dalam RTRW. ☐ Koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan DAS. ☐ Penetapan kawasan rawan bencana banjir tertutup untuk pemukiman. ☐ Penegakan hukum pemanfaatan sempadan sungai secara optimal. ☐ Penyusunan Peta Resiko Bencana Banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Meningkatkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi/Kab. ☐ Pengaturan pemanfaatan kawasan rawan bencana dalam RTRW. ☐ Koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan DAS. ☐ Penetapan kawasan rawan bencana banjir tertutup untuk pemukiman. ☐ Penegakan hukum pemanfaatan sempadan sungai secara optimal. ☐ Penyusunan Peta Resiko Bencana Banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Meningkatkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi/Kab. ☐ Pengaturan pemanfaatan kawasan rawan bencana dalam RTRW. ☐ Koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan DAS. ☐ Penetapan kawasan rawan bencana banjir tertutup untuk pemukiman. ☐ Penegakan hukum pemanfaatan sempadan sungai secara optimal. ☐ Penyusunan Peta Resiko Bencana Banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Meningkatkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi/Kab. ☐ Pengaturan pemanfaatan kawasan rawan bencana dalam RTRW. ☐ Koordinasi antar stakeholder dalam pengelolaan DAS. ☐ Penetapan kawasan rawan bencana banjir tertutup untuk pemukiman. ☐ Penegakan hukum pemanfaatan sempadan sungai secara optimal. ☐ Penyusunan Peta Resiko Bencana Banjir. 	Pembahasan intensif mengenai bencana, RTRW dan pengelolaan SDA oleh Dewan SDA Jawa Timur Identifikasi dan pemetaan kawasan rawan bencana	Pemprov. Jatim dan Pemkab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Instansi terkait di lingkungan Pemprov Jatim.
1.2	Adanya sedimentasi dan luapan banjir.	Pembangunan prasarana fisik bangunan pengendali banjir.	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Perbaikan / peninggian tanggul sungai di lokasi rawan banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Perbaikan / peninggian tanggul sungai di lokasi rawan banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Perbaikan / peninggian tanggul sungai di lokasi rawan banjir. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Perbaikan / peninggian tanggul sungai di lokasi rawan banjir. ☐ Normalisasi penampang sungai pada ruas yang sering mengalami luapan air banjir dengan cara menggali sedimen, membersihkan tumbuhan pengganggu dan timbunan sampah, membuat plengsengan talud, parapet atau meninggikan tanggul. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Perbaikan / peninggian tanggul sungai di lokasi rawan banjir. ☐ Normalisasi penampang sungai pada ruas yang sering mengalami luapan air banjir dengan cara menggali sedimen, membersihkan tumbuhan pengganggu dan timbunan sampah, membuat plengsengan talud, parapet atau meninggikan tanggul. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Perbaikan / peninggian tanggul sungai di lokasi rawan banjir. ☐ Normalisasi penampang sungai pada ruas yang sering mengalami luapan air banjir dengan cara menggali sedimen, membersihkan tumbuhan pengganggu dan timbunan sampah, membuat plengsengan talud, parapet atau meninggikan tanggul. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Perbaikan / peninggian tanggul sungai di lokasi rawan banjir. ☐ Normalisasi penampang sungai pada ruas yang sering mengalami luapan air banjir dengan cara menggali sedimen, membersihkan tumbuhan pengganggu dan timbunan sampah, membuat plengsengan talud, parapet atau meninggikan tanggul. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Perbaikan / peninggian tanggul sungai di lokasi rawan banjir. ☐ Normalisasi penampang sungai pada ruas yang sering mengalami luapan air banjir dengan cara menggali sedimen, membersihkan tumbuhan pengganggu dan timbunan sampah, membuat plengsengan talud, parapet atau meninggikan tanggul. 	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Perbaikan / peninggian tanggul sungai di lokasi rawan banjir. ☐ Normalisasi penampang sungai pada ruas yang sering mengalami luapan air banjir dengan cara menggali sedimen, membersihkan tumbuhan pengganggu dan timbunan sampah, membuat plengsengan talud, parapet atau meninggikan tanggul. 	Koordinasi dengan instansi terkait	Pemprov. Jatim dan Pemkab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Instansi terkait di lingkungan Pemprov Jatim.

1. PENCEGAHAN

NO.	ANALISIS PERMASALAHAN	SASARAN / TARGET YANG INGIN DICAPAI	STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
			JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)		
		Upaya penanganan pengendalian banjir dengan cara non konstruksi fisik.	<ul style="list-style-type: none"> Usaha konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA) dengan menambah luasan daerah tutupan lahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Usaha konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA) dengan menambah luasan daerah tutupan lahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Usaha konservasi Daerah Tangkapan Air (DTA) dengan menambah luasan daerah tutupan lahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penambangan material sedimen / pasir (bahan galian golongan - c) yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan dengan cara penambangan sesuai kriteria yang ditentukan guna memelihara ekosistem morfologi sungai dan kelestarian lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penambangan material sedimen / pasir (bahan galian golongan - c) yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan dengan cara penambangan sesuai kriteria yang ditentukan guna memelihara ekosistem morfologi sungai dan kelestarian lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penambangan material sedimen / pasir (bahan galian golongan - c) yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan dengan cara penambangan sesuai kriteria yang ditentukan guna memelihara ekosistem morfologi sungai dan kelestarian lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penambangan material sedimen / pasir (bahan galian golongan - c) yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan dengan cara penambangan sesuai kriteria yang ditentukan guna memelihara ekosistem morfologi sungai dan kelestarian lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penambangan material sedimen / pasir (bahan galian golongan - c) yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan dengan cara penambangan sesuai kriteria yang ditentukan guna memelihara ekosistem morfologi sungai dan kelestarian lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penambangan material sedimen / pasir (bahan galian golongan - c) yang bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan dengan cara penambangan sesuai kriteria yang ditentukan guna memelihara ekosistem morfologi sungai dan kelestarian lingkungan. 	Koordinasi dengan instansi terkait	
NO.	ANALISIS PERMASALAHAN	SASARAN / TARGET YANG INGIN DICAPAI	STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)		
1.3	Hambatan aliran banjir di muara sungai	Melancarkan aliran banjir di mulut / muara sungai	<ul style="list-style-type: none"> Penataan alur muara sungai yang menghambat aliran banjir 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan alur muara sungai yang menghambat aliran banjir 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan alur muara sungai yang menghambat aliran banjir 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan alur muara sungai yang menghambat aliran banjir Perbaikan alur sungai di bagian muara K. Bajulmati, K. Loo, K. Tambong, K. Bomo, K. Setail. Perbaikan muara Kali Bajulmati yang juga berkaitan dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pondok Mimbo (di sebelah utara muara Kali Bajulmati). Membuat bangunan pengaman pantai dan penanaman mangrove di wilayah Muncar, Blimbingsari dan Kota Banyuwangi guna melindungi dari serangan gelombang badai tropis (Fay & Igggy) dari Samudera Hindia. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan alur muara sungai yang menghambat aliran banjir Perbaikan alur sungai di bagian muara K. Bajulmati, K. Loo, K. Tambong, K. Bomo, K. Setail. Perbaikan muara Kali Bajulmati yang juga berkaitan dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pondok Mimbo (di sebelah utara muara Kali Bajulmati). Membuat bangunan pengaman pantai dan penanaman mangrove di wilayah Muncar, Blimbingsari dan Kota Banyuwangi guna melindungi dari serangan gelombang badai tropis (Fay & Igggy) dari Samudera Hindia. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan alur muara sungai yang menghambat aliran banjir Perbaikan alur sungai di bagian muara K. Bajulmati, K. Loo, K. Tambong, K. Bomo, K. Setail. Perbaikan muara Kali Bajulmati yang juga berkaitan dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pondok Mimbo (di sebelah utara muara Kali Bajulmati). Membuat bangunan pengaman pantai dan penanaman mangrove di wilayah Muncar, Blimbingsari dan Kota Banyuwangi guna melindungi dari serangan gelombang badai tropis (Fay & Igggy) dari Samudera Hindia. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan alur muara sungai yang menghambat aliran banjir Perbaikan alur sungai di bagian muara K. Bajulmati, K. Loo, K. Tambong, K. Bomo, K. Setail. Perbaikan muara Kali Bajulmati yang juga berkaitan dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pondok Mimbo (di sebelah utara muara Kali Bajulmati). Membuat bangunan pengaman pantai dan penanaman mangrove di wilayah Muncar, Blimbingsari dan Kota Banyuwangi guna melindungi dari serangan gelombang badai tropis (Fay & Igggy) dari Samudera Hindia. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan alur muara sungai yang menghambat aliran banjir Perbaikan alur sungai di bagian muara K. Bajulmati, K. Loo, K. Tambong, K. Bomo, K. Setail. Perbaikan muara Kali Bajulmati yang juga berkaitan dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pondok Mimbo (di sebelah utara muara Kali Bajulmati). Membuat bangunan pengaman pantai dan penanaman mangrove di wilayah Muncar, Blimbingsari dan Kota Banyuwangi guna melindungi dari serangan gelombang badai tropis (Fay & Igggy) dari Samudera Hindia. 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan alur muara sungai yang menghambat aliran banjir Perbaikan alur sungai di bagian muara K. Bajulmati, K. Loo, K. Tambong, K. Bomo, K. Setail. Perbaikan muara Kali Bajulmati yang juga berkaitan dengan pengembangan Pelabuhan Perikanan Pondok Mimbo (di sebelah utara muara Kali Bajulmati). Membuat bangunan pengaman pantai dan penanaman mangrove di wilayah Muncar, Blimbingsari dan Kota Banyuwangi guna melindungi dari serangan gelombang badai tropis (Fay & Igggy) dari Samudera Hindia. 	Kesepakatan Pemkab. Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat	Pemprov. Jatim dan Pemkab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Instansi terkait di lingkungan Pemprov Jatim.

1.4	Kurangnya prasarana pengendali banjir.	Membangun embung / check dam sederhana yang tujuannya selain untuk aspek pengendalian daya rusak air juga untuk aspek konservasi dan aspek pendayagunaan SDA.				<input type="checkbox"/> Pembuatan embung / check dam sederhana pada anak sungai bagian hulu K. Baru, K. Setail, K. Blambangan, K. Tambong dan K. Bajulmati.	<input type="checkbox"/> Pembuatan embung / check dam sederhana pada anak sungai bagian hulu K. Baru, K. Setail, K. Blambangan, K. Tambong dan K. Bajulmati.	<input type="checkbox"/> Pembuatan embung / check dam sederhana pada anak sungai bagian hulu K. Baru, K. Setail, K. Blambangan, K. Tambong dan K. Bajulmati.	<input type="checkbox"/> Pembuatan embung / check dam sederhana pada anak sungai bagian hulu K. Baru, K. Setail, K. Blambangan, K. Tambong dan K. Bajulmati.	<input type="checkbox"/> Pembuatan embung / check dam sederhana pada anak sungai bagian hulu K. Baru, K. Setail, K. Blambangan, K. Tambong dan K. Bajulmati.	<input type="checkbox"/> Pembuatan embung / check dam sederhana pada anak sungai bagian hulu K. Baru, K. Setail, K. Blambangan, K. Tambong dan K. Bajulmati.	<input type="checkbox"/> Pembuatan embung / check dam sederhana pada anak sungai bagian hulu K. Baru, K. Setail, K. Blambangan, K. Tambong dan K. Bajulmati.	Kesepakatan Pemkab. Pemerintah Prop. Jatim dengan Pemerintah Pusat	Pemprov. Jatim dan Pemkab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Instansi terkait di lingkungan Pemprov Jatim.
1.5	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara pencegahan banjir	Menciptakan masyarakat yang siap dalam upaya pencegahan banjir	<input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat bila terjadi banjir <input type="checkbox"/> Sosialisasi tentang bahaya pembuangan sampah ke badan air <input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir <input type="checkbox"/> Memberi peringatan dini pada masyarakat di daerah rawan bencana	<input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat bila terjadi banjir <input type="checkbox"/> Sosialisasi tentang bahaya pembuangan sampah ke badan air <input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir <input type="checkbox"/> Memberi peringatan dini pada masyarakat di daerah rawan bencana	<input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat bila terjadi banjir <input type="checkbox"/> Sosialisasi tentang bahaya pembuangan sampah ke badan air <input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir <input type="checkbox"/> Memberi peringatan dini pada masyarakat di daerah rawan bencana	<input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat bila terjadi banjir <input type="checkbox"/> Sosialisasi tentang bahaya pembuangan sampah ke badan air <input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir <input type="checkbox"/> Memberi peringatan dini pada masyarakat di daerah rawan bencana	<input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat bila terjadi banjir <input type="checkbox"/> Sosialisasi tentang bahaya pembuangan sampah ke badan air <input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir <input type="checkbox"/> Memberi peringatan dini pada masyarakat di daerah rawan bencana	<input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat bila terjadi banjir <input type="checkbox"/> Sosialisasi tentang bahaya pembuangan sampah ke badan air <input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir <input type="checkbox"/> Memberi peringatan dini pada masyarakat di daerah rawan bencana	<input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat bila terjadi banjir <input type="checkbox"/> Sosialisasi tentang bahaya pembuangan sampah ke badan air <input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir <input type="checkbox"/> Memberi peringatan dini pada masyarakat di daerah rawan bencana	<input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat bila terjadi banjir <input type="checkbox"/> Sosialisasi tentang bahaya pembuangan sampah ke badan air <input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir <input type="checkbox"/> Memberi peringatan dini pada masyarakat di daerah rawan bencana	<input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat bila terjadi banjir <input type="checkbox"/> Sosialisasi tentang bahaya pembuangan sampah ke badan air <input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir <input type="checkbox"/> Memberi peringatan dini pada masyarakat di daerah rawan bencana	<input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat bila terjadi banjir <input type="checkbox"/> Sosialisasi tentang bahaya pembuangan sampah ke badan air <input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dalam mengurangi kerugian akibat banjir <input type="checkbox"/> Memberi peringatan dini pada masyarakat di daerah rawan bencana	Pedoman Penanganan Bencana Banjir PERDA Persampahan Pedoman Penanganan Bencana Banjir	Pemprov. Jatim dan Pemkab. Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Instansi terkait di lingkungan Pemprov Jatim.

2. PENANGGULANGAN

NO.	ANALISIS PERMASALAHAN	SASARAN / TARGET YANG INGIN DICAPAI	STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT	
			JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)			
2.1	Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara penanggulangan banjir	Meningkatkan kesiapan dan ketahanan para stakeholders dalam menanggulangi bencana banjir.	<input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dan stakeholder dalam menanggulangi bencana banjir. <input type="checkbox"/> Membuat papan pengumuman daerah rawan banjir dan petunjuk arah evakuasi. <input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat dan stake holder tentang cara penanggulangan bencana banjir. <input type="checkbox"/> Menyediakan tempat untuk evakuasi sementara.	<input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dan stakeholder dalam menanggulangi bencana banjir. <input type="checkbox"/> Membuat papan pengumuman daerah rawan banjir dan petunjuk arah evakuasi. <input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat dan stake holder tentang cara penanggulangan bencana banjir. <input type="checkbox"/> Menyediakan tempat untuk evakuasi sementara.	<input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dan stakeholder dalam menanggulangi bencana banjir. <input type="checkbox"/> Membuat papan pengumuman daerah rawan banjir dan petunjuk arah evakuasi. <input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat dan stake holder tentang cara penanggulangan bencana banjir. <input type="checkbox"/> Menyediakan tempat untuk evakuasi sementara.	<input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dan stakeholder dalam menanggulangi bencana banjir. <input type="checkbox"/> Membuat papan pengumuman daerah rawan banjir dan petunjuk arah evakuasi. <input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat dan stake holder tentang cara penanggulangan bencana banjir. <input type="checkbox"/> Menyediakan tempat untuk evakuasi sementara.	<input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dan stakeholder dalam menanggulangi bencana banjir. <input type="checkbox"/> Membuat papan pengumuman daerah rawan banjir dan petunjuk arah evakuasi. <input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat dan stake holder tentang cara penanggulangan bencana banjir. <input type="checkbox"/> Menyediakan tempat untuk evakuasi sementara.	<input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dan stakeholder dalam menanggulangi bencana banjir. <input type="checkbox"/> Membuat papan pengumuman daerah rawan banjir dan petunjuk arah evakuasi. <input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat dan stake holder tentang cara penanggulangan bencana banjir. <input type="checkbox"/> Menyediakan tempat untuk evakuasi sementara.	<input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dan stakeholder dalam menanggulangi bencana banjir. <input type="checkbox"/> Membuat papan pengumuman daerah rawan banjir dan petunjuk arah evakuasi. <input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat dan stake holder tentang cara penanggulangan bencana banjir. <input type="checkbox"/> Menyediakan tempat untuk evakuasi sementara.	<input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dan stakeholder dalam menanggulangi bencana banjir. <input type="checkbox"/> Membuat papan pengumuman daerah rawan banjir dan petunjuk arah evakuasi. <input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat dan stake holder tentang cara penanggulangan bencana banjir. <input type="checkbox"/> Menyediakan tempat untuk evakuasi sementara.	<input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dan stakeholder dalam menanggulangi bencana banjir. <input type="checkbox"/> Membuat papan pengumuman daerah rawan banjir dan petunjuk arah evakuasi. <input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat dan stake holder tentang cara penanggulangan bencana banjir. <input type="checkbox"/> Menyediakan tempat untuk evakuasi sementara.	<input type="checkbox"/> Pelatihan bagi masyarakat dan stakeholder dalam menanggulangi bencana banjir. <input type="checkbox"/> Membuat papan pengumuman daerah rawan banjir dan petunjuk arah evakuasi. <input type="checkbox"/> Penyusunan panduan praktis bagi masyarakat dan stake holder tentang cara penanggulangan bencana banjir. <input type="checkbox"/> Menyediakan tempat untuk evakuasi sementara.	Pedoman Penanganan Bencana Banjir	BPB Nas, BPBD Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Instansi terkait di lingkungan Pemprov Jatim.

**TABEL 4.4. KEBIJAKAN OPERASIONAL POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BARU BAJULMATI
DENGAN SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH, PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI**

ASPEK IV : SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

- SUB ASPE : 1. Ketersediaan Informasi SDA
2. Sistem Informasi SDA (SISDA)

1. KETERSEDIAAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR

NO.	ANALISIS PERMASALAHAN	SASARAN / TARGET YANG INGIN DICAPAI	STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
			JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)		
1.1	Kurangnya ketersediaan data dan informasi SDA terbaru.	Penyediaan data hidrometeorologis & informasi SDA yang up to date dan memenuhi kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> □ Memelihara dan mengupdate data dan informasi yang ada di WS Baru Bajulmati (hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA). □ Pembuatan prosedur akses data dan informasi yang mudah dan tidak menyulitkan pengguna. □ Updating data dan informasi SDA. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Memelihara dan mengupdate data dan informasi yang ada di WS Baru Bajulmati (hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA). □ Pembuatan prosedur akses data dan informasi yang mudah dan tidak menyulitkan pengguna. □ Updating data dan informasi SDA. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Memelihara dan mengupdate data dan informasi yang ada di WS Baru Bajulmati (hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA). □ Pembuatan prosedur akses data dan informasi yang mudah dan tidak menyulitkan pengguna. □ Updating data dan informasi SDA. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Memelihara dan mengupdate data dan informasi yang ada di WS Baru Bajulmati (hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA). □ Menambah jumlah stasiun pengamatan hidro-meteorologi di WS Baru Bajulmati sesuai standar kebutuhan. □ Pembuatan prosedur akses data dan informasi yang mudah dan tidak menyulitkan pengguna. □ Updating data dan informasi SDA. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Memelihara dan mengupdate data dan informasi yang ada di WS Baru Bajulmati (hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA). □ Menambah jumlah stasiun pengamatan hidro-meteorologi di WS Baru Bajulmati sesuai standar kebutuhan. □ Pembuatan prosedur akses data dan informasi yang mudah dan tidak menyulitkan pengguna. □ Updating data dan informasi SDA. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Memelihara dan mengupdate data dan informasi yang ada di WS Baru Bajulmati (hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA). □ Menambah jumlah stasiun pengamatan hidro-meteorologi di WS Baru Bajulmati sesuai standar kebutuhan. □ Pembuatan prosedur akses data dan informasi yang mudah dan tidak menyulitkan pengguna. □ Updating data dan informasi SDA. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Memelihara dan mengupdate data dan informasi yang ada di WS Baru Bajulmati (hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA). □ Menambah jumlah stasiun pengamatan hidro-meteorologi di WS Baru Bajulmati sesuai standar kebutuhan. □ Pembuatan prosedur akses data dan informasi yang mudah dan tidak menyulitkan pengguna. □ Updating data dan informasi SDA. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Memelihara dan mengupdate data dan informasi yang ada di WS Baru Bajulmati (hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA). □ Menambah jumlah stasiun pengamatan hidro-meteorologi di WS Baru Bajulmati sesuai standar kebutuhan. □ Pembuatan prosedur akses data dan informasi yang mudah dan tidak menyulitkan pengguna. □ Updating data dan informasi SDA. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Memelihara dan mengupdate data dan informasi yang ada di WS Baru Bajulmati (hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan SDA). □ Menambah jumlah stasiun pengamatan hidro-meteorologi di WS Baru Bajulmati sesuai standar kebutuhan. □ Pembuatan prosedur akses data dan informasi yang mudah dan tidak menyulitkan pengguna. □ Updating data dan informasi SDA. 	<p>Kebijakan Ditjen</p> <p>Kebijakan Ditjen SDA</p> <p>Pengembangan Sistem Data dan Informasi</p>	<p>Dinas PU</p> <p>Pengairan Provinsi Jawa Timur, UPT PSAWS Sampean Baru</p>

2. SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR (SISDA)

NO.	ANALISIS PERMASALAHAN	SASARAN / TARGET YANG INGIN DICAPAI	STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG			STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI			KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
			JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)		
2.1.	Sistem Informasi SDA belum berjalan secara optimal.	Meningkatkan peran dan fungsi SISDA dalam pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati.	<ul style="list-style-type: none"> □ Pembuatan data base WS Baru Bajulmati . Link SISDA pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati ke Provinsi Jawa Timur. □ Penyusunan prosedur lintas informasi antara UPT PSDA WS Sampean Baru dan masyarakat □ Meningkatkan keberadaan & kinerja Web Site Dinas Pengairan Propinsi yang dapat diakses oleh berbagai pengguna. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Pembuatan data base WS Baru Bajulmati . Link SISDA pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati ke Provinsi Jawa Timur. □ Penyusunan prosedur lintas informasi antara UPT PSDA WS Sampean Baru dan masyarakat □ Meningkatkan keberadaan & kinerja Web Site Dinas Pengairan Propinsi yang dapat diakses oleh berbagai pengguna. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Pembuatan data base WS Baru Bajulmati . Link SISDA pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati ke Provinsi Jawa Timur. □ Penyusunan prosedur lintas informasi antara UPT PSDA WS Sampean Baru dan masyarakat □ Meningkatkan keberadaan & kinerja Web Site Dinas Pengairan Propinsi yang dapat diakses oleh berbagai pengguna. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Pembuatan data base WS Baru Bajulmati . Link SISDA pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati ke Provinsi Jawa Timur. □ Penyusunan prosedur lintas informasi antara UPT PSDA WS Sampean Baru dan masyarakat □ Meningkatkan keberadaan & kinerja Web Site Dinas Pengairan Propinsi yang dapat diakses oleh berbagai pengguna. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Pembuatan data base WS Baru Bajulmati . Link SISDA pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati ke Provinsi Jawa Timur. □ Penyusunan prosedur lintas informasi antara UPT PSDA WS Sampean Baru dan masyarakat □ Meningkatkan keberadaan & kinerja Web Site Dinas Pengairan Propinsi yang dapat diakses oleh berbagai pengguna. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Pembuatan data base WS Baru Bajulmati . Link SISDA pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati ke Provinsi Jawa Timur. □ Penyusunan prosedur lintas informasi antara UPT PSDA WS Sampean Baru dan masyarakat □ Meningkatkan keberadaan & kinerja Web Site Dinas Pengairan Propinsi yang dapat diakses oleh berbagai pengguna. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Pembuatan data base WS Baru Bajulmati . Link SISDA pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati ke Provinsi Jawa Timur. □ Penyusunan prosedur lintas informasi antara UPT PSDA WS Sampean Baru dan masyarakat □ Meningkatkan keberadaan & kinerja Web Site Dinas Pengairan Propinsi yang dapat diakses oleh berbagai pengguna. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Pembuatan data base WS Baru Bajulmati . Link SISDA pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati ke Provinsi Jawa Timur. □ Penyusunan prosedur lintas informasi antara UPT PSDA WS Sampean Baru dan masyarakat □ Meningkatkan keberadaan & kinerja Web Site Dinas Pengairan Propinsi yang dapat diakses oleh berbagai pengguna. 	<ul style="list-style-type: none"> □ Pembuatan data base WS Baru Bajulmati . Link SISDA pengelolaan SDA WS Baru Bajulmati ke Provinsi Jawa Timur. □ Penyusunan prosedur lintas informasi antara UPT PSDA WS Sampean Baru dan masyarakat □ Meningkatkan keberadaan & kinerja Web Site Dinas Pengairan Propinsi yang dapat diakses oleh berbagai pengguna. 	<p>Pengembangan Sistem Data dan Informasi</p> <p>Penyusunan MOU Pengelolaan data antar lembaga terkait</p> <p>Pengembangan Sistem Data dan</p>	<p>Dinas PU</p> <p>Pengairan Provinsi Jawa Timur, UPT PSAWS Sampean Baru</p>

NO.	ANALISIS PERMASALAHAN	STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI RENDAH				STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI SEDANG				STRATEGI BILA SKENARIO PERTUMBUHAN EKONOMI TINGGI				KEBIJAKAN OPERASIONAL	LEMBAGA / INSTANSI TERKAIT
		JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PENDEK (2013 - 2018)	JANGKA MENENGAH (2013 - 2023)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)	JANGKA PANJANG (2013 - 2033)		
1.2.	Belum berfungsi badan pengelolaan Sumber Daya Air di Tingkat WS Baru Bajulmati	Membentuk / memfungsikan Wadah Koordinasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air (WKPSDA) dan TKPSDA	Membentuk / memfungsikan Wadah Koordinasi dalam Pengelolaan SDA yang definitif, yakni TKPSDA	Membentuk / memfungsikan Wadah Koordinasi dalam Pengelolaan SDA yang definitif, yakni TKPSDA	Membentuk / memfungsikan Wadah Koordinasi dalam Pengelolaan SDA yang definitif, yakni TKPSDA	Membentuk / memfungsikan Wadah Koordinasi dalam Pengelolaan SDA yang definitif, yakni TKPSDA	Membentuk / memfungsikan Wadah Koordinasi dalam Pengelolaan SDA yang definitif, yakni TKPSDA	Membentuk / memfungsikan Wadah Koordinasi dalam Pengelolaan SDA yang definitif, yakni TKPSDA	Membentuk / memfungsikan Wadah Koordinasi dalam Pengelolaan SDA yang definitif, yakni TKPSDA	Membentuk / memfungsikan Wadah Koordinasi dalam Pengelolaan SDA yang definitif, yakni TKPSDA	Membentuk / memfungsikan Wadah Koordinasi dalam Pengelolaan SDA yang definitif, yakni TKPSDA	Membentuk / memfungsikan Wadah Koordinasi dalam Pengelolaan SDA yang definitif, yakni TKPSDA	Membentuk / memfungsikan Wadah Koordinasi dalam Pengelolaan SDA yang definitif, yakni TKPSDA	Kebijakan Ditjen SDA	Dinas Pengairan Prov. Jawa Timur, UPT PSAWS Sampean Baru



 GUBERNUR JAWA TIMUR

D. H. SOEKARWO